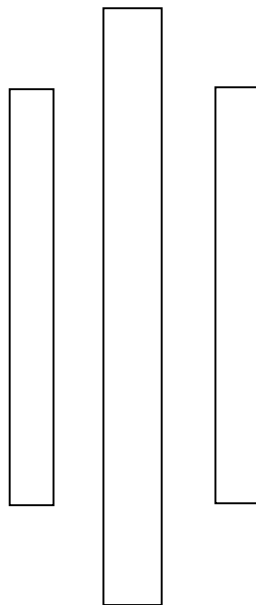




SALINAN

**PERATURAN DAERAH BARITO SELATAN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2017-2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2017**



SALINAN

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan merupakan arah Pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bakti Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program, yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif sesuai urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Visi dalam rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program.
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi atau lebih kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD
Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022;
 - b. Pedoman Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menyusun RKPD.

Pasal 3

Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
- e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- i. BAB IX PENUTUP

Pasal 5

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, terdapat dalam Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan 2017-2022 sebagaimana pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan Dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat dicapai untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. Merugikan kepentingan daerah dan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan Kepentingan Daerah dan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan Kebijakan Daerah dan Nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun:
 - a. Draft Rancangan Awal RPJMD untuk periode selanjutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat.
 - b. RKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat

- (2) Draft Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah periode berikutnya.
- (3) RKPD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 29 Desember 2017.

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 29 Desember 2017.

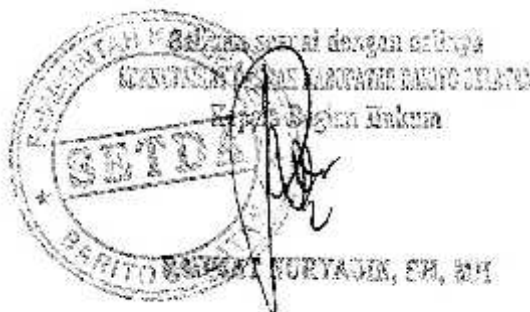
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

ttd

EDI KRISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 13,135/2017



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

RPJMD Kabupaten Barito Selatan digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022, serta sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), mengingat RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam RKPD yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 adalah untuk :

- a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintah;
- c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 terdiri dari 7 BAB dan 10 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Barito Selatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, serta lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga **Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan 2017-2022** dapat diselesaikan. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN, dan RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2017-2022 didasarkan kepada

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
4. Diirencanakan akan diselaraskan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Evaluasi Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Pojka, perumus beserta pihak yang telah membantu. Semoga upaya yang telah dilakukan menjadi langka terbaik bagi kita bersama demi masa depan Kabupaten Barito Selatan. Harapan kami dalam mengemban amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan adalah mengajak semua pemangku kepentingan secara bersama-sama berbuat untuk membangun dan mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten barito Selatan secara lahir dan batin, menuju **BARSEL MANTAP (Mandiri, Aman, Tertata dan Padu)**.

Besar harapan kami agar penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan dapat bermanfaat sebagai upaya dalam mendorong peningkatan kinerja daerah dan perbaikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.

Buntok, Desember 2017

BUPATI BARITO SELATAN

EDDY RAYA SAMSURI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	1-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	1-5
1.4 Maksud dan Tujuan	1-6
1.5 Sistematika Penulisan	1-6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	2-3
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2-21
2.3 Aspek Pelayanan Umum	2-26
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	2-32
2.5 Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 2011-2016	2-38
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	3-1
3.1 Kinerja Masa Lalu	3-2
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	3-17
3.3 Kerangka Pendanaan	3-21
BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	4-1
4.1 Permasalahan Pembangunan	4-2
4.2 Isu Strategis	4-22
BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	5-1
5.1 Visi	5-1
5.2 Misi	5-3
5.3 Tujuan dan Sasaran	5-7
BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	6-1
6.1 Strategi	6-1
6.2 Arah Kebijakan	6-14
6.3 Program Pembangunan Daerah	6-27
BAB VII. KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	7-1
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan	7-1
7.2 Program Perangkat Daerah	7-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	8-1
8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	8-1
8.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	8-10
BAB IX PENUTUP	9-1
9.1 Pedoman Transisi	9-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan	9-3

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan 2016.....	2-3
Tabel 2.2	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan, 2016.....	2-5
Tabel 2.3	Luas Masing-masing Jenis Tanah di Wilayah Daratan Kabupaten Barito selatan.....	2-7
Tabel 2.4	Temperatur, Kelembaban, Relatif, dan Tekanan Udara di Kabupaten Barito Selatan.....	2-8
Tabel 2.5	Banyaknya Curah Hujan dan Kecepatan Angin di Kabupaten Barito Selatan.....	2-8
Tabel 2.6	Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis pengairan di Kabupaten Barito Selatan.....	2-9
Tabel 2.7	Luas Panen, Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan Di Kabupaten Barito Selatan,2016.....	2-10
Tabel 2.8.	Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan (Ha),2016.....	2-11
Tabel 2.9	Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan (Kuintal), 2016.....	2-11
Tabel 2.10	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Barito Selatan (Ton),2016.....	2-12
Tabel 2.11	Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah di Kabupaten Barito Selatan (Ton), 2016.....	2-12
Tabel 2.12	Luas Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Di Kabupaten Barito Selatan (Ha),2016.....	2-13
Tabel 2.13	Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman Di Kabupaten Barito Selatan (Ton),2016.....	2-13
Tabel 2.14	Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak Di Kabupaten Barito Selatan (Ekor), 2016.....	2-14
Tabel 2.15	Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas Di Kabupaten Barito Selatan (Ekor), 2016.....	2-14
Tabel 2.16	Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor Di Kabupaten Barito Selatan (ton) Tahun 2015 – 2016.....	2-15
Tabel 2.17	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor Di Kabupaten Barito Selatan (ton) tahun 2016.....	2-16

Tabel 2.18	Luas Kawasan Hutan dan Perairan (Ha) di Kabupaten Barito Selatan.....	2-16
Tabel 2.19	Produksi Kayu Hutan (m ³) Menurut Jenis Produksi di Kabupaten Barito Selatan.....	2-17
Tabel 2.20	Distribusi dan Kepadatan Pendudukan Menurut Kabupaten di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016.....	2-18
Tabel 2.21	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010, 2015 dan 2016.....	2-18
Tabel 2.22	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016.....	2-19
Tabel 2.23	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Barito Selatan, 2016.....	2-21
Tabel 2.24	Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Selatan (miliar rupiah) Tahun 2013-2016.....	2-22
Tabel 2.25	Indikator Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.....	2-29
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011– 2015.....	2-31
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011– 2015.....	2-31
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Urusan Tata Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011– 2015.....	2-32
Tabel 2.29	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Selatan (km), 2016.....	2-33
Tabel 2.30	Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2015.....	2-33
Tabel 2.31	Statistik Perbankan Barito Selatan 2014-2016.....	2-34
Tabel 2.33	Pengeluaran Rata-rata per Kapita/Bulan Menurut Golongan Pengeluaran Dan Kelompok Barang di Kabupaten Barito Selatan (rupiah) Tahun 2016.....	2-37
Tabel 2.34	Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran per Kapita/Bulan di Kabupaten Barito Selatan (%).....	2-38
Tabel 2.35	Luas Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Barito Selatan.....	2-40
Tabel 2.36	Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2016.....	2-42
Tabel 2.37	Target dan Realisasi Kinerja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016.....	2-46
Tabel 2.38	Pencapaian Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016.....	2-49
Tabel 2.39	Pencapaian Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016.....	2-54

Tabel 3.1	Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah.....	3-3
Tabel 3.2	Perkembangan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 (Juta rupiah).....	3-4
Tabel 3.3	Perkembangan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 (Juta rupiah).....	3-5
Tabel 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 (dalam Juta rupiah).....	3-9
Tabel 3.5	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Barito Selatan 2011-2016 (dalam Juta Rupiah).....	3-12
Tabel 3.6	Rasio Lancar Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 (000 Rupiah).....	3-14
Tabel 3.7	Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah).....	3-15
Tabel 3.8	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2015 (dalam juta rupiah).....	3-15
Tabel 3.9	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Barito Selatan tahun 2011 – 2016.....	3-16
Tabel 3.10	Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 – 2015 (juta rupiah).....	3-16
Tabel 3.11	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 – 2016.....	3-18
Tabel 3.12	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur 2013-2016.....	3-18
Tabel 3.13	SILPA Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016(JutaRupiah).....	3-19
Tabel 3.14	Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2012-2016.....	3-20
Tabel 3.15	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2012-2016.....	3-20
Tabel 3.16	Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 – 2016 (Juta Rupiah).....	3.21
Tabel 3.17	Proyeksi Penerimaan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 (dalam Rupiah).....	3-23
Tabel 3.18	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018-2022.....	3-24
Tabel 3.19	Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017-2022.....	3-25
Tabel 3.20	Perkiraan Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017-2022.....	3-26

Tabel 3.21	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018-2022.....	3-27
Tabel 3.22	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Prioritas Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2022..	3-28
Tabel 3.23	Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017-2022.....	3-28
Tabel 3.24	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 (dalam Rupiah).....	3-30
Tabel 3.25	Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan, Tahun 2017-2022 (dalam Rupiah).....	3-30
Tabel 3.26	Alokasi Prioritas Kabupaten Barito Selatan 2017-2022 (dalam ribu Rupiah).....	3-31
Tabel 3.27	Proyeksi Kerangka Pendanaan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah).....	3-32
Tabel 4.1	Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Selatan (km), 2016.....	4-3
Tabel 4.2	Rasio Elektrifikasi (%) di Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Data Desa dan Data Rumah Tangga Tahun 2012 – 2016.....	4-8
Tabel 4.3	Progres Kegiatan Bidang Kebersihan Di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 – 2016.....	4-10
Tabel 4.4	Perbandingan Indikator Terpilih Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah 2015-2016.....	1-12
Tabel 4.5	Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan.....	4-15
Tabel 4.6	Angka Putus Sekolah di Kabupaten Barito Selatan.....	4-16
Tabel 4.7	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 – 2016.....	4-20
Tabel 4.8	Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai RPJMN 2015 – 2019.....	4-28
Tabel 5.1	Keterkaitan dan Konsistensi dengan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.....	5-4
Tabel 5.2	Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan.....	5-13
Tabel 6.1	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Selatan (Tahun 2017-2022).....	6-4
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022.....	6-17
Tabel 6.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Barito Selatan 2017-2022.....	6-21

Tabel 6.4	Indikasi Rencana Program Pembangunan Daerah.....	6-27
Tabel 7.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 Untuk Mencapai Visi dan Misi	7-5
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk mencapai Visi, Misi dan Layanan SOPD untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah	7-36
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Barito Selatan.....	8-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	8-12

DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>
Grafik 2.1 Presentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan (km ²) Tahun 2016	2-4
Grafik 2.2 Indeks Gini Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016.....	2-24
Grafik 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016.....	2-25
Grafik 2.4 Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010-2016.....	2-26
Grafik 2.5 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010-2016.....	2-27
Grafik 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010-2015.....	2-27
Grafik 2.7 Persentase Penduduk Wanita Berumur 15-49 Berstatus Kawin Menurut Penggunaan Alat KB.....	2-30
Grafik 2.8 Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang di Kabupaten Barito Selatan (ton), Tahun 2011-2016.....	2-35
Grafik 2.9 Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 dan 2015.....	2-36
Grafik 2.10 Statistik Pelanggan Listrik Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013-2015.....	2-41
Grafik 2.11 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang ditamatkan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016.....	2-43
Grafik 4.1 Kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan dalam Pembentukan PDRB Kalimantan Tengah 2016.....	4-11

DAFTAR GAMBAR

		<i>Halaman</i>
Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.....	1-6
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Selatan.....	2-2
Gambar 5.1	Hubungan antar-elemen Visi.....	5-2
Gambar 6.1	Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional.....	6-2
Gambar 6.2	Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi.....	6-3
Gambar 6.3	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Selatan (Tahun 2017-2022).....	6-15



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.
NOMOR 13 TAHUN 2017.
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2017-2022.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak tahun 2017, telah terpilih pasangan calon bupati dan wakil bupati yaitu H. Eddy Raya Samsuri dan Satya Titiek Atyani Djoedir sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Selatan periode Tahun 2017-2022. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut telah dilantik oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Mei 2017.

Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik. Oleh sebab itu, langkah utama yang harus dilakukan diawal kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan periode 2017-2022.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan merupakan arah Pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bakti Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program, yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif sesuai urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih harus diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang.

Selain janji-janji politik atau Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan Kabupaten Barito Selatan harus diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan. Keseluruhan hal



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara evaluasi peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD dan RPJMD, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kondisi lingkungan strategis daerah, isu strategis internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Barito Selatan. RPJMD yang sudah disusun nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah (Berita Negara



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4).
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito

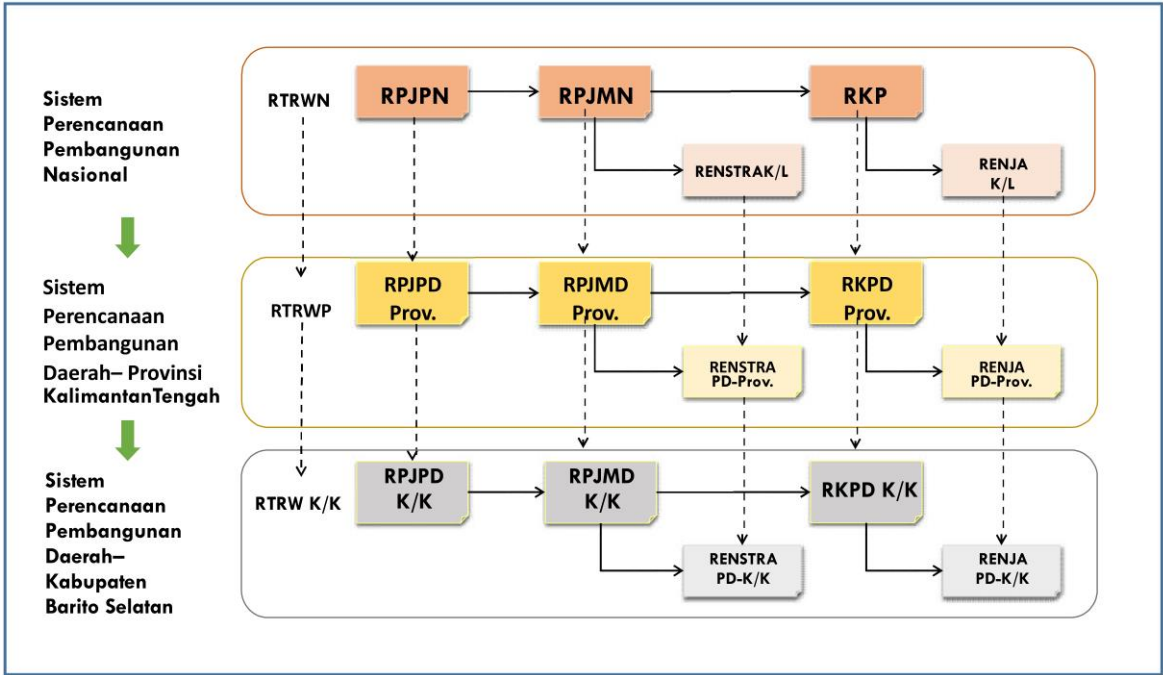


Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, RPJMD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan maupun penganggaran terutama RPJPD, RKPD, Renstra PD, Renja PD, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1.
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa:

1. **RPJMD** Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Barito Selatan 2006-2026 pada RPJMD tahap ketiga.
2. RPJMD dan Renstra PD merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra PD selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Kabupaten Barito Selatan dituangkan dalam Renstra masing-masing PD sesuai tugas dan fungsinya.
3. **RKPD** merupakan dokumen yang digunakan untuk melaksanakan RPJMD dari tahun ke tahun. Sasaran dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program Pembangunan daerah harus dilaksanakan melalui RKPD ke RKPD tahun berikutnya. PD menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja PD.
4. Penyusunan RPJMD didasarkan pada **RTRWP** Kalimantan Tengah. RPJMD harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Hal ini dimaksudkan agar keselarasan perencanaan pembangunan lima tahun mendatang sesuai dengan rencana penataan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

ruang wilayah. Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional dengan memerhatikan kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruangseseuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

5. Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Selatan harus berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Kalimantan Tengah dengan memerhatikan capaian target nasional terhadap target daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 adalah sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan organisasi perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 tahun yang akan datang sehingga secara nyata dan bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Barito Selatan yaitu Dahani Dahanai Tuntung Tulus.

Adapun tujuan dari RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 adalah :

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah tahun 2017-2022.
2. Sebagai acuan bagi SOPD dalam menyusun renstra tahun 2017-2022 yang akan dijabarkan dalam rencana kerja dan pelaksanaan program-program prioritas.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, KUA dan PPAS serta RAPBD Tahun 2017-2022.
4. Sebagai tolak ukur di dalam melaksanakan evaluasi kinerja tahunan SOPD tahun 2017-2022.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

daerah, dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5 Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan
Jangka Menengah 2011-2016

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kinerja Masa Lalu
 - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2. Neraca Daerah.
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2. Analisis Pembiayaan
 - 3.2.3. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah
- 3.3 Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
 - 3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- 6.1 Strategi
- 6.2 Arah Kebijakan
- 6.3 Program Pembangunan Daerah

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

- 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan
- 7.2 Program Perangkat Daerah

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

- 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah

BAB IX PENUTUP

- 9.1 Pedoman Transisi
- 9.2 Kaidah Pelaksanaan



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas sebesar 702.009,90 hektar. Luas wilayah Barito Selatan merupakan 5,75 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ibukotanya terletak di Buntok. Secara geografis terletak membujur di sepanjang Sungai Barito dengan letak astronomis diantara 1°20'LS - 2°35'LS dan 114° - 115° BT.

Barito Selatan dilalui oleh sungai Barito yang merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah. Panjang sungai ini mencapai 900 km dengan rata-rata kedalaman 8 m dapat dilayari hingga 700 km dan melewati 5 kecamatan dari 6 kecamatan di Barito Selatan.

Ditinjau dari letaknya Kabupaten Barito Selatan dilalui oleh jalan nasional dan menjadi Kota perlintasan yang menghubungkan antara Kota Palangka Raya – Kabupaten Pulang Pisau – Kabupaten Kapuas – **Kabupaten Barito Selatan** – Kabupaten Barito Timur – Kota Banjarmasin. Dengan demikian lokasi Kabupaten ini memiliki lokasi strategis karena adanya pola pergerakan orang dan barang, sehingga menjadi kota transit, baik dari arah Kota Banjarmasin maupun Kota Palangka Raya. Sedangkan dilihat dari letak wilayah dalam kesatuan Provinsi Kalimantan Tengah, Dengan letak dan posisi demikian sehingga perkembangan wilayahnya cenderung menuju ke arah Provinsi Kalimantan Tengah.

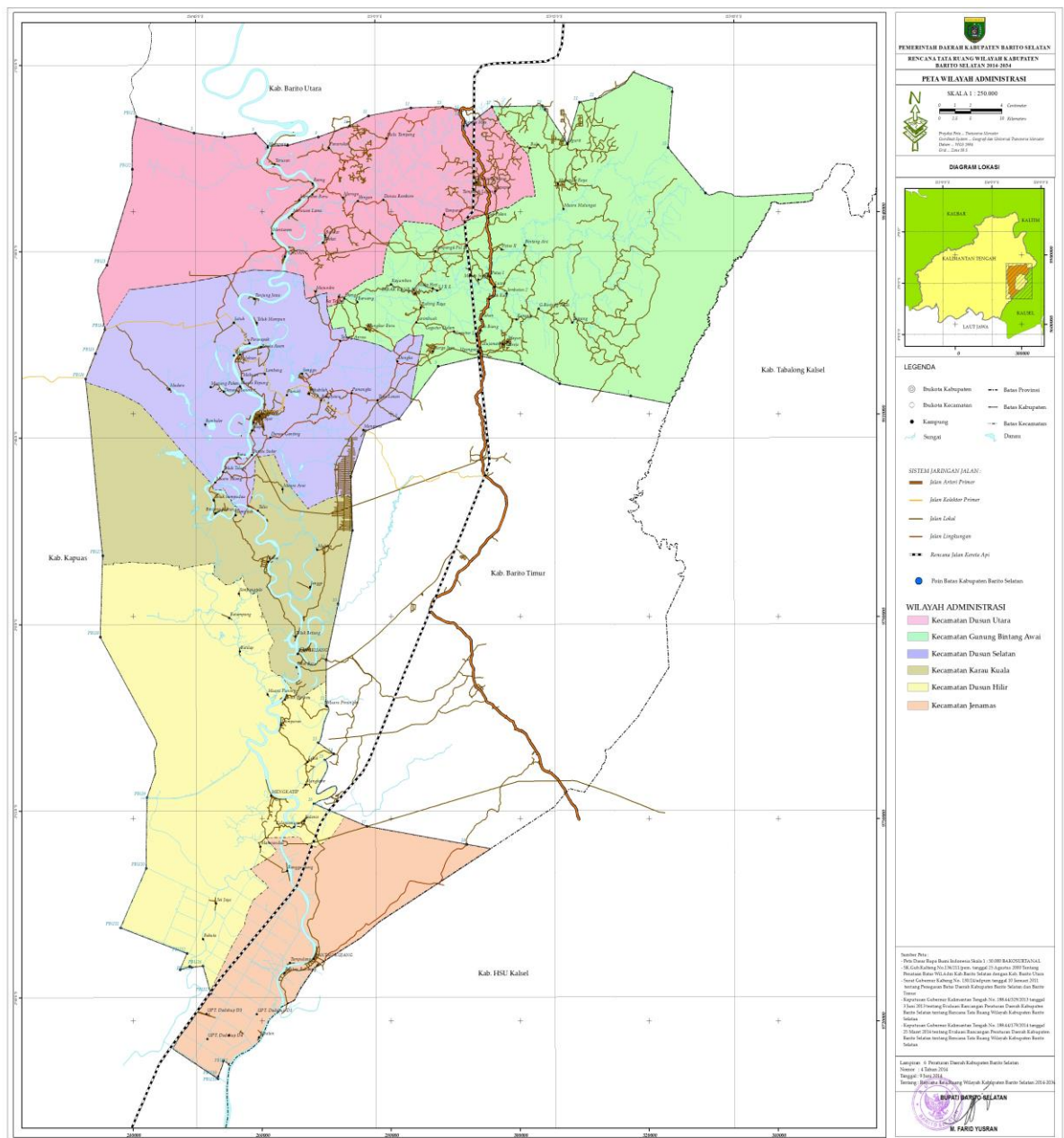
Berdasarkan pembentukan wilayah menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Tengah, luas Kabupaten Barito Selatan adalah 12.664 km². Namun setelah pemekaran pada tahun 2002, luas daerahnya menjadi 8.830 km² yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Dusun Selatan, Dusun Utara, Karau Kuala, Gunung Bintang Awai, Jenamas, dan Dusun Hilir.

Terkait luas Kabupaten Barito Selatan menurut Undang Undang Nomor 5 tahun 2002 seluas **8.830 km²**. Namun berdasarkan perkembangan kesepakatan tata batas administrasi dengan beberapa kabupaten tetangga, antara lain Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan serta

update informasi data spasial secara real luas kabupaten Barito Selatan yang digunakan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan periode tahun 2014-2034 dengan luas wilayah 702.009,9 hektar.

Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah dan batas administrasi Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Selatan



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014



2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

Kabupaten Barito Selatan secara geografis terletak pada 1° 15' 35,625" LS – 2° 36' 31,300 LS dan 114° 35' 48,600" BT – 115° 36' 35,700 BT, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Barito Utara
Sebelah Selatan	: Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Sebelah Barat	: Kabupaten Kapuas
Sebelah Timur	: Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan

1. Luas Wilayah

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/329/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan, diperoleh luas wilayah Kabupaten Barito Selatan seluas 702.009,90 hektar dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan, 2016

No.	Kecamatan	Luas Area (km²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten(%)
1	Jenamas	662,16	9,43
2	Dusun Hilir	1.369,73	19,51
3	Karau Kuala	825,23	11,76
4	Dusun Selatan	1.133,47	16,15
5	Dusun Utara	1.271,64	18,11
6	Gunung Bintang Awai	1.757,86	25,04
	Barito Selatan	7.020,09	100,00

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

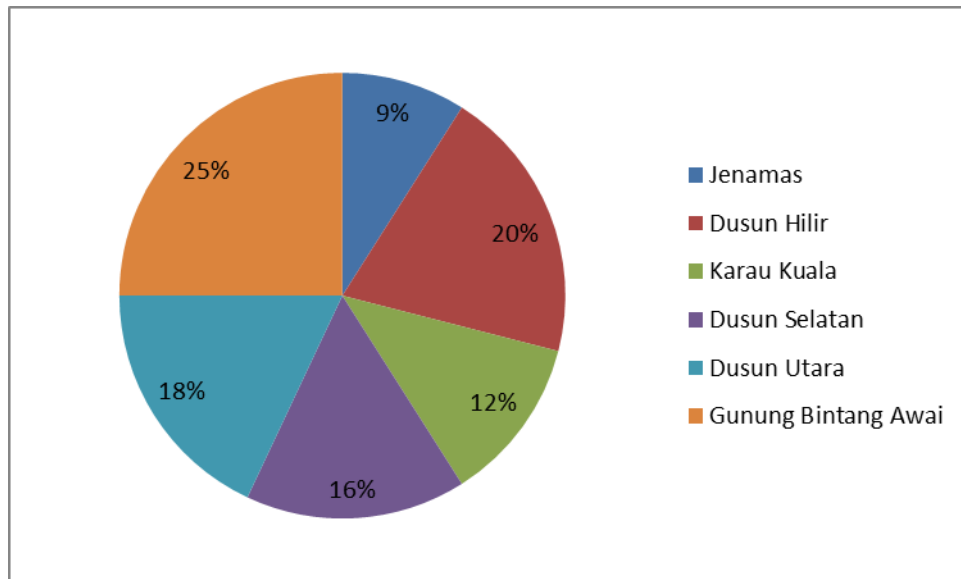
Kecamatan terluas di Kabupaten Barito Selatan adalah Kecamatan Gunung Bintang Awai yang memiliki wilayah seluas 1.757,86 km² atau



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

25,04 persen dari total luas wilayah. Sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah paling kecil adalah Jenamas yang hanya memiliki luas 9,43 persen dari total wilayah Kabupaten Barito Selatan.

Grafik 2.1
Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten
Barito Selatan (km²) Tahun 2016



2. Kondisi Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 - 40 meter dari permukaan air laut, kecuali sebagian wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai yang merupakan daerah perbukitan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Pada bagian tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi dari landai sampai miring, dengan pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Bagian utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2.2
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan, 2016

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi (meter)
1	Jenamas	Rantau Kujang	27,00
2	Dusun Hilir	Mengkatip	31,00
3	Karau Kuala	Bengkuang	33,00
4	Dusun Selatan	Buntok	35,00
5	Dusun Utara	Pendang	38,00
6	Gunung Bintang Awai	Tabak Kanilan	55,00

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

3. Geologi dan Tanah

Kabupaten Barito Selatan berasal dari formasi-formasi geologis yang tergolong tua. Informasinya untuk pengembangan wilayah meliputi potensi kesuburan tanah, bahan tambang, air tanah, daya dukung dan kerawanan fisik.

Berdasarkan formasi batuanannya, potensi kesuburan tanah di Kabupaten Barito Selatan tidak tinggi. Penyebaran formasi batuanannya terdiri dari : Aluvium, endapan sungai dan laut; wilayah berawa dan bergambut; Batuan sedimen yang kaya akan mineral kuarsa. Selain itu, terdapat Batuan sedimen klastik, mineral kuarsa dengan sedikit material vulkanik; Batuan beku; Batuan vulkanik tua, menghasilkan jenis tanah yang kaya unsur hara; Batuan metamorf.

Jenis tanah daerah selatan berbeda dengan jenis tanah yang terdapat pada daerah hulu utara. Jenis tanah yang terbentuk erat hubungannya dengan bahan induk (geologi), iklim dan keadaan medannya. Secara garis besar, jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

- Aluvial, dijumpai di sepanjang kiri kanan jalur aliran sungai Barito, mulai dari bagian Selatan sampai ke Utara sungai Barito. Tanah endapan sungai ini merupakan suatu tanggul sungai dataran banjir, terbentuk dari bahan induk liat dan pasir. Lapisan-lapisan tanahnya terlihat jelas bentuk wilayah datar, warna coklat tua sampai coklat kekuningan, tekstur agak halus, drainase agak terlambat dan reaksi



tanah masam. Lebih masuk dari tepi sungai daerahnya lebih rendah dan sering tergenang, sehingga dijumpai tanah aluvial hidromorfik kelabu yang memanjang disamping tanah aluvial, bersolum dalam, terbentuk wama kelabu tekstur halus sampai agak kasar, drainase terhambat dan reaksi tanah masam. Setelah aluvial hidromorfik terdapat tanah gley yang berasosiasi dengan endapan tanah organik yang telah mengalami pelapukan lanjut. Tanah yang terbentuk dikenal sebagai tanah gley humus. Tanah ini sering berasosiasi dengan organosol sehingga disebut tanah kompleks organosol - gley humus, mempunyai solum dalam, warna gelap, tekstur dari halus sampai sedang, drainase terhambat dan reaksi tanah masam. Solum dalam, tekstur halus, kasar, warna dari cerah sampai gelap, drainase tergenang periodik sampai baik, reaksi tanah basa kandungan garam tinggi sampai sedang.

- Regosol, dijumpai menyebar dibagian tengah kabupaten Barito Selatan. Tanah ini bersolum dalam terbentuk dari bahan induk endapan pasir yang didominasi mineral kwarsa. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, dengan warna tanah coklat sampai kelabu muda, tekstur kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam. Tanah tersebut terletak di Utara bagian tengah dari kabupaten Barito selatan, yaitu kecamatan Dusun Utara.
- Padsolik, merupakan jenis tanah yang cukup luas dijumpai menyebar di tengah sampai hulu sungai. Tanah ini telah mengalami perkembangan lanjut, solum dalam, terbentuk dari induk batu liat, bentuk wilayahnya berombak sampai agak berbukit, warna tanah coklat sampai merah kuning, tekstur halus sampai kasar, drainase baik dan reaksi tanah masam. Jenis tanah lain adalah litosol yang mempunyai solum dangkal dan berbatu, membentang di puncak perbukitan Muller dengan ketinggian sekitar 500 sampai lebih dari 1.500 m keadaan medan yang terjal dan curah hujan tinggi menyebabkan erosi yang cukup berat sehingga terjadilah tanah dangkal berbatu.
- Organosol, merupakan tanah organik (tanah gambut) yang terdapat disebelah Barat sungai Barito mulai dari selatan hingga ke bagian Utara Kabupaten Barito Selatan. Ketebalan gambut umumnya dalam (90 cm) terdapat pada bentuk wilayah datar dan di daerah cekungan, warna merah kehitaman sampai coklat tua, drainase sangat terhambat, reaksi tanah sangat masam.
- Podsolik, terletak menyebar di bagian tengah dan hilir. Solum agak dangkal terbentuk dari bahan induk batu pasir (kwarsa) pada



bentuk wilayah berombak dan agak berombak, warna coklat tua kemerahan sampai kuning pucat, tekstur sedang, drainase agak terhambat dan reaksi masa.

- Podsol, terletak di hulu Kabupaten Barito Selatan serta sebelah Barat sungai Barito. Tanah ini menyebar di daerah bergelombang, mempunyai tektur yang halus, berwarna kecoklatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis tanah dan penyebarannya di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Luas Masing-masing Jenis Tanah di Wilayah Daratan
Kabupaten Barito selatan

No.	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Aluvial	263.151,5	41,5
2.	Organosol	131.892,8	20,8
3.	Podsolik	71.019,2	11,2
4.	Podsol	48.925,7	7,7
5.	Litosol	39.948,3	6,3
6.	Kambisol	27.266,3	4,3
7.	Regosol	52.630,3	8,2
Jumlah		634.834	100

Sumber : LKPJ Bupati 2016

4. Klimatologi

Kabupaten Barito Selatan merupakan wilayah yang beriklim tropis (tipe A) sehingga sangat dipengaruhi oleh perubahan angin yang melewatinya. Selain itu unsur-unsur iklim lainnya seperti temperatur, suhu dan curah hujan ikut berpengaruh terhadap kondisi perubahan cuaca dari tahun ke tahun.

Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kabupaten Barito Selatan udaranya relatif panas dan lembab, yaitu siang hari mencapai sekitar 34,96°C dan malam hari sekitar 22,59°C, sedangkan rata-rata curah hujan per tahunnya relatif tinggi yaitu mencapai 319,39 mm dengan rata-rata hujan turun sebanyak 20 hari setiap bulannya. Untuk lebih lebih jelasnya mengenai kondisi temperatur dan curah



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah**

hujan di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel 2.4
Temperatur, Kelembaban Relatif, dan Tekanan Udara
Di Kabupaten Barito Selatan, 2016

No.	Bulan	Temperatur (°C)		Kelembaban Relatif (%)		Tekanan Udara (mb)
1	Januari	35,20	22,90	99,00	49,00	1.014,50
2	Pebruari	35,20	23,00	100,00	52,00	1.014,30
3	Maret	35,90	23,40	99,00	36,00	1.014,50
4	April	35,30	23,60	99,00	51,00	1.013,50
5	M e i	35,20	24,00	100,00	49,00	1.012,80
6	J u n i	35,00	22,40	99,00	54,00	1.013,60
7	J u l i	35,30	21,40	100,00	53,00	1.013,10
8	Agustus	35,20	21,00	100,00	49,00	1.012,90
9	September	34,80	22,40	98,00	50,00	1.013,40
10	Oktober	34,20	22,60	100,00	54,00	1.013,10
11	Nopember	34,60	23,00	100,00	56,00	1.012,90
12	Desember	33,60	21,40	98,00	57,00	1.012,10
	Rata-rata	34,96	22,59	99,33	50,83	1.013,39

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

Tabel 2.5
Banyaknya Curah Hujan dan Kecepatan Angin
di Kabupaten Barito Selatan, 2016

No.	Bulan	Hujan		Kecepatan Rata-rata Angin (knots)
		Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan	
1	Januari	383,50	24	22,00
2	Pebruari	422,90	23	16,00
3	Maret	392,40	22	15,00
4	April	257,90	22	16,00
5	M e i	330,90	22	15,00
6	J u n i	112,60	18	11,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

7	Juli	342,70	18	12,00
8	Agustus	112,90	6	10,00
9	September	186,10	19	11,00
10	Oktober	386,70	22	13,00
11	Nopember	585,00	21	15,00
12	Desember	319,10	25	11,00
	Rata-rata	319,39	20,17	13,91

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

5. Potensi Pengembangan Wilayah

Struktur perekonomian Barito Selatan pada tahun 2016 didominasi oleh sektor pertanian yaitu sebesar 20,66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa daerah ini sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sumber daya alam.

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan pola lahan pertanian yang menjadi sektor prima meliputi : tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap devisa maupun lapangan pekerjaan menunjukkan bahwa sektor ini memegang peranan penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Barito Selatan.

a. Tanaman Pangan

Tanaman pangan secara eksisting menurut kecamatan meliputi tanaman padi dan palawija. Adapun luas lahan sawah menurut kecamatan dan jenis pengairan di Kabupaten Barito Selatan terlihat pada Tabel 2.6 dibawah ini :

Tabel 2.6
Luas Lahan Sawah menurut kecamatan dan Jenis Pengairan
di Kabupaten Barito Selatan (Ha),2016

No	Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi		Jumlah
			Tadah hujan	Lainnya	
1	Jenamas	-	-	5.040	5.040
2	Dusun Hilir	-	-	2.000	2.000



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

3	Karau Kuala	-	1.252	-	1.252
4	Dusun Selatan	-	29.056	-	29.056
5	Dusun Utara	-	4.085	-	4.085
6	Gunung Bintang Awai	-	701	-	701
Barito Selatan		-	35.094	7.040	42.134

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

Produksi padi sawah dan padi ladang merupakan produk utama dari sektor tanaman pangan. Kantong produksi padi sawah terbesar pada kecamatan Dusun Selatan dan kantong produksi padi ladang di kecamatan Gunung Bintang Awai, dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Luas Panen, Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Barito Selatan, 2016

No	Kecamatan	Padi Sawah		Padi Ladang	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Jenamas	332	1.169,64	-	-
2	Dusun Hilir	1.410	4.967,43	-	-
3	Karau Kuala	657	2.314,61	-	-
4	Dusun Selatan	1.794	6.320,26	277	710,23
5	Dusun Utara	875	3.082,63	405	1.038,42
6	Gunung Bintang Awai	599	2.110,28	801	2.053,76
Barito Selatan		5.667	19.964,84	1.483	3.802,41

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

Luas panen dan produksi jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan ubi kayu serta ubi jalar dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2.8

**Luas Panen Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar
Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan (Ha), 2016**

No	Kecamatan	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	Jenamas	-	-	-	-	-	2,00
2	Dusun Hilir	-	-	2,00	2,00	7,00	10,00
3	Karau Kuala	-	-	-	-	9,00	1,00
4	Dusun Selatan	-	-	2,00	-	84,00	56,00
5	Dusun Utara	-	-	-	-	73,00	27,00
6	Gunung Bintang Awai	-	53,0	8,00	-	21,00	9,00
Barito Selatan		-	53,00	12,00	2,00	194,00	105,00

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

Tabel 2.9

**Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar
Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan (Kuintal), 2016**

No	Kecamatan	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	Jenamas	-	-	-	-	-	18,19
2	Dusun Hilir	-	-	2,00	2,00	147,65	90,95
3	Karau Kuala	-	-	-	-	189,84	9,10
4	Dusun Selatan	-	-	2,00	-	1.771,81	509,33
5	Dusun Utara	-	-	-	-	1.539,79	245,57
6	Gunung Bintang Awai	-	55,00	8,00	-	442,91	81,86
Barito Selatan		-	550,00	120,00	2,00	40.920	9.550

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

b. Hortikultura

Produksi tanaman hortikultura yang diusahakan serta jenis komoditasnya yang memiliki potensi tinggi untuk di kembangkan adalah untuk tanaman sayuran yakni Cabai Kecil, Cabai Besar, Sawi, Tomat, Kacang Panjang, Ketimun dan Sayuran lainnya (Terung, Kangkung dan Bayam), sedangkan untuk tanaman buah-buahan terdiri



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

dari Pisang, Nanas, Nangka, Durian, Papaya, rambutan dan buah-buahan lainnya (Mangga, Jeruk, Manggis, Duku, Sawo, dan Sirsak). Selengkapnya jenis tanaman sayuran disajikan pada Tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran
di Kabupaten Barito Selatan (Ton), 2016

No	Kecamatan	Cabai Kecil	Cabai Besar	Sawi	Tomat	Kacang Panjang	Ketimun	Lainnya
1	Jenamas	17,00	-	-	15,00	105,00	26,00	21,00
2	Dusun Hilir	16,00	-	-	6,00	18,00	5,00	40,00
3	Karau Kuala	38,00	33,00	-	2,00	39,00	3,00	270,00
4	Dusun Selatan	199,00	195,00	-	101,00	193,00	134,00	394,00
5	Dusun Utara	73,00	64,00	33,00	-	126,00	182,00	297,00
6	Gunung Bintang Awai	176,00	49,00	118,00	44,00	276,00	275,00	395,00
Barito Selatan		519,00	341,00	151,00	168,00	757,00	625,00	1.417.000

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

Selengkapnya Jenis komoditas buah-buahan disajikan dan Tabel 2.11 dibawah ini :

Tabel 2.11
Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah
di Kabupaten Barito Selatan (Ton), 2016

No	Kecamatan	Pisang	Nenas	Nangka	Durian	Pepaya	Rambu tan	Lainnya
1	Jenamas	260,00	-	145,00	-	-	12,00	84,00
2	Dusun Hilir	96,00	3	11,00	-	2	-	4,00
3	Karau Kuala	268,00	-	-	-	25	68,00	25,00
4	Dusun Selatan	107,00	2608	68,00	22,00	17	14,00	48,00
5	Dusun Utara	1.193,00	80	-	-	-	-	-
6	Gunung Bintang Awai	12.644,00	3777	3.489,00	2254,00	1.347,00	812,00	782,00
Barito Selatan		14.568,00	6.468,00	3.713,00	2.276,00	1.391,00	906,00	943,00

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

d. Perkebunan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Perkebunan juga merupakan subsektor dari sektor pertanian. Subsektor ini memiliki peranan cukup penting terhadap PDRB Kabupaten Barito Selatan. Tanaman karet termasuk tanaman primadona dan mendominasi perkebunan yang diolah oleh masyarakat dan pihak swasta. Luas areal dan produksi tanaman karet yang diusahakan dan sudah dikembangkan pada semua kecamatan di Kabupaten Barito Selatan, dapat terlihat pada Tabel 2.12 dan Tabel 2.13.

Tabel 2.12
Luas Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman
Di Kabupaten Barito Selatan (Ha),2016

No	Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Lada	Kakao	Lain
1	Jenamas	53,50	25,00	-	-	-	-	-
2	Dusun Hilir	61,00	21,00	629,00	-	-	-	-
3	Karau Kuala	229,00	13,00	0,70	-	-	-	1,10
4	Dusun Selatan	3.423,00	27,77	9,60	-	-	-	15,00
5	Dusun Utara	7.522,00	7,00	853,00	-	-	3,00	-
6	Gunung Bintang Awai	9.088,00	156,00	11,00	59,00	1,60	101,00	4,65
Barito Selatan		20.376,50	249,77	1.503,30	59,00	1,60	104,00	20,75

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka, 2017

Jenis tanaman perkebunan lainnya yang juga potensi untuk dikembangkan adalah Kelapa, Kelapa Sawit, Kopi, Lada, Kakao dan lainnya (Kemiri, Aren, Pinang dan Jambu Mete).

Tabel 2.13
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman
Di Kabupaten Barito Selatan (Ton),2016

No	Kecamatan	Karet	Kelapa	Kelapa Sawit	Kopi	Lada	Kakao	Lainnya
1	Jenamas	7,40	3,41	-	-	-	-	8415,00
2	Dusun Hilir	10,02	5,72	690,00	-	-	-	1.380,00
3	Karau Kuala	49,46	1,56	-	-	-	-	231,00
4	Dusun Selatan	1.245,00	5,17	2,50	-	-	-	313,00
5	Dusun Utara	2.768,00	1,72	1.507,50	-	-	4,80	224,00
6	Gunung Bintang Awai	4.019,00	46,60	2,75	7,80	1,15	83,00	337,00
Barito Selatan		8.098,88	64,18	3.030,50	12,00	1,15	87,80	10.900,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka, 2017

e. Peternakan

Jenis ternak yang ada di Kabupaten Barito Selatan meliputi ternak sapi potong, kerbau, kambing dan babi. Babi merupakan ternak yang paling signifikan dari sisi jumlah populasi dan jumlah ternak yang dipotong, sedang kerbau rawa adalah ternak yang paling banyak diusahakan, terutama yang terdapat di Kecamatan Jenamas dan Kecamatan Dusun Hilir.

Tabel 2.14
Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak
Di Kabupaten Barito Selatan (Ekor), 2016

No	Kecamatan	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Babi
1	Jenamas	-	338	8.503	-	90	-
2	Dusun Hilir	-	19	1.484	-	103	47
3	Karau Kuala	-	54	79	-	163	160
4	Dusun Selatan	-	249	-	-	438	5.715
5	Dusun Utara	-	240	3	-	363	4.795
6	Gunung Bintang Awai	-	227	4	-	565	4.931
Barito Selatan		-	1.127	10.073	-	1.772	15.648

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

Ternak kambing dan sapi potong serta babi hampir merata ada di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Selatan, akan tetapi hingga saat ini belum ada yang memelihara dengan skala peternakan besar. Sedangkan populasi ayam kampung paling banyak dipelihara di Kecamatan Dusun Selatan seperti terlihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas
Di Kabupaten Barito Selatan (Ekor), 2016

No	Kecamatan	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik/Itik Manila
1	Jenamas	11.454	-	1.534	763
2	Dusun Hilir	21.428	-	2.548	841
3	Karau Kuala	20.485	-	2.427	679
4	Dusun Selatan	52.953	-	731	4.562
5	Dusun Utara	35.938	-	3.254	2.854



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

6	Gunung Bintang Awai	37.841	-	5.243	4.938
Barito Selatan		180.099	-	15.737	14.637

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka, 2017

f. Perikanan

Budidaya perairan atau akuakultur merupakan kegiatan memproduksi ikan dalam suatu wadah terkontrol dan berorientasi pada keuntungan. Pada akuakultur pemanenan (*harvesting*) dilakukan setelah kegiatan pemeliharaan ikan yang mencakup persiapan wadah pemeliharaan, penebaran benih, pemberian pakan, pengelolaan kualitas air, serta penanganan hama dan penyakit. Dengan kata lain perikanan budidaya merupakan usaha membesarkan dan memperoleh ikan, baik ikan yang masih hidup liar di alam, atau sudah dibuatkan tempat tersendiri dengan adanya campur tangan manusia. Budidaya tidak terbatas pada ikan di kolam, tambak, empang, aquarium, sawah dan sebagainya, melainkan juga termasuk pada kegiatan memelihara ikan di danau, sungai, waduk atau laut.

Usaha budidaya ikan air tawar di Kabupaten Barito Selatan telah lama berkembang dan jika dilihat wadah atau jenis areal budidaya yang digunakan adalah kolam dan keramba. Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.16 dan Tabel 2.17 dibawah ini :

Tabel 2.16
Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor
Di Kabupaten Barito Selatan (ton) Tahun 2015 – 2016

No	Kecamatan	Perikanan Laut		Perairan Umum		Jumlah	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	Jenamas	-	-	781,20	294,20	781,20	294,20
2	Dusun Hilir	-	-	1.290,17	1.767,82	1.290,17	1.767,82
3	Karau Kuala	-	-	1.334,10	1.296,40	1.334,10	1.296,40
4	Dusun Selatan	-	-	1.482,60	1.178,54	1.482,60	1.178,54
5	Dusun Utara	-	-	737,51	589,27	737,51	589,27
6	Gunung Bintang Awai	-	-	371,30	294,64	371,30	294,64
Barito Selatan		-	-	5.996,88	5.421,31	5.996,88	5.421,31

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Tampak Kecamatan Dusun Selatan memiliki produksi perikanan tangkap tertinggi disusul oleh Kecamatan Karau Kuala dan Dusun Hilir serta Dusun Utara, Jenamas dan Gunung Bintang Awai.

Tabel 2.17
Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor
Di Kabupaten Barito Selatan (ton) tahun 2016

No	Kecamatan	Budi daya Laut	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung	Sawah	Jumlah
1	Jenamas	-	-	84,37	579,72	-	-	664,09
2	Dusun Hilir	-	-	9,37	1.452,92	-	-	1.462,29
3	Karau Kuala	-	-	121,87	1.177,55	-	-	1.299,42
4	Dusun Selatan	-	-	971,22	3.429,99	-	20,80	4.422,01
5	Dusun Utara	-	-	191,24	126,81	-	-	318,05
6	Gunung Bintang Awai	-	-	262,49	32,61	-	-	295,10
Barito Selatan		-	-	1.640,56	6.799,60	-	-	8.460,96

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

g. Kehutanan

Peranan pertanian subsektor kehutanan terhadap perekonomian Kabupaten Barito Selatan cukup rendah. Luas kawasan hutan dan perairan serta produksi kayu hutan di Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat di Tabel 2.18 dan Tabel 2.19.

Tabel 2.18
Luas Kawasan Hutan dan Perairan (Ha) di Kabupaten Barito Selatan

No	Kawasan	Luas
1	Hutan lindung	82.797,5
2	Suaka alam dan pelestarian alam	76.829,5
3	Hutan Produksi	
	a. Terbatas	85.070,3
	b. Tetap	203.445,4
	c. Dapat dikonversi	93.378,9
4	Areal penggunaan lain	144.971,1
5	Sungai	15.607,3
Barito Selatan		702.009,9

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017



Tabel 2.19
Produksi Kayu Hutan (m³) Menurut Jenis Produksi di Kabupaten Barito Selatan

Tahun	Kayu Bulat	Kayu Gergajian	Kayu Lapis
2012	5.217,64	905,79	-
2013	7.411,73	267,19	-
2014	888,83	583,38	-
2015	1.706,20	774,01	-
2016	2.161,51	121,61	-

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

2.1.2 Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan penduduk yang merupakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting adanya melihat pertumbuhan demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

1. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Barito Selatan

Kepadatan penduduk di Kabupaten Barito Selatan tahun 2016 mencapai 19,56 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 6 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Dusun Selatan dengan kepadatan sebesar 48,07 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Gunung Bintang Awai sebesar 10,99 jiwa/Km².

Penduduk Kabupaten Barito Selatan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 133.304 jiwa yang terdiri atas 68.058 jiwa penduduk laki-laki dan 65.246 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104, yang berarti ada 104 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2.20
Distribusi dan Kepadatan Pendudukan Menurut Kabupaten
di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk per Km ²
1	Jenamas	9.305	7,03	662,16	14,02
2	Dusun Hilir	16.416	12,36	1.369,73	11,91
3	Karau Kuala	15.866	11,98	825,23	19,16
4	Dusun Selatan	55.344	41,28	1.133,47	48,07
5	Dusun Utara	16.833	12,71	1.271,64	13,19
6	Gunung Bintang Awai	19.540	14,63	1.757,86	10,99
Barito Selatan		133.304	100,00	7.020.09	19,56

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

Tabel 2.21
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010, 2015 dan 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
		2010	2015	2016	2010-2015	2015-2016
1	Jenamas	9.092	9.284	9.305	0,39	0,41
2	Dusun Hilir	15.659	16.312	16.416	0,83	0,69
3	Karau Kuala	15.413	15.815	15.866	0,52	0,39
4	Dusun Selatan	49.922	54.484	55.344	1,77	1,63
5	Dusun Utara	16.356	16.778	16.833	0,51	0,37
6	Gunung Bintang Awai	18.056	19.314	19.540	1,36	1,22
Barito Selatan		12.500	131.987	133.304		

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

2. Sex Ratio Penduduk Kabupaten Barito Selatan

Data *Sex Ratio* berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. *Sex ratio* penduduk Kabupaten Barito Selatan tahun 2016 sebesar



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

104, yang memiliki arti bahwa disetiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

Tabel 2.22
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016

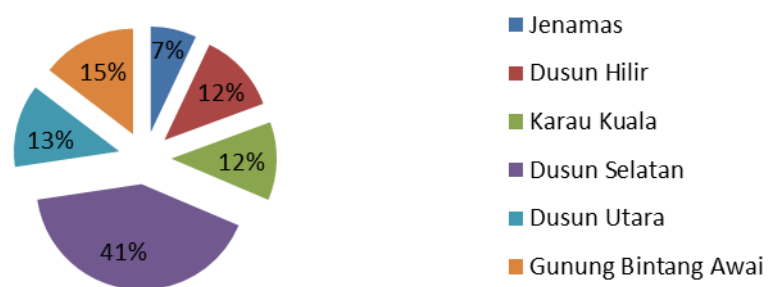
No	Kabupaten	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Jenamas	4.627	4.678	9.305	98,89
2	Dusun Hilir	8.458	7.958	16.416	106,19
3	Karau Kuala	7.942	7.924	15.866	100,14
4	Dusun Selatan	28.123	27.221	55.344	103,23
5	Dusun Utara	8.653	8.180	16.833	105,71
6	Gunung Bintang Awai	10.255	9.285	19.540	110,32
Barito Selatan		68.058	65.246	133.304	104

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

3. Distribusi Penduduk Kabupaten Barito Selatan

Secara umum, penyebaran penduduk di Kabupaten Barito Selatan cukup merata dengan basis kependudukan terpusat di Kecamatan Dusun Selatan (41%), Gunung Bintang Awai (15%), dan Dusun Utara (13%). Sedangkan Dusun Hilir dan Karau Kuala hampir sama persentasenya yaitu 12 persen dan penduduk dengan persentase hunian terkecil adalah Kecamatan Jenamas sebesar 7 persen (Gambar 2).

Gambar 2. Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan, Tahun 2015



Komposisi penduduk Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kelompok umur digambarkan pada Tabel 2.23, bahwa kelompok umur usia non produktif yaitu umur kurang dari 15 tahun (< 15 tahun) dan umur 65 tahun ke atas adalah sebesar 32,71 persen, sedangkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 67,29%. Memperhatikan komposisi tersebut bahwa dari jumlah penduduk usia produktif tersebut merupakan bonus demografi dimana struktur penduduk sangat menguntungkan masyarakat dari sisi pembangunan karena usia produktif lebih banyak dari pada usia non produktif itu artinya beban ketergantungan akan berkurang. Akan tetapi jumlah penduduk dengan umur produktif tersebut masih perlu didukung dengan lapangan pekerjaan karena berdasarkan data BPS untuk tahun 2016 bahwa dari jumlah penduduk usia produktif tersebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah sebesar 71,11%. Artinya bahwa penduduk usia produktif yang tidak bekerja yang menyebabkan tingkat kebergantungan penduduk kepada penduduk yang produktif menjadi tinggi. Dalam proses bonus demografi, penduduk usia sekolah dapat sudah mempersiapkan diri dengan banyak bekal ilmu-ilmu yang mampu membangkitkan semangat produktifitas dalam diri mereka dan menjadi agent dalam menopang kesuksesan bonus demografi di masa yang akan datang.

Tabel 2.23
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Barito Selatan, 2016

Kelompok Umur	Jenis Kelamin			Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
0 – 4	6.542	6.376	12.918	9,866
5 – 9	6.796	6.424	13.176	10,018
10 – 14	6.752	6.968	12.199	9,277
15 - 19	5.500	5.360	10.860	8,249
20 - 24	4.871	4.973	9.844	7,530
25 - 29	5.641	5.377	11.018	8,378
30 - 34	5.923	5.672	11.595	8,768
35 - 39	5.901	5.796	11.697	8,817
40 - 44	5.559	4.900	10.459	7,657
45 - 49	4.676	4.307	8.983	6,551
50 - 54	3.832	3.470	7.302	5,309
55 - 59	2.606	2.450	5.056	3,637
60 - 64	1.783	1.575	3.358	2,396
65 – 69	1.063	1.089	2.152	1,558
70 – 74	658	775	1.433	1,052
75+	520	734	1.254	0,938
Jumlah	68.058	65.246	133.304	100

Sumber : Barito Selatan Dalam Angka 2017

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus pembangunan daerah yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Penjabaran pada masing-masing fokus aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada analisa di bawah ini :

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, indikator yang umum dipakai untuk mengetahui tingkat perekonomian dan kesejahteraan suatu wilayah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah bersangkutan baik migas maupun non



migas termasuk turunannya seperti pertumbuhan ekonomi maupun struktur ekonominya. Selain itu, indikator lain yang juga dapat memperlihatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat adalah laju inflasi dan indeks gini (*gini ratio*).

a. Pertumbuhan PDRB Regional

Pembangunan daerah tidak pernah terlepas dari pertumbuhan ekonomi regional baik mikro maupun makro. Berkenaan dengan hal tersebut, sektor-sektor lapangan usaha yang memberikan nilai tambah bagi produksinya akan menjadikan roda penggerak ekonomi wilayah meskipun ada beberapa investasi yang berasal dari luar daerah. Kontribusi sektor ekonomi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan sektor andalan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi guna mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu ukuran untuk melihat perkembangan aktivitas perekonomian di masyarakat yang terlihat dari nilai tambah suatu produk/olahan produk di wilayah tersebut. Struktur ekonomi suatu wilayah juga dapat terlihat dari data PDRB karena setiap sektor ekonomi memiliki andil tersendiri dalam membentuk peta perekonomian wilayah.

Secara definisi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Barito Selatan tahun 2016 mencapai 4.887,2 milyar rupiah atau meningkat 10 persen dari tahun 2015. Angka ini separuhnya (50,58) persen didominasi oleh peran kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan 19,62 persen; kategori pertambangan dan penggalian 18,51 persen; serta kategori transportasi dan pergudangan (11,32) persen, dapat dilihat pada Tabel 2.24 dibawah ini.

Tabel 2.24
Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha Kabupaten Barito Selatan (miliar rupiah)
Tahun 2013-2016

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	762.079,15	844.968,17	918.949,57	959.071,60
Pertambangan dan Penggalian	987.513,46	918.562,04	842.619,34	904.374,20
Industri Pengolahan	217.901,74	249.398,87	291.019,82	322.994,20
Pengadaan Listrik	1.005,09	1.171,35	1.916,88	2.181,80



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

dan Gas				
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.445,45	5,111,88	6.161,02	6.790,30
Konstruksi	204.873,08	241.510,94	283.512,48	318.813,90
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	261.934,58	297.587,98	336.958,42	383.083,30
Transportasi dan Pergudangan	355.788,22	397.965,97	484.411,22	553.265,40
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	63.890,10	73.284,34	86.706,83	103.069,40
Informasi dan Komunikasi	41,763,17	48.729,61	54.724,80	60.806,70
Jasa Keuangan dan Asuransi	156.306,80	194.904,32	86.706,83	228.178,20
Real Estate	74.496,63	87.517,14	101.270,08	112.809,40
Jasa Perusahaan	591,27	697,56	798,61	888,60
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	234.160,85	267.042,85	300.893,88	334.504,50
Jasa Pendidikan	236.124,06	258.579,92	320.620,50	363.672,20
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	84.849,76	97.259,30	117.987,23	128.690,00
Jasa lainnya	73.824,29	83.855,44	95.563,97	103.984,60
PDRB	3.761.547,71	4.068.147,69	4.448.691,93	4.887.178,4

Sumber: Barito Selatan Dalam Angka 2017

Jika dilihat berdasarkan kategori lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2016 dicapai oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

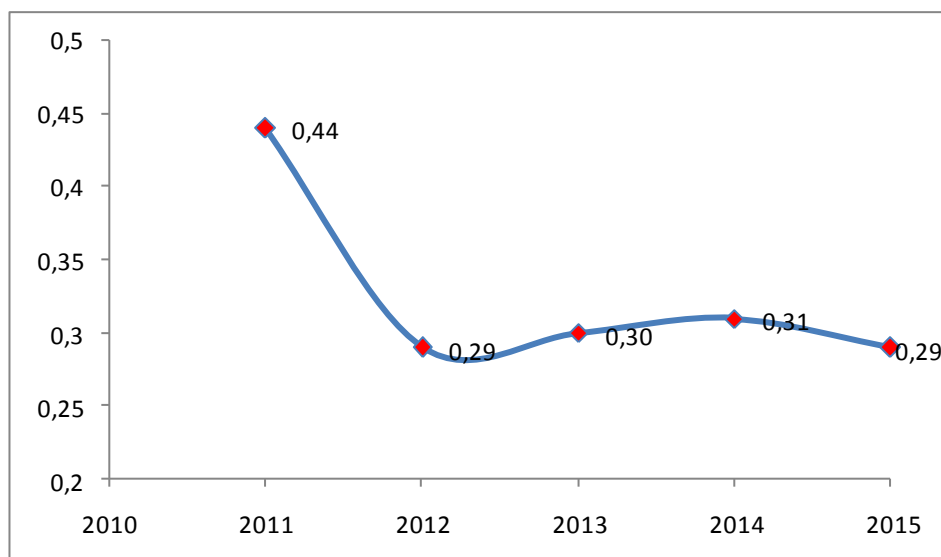
Pada sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalan bila dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi penurunan cukup besar, hal ini salah satunya disebabkan karena adanya pemberlakuan Undang Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang mengatur larangan ekspor mineral dalam bentuk mentah yang mulai berlaku 12 Januari 2014, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya Undang-undang ini, pengusaha dilarang mengekspor enam jenis bahan mentah yaitu emas, nikel, bauksit, bijih besi, tembaga, dan batu bara sebelum diolah. Namun pada tahun 2016, sektor pertambangan dan penggalan mulai tumbuh kembali dapat terlihat di **Tabel 2.24**.

b. Indeks Gini

Pembangunan ekonomi maupun sosial yang dilakukan

pemerintah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Grafik 2.2
Indeks Gini Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016



Secara umum peningkatan indeks gini Kabupaten Barito Selatan memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin “tidak merata” dari tahun ke tahun. Meskipun para ahli ekonomi menganggap “wajar” pada range indeks gini di kisaran 0,3, namun peningkatan ini perlu menjadi perhatian tersendiri dalam bidang kesejahteraan rakyat agar lebih memprioritaskan program dan kegiatan terkait peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

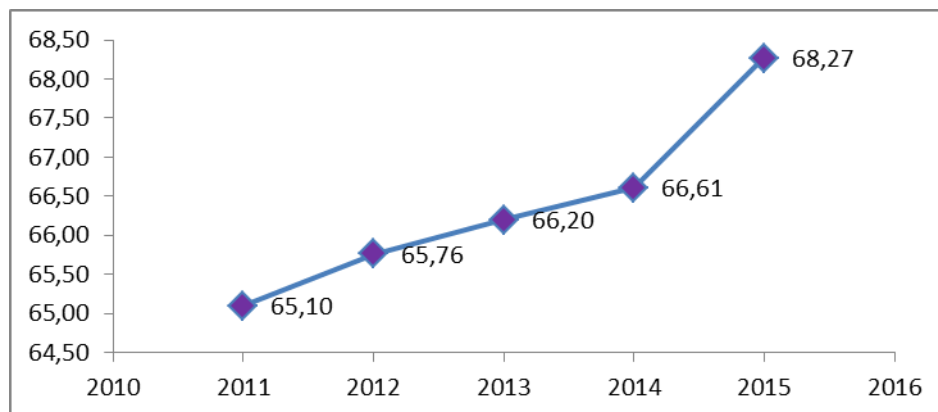
Kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kondisi pengangguran, kondisi kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta seni budaya dan olahraga. Dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama dalam melihat

kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah dan sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan indeks komposit IPM yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta ekonomi masyarakat (paritas daya beli).

Grafik 2.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2017

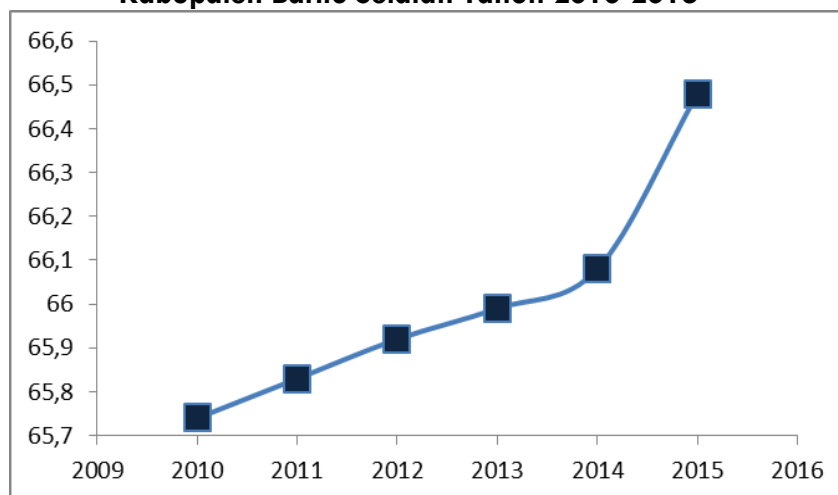
Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Selatan mengalami kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2012, IPM Kabupaten Barito Selatan sudah termasuk kategori sedang, yakni mencapai angka 65,10 dan seiring berjalannya waktu, IPM terus mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga pada tahun 2016 mencapai angka 68,27. Peningkatan IPM yang konsisten setiap tahunnya berbanding lurus

dengan peningkatan komponen-komponen pembentuknya, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian.

b. Kesehatan

Capaian di bidang kesehatan Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2016. Hal ini disebabkan karena perbaikan-perbaikan sarana prasarana fasilitas kesehatan diiringi dengan penambahan kuantitas maupun kualitas sumber daya kesehatan baik dokter, tenaga medis, dan lainnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pencapaian positif di bidang kesehatan ini dapat dilihat dari trend kenaikan angka harapan hidup Kabupaten Barito Selatan tahun 2016 yang mencapai 66,48 tahun, yang berarti bahwa bayi yang baru dilahirkan pada tahun 2015 akan memiliki peluang hidup hingga 66-77 tahun.

Grafik 2.4
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2017

c. Pendidikan

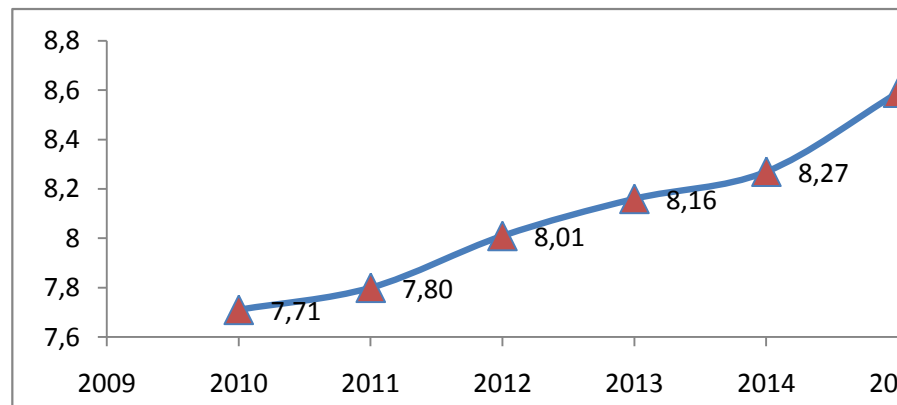
Secara umum, bidang pendidikan di Kabupaten Barito Selatan mengalami perkembangan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masyarakat.

Terlihat bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah



selama 7,71 tahun dan setelah enam tahun berselang angka tersebut beranjak naik hingga 8,59 tahun.

Grafik 2.5
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010-2016

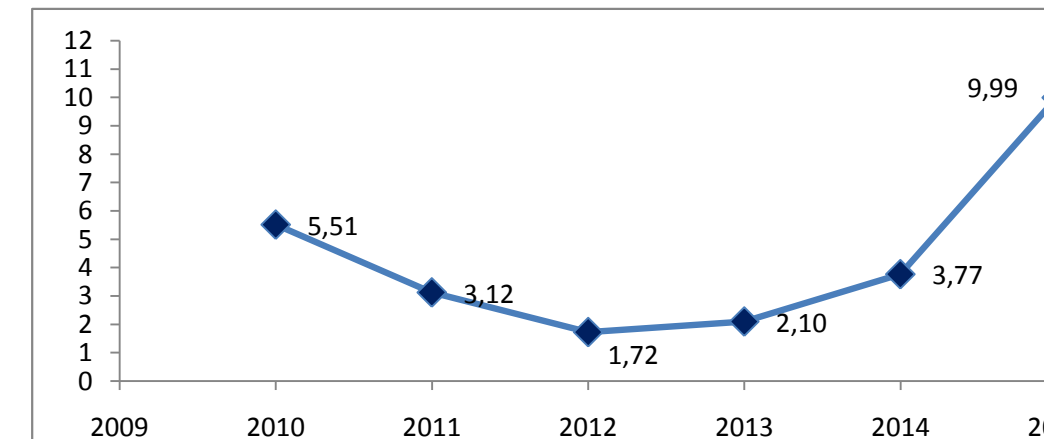


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2017

d. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 mencapai 9,99 persen dimana angka ini mengalami peningkatan secara tajam dari tahun 2014. Jika dilihat secara umum, tingkat pengangguran Provinsi Kalimantan Tengah tergolong rendah jika dibandingkan angka nasional, namun trend kenaikan angka pengangguran selama empat tahun terakhir perlu mendapat perhatian khusus oleh *stakeholders* ketenagakerjaan dalam mengantisipasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan utamanya dalam mengatasi jumlah pengangguran.

Grafik 2.6
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2010-2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2017

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan klasik dalam wilayah administrasi pemerintahan dimana fenomena tersebut dikatakan akan selalu ada selama suatu regional berdiri. Oleh karenanya, dalam setiap rumusan perencanaan pembangunan daerah selalu tercantum kebijakan terkait pengentasan kemiskinan sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Secara umum, angka kemiskinan (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Barito Selatan mengalami penurunan. Pada tahun 2012, tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan mencapai 7,07 persen yang pada tahun berikutnya meningkat mencapai angka 7,56 dan tahun 2013 menurun ke angka 7,25 serta langsung menurun drastis hingga mencapai angka 6,26 persen. Kemudian pada tahun berikutnya, tingkat kemiskinan secara konsisten menurun landai hingga akhirnya pada tahun 2016 mencapai 6,13 persen.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum mencakup fokus pelayanan urusan wajib dan fokus pelayanan urusan pilihan. Kondisi pelayanan wajib dapat dilihat dari pelayanan umum pada berbagai bidang yakni bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum, penataan ruang dan perhubungan, dan sebagainya yang merupakan pelayanan wajib oleh pemerintah daerah dalam pembangunan. Sedangkan kondisi pelayanan pilihan dapat diketahui dari beberapa bidang yakni pertanian, pariwisata, jasa dan perdagangan, energi dan sumberdaya mineral, dan sebagainya yang



menyangkut pelayanan pilihan oleh pemerintah daerah.

1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib (Pelayanan Dasar)

a. Pendidikan

Gambaran umum keadaan pendidikan di Kabupaten Barito Selatan antara lain tercermin dari angka partisipasi sekolah dan rasio guru terhadap murid. Pendidikan merupakan salah satu upaya dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pencapaian di bidang pendidikan berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD Sederajat di Barito Selatan untuk tahun 2016 seorang guru rata-rata mengajar 8 murid baik SD, SMP, maupun SMA sederajat.

Kesadaran masyarakat Barito Selatan dalam menamatkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi pada tahun 2016 semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Sekolah di kelompok umur 7-12 sudah mencapai 100 persen. Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah di kelompok umur 16-18 dan 13-15 juga mengalami peningkatan masing-masing 96,51 persen dan 74,17 persen.

Tabel 2.25. Indikator Pendidikan Kabupaten Barito Selatan

Uraian	2014	2015	2016
Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
7 – 12	100	99,65	100
13 – 15	64,53	81,87	96,51
16 - 18	46,91	59,89	74,17
Rata-rata lama sekolah	8,48	8,49	8,35
Angka Melek Huruf (%)	99,28	99,81	99,28

Sumber : Statistik Daerah Kab. Barito Selatan 2017

Sementara itu, Angka melek huruf mengalami sedikit penurunan begitu juga indikator Rata-rata lama sekolah mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Diharapkan kedua indikator ini terus membaik di tahun yang akan datang.

b. Kesehatan

Sarana prasarana kesehatan yang menunjang untuk optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat sangat menentukan dalam kebijakan

pembangunan bidang kesehatan. Hal ini karena segala fasilitas dan infrastruktur kesehatan sangat berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karenanya, perhatian pemerintah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan menjadi perlu dan penting untuk ditindaklanjuti.

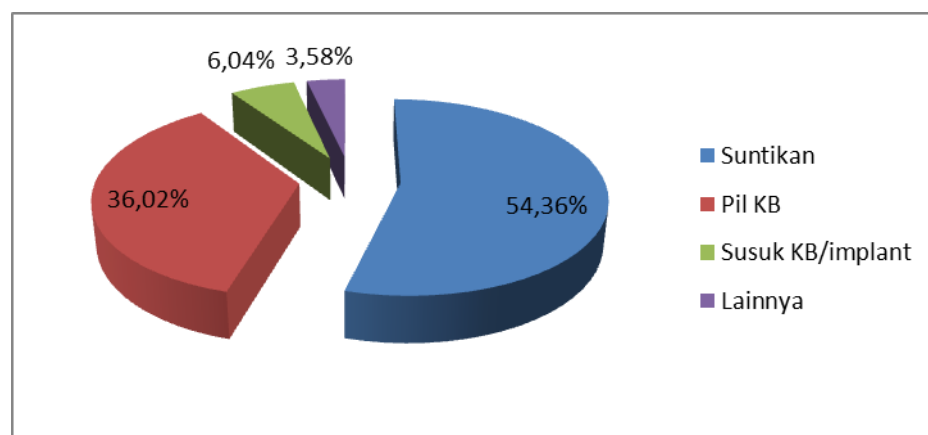
Tempat yang paling banyak dijadikan rujukan penduduk untuk berobat jalan di Barito Selatan tahun 2016 adalah puskesmas/pustu yaitu mencapai 59,95 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kemudahan akses oleh penduduk dan biaya berobat yang dikeluarkan relatif murah. Namun persentase rumah sakit pada tahun 2016 sebagai rujukan untuk berobat jalan menurun dibandingkan tahun 2015 yaitu hanya sebesar 14,75 persen.

Persentase penolong kelahiran terakhir tertinggi di Barito Selatan pada tahun 2016 adalah bidan yaitu sebesar 54,47 persen. Sementara yang menggunakan dokter kandungan sebagai penolong kelahiran mencapai angka 24,95 persen. Ini menunjukkan hampir sebagian besar penduduk Barito Selatan peduli terhadap keselamatan ibu dan bayi saat proses persalinan.

Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh penduduk Barito Selatan pada tahun 2016 adalah suntikan dengan persentase sebesar 54,36 persen, lalu diikuti oleh pil KB dan susuk KB, sedang sisanya alat kontrasepsi yang lain terlihat pada **Grafik 2.7**.

Grafik 2.7.

Gambar 2.7. Persentase Penduduk Wanita Berumur 15-49 Berstatus Kawin Menurut Penggunaan Alat KB



c. Urusan Pekerjaan Umum

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pekerjaan Umum diukur dengan indikator kinerja antara lain: Proporsi Panjang



Jaringan Jalan dalam kondisi baik, Rasio Jaringan Irigasi, Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk, Persentase rumah tinggal bersanitasi, Rasio Tempat Pemakaman umum per Satuan Penduduk, Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk, Rasio Rumah Layak Huni, Rasio Pemukiman Layak Huni, Panjang jalan dilalui roda empat, Jalan penghubung kabupaten dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4, Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air minimal 1,5 m.

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2011-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	44,20	54,40	60,50	54,77	54,77
2.	Rasio Jaringan Irigasi (m/ha)	-	11.970	11.970	11.970	11.970
3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	-	-	10,12	28,12	28,12

Sumber: Dinas PU Kabupaten Barito Selatan

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perumahan diukur dengan indikator: Rumah tangga pengguna air bersih, Rumah tangga pengguna listrik, Rumah tangga bersanitasi, Lingkungan pemukiman kumuh dan Rumah layak huni.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kabupaten Barito Selatan Th 2011-2016

No	Indikator	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rumah tangga pengguna air bersih	-	--	8.950 KK	9.015 KK	12.500 KK
2.	Rumah tangga pengguna listrik	-	-	11.117 KK	12.300 KK	15.700 KK



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

3.	Rumah tangga bersanitasi (%)	-	-	63 %	64%	69%
4.	Rumah layak huni	-	-	33.726 Unit	33.776 unit	45.565 Unit

Sumber: Dinas Perumahan,Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Barito Selatan

e. Urusan Penataan Ruang

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Tata Ruang diukur dengan indikator:

Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dan Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan.

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Tata Ruang Kabupaten Barito Selatan Th 2011-2015

No	Indikator	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	-	-	10-20 %	10-20 %	10-20 %
2.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)	-	-	70 %	75%	77%
3.	Luas Ruang Terbuka Hijau					42.480 Ha

Sumber: Dinas Perumahan,Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Barito Selatan

2. Fokus Pelayanan Urusan Wajib (Non Pelayanan Dasar)

a. Ketenagakerjaan

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Barito Selatan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan pada Tahun 2016 sebesar 3.375 pekerja. Perbandingan pencari kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, terdapat 2.845 laki-laki dan 530 perempuan pencari kerja terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berpendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 58 persen (1.959 pekerja).

b. Perhubungan

1) Jalan dan Angkutan Darat

Berdasarkan klasifikasi jalan, panjang jalan di Kabupaten Barito Selatan mencapai 1.013,57 km merupakan jalan kabupaten; 302,97 km jalan desa. Kondisi permukaan jalan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

yang masih baik mencapai 148,65 km. Pada tahun 2015, sepanjang 152,56 km diaspal; 132,77 km beton; 188,04 km kerikil dan 540,20 km tanah.

Tabel 2.29
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Barito Selatan (km), 2016

Jenis dan Kondisi Jalan	Panjang Jalan
Jenis Permukaan	
1 Aspal	152,56
2 Beton	132,77
3 Kerikil	188,04
4 Tanah	540,20
Jumlah	1.013,57
Kondisi Jalan	
1 Baik	185,47
2 Sedang	420,46
3 Rusak Ringan	263,15
4 Rusak Berat	144,49
Jumlah	1.013,57

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2017

2) Akomodasi

Jumlah hotel dan akomodasi lainnya di Barito Selatan tahun 2016 adalah 20 unit dengan kamar 302 unit dan tempat tidur 406 unit. Jumlah akomodasi ini mengalami kenaikan sebesar 2 unit dibandingkan dengan tahun 2015 dan 13 unit kamar tidur.

Tabel 2.30
Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Barito Selatan, Tahun 2015 – 2016

No	Kecamatan	Hotel		Kamar		Tempat Tidur	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	Jenamas	1	1	4	4	6	8
2	Dusun Hilir	-	-	-	-	-	-
3	Karau Kuala	1	1	8	8	10	10
4	Dusun Selatan	15	15	263	263	369	369
5	Dusun Utara	1	1	8	8	9	9
6	Gunung Bintang Awai	2	2	19	19	12	12
Barito Selatan		20	20	302	302	406	406

Sumber: Barito Selatan Dalam Angka, 2017

c. Perbankan

Jumlah bank yang terdapat di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2016 sebanyak enam bank. Bank itu antara lain BPK, BRI,



BNI, BTPN, Bank Danamon dan Bank Mandiri.

Selama kurun waktu 2014-2016, perkembangan dana perbankan di Barito Selatan terus meningkat. Dana masyarakat Barito Selatan yang terkumpul di Bank pada tahun 2016 yakni sebesar 12,38 triliun rupiah yang simpanannya berupa tabungan, giro, dan deposito. Jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 71,28 persen dibandingkan dengan tahun 2014. Jika dilihat menurut jenis dana yang dihimpun, jenis dana tabungan yang paling besar nilainya yaitu mencapai 5,65 triliun rupiah. Sedangkan jenis dana giro dan deposito masing-masing sebesar 4,57 dan 2,16 triliun rupiah.

Tabel 2.31
Statistik Perbankan Barito Selatan 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016
Jumlah Bank	6	6	6
- Kantor Cabang	2	2	2
- Kantor Cabang Pembantu	6	7	7
Dana perbankan (trilyun rupiah)	6,62	7,22	12,38

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2017

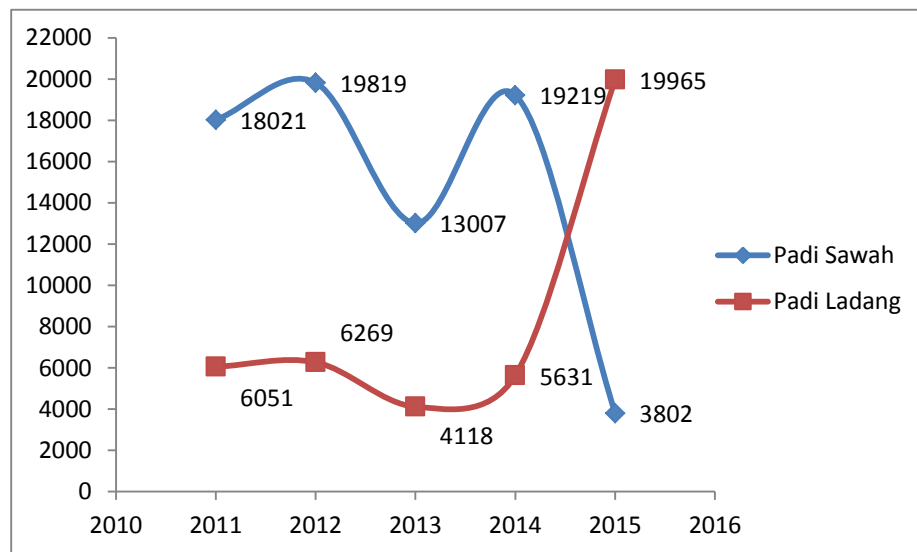
3. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

a. Pertanian

Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap devisa maupun lapangan pekerjaan menunjukkan bahwa sektor ini memegang peranan penting dalam kehidupan social budaya masyarakat Barito Selatan.

Pada tahun 2015 luas panen padi sawah adalah 5.667 Ha dengan produksi 19.786,47 ton, sedangkan luas ladang adalah 1.483 Ha dengan produksi 3.802,01 ton. Penghasil padi terbesar adalah kecamatan Dusun Selatan yaitu seluas 2.071 Ha dan produksi 7.015,24 ton.

Grafik 2.8
Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang di
Kabupaten Barito Selatan (ton), Tahun 2011-2016



Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2017

Perkebunan karet masih menjadi komoditas utama Kabupaten Barito Selatan dengan luas kebun pada tahun 2017 adalah 32.764,50 Ha dan produksi 17.965,50 ton. Kabupaten Barito Selatan hanya memproduksi kayu bulatan dan kayu hasil gergajian dengan produksi di tahun 2016 secara berurutan 2.161,51 m³ dan 121,61 m³.

b. Industri

Sektor industri pengolahan di Barito Selatan hanya mencakup sub sektor industri non migas karena di kabupaten ini tidak terdapat industri migas. Berdasarkan NTB yang terbentuk, sektor ini mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 5,73 persen dan kontribusi sebesar 6,54 persen terhadap pembentukan PDRB pada tahun 2016.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor pertanian, dikarenakan industri di Kabupaten Barito Selatan masih merupakan industri berbasis sumber daya alam atau industri yang menggunakan output sektor pertanian sebagai bahan baku, seperti karet, kayu, dan hasil pertanian lainnya.

Jumlah perusahaan industri kecil dan mikro di Barito Selatan tahun 2016 sebanyak 181 perusahaan, yang menyerap tenaga kerjanya sebanyak 567 orang. Usaha umumnya didominasi oleh in-dustri makanan dan minuman serta industri

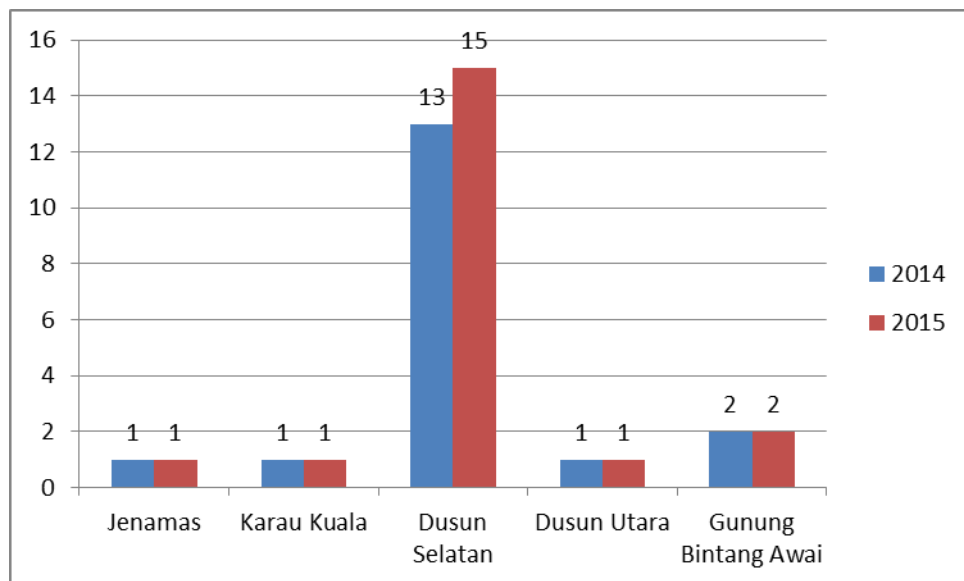


kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya dengan jumlah usaha masing-masing sebesar 86 dan 64 usaha.

c. Pariwisata

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu pembangunan sektoral yang dapat melibatkan masyarakat dalam jumlah besar. Hal tersebut berdampak pada bidang ketenagakerjaan dimana akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang sekaligus meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan. Pengembangan pariwisata tidak akan terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan.

Grafik 2.9
Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kecamatan di
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 dan 2015



d. Pertambangan

Sektor pertambangan di Barito Selatan adalah pertambangan non migas. Perkembangan sektor ini menunjukkan fluktuasi sepanjang tahun 2010-2015, yang ditunjukkan oleh besaran Nilai Tambah Bruto dalam pembentukan PDRB Barito Selatan.



2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari fokus kemampuan ekonomi daerah dan fokus fasilitas wilayah/infrastruktur.

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Fokus kemampuan ekonomi daerah salah satunya diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita adalah pengeluaran berupa uang yang dikeluarkan oleh satu penduduk dalam rumah tangga untuk dikonsumsi baik komoditas makanan maupun bukan makanan selama sebulan. Di Kabupaten Barito Selatan, rata-rata pengeluaran per kapita pada tahun 2016 mencapai angka Rp. 874.470,-.

Tabel 2.33
Pengeluaran Rata-rata per Kapita/Bulan Menurut Golongan Pengeluaran Dan Kelompok Barang di Kabupaten Barito Selatan (rupiah) Tahun 2016

Golongan Pengeluaran	Kelompok Barang		
	Makanan	Bukan Makanan	Jumlah
< 150.000	-	-	-
150.000-199.999	-	-	-
200.000-299.999	186.443	95.973	282.416
300.000-499.999	263.964	155.556	419.520
500.000-749.999	395.572	218.778	614.350
750.000-999.999	545.569	318.021	863.590
1.000.000-1.499.999	702.198	500.141	1.202.339
1.500.000+	839.836	1.205.810	2.045.646
Jumlah	492.189	382.282	874.470

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2017

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat ialah dengan melihat pola pengeluaran konsumsi masyarakatnya. Jika persentase pengeluaran untuk non makanan semakin tinggi, maka hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan, begitu pula sebaliknya.



Tabel 2.34
Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran per Kapita/Bulan
di Kabupaten Barito Selatan (%)

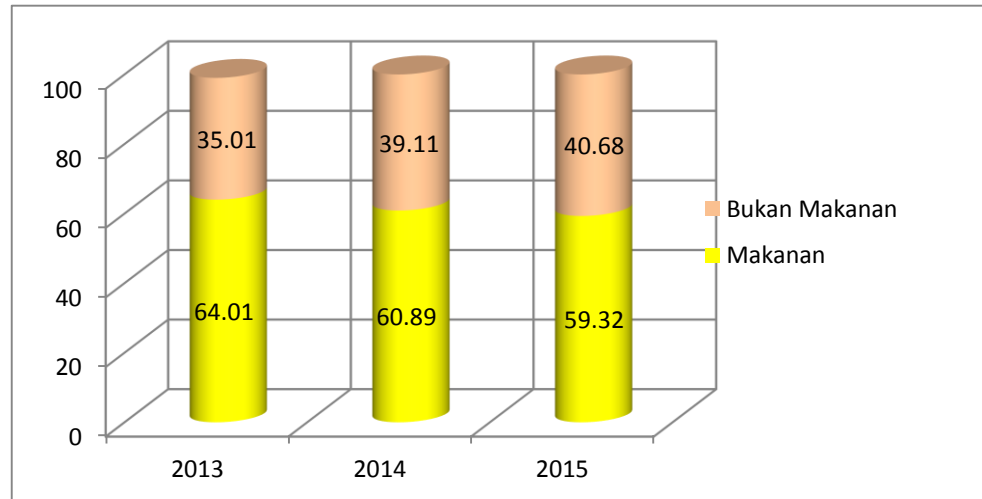
Pengeluaran Per Kapita/Bulan	2014	2015	2016
100.000-149.999	-	-	-
150.000-199.999	0,26	-	0,59
200.000-299.999	5,60	0,34	6,91
300.000-499.999	43,36	27,33	18,81
500.000-749.999	27,85	30,90	28,94
750.000-999.999	11,49	20,53	22,29
≥ 1.000.000	11,44	17,50	16,38

Sumber : Hasil Susenas Kalteng, 2014-2016

Terjadi penurunan persentase penduduk yang pengeluarannya diatas satu juta rupiah pada tahun 2016 yakni hanya sekitar 16,38 persen. Jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan persentase penduduk mencapai 17,50 persen.

Pola pengeluaran untuk konsumsi makanan masyarakat Barito Selatan selama periode waktu 2013-2015 lebih tinggi dibandingkan konsumsi non makanan, yakni mencapai 60 persen. Akan tetapi pada tahun 2014 dan 2015, terjadi penurunan pola konsumsi makanan dan terjadi kenaikan pola konsumsi non makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat Barito Selatan dibandingkan periode sebelumnya.

Jika dilihat secara rinci berdasarkan kategori makanan dan non makanan maka pada tahun 2015, rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita (59,32%) lebih tinggi dibandingkan konsumsi non makanan (40,68%). Meskipun begitu, selama beberapa tahun terakhir persentase tersebut mulai bergeser yang mengindikasikan semakin sejahteranya penduduk Kabupaten Barito Selatan karena pengeluaran untuk kebutuhan primer bergeser ke pengeluaran kebutuhan sekunder bahkan tersier.



Sumber : Hasil Susenas Kalteng, 2013-2015

2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Luas Wilayah (RTRW Kabupaten)

Perencanaan pembangunan daerah harus memiliki integrasi dan sinkronisasi dengan perencanaan tata ruang wilayah dalam hal ini Kabupaten Barito Selatan. Sebagai wilayah yang sebagian besar masih tergolong hutan bioregion, Barito Selatan memiliki RTRW Kabupaten Barito Selatan yang berfokus pada pengelolaan hutan. Dalam pengelolaannya, RTRW membagi wilayah menjadi dua kawasan yakni kawasan lindung (173.920,61 ha) dan kawasan budidaya (294.269,69 ha).



Tabel 2.35
Luas Wilayah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)
Barito Selatan

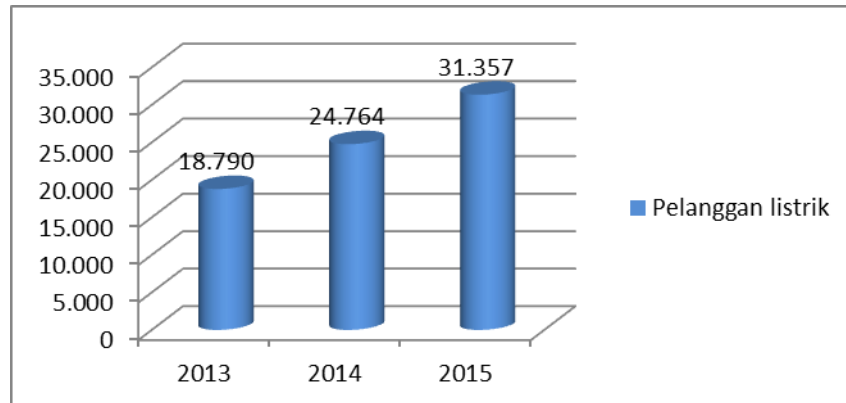
No.	Fungsi/Peruntukan	Luas (Ha)
	• Kawasan hutan lindung;	67.566,60
	• Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;	2.789,30
	• Kawasan perlindungan setempat;	2.904,53
	• Kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam;	74.816,80
	• Kawasan ekosistem air hitam; dan	13.719,02
	• Kawasan perairan.	12.124,36
	Total Kawasan Lindung	173.920,61
	4. Kawasan Budidaya	
	• kawasan peruntukan hutan produksi;	
	Hutan produksi terbatas (HPT)	60.592,01
	Hutan produksi tetap (HP)	79.968,06
	Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)	27.541,74
	• kawasan peruntukan hutan rakyat;	280,12
	• kawasan peruntukan pertanian;	89.546,33
	• kawasan peruntukan perikanan;	745,62
	• kawasan peruntukan pertambangan;	93.400,43
	• kawasan peruntukan permukiman;	26.155,65
	• kawasan peruntukan industri;	2.120,35
	• kawasan peruntukan pariwisata;	50,80
	• kawasan areal penggunaan lain;	54.428,25
	• kawasan holding zone.	
	Total kawasan Budidaya	266.727,55
	Total Kawasan Lindung dan Budidaya	294.269,29

Sumber: Perda RTRW Kab. Barito Selatan No. 4 tahun 2014

b. Kelistrikan

Listrik adalah infrastruktur yang mendorong aktivitas proses produksi sektoral maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat. Produksi listrik sebagian besar dihasilkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sebagian oleh non PLN.

Grafik 2.10
Statistik Pelanggan Listrik Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2013-2015



Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2017

Kondisi kelistrikan di Kabupaten Barito Selatan hingga tahun 2015 mempunyai daya terpasang sebesar 31,51 (juta VA) mengalami peningkatan dibandingkan kondisi tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 18,30 dan 24,41 (juta VA). Jumlah pelanggan mengalami peningkatan setiap tahunnya (lihat **Grafik 2,10**). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi kelistrikan Kabupaten Barito Selatan saat ini telah mengalami perbaikan..

3. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim berinvestasi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik eksternal maupun internal. Iklim investasi akan bergerak positif jika kondusivitas suatu wilayah terjaga dengan baik dan memiliki jaminan terhadap keamanan, kondisi demokrasi, hingga aspek sosial-budaya masyarakat. Oleh karena itulah, keberlangsungan dan kekonsistenan investasi yang masuk ke suatu wilayah menjadi penting adanya untuk menentukan kestabilan pertumbuhan ekonomi.



a. Kriminalitas

Tingginya kriminalitas di suatu wilayah akan memicu penurunan status kenyamanan dalam berinvestasi oleh para investor. Situasi wilayah akan menjadi damai dan aman jika pihak yang berwenang dapat meredam atau meminimalisir kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Barito Selatan. Secara umum, angka kriminalitas di Kabupaten Barito Selatan cukup fluktuatif meningkat dan menurun secara tidak konsisten.

Tabel 2.36
Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2016

Kepolisian Resort	2014	2015	2016
Polres Barito Selatan	70	99	109
Jenamas	4	5	3
Dusun Hilir	5	9	6
Karau Kuala	7	6	6
Dusun Selatan	28	20	13
Dusun Utara	11	6	12
Gunung Bintang Awai	8	7	5

Sumber : Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2017

4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan yang akan menentukan arah tujuan pembangunan daerah maupun nasional. Sebagai pondasi pelaksana pembangunan, setiap individu menjadi penentu dalam setiap pergerakan pembangunan melalui partisipasinya terhadap program kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itulah, kuantitas disertai kualitas sumber daya manusia akan menjadi salah satu fokus tujuan awal pembangunan untuk memperkuat pondasi dalam merealisasikan perencanaan pembangunan daerah.

a. Kualitas Tenaga Kerja

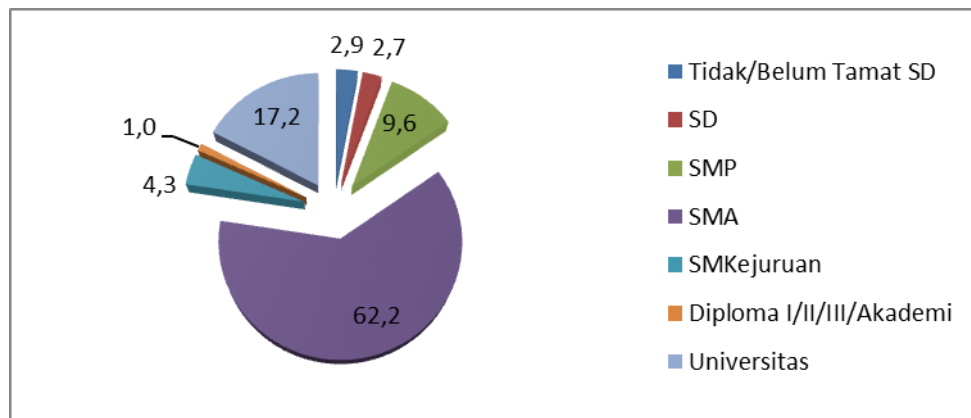
Tenaga kerja merupakan salah satu motor penggerak roda perekonomian suatu wilayah dimana memiliki andil dalam meningkatkan kualitas sistem pembangunan daerah. Semakin tinggi kualitas tenaga kerja di suatu wilayah, maka diasumsikan semakin tinggi pula kualitas perekonomian di wilayah tersebut. Meskipun begitu, tingginya kualitas tenaga kerja dalam hal ini tidak dipisahkan antara tenaga kerja yang berasal dari dalam wilayah maupun luar wilayah selama mereka bekerja untuk

peningkatan perekonomian daerah tersebut.

Sebagian penduduk yang bekerja di Kabupaten Barito Selatan yang pernah mengenyam pendidikan hingga SD sederajat yakni sebesar 2,7 persen, sedangkan sebesar 2,9 persen tidak pernah mengenyam pendidikan atau belum tamat SD. Selain itu, tenaga kerja yang memiliki pendidikan hingga SLTA sederajat juga cukup tinggi yakni mencapai 62,2 persen. Sedangkan tenaga kerja yang sekolah hingga perguruan tinggi sebesar 17,2 persen hingga sarjana dan diploma mencapai 1,0 persen (Grafik 2.11).

Grafik 2.11

Jumlah Pencari Kerja Tendaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016



Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2017

2.5 Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 2011-2016

Dalam merumuskan perencanaan sasaran, arah kebijakan, hingga program prioritas setiap tahapan pembangunan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah, pemerintah daerah perlu melihat kembali setiap hal yang pernah dilaksanakan pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan periode sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui evaluasi dan analisis terhadap pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah sebagaimana yang telah disepakati dan ditetapkan dalam RPJMD tersebut. Selain itu, evaluasi setiap tahapan pembangunan akan menyelaraskan setiap program dan kegiatan menuju ke arah satu koridor pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Selatan serta menunjang pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah nasional.



Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui indikator-indikator mana saja yang telah tercapai, mana yang belum tercapai, apa saja kendala dan hambatannya, dan apa yang harus disempurnakan, dihapus/diganti agar pencapaian target pembangunan lebih optimal. Selain itu melalui evaluasi ini juga akan menghasilkan identifikasi permasalahan baru yang timbul dalam pembangunan, faktor-faktor inefisiensi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat diantisipasi sejak dini dan dirumuskan respon yang sesuai dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan. Dengan demikian maka fokus dari evaluasi ini adalah untuk memberikan masukan bagi perbaikan-perbaikan strategi, kebijakan dan program/kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan 2017-2022, agar ke depan kinerja perencanaan pembangunan lebih berdayaguna dan relevan dengan tujuan pembangunan daerah.

Evaluasi terhadap RPJMD secara umum adalah melihat pencapaian target kinerja indikator makro yang merupakan bagian dari prioritas pembangunan terutama bidang yang menyangkut kesejahteraan masyarakat secara umum. Indikator makro yang menjadi target RPJMD periode sebelumnya (2011-2016), antara lain pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan pencapaian kinerja pembangunan yang diukur dari indikator-indikator makro pembangunan daerah, realisasi indikator hingga tahun 2015 menunjukkan trend peningkatan. Sebagai salah satu fokus utama pembangunan yakni pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2015 mencapai 5,59 persen dimana angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang mencapai 5,32 persen. Meskipun mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan perekonomian Kabupaten Barito Selatan belum mencapai target tahun 2015 (7,5 persen). Meskipun begitu, pertumbuhan ekonomi mencatat pertumbuhan yang positif dan cukup stabil serta memiliki potensi positif dalam pergerakan perekonomian baik secara regional maupun global.

Sementara itu, beberapa target pembangunan daerah lain juga belum tercapai sesuai harapan RPJMD seperti capaian inflasi sebesar 4,74 persen (target sebesar 3 persen), angka kemiskinan sebesar 5,91 persen (target sebesar 2 persen), tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,54 persen kondisi agustus 2015 (target sebesar 2,5 persen), dan lain



sebagainya.

Perlu digarisbawahi, perencanaan yang optimal bukan semata dinilai berdasarkan pada target pembangunan daerah terhadap masing-masing indikator yang dipaksakan serendah-rendahnya atau setinggi-tingginya. Namun, perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat mengoptimalkan segala potensi sumber daya daerah sebagai modal dasar pencapaian pembangunan dan memiliki visi realistis secara maksimal dalam mencapai suatu target kinerja. Oleh karena itu, pada perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 perlu dilakukan penajaman, penyempurnaan, revisi, hingga penggantian strategi, kebijakan, sampai pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada RPJMD periode sebelumnya untuk lebih mendorong kinerja pembangunan daerah yang tepat sasaran guna mewujudkan **Visi terwujudnya Barito Selatan sebagai daerah yang maju dan mandiri, sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera secara merata dan memiliki daya saing dilandasi iman dan taqwa.**

Salah satu hal yang cukup mendasar terkait dengan ketidaktercapaian target kinerja tersebut adalah lemahnya pengendalian dan evaluasi, baik dari sisi institusi, mekanisme maupun sumber daya manusia. Sebenarnya tim pengawalan pencapaian target indikator kinerja telah banyak dibentuk, antara lain Tim Pengawalan Pertumbuhan Ekonomi, Tim Pengendalian Inflasi, Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Tim Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan (Karahut), dan sebagainya. Namun tim-tim tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Guna efektifitas pencapaian target kinerja RPJMD tahun 2017-2022, akan dilakukan perbaikan dalam pengendalian dan evaluasi, sebagaimana tertuang dalam kaidah pelaksanaan RPJMD pada Bab X.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2.37
Target dan Realisasi Kinerja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA (%)											
		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9	5,32	6,2	5,32	6,4	5,24	6,57	5,31	6,77	5,54	6,89	5,72*)
2.	Laju Inflasi provinsi (%)	5,37	4,55	5,23	5,85	5,02	6,79	4,85	7,07	4,75	4,74	4,55	3,18**)
3.	Angka Kemiskinan (%)	8,14	7,56	7,4	7,26	6,7	6,26	6,2	6,13	5,9	5,91	5,4	5,66***)
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	43	2,55	39	3,08	36	3,00	34	3,77	32	9,99	3,0	3,67****)

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2016

Keterangan: *) : pertumbuhan ekonomi triwulan II-2016 (year on year)

**) : laju inflasi bulan September 2016 (year on year)

***) : angka kemiskinan bulan Maret 2016

****) : tingkat pengangguran terbuka bulan Februari 2016



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Program/kegiatan yang mengacu pada empat strategi prioritas nasional yakni *pro poor*, *pro growth*, *pro job*, dan *pro environment*, perlu terus dilanjutkan pada perencanaan pembangunan menengah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022. Berdasarkan data capaian di atas, meskipun realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 belum melebihi target, harapan kondisi perekonomian saat ini secara tidak langsung dapat menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran sebagaimana yang ditargetkan dapat terpenuhi. Selain itu, secara umum memang laju inflasi, kemiskinan, maupun pengangguran tidak mencapai target, akan tetapi jika dilihat pada level nasional maka capaian pembangunan tersebut sudah dapat dikatakan luar biasa dari segi kuantitas nilai. Namun perlu ditekankan kembali, dari segi kualitas harus terus diperhatikan pula sebagai penjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Selatan.

Selain strategi prioritas nasional, fokus utama dalam evaluasi pembangunan adalah pencapaian indikator sasaran perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang dapat terlihat pada tabel berikut:



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (2016)	Realisasi	Keterangan
1	Revitalisasi dan terciptanya klaster ekonomi unggulan di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota	1.1 Teridentifikasinya klaster ekonomi unggulan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.	PDRB	6,77 %	7,01 %	
		1.2 Tumbuhnya klaster ekonomi unggulan daerah yang belum berkembang.	Jumlah cluster ekonomi/Industri kecil & menengah	4.500 unit usaha	4.678 unit usaha	
2	Terselenggaranya penataan ruang yang memerhatikan keberlanjutan sumberdaya wilayah.	2.1 Terwujudnya tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah dan mengarusutamakan lingkungan.	Perda RTRWP ditetapkan tidak bertentangan dengan RPJMD	1	1	Perda No. 5 Tahun 2015 tentang RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035
		2.2 Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup.	Data kualitas udara dan air	UDARA = 81 AIR = 52		
			Dokumen KLHS, RPP LH, SLHD, NSDA telah terselesaikan			
			Rekomendasi Komda REDD dan Dewan Daerah Perubahan Iklim			
3	Terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau	3.1 Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.	Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	SD: 75,16 % SMP: 89,46 % SMA: 92,84 %	SD: 75,16 % SMP: 82,15 % SMA: 92,53 %	Data yang tersedia bukan jumlah guru (orang), tetapi persentase
			Jumlah tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (2015)	Realisasi	Keterangan
		3.2 Meningkatnya kualitas pendidikan	Rupiah per-pendidik			
			Rupiah per-tenaga kependidikan			
			Angka Partisipasi Kasar (%)	SD: 119,50 SMP: 96,82 SMA: 70,09	SD: 114,76 SMP: 95,94 SMA: 70,70	
			Angka Partisipasi Murni (%)	SD: 99,04 SMP: 84,71 SMA: 67,24	SD: 98,54 SMP: 75,76 SMA: 52,36	
			Rasio murid terhadap guru (%)		SD: 46,00 SMP: 15,00 SMA: 11,00	
			Angka putus sekolah		7-12 thn: 0,16 13-15 thn: 6,50 16-18 thn: 33,28	
			Angka melek huruf (%)	99,80	98,90	
4	Tersedianya akses infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok wilayah.	4.1 Tersedianya sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah rumah dinas tenaga pendidik (SMA)			
			Jumlah sekolah dengan akses jalan Roda 4			
		4.2 Tersedianya akses infrastruktur menuju pusat-pusat pendidikan.	Jarak sekolah SD/SMP/SMA dari permukiman			
5	Meningkatnya sistem layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau.	5.1 Tersedianya standar pelayanan kesehatan.	Tersedianya Regulasi standar pelayanan kesehatan			
			Rasio dokter per satuan penduduk	25:100.000	23,8:100.000	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (2016)	Realisasi	Keterangan
		5.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan.	Rasio tenaga perawat per satuan penduduk	168:100.000	176:100.000	
			Rasio Tenaga Bidan per satuan penduduk	108:100.000	201:100.000	
6	Tersedianya akses infrastruktur Kesehatan dasar hingga ke pelosok wilayah.	6.1 Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan	Rasio puskesmas per satuan penduduk	2,4 : 30.000	2,7 : 30.000	
			Rasio Tempat Tidur rumah sakit per satuan penduduk	0,76 : 1.000	0,84 : 1.000	
		6.2 Tersedianya akses infrastruktur kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Panjang jalan fungsional/ waktu tempuh (jam)/biaya transport (Rp.)			
			Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization	80%	77,4%	
7	Terwujudnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan.	7.1 Terwujudnya sistem transportasi, informasi dan komunikasi wilayah	Dokumen TATRAWIL	1 dokumen	1 dokumen	
		7.2 Terwujudnya jaringan transportasi serta komunikasi dan Informatika	Sarana penunjang jaringan transportasi, komunikasi dan informatika	60%	80%	
		7.3 Terwujudnya peningkatan kelas bandara Tjilik Riwt dan Bandara penunjang di Kalimantan Tengah	Ditetapkannya bandara Tjilik Riwt sebagai bandara embarkasi haji antara	Tahun 2012	Tahun 2012	
8	Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.	8.1 Terpeliharanya dan terbangunnya infrastruktur pengairan makro dan mikro, serta pencetakan sawah.	Luas pengairan/irigasi	109.288 Ha	408.452 Ha	
			Luas pencetakan sawah	1000 Ha	693,37 Ha	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (2016)	Realisasi	Keterangan
9	Tersedianya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.	9.1 Tersedianya payung hukum bidang ketenagalistrikan dan energi	Perda/Perkada tentang kelistrikan dan energi	1 perda	1 perda	Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi
		9.2 Tersedianya sumber daya energi yang terjangkau.	Jumlah dan jenis energi alternatif yang dikembangkan	1.000 unit	264 unit	
		9.3 Tersedianya sarana dan prasarana kelistrikan.	Pembangunan PLTU/PLTH/PLPH	90 %	86,25 %	
			Jumlah rumah di daerah yang dialiri listrik (unit)	359.574	628.061	
			Rasio Ketersediaan Daya Listrik	150 %	300 %	
			Rasio desa berlistrik	79,5	74,8	
10	Terselenggaranya sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu	10.1 Tersedianya regulasi dan fasilitasi yang mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan.	Perda/Perkada bidang ekonomi			
		10.2 Penguatan kelembagaan ekonomi rakyat	Persentase koperasi aktif	85%	73,03%	
			Jumlah UKM non BPR/LKM	42.500	298.979	
			Jumlah BPR/LKM	100	243	
		10.3 Meningkatkan kemampuan managerial pelaku ekonomi kerakyatan	Jumlah pelatihan			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target (2016)	Realisasi	Keterangan
		10.4 Terciptanya produktifitas pada sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal	Pertumbuhan PDRB	7,5%	7,01%	
11	Terwujudnya soliditas antar kelompok masyarakat	14.1 Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai dan sejahtera di bumi Tambun Bungai	Angka kriminalitas	2,079	15,71	
			Jumlah unjuk rasa	0	0	
			Sikap toleransi	100 %	100 %	.
		14.2 Meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap adat istiadat lokal.	Jumlah grup kesenian	188	195	
			Jumlah gedung kesenian	17	19	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menghasilkan suatu bentuk capaian pembangunan daerah. Dengan melihat capaian pembangunan maka dapat terlihat secara nyata kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga capaian pembangunan dapat menjadi suatu dasar data dan informasi dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, melihat permasalahan daerah, kemudian permasalahan tersebut dipecahkan dengan tepat melalui kebijakan daerah. Dengan melihat pentingnya capaian pembangunan tersebut maka disajikan data capaian sasaran pembangunan Kabupaten Barito Selatan tahun 2011 – 2016 pada tabel 2.40 sebagai berikut:

Tabel 2.39

Pencapaian Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aspek Kesejahteraan							
I.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Indikator Makro Pembangunan						
1.1	Pertumbuhan PDRB (%)	6,47	6,77	6,69	7,37	6,21	7,01
1.2	Laju inflasi provinsi (%)	9,51	4,55	5,85	6,79	7,07	4,74
1.3	PDRB per kapita (Juta Rp.)	16,5	21,81	23,75	26,63	36,83	40,14
1.4	Angka Kemiskinan (%)	6,77	6,64	6,19	6,23	6,07	5,91
1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,14	2,55	3,08	3,0	3,24	4,54
1.6	IPM	65,96	66,38	66,66	67,41	67,77	68,53
1.7	Indeks Gini	0,291	0,326	0,321	0,337	0,343	0,317



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

II.	Kesejahteraan Sosial						
1	Pendidikan						
1.1	Angka Melek Huruf (%)	97,78	97,84	97,88	97,99	98,90	tad
1.2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,62	7,68	7,73	7,79	7,82	8,03
1.3	Angka Harapan Lama Sekolah	11,09	11,15	11,22	11,71	11,93	12,22
2	Kesehatan						
2.1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	970	861	737	858	858	858
2.2	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	68,98	69,09	69,18	69,29	69,39	69,54
2.3	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	16,8	16,77	16,5	14,4	19,6	19,6
3	Ketenagakerjaan						
3.1	Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	96,12	97,45	96,83	98,18	96,76	95,46
Indikator		Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Seni Budaya dan Olahraga							
Kebudayaan							
Jumlah grup kesenian/ sanggar seni (buah)		168	343	343	343	343	336
Jumlah gedung (unit)		10	19	19	19	19	19
Pemuda dan Olahraga							
Jumlah Klub olahraga (buah)		50	0	0	26	46	46
Jumlah gedung olahraga (unit)		15	15	15	15	16	16
Aspek Pelayanan Umum							
Pelayanan Urusan Wajib							
Pendidikan							
Pendidikan dasar:							
SD/MI							
Angka partisipasi sekolah		98,70	98,84	99,20	99,22	99,25	99,26



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	89,04	98,87	99,60	99,18	94,12	94,12
Rasio guru terhadap murid	1:13	1:15	1:17	1:19	1:25	1:25
Prosentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%)	35,45	45,65	55,95	65,79	75,16	75,16 ***
Angka partisipasi murni dan paket A	96,63	92,15	96,03	97,41	98,13	98,54
Angka partisipasi kasar	117,70	104,47	109,19	110,83	112,01	114,76
SMP/MTs						
Angka partisipasi sekolah	84,46	84,59	85,05	85,05	85,10	85,61
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	45,18	69,63	67,18	67,35	68,64	58,64
Rasio guru terhadap murid	1:15	1:16	1:17	1:18	1:22	1:22
Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Prosentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%)	55,00	59,16	68,8	79,53	82,15	82,15
Angka partisipasi kasar dan paket B	74,60	90,19	79,20	80,85	84,89	95,94
Angka partisipasi murni	61,30	66,62	65,11	68,15	75,40	75,76
Pendidikan menengah						
Angka partisipasi sekolah	54,50	55,75	55,06	64,74	77,50	77,50
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	45,18	69,63	67,18	67,35	58,64	58,64
Rasio guru terhadap murid	1:14	1:16	1:17	1:18	1:20	1:20
Prosentase guru SMA/SMALB/SMK berkualifikasi S1/D4, dan bersertifikasi (%)	65,23	74,58	80,14	85,46	92,53	92,53
Prosentase sekolah SMA/SMALB/ SMK melaksanakan e-pembelajaran (e-learning) - (%)	5	8	12	14	16	16
Prosentase APK PLB setara SMALB (%)	53,33	55,89	57,14	58,23	59,43	59,58
Angka partisipasi kasar	57,61	58,32	60,65	58,85	67,74	70,70



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Angka partisipasi murni	39,62	44,99	43,55	45,43	51,75	52,36
Kesehatan						
Rasio posyandu per satuan balita						
Rasio puskesmas per satuan penduduk	2,34	2,34	2,70	2,70	2,70	2,70
Rasio pustu per satuan penduduk			0,44	0,44	0,43	0,38
Rasio distribusi tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk	0,64	0,65	0,70	0,75	0,78	0,84
Rasio dokter per satuan penduduk	10	10	12	14	18	25
Rasio tenaga Bidan per satuan penduduk	144	155	165	187	195	201
Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	38,9	40	40	40,2	40,3	42
Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Umur Harapan Hidup (UHH) – (Tahun)	68,98	69,09	69,18	69,29	69,39	69,54
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	7	10	5	6	5	6
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	254	50	390	96	96	89
Prevalensi Gizi Buruk pada Anak (%)	0,17	0,15	0,13	0,1	0,08	0,08
AKABA per 1000 Balita	12	14	11	13	12	13
Pekerjaan Umum						
Panjang jalan dalam kondisi baik (Km)	1.084,35	1.431,92	1.694,71	1.647,08	1.595,76	1.635,51
Rasio Jaringan Irigasi dan rawa (Ha)	224,02	33,02	34,1	34,75	34,80	34,80
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,18	0,95	0,25	0,26	0,27	0,27
Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	24,01	24,01	tad	44,05	44,05	35,38
Rasio tempat pemakaman umum per satuan desa/kelurahan ****	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	1:1,7	1:1,9	1:1,6	0,78	0,79	0,79
Rasio rumah layak huni	1 : 4,14	1 : 4,33	1 : 4,11	1 : 4,10	1 : 4,10	1 : 3,9
Rasio permukiman layak huni (%)	95,00	76,00	76,50	77,00	77,10	70,45



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km)	1.642,96	1.643,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) ~ (Km)	11,057	11.445,63	12.366,00	11.869,48	11.869,48	11.869,48
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) (Km)	6.000,00	4.449,00	4.119,00	4.202,00	4.230,00	4.230,00
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (Km)	100,00	64,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (Km)	5,00	4,98	4,80	4,78	4,60	4,60
Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar****						
Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (km)	35,81	14,45	5,04	2,70	2,75	2,75
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota****						
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	35.503,00	68.538,00	68.300,00	90.700,00	91.500,00	91.500,00
Lingkungan Pemukiman (Ha)	1.607.113	1.421.150	1.501.204	1.581.258	1.581.258	1.581.258
Perumahan						
Rumah tangga pengguna air bersih (Unit)	128.487	598.134	695.169	695.169	695.169	609.695
Rumah tangga pengguna listrik (Unit)	284.310	430.295	591.385	591.385	600.212	600.212
Rumah tangga bersanitasi (%)	24,01	82,61	85,10	87,59	88,1	88,1
Lingkungan pemukiman kumuh (%)	5	13,2	11,5	9,9	9,7	10
Rumah layak huni (Unit)	544,231	519,191	556,473	566,139	570,154	570,154
Penataan Ruang						



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	7	7	4,99	4,99	5	5
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan****						
Ruang publik yang berubah peruntukannya****						
Perencanaan Pembangunan						
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	1	-	-	-	-	-
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	-	1	-	-	-	-
Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	1	1	1	2	2	2
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1	1
Perhubungan						
Jumlah arus penumpang angkutan umum (PnP)	119.511.749	157.647.630	157.822.630	157.922.630	160.281.946	162.779.225
Load Factor Angkutan Jalan (%)	50	60	60	60	60	70
Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)	21.867	23.080	24.537	25.337	28.660	30.278
Jumlah Perusahaan Angkutan Laut (Unit)	191	210	213	215	218	221
Jumlah Angkutan Udara (Rute Regional dan Nasional) (Armada)	11	15	22	28	32	34
Jumlah Angkutan Jalan (AKAP & AKDP) (Unit)	200	244	113	113	113	113
Jumlah Angkutan Sungai (Unit)	4781	60	75	75	83	50



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Jumlah Terminal Angkutan Jalan (Type A dan B) (Buah)	9	9	9	9	9	9
Jumlah Bandara (Buah)	9	9	9	9	9	9
Jumlah Dermaga Sungai (Buah)	118	118	146	149	232	234
Jumlah Pelabuhan Laut (Buah)	10	13	13	19	19	19
Kepemilikan KIR angkutan umum (Unit)	21.867	23.080	24.537	25.337	28.660	30.278
Lama pengurusan uji kelayakan angkutan umum (KIR) (Hari)	2	2	2	2	2	2
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp. Ribu)	60	60	75	75	75	85
Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit)	673	773	1.023	1.863	2.313	2.948
Pemasangan Rambu Sungai (Unit)	542	1.000	1.050	1.250	1.385	1.395
Pemasangan Rambu SBNP (Unit)	70	70	90	90	90	102
Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lingkungan Hidup						
Perbaikan Peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	22	26	19	8	8	8 ***
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup *	50,38	50	49	69,53	70,37	70,37 ***
Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (Jumlah Kabupaten/Kota)	14	14	14	14	14	14
Peningkatan kualitas akses informasi SDA, keanekaragaman hayati dan LH	7	8	9	11	14	14
Pemantauan, pengendalian dan pendataan kawasan ekosistem pesisir dan laut (jumlah lokasi)	6	2	2	2	0	6
Penyelesaian perselisihan/sengketa lingkungan hidup (%)	50	21	9	19	18	25
Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (jumlah Kabupaten/kota)	1	1	2	14	14	14



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Ijun Usaha Pertambangan (IUP) yang menerapkan Good Mining Practice (GMP)*		-	-	-	-	-	12
Pertanahan							
Persentase luas lahan bersertifikat (%)		6,23	6,23	6,23	6,23	6,23	6,23
Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Ha)*		6,7	6,7	6,7	6,7	28,08	37,60
Penyelesaian kasus tanah Negara (jumlah kasus)		71					
Penyelesaian Izin lokasi ****							
Kependudukan dan Catatan Sipil							
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk		54	60	66	67	68	80
No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
10.2	Rasio bayi berakte kelahiran	45	46	47	48	50	54
10.3	Rasio pasangan berakte nikah	-	45	47	47,5	48	57
10.4	Kepemilikan KTP (orang)	968.345	1.162.568	1.265.238	1.315.178	1.341.630	1.349.663
10.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	-	31	43	50	55	57
10.6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Manual	Digital Online	Digital Online	Digital Online	Digital Online	Digital Online ***
10.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	12 Kab/Kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	8,04	7,19	8,31	9,14	8,49	8,00
11.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	9,22	11,04	9,71	12,59	16,78	15,18
11.3	Rasio KDRT	0,0052	0,0054	0,0106	0,0066	0,0210	0,0306



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

11.4	Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%)	0,57	0,56	0,58	11,23	0,53	0,53
11.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	52,01	56,16	51,28	49,41	49,97	35,66
11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	139	106	189	123	135
11.7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*	68,62	69,48	70,35	68,61	77,90	-
11.8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)*	88,02	88,11	88,13	88,47	89,33	-
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera						
12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,79	1,06	1,00	1,00	0,80	1,1
12.2	Rasio akseptor KB	22,73	79,28	74,69	77,15	76,47	77,91
12.3	Cakupan peserta KB aktif (Orang)	298,91	394,46	355,421	384,547	353,322	376,606
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	191,474	209,279	194,108	188,555	188,730	183,937
No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
13	Sosial						
13.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (Unit)	100	4	4	4	4	4
13.2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial (Orang)	1.275	953	973	550	614	1078
13.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Kasus)	120	105	140	175	120	174
14	Ketenagakerjaan						
14.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	534	tad	tad	tad	tad	tad
14.2	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Kasus)	140	3	20	4	57	172
14.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,86	72,89	69,90	72,63	68,56	71,11
14.4	Pencari kerja yang ditempatkan (Orang)	3,142	2,164	1,400	406	1,738	1,570
14.5.	Keselamatan dan perlindungan	174,975	145,259	200,653	216,634	215,069	27,491



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

14.6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (Kasus)	tad	0	0	0	tad	tad
15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
15.1	Persentase koperasi aktif (%)	74,34	71,15	72,80	78,23	73,03	73,03
15.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (Unit)	41,613	213	216	460	298.979	299.979
15.3	Jumlah BPR/LKM (Unit)	63	12	17	17	243	243
15.4	Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	274,788	298,979	298,979	298,979	298.979	298.979
16	Penanaman Modal						
16.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (Unit)	372	380	420	442	468	473
16.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (juta rupiah)	17.791.499,66	22.341.369,59	36.433.566,48	39.673.132,18	46.360.379,83	33.138.153,41
	- PMDN (juta rupiah)	8.109.436,82	9.191.372,19	24.076.123,88	25.679.488,08	25.880.318,24	27.992.647,91
	- PMA (US \$ Ribu)	17.959.019,879	17.959.519,87	2.177.886,32	1.948.949,47	3.278.674,07	1.088.548,80
No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
16.3	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	25,6	26	29	31	39	32
16.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	4,08	25,57	63,08	8,79	16,96	28,52
17	Kebudayaan						
17.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	2	1	2	1	2	2
17.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	2	2	2
17.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)	490	487	487	487	490	490
18	Kepemudaan dan Olahraga						
18.1	Jumlah organisasi pemuda	62	62	62	65	66	66



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

18.2	Jumlah organisasi olahraga	42	42	42	42	43	42
18.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	50	67	65	63	40	35
18.4	Jumlah kegiatan olahraga	27	30	35	45	76	60
18.5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (buah)	33	33	34	37	37	37
18.6	Lapangan olahraga (lapangan Volley, sepak bola, bulu tangkis, basket) (buah)	207	210	289	289	289	289
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						
19.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (Ormas/LSM)	4	4	5	4	8	6
19.2	Kegiatan pembinaan politik daerah (Parpol)	1	1	2	1	4	6
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
20.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	50	50	55	60	68	133
No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2
20.2	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (Orang)	30	35	59	60	65	65
20.3	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	10	12	12	12	12	12
20.4.	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah****						
20.5	Penegakan Perda (buah)	2	3	5	5	5	3
20.6	Cakupan patroli petugas Satpol PP	14	14	30	30	30	48
20.7.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	0	0	0	3	5	5*
20.8.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (Orang)	11.621	11.621	13.050	13.186	15.827	15.827***



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

20.9.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten****						
20.10	Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran****						
20.11	Penyampaian Informasi Kebencanaan melalui kegiatan Percetakan Brosur dan Penggandaan Peraturan Penanggulangan Bencana (Paket Kegiatan)*	0	0	0	1	1	1
20.12	Pengadaan Paket Logistik (Paket Kegiatan)*	0	0	0	1	1	1
20.13	Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan (Paket Kegiatan, Posko Siaga Bencana) *	0	1	1	1	1	1
20.14	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (paket)	210					
20.15	Sistem Informasi Manajemen Pemda****						
20.16	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	-	-	-	-	70,19	77,2
No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2014	2013	2014	2015	201
20.17	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) *	71,10	76,28	65,78	64,15	79,00	73,46
20.18	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) *	D	C	C	CC	B	B
20.19	Nilai Inovasi Pelayanan Publik *	-	-	-	-	-	A
20.20	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *	-	-	-	-	31,46	47,52
20.21	Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) *	397	444	593	457	484	506
20.22	Perda Kelembagaan Organisasi Daerah *	9	9	9	9	9	9
21	Ketahanan Pangan						
21.1	Regulasi ketahanan pangan (Pergub)	2	1	2	3	1	1



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

21.2	Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton)	93.330	66.083	142.805	169.891	174.185	213.614
21.3	Penguatan Cadangan Pangan (%) *	-	27,20	28,02	36,80	32,65	34,65
21.4	Penanganan Daerah Rawan Pangan (%) *	-	35,96	21,92	16,17	21,31	33,33
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
22.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	2,7	3	4	5	6	6
22.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	2,8	1,99	2,30	2,35	2,37	2,37
22.3	Jumlah LSM (buah)	150	150	150	150	150	150
22.4	LPM Berprestasi (%)	6,73	3,6	4,8	6,0	tad	6,0 **
22.5	PKK aktif (Unit)	1470	1480	1492	1565	1428	1.428
22.6	Posyandu aktif (Unit)	110	2141	2200	2236	2210	2210
22.7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (Paket)	562	562	562	562	562	562
22.8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (Paket)	260	260	260	260	260	260
No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	201
23	Statistik						
23.1	Buku " Kalimantan Tengah Dalam Angka"	1	1	1	1	1	1
23.2	Buku "PDRB Kalimantan Tengah"	2	2	2	2	2	2
24	Kearsipan						
24.1	Pengelolaan arsip secara baku (lembar)	4.650	5.430	6.210	6.990	7.760	7.760
24.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (Orang)	72	83	94	105	116	127
25	Komunikasi dan Informatika						
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi*****						
25.2	Desa dering/Telepon Pedesaan (Unit)	1131	1131	1131	1131	1131	1131
25.3	Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)	132	132	132	132	132	132



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

25.4	Warung masyarakat Informasi	1	0	0	0	0	0
25.5	Pusat Komunitas Kreatif (buah)	0	1	1	1	1	1
25.6	M-CAP (Mobile Capacity Acces Point)	1	1	1	1	1	1
25.7	M-PLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) (unit)	0	98	98	98	98	98
25.8	Data Center (buah)	1	1	1	1	1	1
25.9	Media Center (buah)	1	1	1	1	1	1
25.10	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,0000653	0,0001621	0,0002311	0,0003011	0,0001011	0,0001011
25.11	Jumlah surat kabar nasional/lokal	-	-	-	-	13	13
25.12	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	59/16	23/2	23/2	23/2	66/1	66/1
25.13	Web site milik pemerintah daerah (buah)	15	0	0	15	15	15
25.14	Pameran/expo terkait Kominfo	-	-	-	-	-	-
26	Perpustakaan						
No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
26.1	Jumlah perpustakaan (Unit)	124	215	227	227	227	227
26.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (Orang)	269.366	279.366	289.366	296.366	309.266	319.366
26.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Jumlah Judul)	85.521	86.65	91.65	96.75	105.315	106.850
II.	Pelayanan Urusan Pilihan						
1	Pertanian dan Peternakan						
1.1	Luas tanam tanaman pangan						
1.1.1	Padi sawah (Ha)	141.582	159.256	183.652	182.634	176.171	198.224
1.1.2	Padi ladang (Ha)	66.602	86.177	102.461	63.915	71.798	78.224
1.1.3	Jagung (Ha)	4.712	5.774	4.404	3.715	4.729	6.224



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

1.1.4	Kedelai (Ha)	3.465	2.751	1.896	1.595	1.463	1.
1.1.5	Kacang Tanah (Ha)	880	694	667	511	544	431
1.1.6	Kacang Hijau (Ha)	222	150	237	91	95	51
1.1.7	Ubi Kayu (Ha)	6.320	4.216	3.949	3.666	3.211	2.
1.1.8	Ubi Jalar (Ha)	1.429	1.528	1.587	1.328	1.240	977
1.2.	Luas Panen tanaman pangan						
1.2.1	Padi sawah (Ha)	147.495	148.068	168.733	169.651	186.509	183.
1.2.2	Padi ladang (Ha)	100.082	66.093	83.054	77.822	55.979	71.
1.2.3	Jagung (Ha)	3.247	3.195	2.752	2.062	2.594	2.
1.2.4	Kedelai (Ha)	2.397	2.443	1.448	1.413	1.166	1.
1.2.5	Kacang Tanah (Ha)	924	689	687	564	470	465
1.2.6	Kacang Hijau (Ha)	206	125	210	127	70	52
1.2.7	Ubi Kayu (Ha)	6.488	4.181	3.939	3.406	3.608	3.
1.2.8	Ubi Jalar (Ha)	1.350	1.205	1.339	1.292	1.270	1.
1.3	Produktivitas tanaman pangan						
		Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2
1.3.1	Padi sawah (Ku/Ha)	30,74	31,62	33,77	37,43	38,03	39
1.3.2	Padi ladang (Ku/Ha)	19,69	21,50	22,36	22,84	23,02	22
1.3.3	Jagung (Ku/Ha)	28,78	28,82	28,88	25,30	31,37	32
1.3.4	Kedelai (Ku/Ha)	11,53	11,56	11,74	11,92	11,98	12
1.3.5	Kacang Tanah (Ku/Ha)	11,17	11,20	11,22	11,24	11,26	11
1.3.6	Kacang Hijau (Ku/Ha)	8,25	8,24	8,24	8,27	8,43	8,46
1.3.7	Ubi Kayu (Ku/Ha)	118,17	118,33	118,38	119,68	120,13	15
1.3.8	Ubi Jalar (Ku/Ha)	70,99	71,12	71,14	71,27	71,24	9
1.4	Produksi tanaman pangan						
1.4.1	Padi sawah (Ton)	453.341	468.168	569.818	634.920	709.357	725



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

1.4.2	Padi ladang (Ton)	197.075	142.068	185.689	177.732	128.850	167
1.4.3	Jagung (Ton)	9.345	9.208	7.947	5.217	8.138	8
1.4.4	Kedelai (Ton)	2.764	2.823	1.700	1.684	1.397	1
1.4.5	Kacang Tanah (Ton)	1.032	772	771	634	529	523
1.4.6	Kacang Hijau (Ton)	170	103	173	105	59	44
1.4.7	Ubi Kayu (Ton)	76.669	49.475	46.630	40.762	43.342	45
1.4.8	Ubi Jalar (Ton)	9.583	8.570	9.525	9.208	9.048	9
1.5	Luas Panen Tanaman Hortikultura						
1.5.1	Buah-Buahan (Ha)	6.202.496	5.574.390	4.290.025	3.346.216	4.090.695	3.185
1.5.2	Sayuran (Ha)	9.754	10.522	11.191	11.799	11.569	31
1.5.3	Tanaman Hias (M2)	18.370	16.843	17.889	13.922	28.413	17
1.5.4	Tanaman Obat (M2)	458.292	587.888	728.056	646.657	778.822	709
1.6	Produksi Tanaman Hortikultura						
1.6.1	Buah-Buahan (Ku)	1.123.246	1.284.548	1.087.063	1.048.571	1.308.120	1.152
1.6.2	Sayuran (Ku)	297.231	293.169	278.442	333.234	334.636	319



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016 ¹
1.6.3	Tanaman Hias (Tangkai)	81.234	68.571	79.040	83.928	66.076	50.255
1.6.4	Tanaman Obat (Kg)	1.440.833	1.364.016	1.888.523	1.694.110	1.731.006	1.467.206
1.7	Populasi Ternak						
1.7.1	Sapi Potong (Ekor)	72.180	42.246	59.385	51.92	65.197	71.445
1.7.2	Kerbau (Ekor)	5.988	6.413	6.778	9.809	10.466	11.463
1.7.3	Kambing (Ekor)	47.185	35.260	46.674	43.463	39.595	43.368
1.7.4	Domba (Ekor)	1.803	990.000	1.884	2>341	2.004	1.502
1.7.5	Babi (Ekor)	192.481	132.352	183.532	193.900	182.442	190.016
1.7.6	Ayam Buras (Ekor)	3.897.909	1.950.748	3.028.271	3.167.218	2.663.843	2.512.553
1.7.7	Ayam Ras Petelur (Ekor)	62.440	19.511	37.330	40.900	94.912	111.776
1.7.8	Ayam Ras Pedaging (Ekor)	4.455.671	2.936.947	5.225.358	4.892.196	7.274.673	7.902.412
1.7.9	Itik (Ekor)	252.503	143.360	281.063	261.318	271.014	255.056
1.8	Produksi Ternak						
1.8.1	Sapi Potong (Ton)	3.830,54	3.991,91	4.154,17	4.277,19	3.843,99	4.061,07
1.8.2	Kerbau (Ton)	-	26,40	28,05	44,95	56,14	67,15
1.8.3	Kambing (Ton)	117,41	214,64	320,13	338,68	315,25	343,99
1.8.4	Domba (Ton)	216,43	1,20	2,98	4,25	9,97	8,83
1.8.5	Babi (Ton)	4,81	2.021,00	2.374,77	433,64	1.548,74	2.074,23
1.8.6	Ayam Buras (Ton)	3.614,86	4.470,06	2.069,82	2.125,02	2.017,86	1.903,26
1.8.7	Ayam Ras Petelur (Ton)	48,91	33,19	29,28	40,90	21,07	34,58
1.8.8	Ayam Ras Pedaging (Ton)	12.580,97	17.654,41	15.566,32	7.338,29	10.912,01	11.487,45
1.8.9	Itik (Kg)	145,92	285,17	148,94	143,12	148,43	139,69



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.9.	Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%)	2,46	2,17	2,20	2,13	2,20	2,33
1.10.	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	1,49	1,42	1,48	1,50	1,52	1,59
1.11	Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kalteng (%)	4,01	1,65	2,62	3,38	6,75	5,32
1.12	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%) ****	28,2***					
1.13	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	14,90	14,70	13,99	13,73	14,49	13,41
1.14	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	12,21	11,70	12,12	12,15	12,15	12,15 **
1,15	Cakupan bina kelompok petani****						
2	Perkebunan						
2.1	Peningkatan produktifitas perkebunan dari potensi produksi di lapangan (%)	75	14	14	14	14	19
2.2	Penerimaan devisa ekspor per tahun dari komoditas perkebunan (US\$ Juta)	80	255	95	90	95	112
2.3	Peningkatan jumlah SDM perkebunan berkualitas (%)	15	6	9	7	7	7
2.4	peningkatan pendapatan petani kebun (Capaian rata-rata US\$/KK/Tahun)	1.500-2.000	700	650	700	600	600
2.5	Penyerapan tenaga kerja baru di sektor perkebunan (jumlah tenaga kerja baru/tahun)	15.000	23.703	24.798	20.533	20.600	31.400
2.6	Peningkatan pertumbuhan sub sektor sektor perkebunan (%)	5,49***	12,95	5,15	5,25	5,25	7,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

2.7	Penumbuhan sentra sentra komoditas wilayah pengembangan perkebunan (jumlah sentra pengembangan perkebunan)	13	3	3	3	3	3
No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.8	Peningkatan Pemanfaatan Lahan Terlantar (Ha/Tahun)	150	150	150	150	150	150
3	Kelautan dan Perikanan						
3.1	Jumlah Produksi Perikanan budidaya (Ton)	25.659	30.686,19	51.236,29	53.159	60.848,59	68.693,7
3.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	101.999	96.428,8	90.675,40	105.560,80	104.082,2	130.526,1
3.3	Konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	35,72	44,36	44,36	45,89	46,19	46,35
3.4	Jumlah volume produk olahan hasil perikanan (Ton) *	9.523	15.17	21.421	25.550	28.422	28.510
3.5	peningkatan produksi benih ikan (Juta ekor)	25.667.000	39.797.000	52.128.000	42.868.000	54.020.000	55.620.000
3.6	Nilai Tukar Nelayan (%) *	106,63	104,05	107,14	104,04	104,64	103,85
3.7	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%) *	2,48	2,48	2,62	2,59	2,46	2,59
4	Kehutanan						
4.1	Penataan kawasan hutan (Jumlah peta penataan kawasan hutan)	-	1	1	1	0	0
4.2	Pendataan sumberdaya hutan (jumlah dokumen)	-	2	2	1	1	1
4.3	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Hutan (jumlah dokumen laporan)	27	50	50	50	50	60
4.4	Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan (unit)	-	40	56	56	60	60



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

4.5	Pengendalian pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan dari hutan alam (jumlah dokumen)	1	-	1	2	2	0
4.6	Pembedayaan masyarakat local di sekitar kawasan hutan (orang)	30	30	30	30	30	40
No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2010-2015					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4.7	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (paket kegiatan)	1	1	1	1	1	1
4.8	Pencegahan, pengendalian dan penindakan illegal logging (frekuensi pengamanan hutan)	1	1	1	1	2	2
4.9	Penghijauan dan reboisasi (jumlah batang pohon bibit)	-	5.320	18.716	25.000	45.000	36.000
4.10	Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan (jumlah orang)	-	40	40	40	40	40
5	Pariwisata						
5.1	Kunjungan wisata - Wisatawan Nusantara - Wisatawan Mancanegara						
5.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	1,32	1,54	1,54	1,50	1,50	1,50
5.3	Tingkat Hunian Hotel Kabupaten Barito Selatan *	29,14	55,06	53,6	54,47	55,42	54,84
6	Perdagangan						
6.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	10,97	10,73	10,53	10,04	11,33	11,64
6.2	Ekspor Bersih Perdagangan (US \$)	148.559.164	1.254.690.000	1.017.670.000	1.320.000.000	990.000.000	990.000.000
6.3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal/Penerbitan SIUP	3.889	4.593	3.733	4.342	6.296	6.296
7	Perindustrian						



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

7.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	15,36	14,57	13,99	13,69	16,04	16,15
7.2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri****						
7.3	Pertumbuhan Industri, (unit)	5.649	4.461	4.401	4.807	4.678	5.164
7.4	Cakupan bina kelompok pengrajin/jumlah tenaga kerja (orang)	11.776	15.205	15.103	16.814	16.180	16.655
No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
8	Ketransmigrasian						
8.1	Transmigran swakarsa (KK)	50	0	118	0	0	0
8.2	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB (%)****	10					
Aspek Daya Saing							
I.	Kemampuan Ekonomi						
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	tad	656.900	709.774	803.470	883.144	920.786
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan ****(Rp/perkapita perbulan)						382.282
1.3.	Produktivitas total daerah****						
2	Pertanian						
2.1	Nilai Tukar Petani %	102,88	101,1	99,25	98,31	101,29	98,66
II.	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur						
1	Perhubungan						
1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	-	-	18,23	15,88	13,70
1.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (Orang/Barang)	119.513.879/ 8.545.183	157.647.630/ 12.124.442	157.650.000/ 12.124.842	157.653.570/ 12.125.442	160.281.946/ 12.158.364	162.779.225/ 12.185.214
1.3	Jumlah pengguna angkutan umum *	143.335	146.456	158.763	169.872	171.948	172.948



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

2	Penataan Ruang						
2.1	Ketaatan terhadap RTRW (%)	83,7	83,7	41,65	41,65	72	72
2.2.	Luas wilayah produktif (Juta Ha)	2					
2.3.	Luas wilayah industri (Ha)	15					
2.4.	Luas wilayah banjir (Ha)	1.364.523					
2.5.	Luas wilayah kekeringan****						
2.6.	Luas wilayah perkotaan (Ha)	289.000					
No.	Indikator	Capaian Indikator Sasaran RPJMD 2011-2016					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
3.1	Jenis dan jumlah bank dan cabang (Unit)	155	166	170	147	147	155
3.2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (Unit)	35	35				35
3.3	Jenis, kelas, dan jumlah restoran (Buah)	243	243	567	567	502	519
3.4	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel (Buah)	316	315	309	317	336	377
4	Komunikasi dan Informatika						
4.1	Rasio ketersediaan daya listrik (%)	106	137	125	150	225	300
4.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%)	47,4	61,1	60,6	65,1	69,3	69,8
4.3	Rasio desa berlistrik (%)	61,6	65,7	67,9	74,4	77,3	74,8
4.4	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon (%)	76,07	76,07	76,07	75,83	76,62	76,07
III.	Iklim Berinvestasi						
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
1.1	Angka kriminalitas				13,26	16,22	15,71
1.2.	Jumlah demo****						
1.3.	Lama proses perijinan (Ijin/Hari)	7/37	7/37	7/37	7/37	7/37	7/37



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

1.4.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (Perda/%; Retribusi Daerah/%)	7/109,23; 3/99,88	6/136,76; 3/102,54	4/130,62; 3/108,84	4/86,02; 3/80,02	4/86,02; 3/80,02	4/86,02; 3/80,02
1.5.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (Perda) ****						
1.6.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa (%)	30,04	30,04	30,04	30,04	30,04	30,04
IV.	Sumber Daya Manusia						
1	Ketenagakerjaan						
1.1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	317					
1.2.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (%)	11,99					
1.2	Rasio ketergantungan (%)	51,16	51,16	51,13	47,60	47,61	46,21

Keterangan : * : Indikator baru pada RPJMD 2016-2021 *** : Data tahun 2014** : Data tahun 2013 **** : Data tidak tersedia



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi dan kabupaten/kota. Daerah memiliki kewenangan yang didasarkan pada asas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta asas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Salah satu pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintahan daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Pemerintah Daerah adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan daerah karena lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Hasil dari pelaksanaan pembangunan berbasis otonomi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan *local accountability* pemerintah pusat terhadap rakyatnya melalui pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perwujudan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dari pengelolaan keuangan daerah harus melalui perencanaan, pelaksanaan,



pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang terstruktur dengan baik.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Perubahan ini terkait dengan paket undang-undang keuangan negara yang dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan sampai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari paket undang-undang keuangan negara tersebut, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam tataran teknis, telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

Selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2015, proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan telah mengalami kemajuan yang cukup berarti setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan maupun program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada periode di setiap tahun tersebut.

3.1. Kinerja Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah. Kesenambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Barito Selatan periode tahun 2011-2016, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1



Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 (Juta Rupiah) Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (%)
2011	14.605.777.456,11	562.631.021.665,11	2,6
2012	29.097.950.503,87	640.720.950.503,37	4,5
2013	24.893.346.644,12	708.451.583.438,31	3,5
2014	32.726.181.483,83	786.257.511.621,64	4,2
2015	38.343.109.568,73	853.554.305.190,09	4,5
2016	44.019.869.814,06	932.032.770.061,47	4,7
Rata-rata	30.614.372.578	747.274.690.413,33	4,1

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2011-2016. Diolah

Dari tabel di atas tampak bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Barito Selatan masih sangat kecil yaitu rata-rata 4,10 persen dalam enam tahun terakhir. Dengan keragaan seperti itu maka menjadi dorongan bagi pemerintahan Kabupaten Barito Selatan untuk dapat meningkatkan peran Pendapatan Asli Daerah dalam era desentralisasi fiskal.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, APBD Kabupaten Barito Selatan mengalami perkembangan yang stabil. Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari perkembangan pendapatan maupun belanja pada APBD Kabupaten Barito Selatan yang tersaji pada tabel berikut ini.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 3.2.
Perkembangan Anggaran dan Realisasi APBD
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 (Rupiah)

URAIAN	REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	ANGGARAN 2017
	2012	2013	2014	2015	2016		
Pendapatan	640.720.363.209,36	720.673.306.920,18	786.257.511.621,64	853.554.305.190,09	932.032.770.061,47	7,83	930.580.061.842,07
Belanja	605.917.192.183,43	690.165.703.673,20	772.158.024.249,19	859.607.856.407,28	939.598.457.432,06	8,67	929.523.367.325,17
Surplus (Defisit)	34.803.171.025,93	30.507.603.246,98	14.099.487.372,45	-6.053.551.217,19	-7.565.687.370,59	21,73	1.056.694.516,90
Penerimaan Pembiayaan	81.029.748.174,13	100.302.028.358,59	105.127.908.123,70	111.937.850.496,15	98.506.299.278,96	3,98	46.665.737,700
Pengeluaran Pembiayaan	16.184.053.731,51	13.460.000.000,00	7.378.000.000,00	7.378.000.000,00	5.873.783.634,00	-18,41	5.878.000.000,00
Pembiayaan Netto	65.498.857.332,66	86.842.028.358,59	97.749.908.123,70	104.559.850.496,15	92.328.299.278,96	7,62	41.844.432.216,90
Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)	100.302.028.358,59	105.127.908.123,70	111.849.395.496,15	98.506.299.278,96	84.988.100.274,37	-25,61	

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2011-2016. Diolah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 3. 3
Perkembangan Anggaran dan Realisasi APBD
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 (Juta rupiah)

NO	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran*)	Realisasi**)
1	Pendapatan	639.820.693	640.720.363	720.673.306	708.451.583	808.696.284	786.257.511	905.188.733	853.554.305	932.637.974	932.032.770
1.1	Pendapatan Asli Daerah	25.000.000	25.097.950	30.000.000	24.893.346	35.130.000	32.726.181	44.977.561	38.343.109	50.327.409	44.019.869
1.1.1	Pajak	10.805.897	9.980.929	12.933.363	6.771.280	11.541.450	8.207.777	12.894.431	6.708.026	11.678.149	6.452.131
1.1.2	Retribusi	6.998.676	7.202.385	8.643.879	9.490.090	12.287.117	13.764.840	7.154.514	3.896.619	4.823.976	3.553.261
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kek. Daerah yang Dipisahkan	3.909.087	3.409.087	45.558.243	4.055.824	3.481.652	3.481.652	5.253.635	5.253.635	5.253.635	5.440.118
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	3.286.338	4.505.548	3.866.932	4.576.150	7.819.779	7.271.911	19.674.980	22.484.828	285.716.485	285.743.578
1.2	Dana Perimbangan	566.660.867	570.120.538	616.187.639	614.158.566	690.943.431	676.472.134	738.100.427	697.772.123	802.702.397	785.114.703
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/bukan pajak	75.822.472	79.282.143	72.698.172	70.669.149	95.009.900	80.538.603	95.421.149	69.601.529	52.785.196	46.971.284
1.2.2	DAU	450.692.235	450.692.235	504.292.187	504.292.137	552.539.111	552.539.111	570.135.858	570.135.858	583.667.676	583.667.676
1.2.3	DAK	40.146.160	40.146.160	39.197.280	39.197.280	43.394.420	43.394.420	72.543.420	58.034.736	166.249.525	154.475.742
1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	48.159.826	45.501.874	74.485.667	69.399.669	82.622.853	770.591.957	122.110.745	117.439.071	79.608.167	102.898.196
1.3.1	Hibah	1.000.000	145.000	3.500.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	24.538.876
1.3.2	Pendapatan lainnya	187.359.063	16.645.894	22.495.594	18.734.578	26.483.800	199.865.210	20.440.338	162.096.130	22.909.564	20.411.260
1.3.3	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	28.423.920	28.567.964	41.395.434	41.395.434	47.553.932	47.553.932	92.381.945	93.061.358	54.725.770	56.244.168
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah	0	143.015	6.149.600	6.299.600	8.085.121	9.518.742	8.788.461	8.168.100	1.472.833	1.703.890

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2011-2016. Diolah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022

Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Dari tahun 2012 sampai 2016 pendapatan daerah Kabupaten Barito Selatan mengalami peningkatan, dan diikuti dengan meningkatnya total belanja daerah. Pada 3 tahun pertama, SILPA cukup besar pada tiap tahunnya. Dengan SILPA yang sedemikian besar tiap tahun, maka isu penting dalam pengelolaan keuangan daerah pada saat itu adalah bagaimana meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pembangunan, sehingga penyerapan APBD dapat ditingkatkan demi optimalisasi hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat. Pemerintah daerah semestinya terus mengupayakan perbaikan terus mengingat bahwa SILPA pada tahun 2016 masih sebesar 84,988 milyar rupiah.

Berdasarkan tabel rata-rata realisasi pertumbuhan dan kontribusi rata-rata selama 5 tahun terakhir (2012-2016) sebesar 7,89% per tahun dan kontribusi pertumbuhan rata-rata per-obyek pendapatan terhadap total pendapatan daerah dominasi paling besar adalah dana perimbangan dengan persentase sebesar 84,22 % dari Total Pendapatan, sedangkan PAD sebesar 4,7% dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 30,5%. Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun (tahun 2011 – 2016) sebesar 7,89 % per tahun, hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah telah berhasil melampaui target yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan tahun 2011 – 2016 yang ditargetkan sebesar per tahun. Pencapaian target tersebut merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Kebijakan pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam upaya meningkatkan PAD dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yaitu dengan melakukan langkah-langkah identifikasi sumber-sumber pendapatan potensial maupun penyesuaian tarif retribusi/ pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi dengan tidak membebani masyarakat. Namun demikian jika dilihat dari kontribusi PAD terhadap penerimaan pendapatan daerah masih relatif kecil, ketergantungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi masih cukup tinggi. Kontribusi penerimaan yang berasal dari dana perimbangan sebesar 84,22 %, PAD sebesar 4,7% dan lain-lain penerimaan pendapatan daerah yang sah sebesar 30,5%, hal tersebut dapat diartikan bahwa kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam memenuhi



kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih bergantung pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Perkembangan realisasi Penerimaan Daerah dari Dana Perimbangan juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16,47% per tahun, dengan kontribusi terbesar pada pos Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 22,12% per tahun. Kenaikan Penerimaan Dana Perimbangan tersebut menggambarkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam menggali potensi pada pos-pos Dana Perimbangan menunjukkan hasil yang positif. Pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga mengalami pertumbuhan yang meningkat. Penerimaan pada Pos ini bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten untuk mendanai program/kegiatan pembantuan yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Berdasarkan kinerja pertumbuhan dan kontribusi pendapatan daerah rata-rata selama 5 tahun terakhir, untuk pemenuhan pendanaan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi aset dan kekayaan pemerintah kota termasuk mengembangkan BUMD dengan menganut prinsip-prinsip; (1) Potensial, lebih menitikberatkan pada potensi daripada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (2) Tidak memberatkan masyarakat; (3) Tidak merusak lingkungan; (4) Mudah diterapkan dan dilaksanakan; dan (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya.

Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah secara konsisten selalu dioptimalkan agar proporsi PAD terhadap pembangunan daerah dapat terus ditingkatkan. Untuk melihat perilaku (*behaviour*) dari pendapatan, pada tabel 3.4 berikut akan ditunjukkan perkembangan dari komponen pendapatan secara lebih rinci.

Dari tabel perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan di atas terlihat bahwa secara umum pendapatan Kabupaten Barito Selatan sudah baik. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa kinerja penerimaan daerah mencapai atau bahkan melebihi target, meskipun pada tahun 2014 dan 2015 perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan mengalami penurunan. Pertumbuhan tahunan dan rata-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

rata dari masing-masing jenis pendapatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 (dalam Juta rupiah)

NO	Uraian	Realisasi					Proyeksi 2017	Rata-rata Pertumbuhan
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	Pendapatan	640.720.363	708.451.583	786.257.511	853.554.305	932.032.770	970.624.639	0,0983
1.1	Pendapatan Asli Daerah	25.097.950	24.893.346	32.726.181	38.343.109	44.019.869	80.315.123	0,1565
1.1.1	Pajak	9.980.929	6.771.280	8.207.777	6.708.026	6.452.131	14.766.071	-0,0826
1.1.2	Retribusi	7.202.385	9.490.090	13.764.840	3.896.619	3.553.261	5.427.131	-0,0092
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kek. Daerah yang Dipisahkan	3.409.087	4.055.824	3.481.652	5.253.635	5.440.118	7.068.025	0,1481
1.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	4.505.548	4.576.150	7.271.911	22.484.828	28.574.357	53.053.895	0,2708
1.2	Dana Perimbangan	570.120.538	614.158.566	676.472.134	697.772.123	785.114.703	783.654.415	0,0838
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/bukan pajak	79.282.143	70.669.149	80.538.603	69.601.529	46.971.284	59.639.908	-0,1075
1.2.2	DAU	450.692.235	504.292.137	552.539.111	570.135.858	583.667.676	583.667.676	0,0675
1.2.3	DAK	40.146.160	39.197.280	43.394.420	58.034.736	154.475.742	140.348.831	0,5207
1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	45.501.874	69.399.669	770.591.957	117.439.071	102.898.196	106.653.101	0,2589
1.3.1	Hibah	145.000	-	-	-	24.538.876	500.000	0,0000
1.3.2	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	16.645.894	18.734.578	199.865.210	162.096.130	20.411.260	35.088.585	0,0656
1.3.3	Dana PenyesuaianDan Otonomi Khusus	28.567.964	41.395.434	47.553.932	93.061.358	56.244.168	69.302.851	0,2898
1.3.4	Bantuan Lainnya	143.015	6.299.600	9.518.742	8.168.100	1.703.890	1.761.665	10,6566



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

2	Belanja							
A	Belanja Tidak Langsung	320.614.916	340.395.495	382.878.889	437.144.494	514.478.018	1.023.401.446	12,63
2.1.1	Belanja Pegawai	280.827.166	302.373.671	334.185.352	346.398.856	359.973.665	623.445.364	6,44
2.1.2	Belanja Bunga	315.069	82.263.334	0	12.571	7.587	0	-9,91
2.1.3	Belanja Subsidi	700.000	0	0	0	0	1.000.000	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	16.194.149	13.779.122	18.675.716	12.949.293	45.086.359	29.688.500	59,53
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.270.500	3.772.696	3.061.230	2.624.152	4.450.296	9.060.000	25,65
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kab/Kota/Pemerintah Desa	1.750.455	1.551.067	2.382.856	2.004.900	781.000	2.019.320	-8,67
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	17.998.200	18.836.674	24.573.733	72.649.421	104.179.109	134.752.408	68,54
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	559.376	0	0	505.299	0	1.000.000	
B.	Belanja Langsung	285.302.275	318.537.950	389.279.134	422.463.360	425.120.438	399.956.081	10,75
2.2.1	Belanja Pegawai	21.125.592	26.013.130	36.694.387	43.345.992	46.054.571	50.511.876	22,14
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	114.084.123	145.430.074	172.169.284	201.048.726	215.583.458	206.175.753	17,47
2.2.3	Belanja Modal	150.092.559	207.393.571	180.415.462	178.068.642	163.482.408	143.268.451	3,92

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2011-2016. Diolah



Dari tabel di atas, secara umum terlihat bahwa pertumbuhan pendapatan Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari tiga komponen yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan yang sah dari tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan Kabupaten Barito Selatan adalah sebesar 9,83 persen. Sedangkan untuk Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mulai tahun 2012 sampai dengan 2017 terus mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah. Belanja tidak langsung mulai tahun 2012 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 12,63%, dan untuk Belanja Langsung mulai tahun 2012 sampai dengan 2017 tumbuh rata-rata sebesar 10,75%.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Kabupaten Barito Selatan periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan APBD Kabupaten Barito Selatan pada periode tersebut. Perkembangan neraca ini terutama terkait dengan jumlah aset yang dimiliki oleh Kabupaten Barito Selatan pada periode tahun 2012 sampai 2016. Total aset dari tahun 2011 hingga 2016 mengalami kenaikan dari semula Rp.1.106.347.833.835,70 menjadi Rp.1.284.960.295.477,83. Secara rinci pertumbuhan neraca Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 3.5
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Barito Selatan 2011-2016 (dalam Juta Rupiah)

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertum- buan (%)
1	Aset							
1,1	Aset Lancar	76.223.124.572,16	106.140.112.941,00	115.027.311.286,32	126.815.031.400,22	118.648.832.621,22	104.332.178.811,98	5,37
1.1.1	Kas	70.520.081.064,17	100.086.878.999,59	105.148.266.317,70	111.937.850.496,15	84.989.100.214,27	78.530.558.656	1,81
1.1.2	Piutang	2.180.056.045,99	1.356.863.799,41	5.449.188.963,62	9.512.393.697,07	10.083.103.641,95	6.978.956.321,01	21,40
1.1.3	Persediaan	3.023.007.462,00	4.196.370.142,00	5.364.787.207,00	4.429.858.005,00	5.941.123.048,00	7.652.246.135,25	16,74
1.1.4	Investasi Jangka Panjang	16.483.796.146,75	14.457.329.384,00	16.690.682.272,00	22.422.045.146,00	29.349.525.750,00	38.634.230.318,00	15,25
1,2	Aset Tetap	1.012.885.680.281,20	1.150.519.599.964,72	1.331.285.423.039,22	1.495.005.890.784,62	1.106.058.399.224,87	1.401.860.757.371,01	5,57
1.2.1	Tanah	59.428.308.377,00	62.060.959.712,00	72.204.186.902,00	74.833.253.653,00	95.360.305.521,00	170.117.500.439,00	19,16
1.2.2	Peralatan Dan Mesin	124.532.694.717,00	146.050.196.431,00	190.216.768.540,63	166.433.330.645,17	142.782.475.622,00	166.230.677.414,56	4,93
1.2.3	Gedung Dan Bangunan	446.207.979.722,89	482.052.625.746,94	534.857.690.285,25	596.161.171.390,79	649.279.658.132,74	684.297.689.033,88	7,39
1.2.4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	372.295.499.303,31	450.047.430.996,78	542.754.309.702,80	617.607.314.926,14	710.254.698.615,14	802.036.882.907,14	13,65
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	8.189.152.666,00	8.676.341.583,00	13.097.880.009,00	14.322.137.929,06	14.244.367.370,03	15.253.340.242,09	10,92
1.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.233.045.495,00	1.632.045.495,00	1.865.244.345,00	1.938.025.495,00	9.237.165.695,00	24.869.759.474,00	49,44
1,3	Aset Lainnya	555.232.835,59	13.843.253.188,11	13.664.256.281,93	13.676.440.754,19	25.802.083.942,33	13.176.809.147,94	69,52
1.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran	0	1.076.171.767,52	899.174.861,34	699.359.333,60	643.058.200,20	453.142.600,24	-15,89
1.3.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3.4	Aset Tak Berwujud	0	417.375.000,00	417.375.000,00	417.375.000,00	768.030.000,00	1.150.134.000,00	22,47
1.3.5	Aset Bukan Milik Pemda	0	11.792.473.585,00	11.792.473.585,00	11.792.473.585,00	11.792.473.585,00	3.693.050.600,00	-20,72
1.3.6	Aset Lain-Lain	0	555.232.835,59	555.232.835,59	555.232.835,59	11.844.269.322,04	7.880.481.947,70	69,99
	Jumlah Aset		1.284.960.295.477,83	1.476.661.672.879,47	1.657.707.408.085,03	1.250.509.315.788,42	1.519.369.745.330,93	3,41



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
2	Kewajiban	14.054.053.131,51	10.730.000.000,00					-12,62
2,1	Kewajiban Jangka Pendek	14.054.053.131,51	10.730.000.000,00	0	0	0	0	-12,62
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga			0	0	0	0	0,00
2.1.2	Uang Muka Dari Kas Daerah			0	0	0	0	0,00
2.1.3	Pendapatan Diterima Dimuka			0	0	0	0	0,00
2.1.4	Utang Belanja			0	0	1.839.539.236,00	2.827.089.915,00	23,97
2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	14.054.053.131,51	10.730.000.000,00	0	0	295.783.634,00	219.539.299,86	-72,65
2,2	Kewajiban Jangka Panjang			0	0	0	0	0,00
2.2.1	Utang Jangka Panjang			0	0	0	0	0,00
	Jumlah Kewajiban			0	0	2.135.322.870,00	3.046.629.214,86	19,45
3	Ekuitas Dana	1.029.093.780.104,19	1.274.230.295.477,83	1.476.667.672.819,47	1.657.107.408.085,03	1.277.520.498.668,92	1.560.512.579.449,66	7,19
3,1	Ekuitas Dana Lancar	62.169.070.840,65	95.410.112.941,00	126.815.031.400,22	115.027.311.286,32	0	0	16,63
3.1.1	Silpa	70.952.911.064,17	100.302.028.358,59	105.127.908.123,70	111.849.395.496,15	0	0	12,05
3.1.2	Cadangan Piutang	2.180.056.045,99	1.356.863.799,41	5.449.188,62	9.512.393.697,07	0	0	44,53
3.1.3	Cadangan Persediaan	3.023.007.462,00	4.196.370.142,00	4.429.856.005,00	5.364.787.207,00	0	0	15,42
3.1.4	Pendapatan Yang Ditangguhkan	67.150.000,00	284.850.641,00	0	0	0	0	105,96
3.1.5	Dana Yang Disediakan Untuk Hutang Jangka Pendek	(14.054.053.731,51)	(10.730.000.000,00)	0	0	0	0	-12,62
3,2	Ekuitas Dana Investasi	1.029.924.709.263,54	1.178.820.182.536,83	1.361.640.361.593,15	1.530.892.376.684,81	0	0	-99,34
3.1.1	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	1.012.885.680.281,20	1.150.519.599.964,72	1.495.005.890.784,64	1.331.285.423.039,22	0	0	7,07
3.1.2	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	555.232.835,59	13.843.253.188,11	13.464.440.754,19	13.664.256.281,93	0	0	122,73
3.1.3	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang		14.457.329.384,00	16.690.682.272,00	2.242.045.146,00	0	0	-46,27
	Jumlah Ekuitas Dana							0,00
	Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana	1.106.147.883.835,70	1.284.960.295.477,83	1.476.667.672.897,47	1.657.707.408.085,03	1.279.655.821.538,92	1.563.559.208.664,52	5,94

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2011-2016. Diolah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk menganalisis neraca Kabupaten Barito Selatan periode tahun 2011-2016 digunakanlah beberapa analisis rasio seperti :

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Ada beberapa macam rasio likuiditas, namun yang lazim dipakai, termasuk untuk melihat neraca Kabupaten Barito Selatan adalah rasio lancar. Neraca pada pemerintah daerah sedikit ada perbedaan dengan neraca pada perusahaan, untuk itu dilakukan penyesuaian pada aktiva lancar.

Tabel 3. 6
Rasio Lancar
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 (000 Rupiah)

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aset Lancar	76.223.124, 572	106.140.112,941	115.027.311,266	111.753.428,494	90.906.088,867	78.530.558,655
Kewajiban Lancar	14.054.053,131	10.730.000,000		1.720.312,100	1.839.539,236	3.046.629,214
Rasio Lancar	5,42	9,891902418		64,96	49,41	25,77

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2011-2016. Diolah

Dengan rasio lancar sebagaimana ditunjukkan dalam tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan Kabupaten Barito Selatan sangat likuid dengan kemampuan pengembalian hutang lancar mencapai rata-rata mencapai 31,09 terhadap aset lancarnya.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio ini disebut juga rasio *leverage* (daya ungkit) yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana aktiva entitas dibiayai oleh hutang sehingga menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio *leverage* adalah:

a. Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 3.7
Rasio Hutang Terhadap Ekuitas
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2016 (JutaRupiah)

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
Kewajiban	10.730.000,000	0	2.316.095.734	2.135.322.870	3.046.629,214
Ekuitas	1.274.230.295,477	1.476.667.672,819	1.657.107.408,085	1.277.520.498,668	1.560.512.579,449
Total Debt to equity Ratio	0,00842077	0	0,001397674	0,001671459	0,001952326

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2011-2016. Diolah

Dengan rasio hutang terhadap ekuitas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan Kabupaten Barito Selatan memiliki kemampuan modal untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

b. Total Debt to Total Asset Ratio(Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang.

Tabel 3.8
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2015 (dalam juta rupiah)

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
Kewajiban	10.730.000,000	0	2.316.095,734	2.135.322.870	3.046.629.214,86
Aktiva	1.284.960.295,477	1.476.667.672,879	1.657.707.408,085	1.273.883.694,476	1.165.868.653,467
Total Debt to Total Aset Ratio	0,0084	-	0,0014	0,0017	0,0026

Sumber:Laporan Realisasi APBDKabupaten Barito Selatan, 2011-2016. Diolah

3. Rasio Aktivitas

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas entitas dalam menggunakan aktiva(aset) yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektifitas) pemanfaatan sumber daya entitas. Dikarenakan adanya perbedaan antara laporan keuangan pemerintah dengan laporan keuangan perusahaan, maka dalam laporan keuangan Kabupaten Barito Selatan yang dapat dilihat adalah tingkat rasio pemanfaatan sumber daya entitas dalam menggali PAD. Ada 2 rasio yang digunakan dalam mengukur aktivitas laporan keuangan Kabupaten Barito Selatan, yaitu:

a. Perputaran aktiva tetap (*fixed assets turnover*)

Tabel 3.9
Rasio Perputaran Aktiva Tetap
Kabupaten Barito Selatan tahun 2011 – 2016

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
PAD	25.097.950,503	24.893.346,644	24.893.346,644	24.893.346,644	24.893.346,644
Aktiva Tetap	1.150.519.599,964	1.331.285.423,039	1.495.005.890,784	1.106.058.399,224	1.401.860.757,371
Rasio Perputaran aktiva tetap	0,021	0,018	0,016	0,022	0,017

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2011-2016. Diolah

Dengan rasio perputaran aktiva tetap sebagaimana ditunjukkan dalam tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 perputaran aktiva sebesar 0,017persen.

b. Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Tabel 3.10
Rasio Perputaran Total Aktiva
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 – 2015 (juta rupiah)

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
PAD	25.097.950,503	24.893.346,644	32.726.181,438	38.343.109,568	44.019.869,814
Total Aktiva	1.284.960.295,477	1.476.661.672,879	1.657.707.408,085	1.279.655.821,538	1.563.559.208,664
Rasio Perputaran total aktiva	0,020	0,017	0,020	0,030	0,028

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2011-2016. Diolah

Dengan rasio perputaran total aktiva sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa perputaran aktiva berada di 2,3 persen. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset tidak sepenuhnya dapat digunakan secara langsung dalam menghasilkan PAD.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Di setiap organisasi seperti halnya organisasi Perangkat Daerah (PD) yang berada dalam suatu wilayah administrasi merupakan satuan entitas akuntansi. Hal tersebut berarti bahwa Perangkat Daerah (PD) tersebut bertanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan secara administratif harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah (PD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing PD.

Dari segi pengawasan terhadap rangkaian pengelolaan keuangan daerah, pada periode tahun 2012-2016 disusun laporan keuangan sebagai entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap PD dan dikoordinir oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mengemban fungsi sebagai SKPKD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca, hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh PD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Badan Keuangan Daerah sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Barito Selatan. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh Badan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dimana kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Pengelola Belanja Daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan SAP walaupun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya mengikuti SAP. Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Kabupaten Barito Selatan dapat dikatakan telah mencapai target dengan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari positifnya hasil opini audit BPK Kabupaten Barito Selatan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 – 2016

Tahun	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Barito Selatan Tengah
2011	Tidak Memberikan Pendapat(TMP)/Disclaimer
2012	Wajar Dengan Pengecualian(WDP)
2013	Tidak Memberikan Pendapat(TMP)/Disclaimer
2014	Wajar Dengan Pengecualian(WDP)
2015	Tidak Memberikan Pendapat(TMP)/Disclaimer
2016	Wajar Dengan Pengecualian(WDP)

Sumber : Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan, 2017

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran belanja tahun 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel 3.12
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
2013-2016

(dalam jutaan rupiah)

NO	URAIAN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (RP)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PEMBIAYAAN PENGELUARAN) (RP)	PRESENTASE
		(a)	(b)	(a) / (b) X 100%
1	Tahun Anggaran 2013	341.740.508	690.165.703	49,52
2	Tahun Anggaran 2014	366.408.625	690.165.703.	53,09
3	Tahun Anggaran 2015	419.573.276	859.607.856.	48,81
4	Tahun Anggaran 2016	480.490.486	939.598.457	51,14

Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2011-2016. Diolah

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan penggunaan anggaran belanja antara lain :

- Proporsi belanja tidak langsung dalam APBD Kabupaten Barito Selatan setiap tahunnya rata-rata masih 50,48% dari total belanja daerah.
- Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dalam APBD Kabupaten Barito Selatan setiap tahunnya rata-rata masih 41,50% dari

total belanja daerah, sementara arah yang diinginkan secara nasional mengenai proporsi belanja untuk lebih didominasi oleh pemenuhan kebutuhan di luar belanja untuk aparatur.

- c. Faktor penyebab yang melatar belakangi masih dominannya proporsi belanja tidak langsung antara lain karena di dalam belanja tidak langsung teralokasi belanja bantuan sosial, belanja hibah, serta belum diterapkannya system penganggaran dengan menggunakan Standar Analisa Belanja (SAB), belum efektifnya pola pengintegrasian antara target capaian pada Standard Pelayanan Minimum dengan penganggarnya. Selain itu, masih belum optimalnya pemanfaatan potensi serta rendahnya realisasi PAD menyebabkan masih sebagian besar alokasi DAU diserap untuk memenuhi kebutuhan belanja tidak langsung khususnya pada belanja wajib, sehingga alokasi belanja langsung menjadi sangat terbatas.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tercermin dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pertahunnya. SILPA per tahun diharapkan menurun baik secara nominal maupun persentasenya. Tingginya SILPA menjadi catatan penting terhadap perekonomian makro Kabupaten Barito Selatan dimana hal tersebut menggambarkan belanja pemerintah kurang diberdayakan sehingga tidak optimal dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan SILPA pertahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.13
SILPA
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 (Rupiah)

Tahun	SILPA(Rp)
2011	70.952.911.064,17
2012	100.302.028.358,59
2013	105.127.908.123,70
2014	111.937.850.496,15
2015	98.506.299.278,96
2016	84.988.100.274,37

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Barito Selatan, 2017

Analisis pembiayaan Kabupaten Barito Selatan dalam kurun waktu tahun 2012-2016 dapat dijelaskan secara rinci ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Defisit Riil dan Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2012-2016

(dalam juta rupiah)

		2012	2013	2014	2015	2016
NO	Uraian	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	640.720.363	708.451.583	786.257.511	853.554.305	932.032.770
2	BELANJA DAERAH	605.917.192	690.165.703	772.158.024	859.607.856	939.598.457
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	16.184.053	13.460.000	7.378.000	7.378.000	5.873.783
A.	Defisit Riil	18.619.118	4.825.880	6.721.487	(13.431.551)	(13.439.470)
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	100.302.028	105.127.908	111.937.850,00	98.506.299	84.988.100
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	1.821,04	15.416,81
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	4.471,74
B.	Total Realisasi Penerimaan	100.302.028	105.127.908	111.937.850	98.506.299	84.988.100
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		81.682.910,00	100.302.028,00	105.216.363,00	85.074.748,00	69.000.000

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2011-2016. Diolah

Dari Tabel 3.15 diatas tampak bahwa pada tahun 2012 sampai dengan 2014 Kabupaten Barito Selatan mengalami surplus anggaran. Surplus anggaran pada periode 2012 sampai 2014 dipergunakan sebagai pembiayaan tahun berikutnya. Dan pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan anggaran. Gambaran komposisi penutup defisit riil anggaran selama 5 tahun terakhir (2012-2016) terlihat pada Tabel 3.16 berikut ini:

Tabel 3.15
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA)
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2012-2016

(dalam juta rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		RATA-RATA PERTUMB
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	
1	Jumlah SiLPA	81.682	100	100.302	100	105.216	100	85.074	100	69.000	100	18

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2011-2016. Diolah

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

- d. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional

dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

- e. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

3.2.3 Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah dapat menyelenggarakan otonominya secara efektif dan efisien yang bersumber dari pendanaan sendiri. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui beberapa model, salah satunya dengan rasio kemandirian keuangan daerah.

Tabel 3.16
Rasio Kemandirian Keuangan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 (Juta Rupiah)

Tahun	Total PAD	Pengeluaran Daerah	Rasio PAD/ Total Pengeluaran (%)
2012	640.720.363.209,36	589.669.447.783,43	1,09
2013	708.451.583.438,31	366.408.626.258,65	1,93
2014	1.572.515.023.243,28	772.158.024.249,19	2,04
2015	853.554.305.190,09	859.607.856.407,28	0,99
2016	932.032.770.061,47	939.598.457.432,06	0,99

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2011-2016. Diolah

Dengan rasio kemandirian keuangan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013 rasio kemandirian berada pada angka 1,93% dan tahun 2016 berada pada angka 0,99 %.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Pendanaan program kegiatan yang diakomodir dalam periode tahun 2017-2022 sangat penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya, dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2017-2022.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

a. Proyeksi Pendapatan

1. Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Proyeksi pendapatan daerah menggunakan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan kurun waktu 2012-2016, yakni 9,70% per tahun. Dengan menggunakan tahun dasar 2016 dan mempertimbangkan bahwa dana alokasi khusus dan dana penyesuaian jumlah penerimaan serta alokasinya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat serta beberapa komponen pendapatan lainnya yang tidak bisa diproyeksikan dengan menggunakan nilai pertumbuhan pendapatan masa lalu, maka dapat dikalkulasikan proyeksi pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:



Tabel 3.17
Proyeksi Penerimaan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 (dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	PENDAPATAN DAERAH	970.624.639.960,21	997.227.591.027,81	1.029.676.155.653,44	1.063.275.398.800,48	1.098.072.246.335,35	1.134.115.900.286,23
I	P A D	80.315.123.016,19	63.293.422.369,97	67.723.961.935,87	72.464.639.271,38	77.537.164.020,38	82.964.765.501,80
1	PAJAK DAERAH	14.766.071.256,00	15.799.696.243,92	16.905.674.980,99	18.089.072.229,66	19.355.307.285,74	20.710.178.795,74
2	RETRIBUSI DAERAH	5.427.131.002,00	6.438.456.646,14	6.889.148.611,37	7.371.389.014,17	7.887.386.245,16	8.439.503.282,32
3	HASIL PENG.KEKAYAAN DAERAH YG SYAH	7.068.025.165,00	7.588.173.886,72	8.119.346.058,79	8.687.700.282,91	9.295.839.302,71	9.946.548.053,90
4	LAIN-LAIN PAD YG SYAH	53.053.895.593,19	33.467.095.593,19	35.809.792.284,71	38.316.477.744,64	40.998.631.186,77	43.868.535.369,84
II	PERIMBANGAN	783.656.415.648,18	807.717.502.232,00	831.949.027.298,96	856.907.498.117,93	882.614.723.061,47	909.093.164.753,31
1	TRANSFER UMUM	59.639.908.648,18	59.636.719.232,00	61.425.820.808,96	63.268.595.433,23	65.166.653.296,23	67.121.652.895,11
2	DAU	583.667.676.000,00	576.041.341.000,00	593.322.581.230,00	611.122.258.666,90	629.455.926.426,91	648.339.604.219,71
3	DANA TRANSFER KHUSUS	67.489.557.000,00	99.180.168.000,00	102.155.573.040,00	105.220.240.231,20	108.376.847.438,14	111.628.152.861,28
4	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	72.859.274.000,00	72.859.274.000,00	75.045.052.220,00	77.296.403.786,60	79.615.295.900,20	82.003.754.777,20
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SYAH	106.653.101.295,84	126.216.666.425,84	130.003.166.418,62	133.903.261.411,17	137.920.359.253,51	142.057.970.031,11
1	PENDAPATAN HIBAH	500.000.000,00	500.000.000,00	515.000.000,00	530.450.000,00	546.363.500,00	562.754.405,00
2	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	35.088.585.008,84	35.088.585.008,84	36.141.242.559,11	37.225.479.835,88	38.342.244.230,95	39.492.511.557,88
3	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	69.302.851.000,00	69.302.851.000,00	71.381.936.530,00	73.523.394.625,90	75.729.096.464,68	78.000.969.358,62
4	PENDAPATAN LAINNYA	1.761.665.287,00	21.325.230.417,00	21.964.987.329,51	22.623.936.949,40	23.302.655.057,88	24.001.734.709,61

Proyeksi penerimaan Kabupaten Barito Selatan tiap tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 9,83 persen selama 6 (enam) tahun (2017-2022), dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2016-2021 rata-rata sebesar 15,65 persen. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Selatan tersebut, mengindikasikan bahwa Kabupaten Barito Selatan belum cukup memiliki kemandirian fiskal dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan tahun 2017-2022.

Peningkatan proyeksi target PAD secara signifikan diarahkan pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Guna merealisasikan PAD dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut, beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain : revitalisasi BUMD/Perusda dan ekstensifikasi usaha dalam berbagai sektor, seperti pemungutan pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan, pertambangan galian C, jasa konstruksi dan bidang usaha lainnya melalui penyertaan saham sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Proyeksi SiLPA

Proyeksi SiLPA tahun 2017-2022 menggunakan data SiLPA kurun waktu ditunjukkan melalui Tabel 3.16 dimana diketahui nilai SiLPA cukup besar dengan tingkat pertumbuhan SiLPA minus 2,58%, namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD, maka diperoleh proyeksi SiLPA berikut ini :

Tabel 3.18
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA)
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018-2022

(dalam juta rupiah)

URAIAN	TAHUN PROYEKSI				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	67.216	65.478	63.785	62.136	60.529

Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Barito Selatan dalam jangka waktu lima tahun mendatang tahun 2017-2022, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.19
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017-2022

(dalam juta rupiah)

N O	URAIAN	TAHUN PROYEKSI				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan Daerah	997.227	1.029.676	1.349.763	1.480.690	1.624.317
4	Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	67.216	65.478	63.785	62.136	60.529
	Total Kapasitas Kemampuan Keuda	1.064.443	1.095.154	1.413.548	1.542.826	1.684.846

b. Proyeksi Belanja

1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemda dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, seperti belanja pegawai (gaji dan tunjangan pegawai termasuk gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta anggota DPRD), bunga, subsidi, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, serta belanja tidak terduga. Perkiraan belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah sebagaimana tabel 3.16 berikut.



Tabel 3.20
Perkiraan Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 (dalam Rupiah)

No	Uraian	APBD 2016	RATA- RATA PERTUM- BUHAN	PROYEKSI RAPBD					
				2.017	2018	2.019	2.020	2021	2022
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	514.478.018	12,63	623.445.364	652.624.083	735.040.438	827.864.707	932.411.249	1.050.160.407
2.1.1	Belanja Pegawai	359.973.665	6,44	445.925.135	407.844.075	434.116.079	462.080.441	491.846.177	523.529.325
2.1.2	Belanja Bunga	7.587	-9,91	0	7.587	7.587	7.587	7.587	7.587
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Belanja Hibah	45.086.359	59,53	71.928.206	114.750.158	183.065.857	292.052.828	465.924.426	743.309.256
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.450.296	25,65	5.591.966	7.026.518	8.829.086	11.094.082	13.940.135	17.516.309
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kab/Kota/Pemerintah Desa	781.000	-8,67	713.306	651.479	595.011	543.437	496.334	453.314
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	104.179.109	68,54	175.581.859	295.922.949	498.743.962	840.575.359	1.416.692.709	2.387.671.979
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0		0		0			
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		10,75						
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		22,14						
3.2.2	Penyertaan Modal	7.078.000	17,47	7.078.000	7.078.000	7.078.000	7.078.000	7.078.000	7.078.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	300.000	3,92	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Pemberian Pinjaman Daerah		13,23						
	Total Belanja Wajib & Mengikat	521.856.018		586.826.656	652.624.083	742.418.438	835.242.707	939.789.249	1.057.538.407

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Barito Selatan, 2011-2016. Diolah

Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dihitung berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2012-2016 sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 3.21. Adapun hasil proyeksi dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.21
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN PROYEKSI				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
	Prioritas I :	595.954	651.650	712.641	777.778	849.538
2.1.1	Belanja pegawai	545.422	597.439	654.644	715.760	781.831
2.1.2	Belanja bunga	1.900	2.200	2.300	2.300	3.600
2.1.3	Belanja subsidi	0	0	0	0	0
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada prov/kab/kota dan pem.des	48.632	52.011	55.697	59.718	64.107

2. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas.

Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut.

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah dan harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian Visi dan Misi daerah.

Prioritas II, dialokasikan untuk Program Prioritas ditingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan, berhubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas.

Prioritas III, dialokasikan untuk belanja tidak langsung seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi

kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.

Tabel 3.22
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Prioritas
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018-2022 (dalam Jutaan Rupiah)

No.	Jenis Dana	Alokasi									
		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1.	Prioritas I	54	680.082.070	56%	760.222.544	56%	847.293.719	55%	987.348.092	55%	1.051.626.132
2.	Prioritas II	32	408.495.554	31%	435.711.090	31%	462.623.878	31%	493.342.511	30%	524.282.639
3.	Prioritas III	11	33.039.000	11%	34.479.802	12%	39.845.943	12%	40.538.349	14%	48.408.820
	Total	100	1.121.616.624	100%	1.230.413.436	100%	1.349.763.540	100%	1.480.690.603	100%	1.624.317.591

Kerangka pendanaan alokasi kapasitas keuangan daerah periode 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.22, yang memuat kapasitas kemampuan keuangan daerah, belanja dan pembiayaan.

Tabel 3.23
Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017-2022 (dalam Jutaan Rupiah)

KODE	U R A I A N	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
A.	Kapasitas kemampuan keuangan daerah	1.188.832	1.295.891	1.413.548	1.542.826	1.684.846
1	Pendapatan	1.121.616.	1.230.413	1.349.763.000	1.480.690.000	1.624.317.000
2	Silpa	67.216	65.478	63.785	62.136	60.529
B.	Belanja					
2.1	Belanja tidak langsung	444.247.860	481.842.371	525.064.832	575.424.297	611.816.785
	Prioritas I :					
2.1.1	Belanja pegawai	407.844.075	434.116.079	462.080.440	491.846.176	383.162.011
2.1.2	Belanja bunga	6.158	5.547	4.997	4.502	6.835
2.1.3	Belanja subsidi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada prov/kab/kota dan pem.des	651.479	595.011	543.437	496.334	713.306
	Prioritas III :	46.131.281	61.440.954	82.081.786	86.574.154	46.131.281
2.1.4	Belanja hibah	26.369.000	35.739.574	48.440.106	65.653.941	65.653.941
2.1.5	Belanja bantuan sosial	6.670.000	8.740.228	11.405.837	14.884.408	19.423.879



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

KODE	U R A I A N	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	713.306	651.479	595.011	543.437	496.334
2.1.8	Belanja tidak terduga	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.2	Belanja langsung	470.832.419	521.459.679	577.530.743	639.630.967	708.408.651
	Prioritas II	253.238.232	297.469.958	349.427.396	410.459.953	482.152.730
	Prioritas III	169.889.613	176.547.929	183.467.198	190.657.647	198.129.904
	Surplus / (defisit)	-42.394.682	24.517.955	107.833.505	188.166.755	216.275.246
C.	Pembiayaan daerah					
3.1	Penerimaan pembiayaan daerah	109.559.661	115.589.301	121.950.783	128.662.371	135.743.333
3.2	Pengeluaran pembiayaan daerah	10.000	16.135	14.268	12.134	12.134
	Pembiayaan netto	-42.394.682	24.517.955	107.833.505	188.166.755	216.275.246
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	0	0	0	0	0

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dari perkiraan belanja gaji dan tunjangan serta belanja wajib dan mengikat tersebut pada tabel 3.23 dapat diketahui kapasitas riil keuangan daerah. Kapasitas riil adalah dana yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah dengan rumusan total penerimaan dikurangi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama. Tabel 3.18 berikut menunjukkan kapasitas riil ataupun dana yang tersedia setiap tahunnya untuk melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Selatan.

a. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 3.22 dan 3.23 tersebut diatas, dapat dihitung rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan, sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.24
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 (dalam Rupiah)

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata (%)
I	Penerimaan	1.022.439.949	1.121.616.624	1.230.413.436	1.349.763.540	1.480.690.603	1.624.317.591	
	dikurangi:							
II	Belanja Wajib dan Mengikat dan Prioritas Utama	586.826.656	652.624.083	742.418.438	835.242.707	939.789.249	1.057.538.407	12,49
Kapasitas Riil (I-II)		435.613.293	468.992.541	487.994.999	514.520.833	540.901.354	566.779.185	4,784

Sumber: Hasil analisis

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka alokasi kapasitas keuangan daerah berdasarkan prioritas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Selatan, Tahun 2017-2022 (dalam Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata(%)
Prioritas I	588.027.977	680.082.070	760.222.544	847.293.719	987.348.092	1.051.626.132	
Prioritas II	384.875.317	408.495.554	435.711.090	462.623.878	493.342.511	524.282.639	6,378
Prioritas III	49.536.655	33.039.000	34.479.802	39.845.943	40.538.349	48.408.820	
Total	1.022.439.949	1.121.616.624	1.230.413.436	1.349.763.540	1.480.690.603	1.624.317.591	

Sumber: Hasil analisis

Penetapan anggaran tiap tahun sesuai urutan prioritas (I,II,dan III) bukan menunjukkan urutan besarnya anggaran, tetapi lebih untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar anggaran ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang diproyeksikan untuk menunjang prioritas dimaksud. Evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah dimasa lalu cukup baik untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan. Adapun baris total untuk kolom rupiah menunjukkan total kapasitas riil keuangan daerah yang telah dihitung pada bagian sebelumnya. Penetapan persenta semasing-masing prioritas bersifat indikatif sebagai panduan awal dalam menetapkan pagu indikatif program atau pagu indikatif urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Secara simultan hal tersebut dipertajam ketika program prioritas untuk masing-masing jenis prioritas (prioritas I dan II) telah dirumuskan. Sisanya, dialokasikan untuk persentase final prioritas III. Berikut rincian anggaran yang dialokasikan untuk prioritas III.

Tabel 3.26
Alokasi Prioritas Kabupaten Barito Selatan 2017-2022 (dalam ribu Rupiah)

Uraian	2016	2.017	2018	2.019	2.020	2021	Rata-rata (%)
Belanja Hibah	45.086.359	26.369.000	25.739.574	28.440.106	25.653.941	28.984.941	
Bantuan sosial	4.450.296	6.670.000	8.740.228	11.405.837	14.884.408	19.423.879	
Total	49.536.655	33.039.000	34.479.802	39.845.943	40.538.349	48.408.820	

Sumber: Laporan Realisasi APBD Barito Selatan 2017. Diolah

b. Penghitungan Pendanaan

Secara garis besar, proyeksi kerangka pendanaan tahun 2017-2022, yang meliputi : pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel 3.21 berikut. Proyeksi kerangka pendanaan tersebut sifatnya indikatif dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan setiap tahunnya, serta menyesuaikan dengan kebijakan pusat dan daerah dalam perkembangannya nanti, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan (RKPD, KUA, PPAS dan APBD tahun 2017-2022).



Tabel 3.27

Proyeksi Kerangka Pendanaan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah)

No.	Uraian	APBDA.2017	APBDA.2018	APBDA.2019	APBDA. 2020	APBDA.2021	APBDA.2022	RATA-RATA(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.022.439.949	1.121.616.624	1.230.413.436	1.349.763.540	1.480.690.603	1.624.317.591	
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	48.289.796	52.973.907	58.112.375	63.749.276	69.932.956	76.716.452	
1.1.1.	Pajak Daerah	7.077.988	7.764.553	8.517.714	9.343.932	10.250.294	11.244.572	
1.1.2.	Retribusi Daerah	3.897.927	4.276.026	4.690.801	5.145.808	5.644.952	6.192.512	
1.1.3.	Hasil Pengelolaan	5.967.809	6.546.687	7.181.716	7.878.342	8.642.541	9.480.868	
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan	31.346.070	34.386.638	37.722.142	41.381.190	45.395.166	49.798.497	
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER							
1.2.1	Pendapatan	904.042.134	1.040.984.427	1.198.670.435	1.380.242.368	1.589.318.415	1.830.064.837	
1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	54.086.390	62.279.276	71.713.202	82.576.159	95.084.612	109.487.817	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	583.667.676	672.080.359	773.885.598	891.112.068	1.026.095.744	1.181.526.447	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	154.475.742	177.875.384	204.819.552	235.845.163	271.570.464	312.707.354	
1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	118.484.986	136.432.828	157.099.370	180.896.434	208.298.223	239.850.775	
1.3.1	Hibah	28.255.970	32.536.122	37.464.621	43.139.679	49.674.382	57.198.947	
1.3.2	Pendapatan lainnya	23.503.112	27.063.312	31.162.802	35.883.274	41.318.792	47.577.671	
1.3.3	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	64.763.910	74.574.203	85.870.537	98.878.015	113.855.837	131.102.467	
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	1.961.991	2.259.190	2.601.407	2.995.462	3.449.208	3.971.686	
1.2.4	Bantuan Keuangan	672.080.359	773.885.598	891.112.068	1.026.095.744	1.181.526.447	1.360.501.448	
1.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah	177.875.384	204.819.552	235.845.163	271.570.464	312.707.354	360.075.569	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Uraian	APBDA.2017	APBDA.2018	APBDA.2019	APBDA. 2020	APBDA.2021	APBDA.2022	RATA- RATA(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	BELANJA							
2.1	Belanja Tidak Langsung	579.448.656	652.624.083	735.040.437	827.864.706	932.411.248	579.448.656	
2.1.1	Belanja Pegawai	383.162.011	407.844.075	434.116.079	462.080.440	491.846.176	383.162.011	6,44
2.1.2	Belanja Bunga	6.835	6.158	5.547	4.997	4.502	6.835	
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	
2.1.4	Belanja Hibah	71.928.206	114.750.157	183.065.857	292.052.827	465.924.424	71.928.206	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.591.966	7.026.517	8.829.086	11.094.082	13.940.135	5.591.966	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	713.306	651.479	595.011	543.437	496.334	713.306	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	175.581.859	295.922.949	498.743.962	840.575.359	1.416.692.708	175.581.859	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG							
2.2	Belanja Langsung	470.832.419	521.459.679	577.530.743	639.630.967	708.408.651	470.832.419	
2.2.1	Belanja Pegawai	56.252.484	68.708.531	83.922.734	102.505.835	125.203.811	56.252.484	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	253.238.232	297.469.958	349.427.396	410.459.953	482.152.730	253.238.232	
2.2.3	Belanja Modal	169.889.613	176.547.929	183.467.198	190.657.647	198.129.904	169.889.613	
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG (2.21 s/d 2.2.3)							
D	JUMLAH TOTAL BELANJA DAERAH (B+C)							
E.	SURPLUS/(DEFISIT)							



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Uraian	APBDA.2016	APBDA.2017	APBDA.2018	APBDA. 2019	APBDA.2020	APBDA.2021	RATA- RATA(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	PEMBIAYAAN DAERAH							
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN							
3.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)							
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan							
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan							
3.1.4	Penerimaan Pinjaman							
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman							
3.1.6	Penerimaan Piutang							
F	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (3.1.1 s/d3.1.6)							
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah							
3.2.1	Pembentukan dana cadangan							
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah							
3.2.2.1.	Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalteng							
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang							
3.2.4	Pemberian Pinjaman							
G	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN							
H	Pembiayaan Netto (F-G)							
I	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA)(H+E)							



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara teknokratis, penentuan sesuatu atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala daerah atau kepala Bappeda.

Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Bagi daerah yang lebih berhasil menciptakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya melakukan upaya-upaya rutin untuk memantau peluang dan ancaman lingkungan eksternal. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah tidak lagi bersifat reaktif tetapi lebih antisipatif. Tanpa itu, akan banyak peluang-peluang penting akan hilang, dengan ancaman tidak dikenali atau terlambat diantisipasi.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, maka dirumuskan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Barito Selatan, sebagai berikut.



4.1 Permasalahan Pembangunan

Meskipun pembangunan di Kabupaten Barito Selatan relatif telah mengalami kemajuan, namun masalah-masalah mendasar yang akan dihadapi tahun-tahun mendatang cukup besar yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penyediaan infrastruktur serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Memperhatikan kondisi Barito Selatan saat ini, permasalahan pembangunan yang menjadi perhatian adalah:

1. Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai

Kabupaten Barito Selatan memiliki wilayah geografis yang dimana sebagian besar transportasi melewati alur sungai, sehingga pembangunan daerah bidang sarana prasarana infrastruktur memiliki berbagai kendala. Transportasi dari kecamatan ke ibukota kabupaten dan sebaiknya sebagian besar melewati sungai. Dimana hanya beberapa kecamatan yang bisa ditempuh lewat darat.

Dari Permasalahan “Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai”, ditegaskan dengan data dibawah ini:

a. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan jembatan, serta prasarana lalu lintas air antar kecamatan dan desa

Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting. Untuk mendukung transportasi darat, pemerintah daerah telah membangun jalan sepanjang 1.037,56 km jalan kabupaten, 30 km jalan negara dan 97,9 km jalan provinsi. Dari total panjang jalan kabupaten, sepanjang 152,56 km jalan sudah di-aspal atau sekitar 15 persen, 13 persen beton, 19 persen kerikil, dan sisanya (53 persen) tanah. Kondisi jalan yang baik sekitar 14,67 persen, sedang 42,55 persen, rusak ringan 28,44 persen dan yang rusak berat 14,34 persen.



Tabel 4.1
**Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Selatan (km),
2016**

Jenis dan Kondisi Jalan	Panjang Jalan
Jenis Permukaan	
1 Aspal	152,56
2 Beton	132,77
3 Kerikil	188,04
4 Tanah	540,20
Jumlah	1.013,57
Kondisi Jalan	
1 Baik	185,47
2 Sedang	420,46
3 Rusak Ringan	263,15
4 Rusak Berat	144,49
Jumlah	1.013,57

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka 2017

Berdasarkan tabel 4.1 panjang jalan Kabupaten yang berkondisi baik 185,47 km dan kondisi sedang sepanjang 420,46 km. Sehingga memerlukan fasilitas keselamatan jalan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Semakin membaiknya akses jaringan jalan ke semua wilayah baik antar kecamatan, kabupaten, hingga antar provinsi mesti diimbangi dengan pelayanan umum seperti jasa layanan angkutan secara terpadu untuk memenuhi lalu lintas jalan barat-timur dan utara-selatan. Kondisi sarana dan prasarana sektor angkutan, khususnya terminal yang memadai dan modern masih belum memadai.

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten yang memiliki jumlah ruas jalan cukup banyak yaitu sejumlah 207 ruas jalan. Sejak beberapa tahun terakhir kondisi sebagian jaringan jalan dan jembatan telah mengalami kerusakan yang cukup parah. Kondisi tersebut merupakan bentuk penggunaan infrastruktur oleh masyarakat sebagai alat pendukung perkembangan diberbagai segi kehidupan.

Walaupun tingkat kerusakan bervariasi dan lokasinya tidak merata namun kerusakan jaringan jalan dan jembatan tersebut telah mengganggu kelancaran arus transportasi darat yang akan menghambat kelancaran berbagai aktifitas kehidupan di masyarakat, baik aktifitas pemerintahan, aktifitas dunia usaha maupun aktifitas masyarakat itu sendiri.



Berdasarkan data Total Jumlah panjang jalan Kabupaten Barito Selatan, ditinjau dari Jalan yang mantap adalah 59,78% , hal tersebut terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya karena di samping bertambahnya jumlah panjang namun masih banyak yang belum fungsional. Pada RPJMD tahun 2017 sd 2022 perlu memprioritaskan peningkatan dan pemeliharaan jalan untuk menambah jalan mantap menjadi paling tidak 70,04% untuk seluruh jalan kabupaten. Pembangunan jalan baru dapat dilakukan bila sangat penting sekali seperti untuk menunjang pariwisata yang dicanangkan pemerintah. Hal tersebut dilakukan terkait dengan kelancaran arus transportasi barang dan orang dalam menunjang perbaikan ekonomi masyarakat.

Konektivitas Antar Wilayah Kecamatan Di Barito Selatan belum semua tersambung Jalan Darat

Wilayah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari 6 Kecamatan, dan 3 Kecamatan yakni Kecamatan Dusun Selatan, Gunung Bintang Awai dan Karau Kuala yang tersambung jaringan jalan kabupaten dapat teraksesibilitas dengan ibukota kecamatan, sedang 3 kecamatan (Dusun Utara, Dusun Hilir dan Jenamas) belum terhubung melewati jalan secara langsung dengan ibukota kabupaten, hanya dapat melewati angkutan sungai.

Pemerintah Daerah berencana untuk menyambung konektivitas antar kecamatan dengan ibukota kabupaten , dengan melakukan :

1. Untuk menghubungkan dari Kecamatan Jenamas ke ibukota Kabupaten dilakukan lanjutan peningkatan jalan , melalui jalan Nasional di Pasar Panas – Jalan Adaro - Jalan Rantau Kujang – Jenamas. Perlu dilanjutkan pembangunan Jalan yang sudah ada tersebut.
2. Untuk menghubungkan dari Kecamatan Jenamas ke Dusun Hilir direncanakan pembuatan Jalan Tambak Bajai (perbatasan dengan Kapuas)- Jalan Bakuta – Sei Jaya – Jl Mahajandau – Jalan Mengkatif yang diusulkan ditangani oleh Pemprov Kalteng.
3. Untuk menghubungkan kecamatan Karau Kuala menuju ibukota Kabupaten , dilakukan peningkatan jalan yaitu dari Bangkuang – Telang (Batas Kab.Barito Timur) sepanjang 6,5 km diteruskan jalan Telang/ Siong (jalan di wilayah Bartim).
4. Untuk menghubungkan kecamatan Dusun Utara ke ibukota kabupaten , dengan melanjutkan pembangunan jalan Kabupaten bernilai strategis (menuju ibukota kecamatan Dusun Utara ;



Pendang), dimulai dari titik nol di jalan Nasional (Palangka Raya-Timpah- Kalahien-Buntok) ke Pendang ,panjang jalan ; 16,96 km.

Disamping itu untuk menunjang Pariwisata Danau Malawen di bangun jalan kabupaten dari Jl.Barito Raya menuju Desa Sababilah sepanjang 4,8 km, disamping sebagai jalan alternatif masuk/keluar ke kota Buntok, karena saat ini satu satunya jalan masuk/keluar ke kota Buntok adalah Jalan Nasional ; Jalan Buntok –Ampah (km.6 muka di kantor Bappeda sd km.11,5 di Bundaran Sanggu) , dengan panjang 5,5 km).

Pengembangan Terminal angkutan Darat

Salah satu pengembangan prasarana wilayah yang terkait dengan rencana pengembangan transportasi adalah sarana dan prasarana terminal penumpang diantaranya adalah Terminal angkutan darat dimana bus antar propinsi atau bus antar wilayah dalam propinsi dapat melakukan transit sesuai dengan jalur tujuan.

Kondisi saat ini Kabupaten Barito Selatan memiliki 1 unit terminal tipe C di Kecamatan Dusun Selatan. Dengan memperhatikan rencana struktur ruang yang telah dirumuskan rencana sistem jaringan jalan dan keberadaan terminal yang ada, jenis dan kelas pelayanannya, maka rencana terminal angkutan penumpang dan barang sebagai penunjang operasional angkutan di Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut : Terminal Penumpang Buntok Tipe B, Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C di Bangkuang, Tabak Kanilan, Jenamas dan di Pendang, Terminal Barang Beringin Tipe B di Buntok.

b. Belum maksimalnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informasi yang mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan sehingga memerlukan biaya operasional dan perawatan sarana prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan.

Karakteristik geomorfologi pembentukan wilayah Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari daerah rawa dan daerah aliran sungai, menyebabkan Kabupaten Barito Selatan membutuhkan transportasi antar moda yang memadukan antara transportasi darat dan sungai.

Angkutan penyeberangan sebagai penghubung jaringan transportasi darat (jalan raya) dalam kerangka tatanan transportasi daerah berfungsi mempersatukan wilayah kabupaten yang terdiri dari beberapa sungai/anjir memegang peranan yang penting dan strategis. Selain itu, potensi sungai yang dapat dilayari sampai jauh ke pedalaman,



hususnya mengangkut batu bara dan kayu melalui sungai dalam jumlah besar, sehingga potensi ini perlu dikembangkan sebagai alternatif jalan raya atau angkutan sungai, jauh lebih murah daripada angkutan jalan raya. Alat angkutan terdiri dari perahu, *speed boat*, perahu rumah, kapal sungai, bus air, dan truk air.

Rencana moda angkutan penyeberangan lebih memanfaatkan keberadaan lokasi dan fungsi dermaga sungai dan anjir, terdiri dari:

- a) Pelabuhan (dermaga) sungai nasional, meliputi : Pendang, Kalahien, Buntok Kota, Bangkuang, Mangkatip, Kalanis, Ranga Ilung dan Jenamas pada Sungai Barito.
- b) Pelabuhan (dermaga) sungai provinsi, meliputi : Mangkatip pada Sungai Mangkatip dan Sungai Kalanis.
- c) Pelabuhan (dermaga) sungai kabupaten meliputi dermaga lokal yang berfungsi sebagai penunjang mobilitas perekonomian rakyat, menghubungkan daerah perdesaan terpencil dan belum berkembang, serta transportasi lainnya belum berkembang.

c. Masih Terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan

Pertanian merupakan sektor/sub-sektor yang memiliki laju pertumbuhan PDRB rata-rata relatif tinggi yaitu 2,60 persen. Oleh karena itu, ketersediaan dan operasional sarana irigasi teknis menjadi suatu kebutuhan untuk mendukung agar sektor pertanian terus dapat dipacu pertumbuhannya. Kondisi tersebut terlihat dengan data tahun 2016, dimana luas lahan pertanian dengan pengairan sederhana mencapai 35.094 Ha, sedangkan luas pengairan semi teknis 7.040 Ha. Luas lahan komoditi pertanian khususnya padi hybrida sebagian besar diarahkan di : Kecamatan Dusun Hilir 2.500 Ha; Kecamatan Dusun Selatan 2.000 Ha; Intensifikasikan lahan lebak yaitu di : Kecamatan Jenamas 80 Ha, Kecamatan Dusun Hilir 75 Ha, Kecamatan Karau Kuala 50 Ha, Kecamatan Dusun Selatan 50 Ha, Kecamatan GB Awai 25 Ha. Pengembangan usaha produksi padi : Kecamatan Karau Kuala 100 Ha. Pengembangan usaha produksi palawija : Kecamatan Dusun Utara 85 Ha, Kecamatan GB Awai 125 Ha.

Apabila dikaitkan dengan ketersediaan air untuk irigasi, dapat dikatakan bahwa wilayah Kabupaten Barito Selatan yang subur adalah



wilayah yang berada di dekat aliran Sungai Barito. Wilayah Kabupaten Barito Selatan bagian utara kurang subur karena wilayah tersebut merupakan perbukitan bergelombang yang kedalaman tanahnya dangkal dan kekurangan air untuk mengairi tanam-tanaman. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk memanfaatkan danau yang ada merupakan salah satu cara menataguna air di Kabupaten Barito Selatan agar lahan di wilayah tersebut menjadi lebih produktif. Kebijakan pembuatan sumur bor juga merupakan salah satu cara mengatasi kekurangan air di wilayah tersebut sehingga lahan menjadi lebih produktif untuk tanaman perkebunan. Kebijakan yang perlu diambil terkait dengan pengembangan kawasan pertanian adalah mempertahankan lahan pertanian yang sudah ada, baik pertanian lahan basah maupun pertanian lahan kering.

Kawasan pertanian umum diarahkan tersebar di bagian tengah Kabupaten Barito Selatan, yaitu Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Karau Kuala dan Kecamatan Dusun Hilir. Dengan semakin tingginya perubahan fungsi tanah pertanian menjadi kawasan terbangun, maka untuk mempertahankan kawasan pertanian khususnya sawah beririgasi teknis dan lahan abadi pertanian pangan (sawah abadi) ini perlu ditingkatkan intensifikasinya. Untuk menunjang peningkatan dari nilai manfaat melalui peningkatan pelayanan irigasi dari setengah teknis menjadi teknis dan sederhana menjadi setengah teknis. Pengembangan sawah selain padi juga dilakukan penerapan sistem mina padi, tumpang sari dan sebagainya.

d. Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat

Berbagai sumber energi yang dimiliki oleh masyarakat Barito Selatan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan pemanfaatan sumber energi listrik yang hingga saat ini masih hanya bisa dinikmati oleh warga diperkotaan sementara untuk wilayah pedalaman/perdesaan belum seluruhnya mampu menikmati fasilitas listrik.

Terdapat rencana pengembangan PLTU di Kabupaten Barito Selatan, dimana di rencanakan di Kota Buntok yang merupakan lokasi yang potensial karena sebagai pusat pertumbuhan/PKL di Kabupaten Barito Selatan. PLTU Buntok ini direncanakan dengan memanfaatkan hasil batubara di Kecamatan GB Awai dan Dusun Utara yang di distribusikan melalui Sungai Barito. Proyeksi kebutuhan listrik sampai dengan tahun 2015, kebutuhan total (VA) di Barito Selatan adalah 45.182.280 VA. Sedangkan pada tahun 2030 ditargetkan semua desa dan dusun terlayani oleh listrik.



Tabel 4.2 Rasio Elektrifikasi (%) di Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Data Desa dan Data Rumah Tangga Tahun 2012 – 2016

No.	Rasio Elektrifikasi	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Desa Berlistrik	64,52	73,68	79,57	81,72	89,25
2.	Desa Belum Berlistrik	35,48	26,32	20,43	18,28	10,75
3.	Rumah Tangga Berlistrik	77,00	75,20	80,70	81,81	82,19
4.	Rumah Tangga Belum Berlistrik	23,00	24,80	19,30	18,19	17,81

Sumber : Memori Bupati 2016

Dari data diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

- Peningkatan persentase desa yang berlistrik dari tahun 2012 s/d tahun 2016 sebesar 24,73 %.
- Peningkatan persentase rumah tangga berlistrik dari tahun 2012 s/d tahun 2016 sebesar 5,19 %.
- Sampai dengan tahun 2016 dari 93 desa/kelurahan di Kabupaten Barito Selatan terdapat 83 desa yang sudah berlistrik dan 10 desa yang belum berlistrik.
- Sampai dengan tahun 2016 dari 34.463 jumlah rumah tangga di Kabupaten Barito Selatan 28.324 rumah tangga sudah berlistrik atau 82,19 % dan masih terdapat 6.139 rumah tangga belum berlistrik atau sebesar 17,81%.

Jumlah pembangkit dan jaringan listrik yang dibangun oleh pemerintah non PT. PLN (Persero) sampai dengan tahun 2016 yaitu:

- Pembangkit PLTD = 22 unit dengan total daya terpasang 2.145 kVA.
- Pembangkit EBT (PLTS) = 561 unit dengan total daya terpasang 131.855Wp.
- Panjang jaringan listrik 13.455 meter sirkuit.

Pengelolaan Sumber Energi Listrik yang operasional/menyala dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan. Dari 93 Desa/Kelurahan tersebut, sampai dengan tahun 2016 yang dikelola oleh PT. PLN (Persero)



sebanyak 48 desa, pemerintah sebanyak 35 desa dan 10 desa belum berlistrik.

Berdasarkan data saat ini jumlah rumah tangga yang belum teraliri listrik sebanyak 6.139 dari 32.263 rumah tangga. Sementara rumah tangga yang teraliri pembangkit listrik non PLN 6.441 sedangkan yang menggunakan PLN 21.883. Dengan rasio elektrifikasi desa berlistrik sebanyak 89,25 persen dan rasio elektrifikasi rumah tangga berlistrik 82,19 persen. Bagi desa yang belum teraliri listrik baik PLN dan non PLN, pemerintah daerah berupaya mengusulkan agar bagaimana desa-desa itu dapat menikmati penerangan listrik negara tersebut seperti desa lainnya. Karena sejak kewenangan distamben dialihkan ke provinsi. Otomatis kewenangan pembangunan tenaga kelistrikan juga dilimpahkan ke Provinsi.

e. Sarana Air Bersih

Ketersediaan air disamping untuk kepentingan pertanian, juga sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan air bersih di Kabupaten Barito Selatan sampai saat ini sudah terpenuhi dengan baik, namun pemerintah tetap terus berupaya untuk mencari alternatif lain dalam pemenuhan akan air bersih dimasa yang akan datang.

f. Persampahan

Sumber utama timbunan sampah di kawasan perkotaan yaitu sampah domestik (rumah tangga) dan sampah non domestik meliputi sampah intitusional (sekolah, kantor, dll), sampah komersial (pasar, toko, dll), sampah aktivitas perkotaan (penyapuan jalan, lapangan, dll), sampah klinik, sampah industri, sampah konstruksi, dan lain sebagainya. Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Barito Selatan dikelola langsung oleh masyarakat secara perorangan atau berkelompok. Secara perorangan sampahnya dikelola dengan cara membakar, menanam, ataupun mengupah seseorang dengan peralatan angkutnya untuk membuang sampah ketempat pembuangan sampah yang telah disediakan.

Untuk kebutuhan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten sudah menyediakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di berbagai titik di dalam kota maupun luar kota. Penyediaan petugas seperti penyapu jalan, pengangkut sampah dan pembersih saluran/got sudah pula disediakan oleh pemerintah beserta prasarana transportasi seperti pick up dan truk sampah.



**Tabel 4.3 Progres Kegiatan Bidang Kebersihan
Di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 – 2016**

No.	Kegiatan	Tahun	
		2011	2016
1	Jumlah TPS	10 buah	16 buah
2	Jumlah TPA	1 buah	1 buah
3	TenagaKerja : a. Penyapu Jalan b. PengangkutSampah c. Pembersih Saluran / Got	115 orang 27 orang 10 orang	150 orang 27 orang 10 orang
4	TrukSampah	4 buah	8 buah
5	Pick Up	-	2 buah

Sumber : Memori Bupati 2016

2. Masih rendahnya kapasitas ekonomi daerah

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi terkait dengan finansial dan kebutuhan baik primer, sekunder, maupun tersier. Trend positif ditunjukkan oleh perkembangan perekonomian Kabupaten Barito Selatan dengan pertumbuhan yang relatif stabil pada kurun waktu lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi ini menjadi potensi bagi peningkatan perekonomian kabupaten utamanya pada sektor-sektor unggulan seperti sektor pertanian, industri pengolahan, ataupun pertambangan dan penggalan. Dalam skala Kabupaten Barito Selatan, perekonomian memang berkembang dari tahun ke tahun, namun perlu digarisbawahi terkait pemerataan perkembangan perekonomian di setiap wilayah regional administrasi masih kurang efisien dalam pergerakan roda perekonomian wilayah utamanya daerah terpencil/pelosok.

Permasalahan pemerataan pergerakan ekonomi menjadi penghambat utama perkembangan wilayah suatu daerah. Hal ini dikarenakan produktivitas setiap wilayah akan mengalami ketimpangan



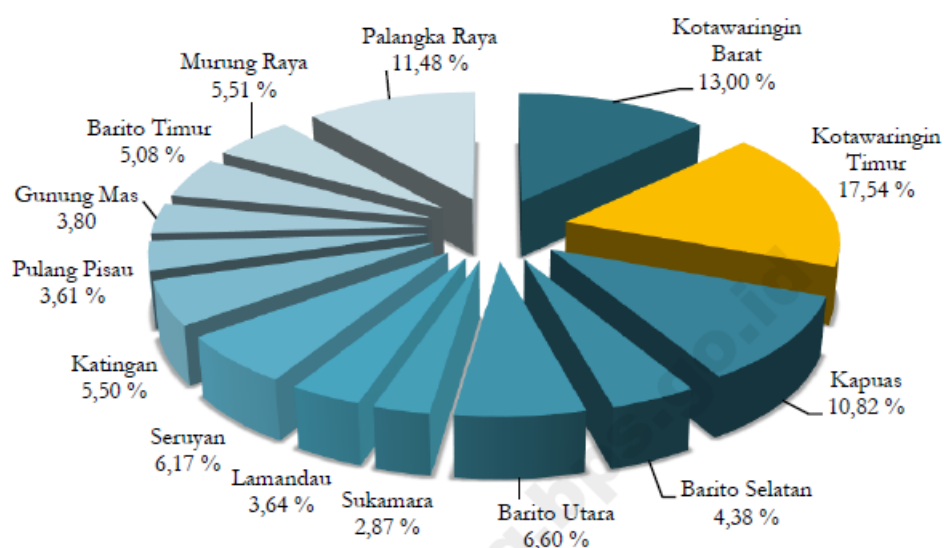
yang menyebabkan secara kumulatif pembangunan daerah berjalan tidak seimbang. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus selalu memberi perhatian lebih terhadap wilayah-wilayah yang masih memiliki kesulitan pergerakan ekonominya. Ekonomi Barito Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir relatif berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dan di antara kabupaten/kota secara keseluruhan, yaitu berada di kisaran 5 - 6 persen.

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dapat dilihat melalui angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan (rill) secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku nominal yang menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/regional. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

Dilihat dari segi ekonomi, PDRB ADHB Barito Selatan tahun 2016 menduduki urutan kesepuluh se-Kalimantan Tengah dengan nilai 4,487,2 triliun rupiah. Sementara untuk laju pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Barito Selatan menduduki urutan kesebelas se-Kalimantan Tengah dengan tingkat pertumbuhan 5,62 persen dimana masih berada dibawah angka laju pertumbuhan Kalimantan Tengah sebesar 7,01 persen.

Gambar 4.1 Kontribusi PDRB Kabupaten Barito Selatan dalam Pembentukan PDRB Kalimantan Tengah 2016



Sumber: Produk Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, BPS Kalteng 2017



Tabel 4.4
Perbandingan Indikator Terpilih
Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah 2015-2016

Kabupaten / Kota	PertumbuhanPenduduk (%)	IPM (%)	2015*	2016*
Kotawaringin Barat	3,16	70,60	7,32	5,81
Kotawaringin Timur	2,41	68,61	7,62	7,95
Kapuas	0,90	66,07	7,26	7,29
Barito Selatan	1,06	68,27	5,59	5,62
Barito Utara	0,78	67,38	5,20	5,48
Sukamara	4,01	65,80	6,02	6,19
Lamandau	3,03	68,30	6,74	6,75
Seruyan	4,32	64,77	5,12	5,48
Katingan	1,68	66,81	6,52	6,54
Pulang Pisau	0,67	65,76	7,80	6,06
Gunung Mas	2,31	69,24	6,96	7,00
Barito Timur	2,94	69,71	5,15	5,50
Murung Raya	2,47	66,46	6,85	5,68
Palangkaraya	3,08	78,50	7,18	6,92

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Barito Selatan 2017

Ket.: * Pertumbuhan Ekonomi

Dari gambar 4.1 dan tabel 4.4 terlihat bahwa kontribusi Kabupaten Barito Selatan dalam pembentukan PDRB Kalimantan Tengah sebesar 4,38% sementara pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan kenaikan dari 5,59% di tahun 2015 naik menjadi 5,62%. Ini menunjukkan bahwa kemampuan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah Barito Selatan yang timbul dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tersebut relatif stagnan atau relatif kurang berkembang maksimal. Jika dicermati PDRB kabupaten Barito Selatan masih bergantung pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 19,62% diikuti Pertambangan dan Penggalan 18,62%. Subkategori penyumbang terbesar terhadap Kategori Pertanian antara lain Subkategori Perkebunan yakni sebesar 39,84 persen, Subkategori Perikanan menyumbang sebesar 30,67 persen, kemudian disusul Subkategori Peternakan yakni sebesar 12,69 persen. Adapun subkategori lainnya seperti Subkategori Tanaman Pangan, Subkategori Tanaman Hortikultura, Jasa Pertanian dan Perburuan, serta Subkategori Kehutanan dan Penebangan Kayu hanya memberikan kontribusi masing-masing dibawah 10 persen. Sementara, kontribusi terkecil dari Jasa Perusahaan 0,02% dan Listrik dan Gas 0,04%.

Isu terhadap “**Masih rendahnya kapasitas ekonomi daerah**” dapat ditelaah dengan analisa data sebagai berikut :



1) **Belum optimalnya pengelolaan SDA Barito Selatan**

Disebutkan bahwa kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Barito Selatan adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan diikuti pertambangan dan penggalian. Meskipun memberi kontribusi yang besar namun dengan luas wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah 702.009,90 hektar, SDA belum sepenuhnya optimal dimanfaatkan. Untuk perkebunan rakyat misalnya, dari luas tersebut, penggunaan lahan untuk perkebunan rakyat Barito Selatan 33.746,01ha dimanfaatkan untuk 10 komoditas (atau hanya 4,8 %). Sementara total perkebunan rakyat di DAS Barito seluas 193.401 hektare (ha). Di Kabupaten Murung Raya seluas 52.381,64 ha (5 komoditas), Barito Utara 51.780,85 ha (10 komoditas) , Barito Timur 55.510,81 ha (8 komoditas). Luasan perkebunan rakyat ini tidak sebanding dengan konsesi yang diperoleh perusahaan perkebunan skala besar. Data jumlah perkebunan besar swasta (PBS) se-DAS Barito mencapai 98 unit dengan luas konsesi mencapai 1,25 juta.

Disektor kategori Pertambangan dan Penggalian, secara keseluruhan pada tahun 2016, laju pertumbuhan mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 3,77 persen setelah tahun sebelumnya mengalami penurunan hingga mencapai 0,61 persen. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya Subkategori Pertambangan Batubara dan Lignit sebesar 3,57 persen yang disebabkan karena perusahaan-perusahaan tambang batubara di Barito Selatan sudah mulai beroperasi setelah pada tahun 2015 perusahaan tersebut tutup. Adapun Subkategori Pertambangan dan Penggalian Lainnya hanya mampu tumbuh sebesar 5,84 persen setelah sebelumnya tumbuh hingga mencapai 6,76 persen

Hal ini menunjukkan ekonomi Kabupaten Barito selatan masih bergantung pada sumber daya alam (*Resource base*). Dengan demikian bila sektor-sektor tersebut mengalami kendala seperti tidak beroperasi maka akan berimbas pada perekonomian Barito Selatan secara keseluruhan.

2) **Ekonomi masyarakat belum diberdayakan secara optimal**

Permasalahan ekonomi masyarakat yang belum diberdayakan secara optimal dapat dilihat dari berbagai data sebagai berikut:

a) Pola pengeluaran konsumsi masyarakat

Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat ialah dengan melihat pola pengeluaran konsumsi



masyarakatnya. Jika persentase pengeluaran untuk non makanan semakin tinggi, maka hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan, begitu pula sebaliknya. Pola pengeluaran untuk konsumsi makanan masyarakat Barito Selatan selama periode waktu 2013-2015 lebih tinggi dibandingkan konsumsi non makanan, yakni mencapai 60 persen. Akan tetapi pada tahun 2014 dan 2015, terjadi penurunan pola konsumsi makanan dan terjadi kenaikan pola konsumsi non makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat Barito Selatan dibandingkan periode sebelumnya. Terjadi penurunan persentase penduduk yang pengeluarannya diatas satu juta rupiah pada tahun 2015 yakni hanya sekitar 16,38 persen. Jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2014 dengan persentase penduduk mencapai 17,50 persen.

b) Penghimpunan dana perbankan

Selama kurun waktu 2012-2014, perkembangan dana perbankan di Barito Selatan terus meningkat. Dana masyarakat Barito Selatan yang terkumpul di Bank pada tahun 2014 yakni sebesar 12,38 triliun rupiah yang simpanannya berupa tabungan, giro, dan deposito. Jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 71,28 persen dibandingkan dengan tahun 2013. Jika dilihat menurut jenis dana yang dihimpun, jenis dana tabungan yang paling besar nilainya yaitu mencapai 5,65 triliun rupiah. Sedangkan jenis dana giro dan deposito masing-masing sebesar 4,57 dan 2,16 triliun rupiah. Meskipun demikian, perkembangan perbankan Barito Selatan sampai dengan tahun 2017 belum sebesar kabupaten lainnya daerah lainnya di Kalimantan Tengah. Ini bisa dilihat dari share penyaluran kredit perbankan terhadap Kalimantan Tengah hanya mencapai 3,45 % dibandingkan dengan Kotawaringin Timur 43,90% dan kota Palangka Raya 28,13. Kita ketahui bahwa besarnya penyaluran kredit perbankan menjadi indikator kebutuhan dana bagi semua sektor usaha yang penggunaannya akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Misalnya penyaluran kredit untuk sektor UMKM yang menjadi bagian terbesar dari aktivitas ekonomi masyarakat.

Permasalahan dalam bidang ekonomi lainnya antara lain menyangkut optimalisasi lahan pertanian, ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, pengembangan industri hilir, penanganan budidaya perikanan, pengembangan tata niaga komoditas, pemanfaatan potensi tambang, dan masih rendahnya investasi.



c) Kemampuan Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) dapat dilihat melalui beberapa parameter untuk menilai kemampuan fiskal yaitu Indeks Kapasitas Fiskal (IKF), Tingkat Ketergantungan Daerah (TKtD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

IKF adalah indeks kemampuan keuangan melalui APBD untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) adalah penjumlahan PAD, DAU, DBH, DAK, Transfer Provinsi, Lain-Lain Pendapatan yang Sah, dikurangi Belanja Pegawai yang dibagi dengan Jumlah Penduduk Miskin.

Tingkat Ketergantungan Daerah (TKtD) adalah rasio antara Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) dan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini mengukur kontribusi keuangan pusat terhadap pengembangan daerah.

PDRB digunakan untuk melihat *size* ekonomi daerah. PDRB yang besar mengindikasikan bahwa jumlah nilai barang dan jasa akhir semua unit dari daerah tersebut adalah besar.

Dari analisis menunjukkan bahwa Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) kabupaten Barito Selatan sebesar 0,77. Angka ini dimaknai bahwa daerah ini masuk kategori Kapasitas Fiskal Sedang. Nilai Tingkat Ketergantungan Daerah (TKtD) sebesar 84% (masuk kategori sangat tergantung) dan jumlah PDRB sebesar 4667.895 (kategori rendah). Kesimpulan dari analisis ini adalah Kabupaten Barito Selatan masuk dalam kelompok daerah dengan tingkat sangat tergantung (Instruktif) – ketergantungan fiskal dinyatakan besar atau kinerja anggaran tidak baik.

**Tabel 4.5 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Selatan**

Parameter	Nilai	Kategori
IndeksKapasitasFiskal	0,77	Kapasitas Fiskal Rendah
Tingkat Ketergantungan Daerah (TKtD)	84%	Sangat Bergantung
PDRB	4666.895	Size Ekonomi Kecil

Sumber: Book 1. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kalimantan Tengah.
Disarikan dari Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia. 2017



3. Masalah sumberdaya manusia

Di bidang sumber daya manusia permasalahan dan tantangan yang dihadapi antara lain belum meratanya jenjang pendidikan di daerah karena kondisi wilayah yang terpencil. Di samping itu juga kualitas pendidikan masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan peserta didik yang disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, terbatasnya jumlah guru dan belum memadainya fasilitas belajar terutama buku pelajaran, peralatan peraga pendidikan karena terbatasnya dana yang tersedia.

Kabupaten Barito Selatan memiliki berbagai masalah dalam dunia pendidikan, di antaranya karena terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, belum maksimalnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan, masih rendahnya tingkat kualitas dan kesejahteraan guru, serta masih terbatasnya mutu pendidikan. Sumber daya manusia Barito Selatan masih perlu ditingkatkan. Dari jumlah penduduk 131.721 jiwa tingkat pendidikan penduduk tidak tamat SD mencapai 2,95%, SD 2,67%, SLTP 9,62%,, SLTA 62,19%, SMK 4,29%,, D1 dan D3 1,02%, Universitas 17,24%.

Tabel 4.6
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Barito Selatan

No.	Jenjang Pendidikan	JumlahCapaianKinerja APS (%)			JumlahSeluruh APS (Orang)		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	SD / MI	0,048	0,043	0,040	50	45	21
2	SMP / MTs	0,020	0,190	0,060	21	20	21
3	SMA/SMK/MA	0,330	0,320	1,62	34	33	28

Sumber : Dinas Pendidikan

Kualitas angkatan kerja relatif masih rendah tingkat SDM yang bekerja terlihat dari tingkatan pendidikan 42,92 % yang bekerja diberbagai sektor memiliki tingkat pendidikan dasar tidak/belum tamat SD/ sederajat.

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) jelas akan membawa pengaruh terhadap kemampuan penyerapan pertumbuhan angkatan kerja yang selalu meningkat setiap tahun, baik akibat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), maupun bertambahnya tingkat setengah pengangguran. Pertumbuhan tingkat partisipasi angkatan kerja tahun sebesar % baik



untuk angkatan kerja laki-laki maupun perempuan. Kesempatan kerja yang ada memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sehingga angkatan kerja yang tidak berhasil terserap merupakan masalah yang harus dicarikan solusinya secara bersama-sama.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia juga menghadapi tantangan karena rasio dokter (dokter umum) per-jumlah penduduk relatif belum ideal karena seorang dokter umum harus menangani lebih dari 6.206 orang penduduk. Pada tahun 2016 jumlah keseluruhan dokter berjumlah 36 orang, untuk jumlah penduduk sebesar 131.721 jiwa, sehingga seorang dokter spesialis harus melayani lebih dari 20.688 jiwa. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di, khususnya di Barito Selatan belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Sebagian besar penduduk Barito Selatan bermukim di kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan umumnya dicirikan oleh lemahnya daya dukung dan kualitas SDM lokal, antara lain rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, terbatasnya infrastruktur terbatas, akses kesehatan, minimnya akses pendidikan, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman perdesaan. Lemahnya daya dukung dan kualitas SDM lokal akan menentukan daya saing yang akan mempengaruhi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Beberapa isu terkait lemahnya daya dukung dan kualitas SDM perdesaan tersebut, antara lain: (1) rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (2) masih tingginya jumlah desa tertinggal dengan kondisi terbatas bidang infrastruktur, akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian rakyat yang belum berkembang serta kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih rendah. Sumberdaya manusia kesehatan menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Selatan masih kekurangan tenaga kesehatan. Masih kekurangan dokter umum, dokter gigi, perawat, dan bidan. Kekurangan tenaga kesehatan itu khusus untuk wilayah kecamatan. Kalau di Kota Buntok sudah cukup. Ada beberapa puskesmas di kecamatan yang masih kekurangan dua tenaga dokter yakni dokter umum dan dokter gigi serta satu orang perawat. Kalau untuk desa, tenaga kesehatannya masih kekurangan bidan.



4. Masalah Pertanian

Di bidang pertanian dihadapkan pada rendahnya daya saing dan nilai-nilai produk-produk pertanian dan masih ketergantungan terhadap import pangan dan peningkatan keragaman pengolahan produk pertanian yang mempunyai nilai jual yang kompetitif. Walaupun memiliki beragam hewan ternak, secara umum Kabupaten Barito Selatan mengalami produksi perternakan masih sangat terbatas dibandingkan dengan pertumbuhan dan kebutuhan konsumsi. Rata-rata konsumsi daging di Kabupaten Barito Selatan tahun 2015 sebesar 662.149 ton/tahun atau setara dengan 5,10 kg/kapita/tahun dan sebagian besar didatangkan dari luar yang mencapai 1.308,7 ton/tahun.

Perkebunan karet yang luas dan produktif saat ini belum termanfaatkan secara optimal. Kapasitas terpakai industri pengolahan getah karet baru mencapai 60%. Hal ini karena bahan baku masih banyak dijual ke Banjarmasin karena adanya persaingan harga. Jenis tanaman yang mempunyai potensi sebagai produk unggulan di wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah :

- a. Budidaya tanaman kopi (GB.Awai, Dusun Selatan.
- b. Budidaya tanaman kelapa (seluruh kecamatan terutama GB.Awai)
- c. BUdidaya tanaman jagung (seluruh kecamatan terutama GB.Awai)
- d. Budidaya tanaman karet (Dusun Utara, Dusun Selatan, Karau Kuala dan GB.Awai)
- e. Budidaya tanaman kelapa sawit (Dusun Utara, Dusun Selatan, dan GB.Awai)

Perairan Umum, Kabupaten Barito Selatan memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan panjang 900 km, di daerah aliran sungai tersebut bermuara anak-anak sungai serta terdapat danau (besar-kecil) dan rawa-rawa, kawasan ini mempunyai potensi untuk perikanan budidaya, tangkap dan daerah konservasi serta dapat pula menjadi bisnis agrowisata seperti di Danau Sababilah.

- Perairan Budidaya, Sarana Pendukung:
 - Keramba percontohan di rantau kujang dan Mangkatip masing-masing 1 Unit
 - Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Mangkatip 100 Ha
 - Balai Benih Ikan (BBI) di Palurejo Kecamatan GB.Awai 205 Ha
 - Stasiun Benih Ikan Lokal di Mangkatip 0.25 Ha.
 - Stasiun Pendaratan Ikan Perairan Umum (SPIPU) & Pasar Benih di Kecamatan Dusun Selatan 0.25 Ha.



5. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam usaha mencapai reformasi birokrasi pemerintah daerah yang optimal terutama dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, sekurang-kurangnya terdapat empat elemen penting yang meliputi: *accountability, transparency, predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan yang belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; pelayanan publik yang belum berkualitas; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

a. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel

Reformasi birokrasi yang belum terintegrasi di Kabupaten Barito Selatan, permasalahan ini dapat dipertajam dengan analisa data sebagai berikut:

1. Opini BPK
2. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten
5. Penindakan kasus korupsi

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan, Kabupaten Barito Selatan dapat dikatakan telah mencapai target dengan hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari positifnya hasil opini audit BPK Provinsi Kalimantan Tengah pada Tabel 4.6

T



abel 4.6
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 – 2016

Tahun	Opini BPK
2011	Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/Disclaimer
2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2013	Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/Disclaimer
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/Disclaimer
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Perkembangan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Barito Selatan selama lima tahun terakhir dari 2011 sampai 2016 mendapat opini yang berbeda-beda dari BPK. Mulai dari Tidak Memberi Pendapat (Disclaimer), Wajar Dengan Pengecualian, dan wajar Tanpa Pengecualian yang baru diraih pada tahun 2016.

Sebelum tahun 2016, Barito Selatan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP) dalam audit LKPD yang dilakukan BPK. BPK tak memberikan pendapat alias disclaimer atas laporan tersebut. Kondisi tersebut terjadi karena

- a. Pelaksanaan SAP dan pelaporan keuangan belum memadai.
- b. Tata kelola belanja dan pendapatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Sistem pengendalian intern belum optimal.
- d. Tata kelola aset belum optimal.

Atas permasalahan tersebut, kedepan perlu merumuskan strategi yang tepat dan meningkatkan komitmen melalui berbagai cara antara lain:

1. Penguatan komitmen integritas pimpinan, para pengelola, dan para pelaksana kegiatan.
2. Penguatan SPIP.
3. Penguatan perencanaan dan penganggaran.
4. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan.
5. Peningkatan kualitas proses pengadaan barang/jasa.
6. Pembenahan penatausahaan BMN agar tercapai 3 T (Tertib Administrasi, Tertib Fisik dan Tertib Hukum).
7. Penguatan monitoring dan evaluasi.
8. Peningkatan kualitas pengawasan dan reviu Laporan Keuangan.
9. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan audit Inspektorat.



Kedepan upaya untuk perbaikan dalam rangka mempertahankan opini WTP, antara lain:

1. Menyusun dan menerapkan Pedoman Pengelolaan PNBPN yang mengatur mekanisme proses pendaftaran jasa terintegrasi dengan pembayaran PNBPN secara elektronik (*e-payment*).
2. Memperbaiki dan menerapkan Pedoman Penatausahaan BMN, termasuk penatausahaan dan pelaporan persediaan serta metode penilaian persediaan baku pembandingan berdasarkan harga perolehannya.
3. Menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tentu harus dilaksanakan oleh setiap satker dalam upaya mencapai kualitas Laporan Keuangan yang baik. Melalui perbaikan dan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja program dan kegiatan, maka opini WTP dapat dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Angka IDI 2016 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil, aspek Hak-hak Politik dan aspek Lembaga Demokrasi. Untuk capaian demokrasi 2016 nilai indeks aspek Kebebasan Sipil sebesar 84,98; aspek Hak-hak Politik sebesar 70,66; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 68,43. Gambaran IDI di Barito Selatan menggunakan data agregasi dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016 sebesar 74,77 dalam skala 0 sampai 100, angka ini naik 1,31 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2015 yang hanya berada di angka 73,46. Capaian kinerja demokrasi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60).

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintah merupakan salah satu permasalahan birokrasi yang harus diberantas. Begitu pula di Kalimantan Tengah, KKN harus menjadi perhatian utama oleh bidang terkait agar jumlah kasus KKN dapat diminimalisir. Pencegahan KKN dapat dilakukan dengan fokus pada monitoring pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi menyeluruh agar tidak ada celah bagi aparatur negara untuk melakukan praktek KKN. Dari data berikut terlihat bahwa Kabupaten Barito Selatan memiliki jumlah kasus penindakan KKN yang paling tinggi yakni pada tahun 2015 terjadi 11 kasus jika dibandingkan dengan kabupaten lain yaitu Palangka 15 kasus; Kasongan 12 kasus; Pulpis 7 kasus; 29 kasus; Buntok 11 kasus, dan Tamiang Layang 9 kasus. Kemudian, Kejari Muara Teweh 6 kasus; Puruk



Cahu 5 kasus; Kuala Kurun 8 kasus; Sampit 14 kasus; Pangkalan Bun 9 kasus; Nanga Bulik 7 kasus; Sukamara 15 kasus; dan Kejari Kuala Pembuang 13 kasus dugaan korupsi.

4.2 Isu-isu Strategis

1. Kebijakan Internasional (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Tujuan pembangunan dalam Millennium Development Goals (MDGs) sebagai nomenklatur tidak akan berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs, dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global lebih ditekankan dan diprioritaskan. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan kurun waktu selama 15 tahun program MDGs berjalan. Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *depletion* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Kerangka Pembangunan Paska 2015 menjadi salah satu isu yang dibahas di KTT Rio. Ada tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs, yaitu :

Indikator pertama yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs paska MDGs 2015, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan. Di antaranya segala sesuatu itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*, serta juga ditentukan apakah ini difokuskan pada negara berkembang atau negara maju. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang harus dicapai hingga 2030 yaitu:



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022

Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

1. Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang
2. Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan
3. Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia
4. Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak.
5. Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak
6. Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua
7. Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energy untuk semua
8. Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak.
9. Membangun infrastruktur yang memiliki keandalan, dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi
10. Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara
11. Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan.
12. Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi
13. Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya
14. Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, mengembalikan, dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/ menghentikan penurunan, dan mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati.
16. Mendukung perdamaian dan ketebukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan dan kelembagaan terbuka pada setiap level.
17. Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2. Kebijakan Nasional: Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019

Isu-isu secara nasional yang memiliki potensi besar mempengaruhi arah pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah pada masa mendatang adalah kebijakan dari Pemerintah. Dokumen perencanaan tingkat nasional merupakan salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti



karena penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN dan RPJPD, serta harus mengacu pula pada RPJPN. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada periode ini, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan **visi RPJM Nasional tahun 2015-2019** sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui **Misi RPJMN 2015-2019** sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara,
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,



3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,
8. Melakukan revolusi karakter bangsa, dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019 yang dilaksanakan pada pemerintahan saat ini, salah satunya memiliki tema pokok maupun fokus pada pengembangan wilayah Kalimantan baik sebagai bagian dari Indonesia dengan pengelolaan potensi sumber daya alamnya maupun sebagai bagian dari internasional dengan hutan tropisnya sebagai paru-paru dunia.

Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terluas yang dimiliki Negara Indonesia yang terletak di tengah-tengah wilayah Indonesia sehingga memiliki posisi geografis yang strategis. Selain itu, sumber daya alam yang dimiliki Pulau Kalimantan menjadikan pulau Kalimantan memiliki posisi yang strategis baik pada koridor nasional, regional ASEAN, hingga global atau internasional. Dalam koridor nasional, wilayah Kalimantan memiliki peranan sebagai pengeksport batu bara di beberapa Negara ASEAN dan juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan perkebunan sawit pada level nasional maupun ASEAN. Sedangkan pada level internasional, selain sebagai paru-paru dunia juga Kalimantan merupakan salah satu penghasil sumber daya mineral yang tinggi sebagai sumber energi kehidupan manusia saat ini.

3. Kebijakan Strategis Regional: Pulau Kalimantan

1. Pengembangan Wilayah Kalimantan (Buku III RPJMN 2015-2019: Agenda Pengembangan Wilayah)

Pada perencanaan pembangunan nasional periode 2015-2019, tema pengembangan wilayah regional Kalimantan sesuai RPJMN 2015-2019 (Buku III: Agenda Pengembangan Wilayah) adalah:



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

1. Mempertahankan fungsi **Kalimantan sebagai paru-paru dunia**, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir;
2. **Lumbung energi nasional** dengan pengembangan hilirisasi komoditas batubara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomasa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi;
3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa; dan
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan pengembangan wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan pada keunggulan dan potensi daerah masing-masing, melalui:

- 1) Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon, dan pasir kuarsa;
- 2) Penyediaan infrastruktur wilayah;
- 3) Peningkatan SDM serta ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Adapun sasaran untuk Wilayah Pulau Kalimantan adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 45% untuk provinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD provinsi sebesar 35% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 provinsi dan 27 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan; (4) Terlaksananya penggunaan *block grant* (inpres) yang efektif dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah; (5) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 50% dan S2-S3 sebesar 10%; (6) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalimantan sebesar 75 angkatan; (7) Meningkatnya



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (8) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (9) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (10) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Kalimantan; (11) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; (12) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara *on-line* di wilayah Kalimantan.

Sasaran penanggulangan bencana adalah **mengurangi indeks resiko bencana** pada 18 kabupaten/kota sasaran (Kota Pontianak, Kota Singkawang, **Kota Palangka Raya**, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Laut, Kapuas, Kutai Kertanegara, Nunukan) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang memiliki berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya.

Diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Pulau Kalimantan terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 8,7 persen (2013) menjadi 9,6 persen (2019). Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2015-2019 di Wilayah Pulau Kalimantan adalah sebagai berikut.

- a. secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan;
- b. Membangun dan memberikan perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana;
- c. Pengurangan resiko bencana berbasis komunitas melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana di kabupaten/kota;
- d. Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan 1 (satu) unit pusat logistik kebencanaan di wilayah pulau Kalimantan yang dapat menjangkau wilayah terpencil;



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Sesuai dengan Buku III RPJMD 2015-2019 (Agenda Pengembangan Wilayah), beberapa program strategis di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah
sesuai RPJMN 2015 - 2019

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional
PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG
1. Pembangunan Jalur KA : Kudangan – Nanga Bulik – Kumai
2. Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang – Tumbang Samba – Sampit- Kuala Pembuang – Teluk Segintung
3. Pembangunan Jalur KA Tumbang Samba – Rantau Pulut -Nanga Bulik
4. Pembangunan Jalur KA Kuala Kurun – Rabambang – Palangka Raya – Pulang Pisau – Batanjung (Kuala Kapuas)
5. Pembangunan Jalur KA Puruk Cahu – Bangkuang/Mangkatip - Batanjung
6. Pembangunan Jalur KA Banjarmasin-Palangka Raya
PERHUBUNGAN UDARA
1. Pengembangan Bandara Tjilik Riwt
2. Pembangunan Bandara Muara Teweh
PERHUBUNGAN LAUT
1. Pengembangan Pelabuhan Laut Batanjung, Teluk Segintung dan Pelabuhan Kumai
2. Pengembangan pelabuhan Pangkalan Bun
3. Pengembangan Pelabuhan Tongkang Bangkuang
4. Pengembangan Pelabuhan Bagendang
5. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Perawan di Kab.Pulang Pisau
6. Pembangunan Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan
7. Relokasi Pelabuhan Pangkalan Bun ke Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat
JALAN
1. Pembangunan Jalan Palangka Raya-Bukit Liti-Bkt.Batu-Buntok-Ampah
2. Pembangunan Jalan Sampit-Samuda-Ujung Pandaran
3. Pembangunan Jalan Tumbang Samba-Tbg Senamang-Bts Kalbar
4. Pembangunan Jembatan Tumbang Samba
ASDP
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Baok di Kab. Barito Utara
2. Pemb. Dermaga Sungai di Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan
3. Pengadaan Bus Air
4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai RPM
5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Kasongan Baru, Kab. Katingan
6. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Petanak, Kab. Pulang Pisau
KETENAGALISTRIKAN
1. PLTMG Bangkanai (FTP2) 140 MW, di Kab. Barito Utara
2. PLTU Kalselteng 1 100 MW
3. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
4. Persiapan Jaringan Kabel Listrik bawah Laut KalimantanTengah ke Jawa Tengah
5. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
Telekomunikasi dan Informatika



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

1. Pembangunan Serat Optik seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI
SUMBER DAYA AIR
1. Pembangunan Prasarana Air Baku Kotawaringin Barat, Kab Kotawaringin Barat
2. Revitalisasi lahan rawa ex PLG
PENDIDIKAN
1. Program PAUD : a. BOP PAUD; b. Rintisan PAUD; dan c. Gugus PAUD
2. Program Pendidikan Dasar a. Peningkatan mutu SD; b. Peningkatan mutu PK-PLK; c. Peningkatan mutu SMP; dan d. P2TK Dikdas (tunjangan guru kualifikasi, daerah khusus/terpencil, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional non-PNS)
3. Program Pendidikan Menengah dan Luar Biasa : a. Layanan Peningkatan mutu Pendidikan SMA; b. Layanan Peningkatan mutu SMK; dan c. P2TK Dikmen (tunjangan kualifikasi guru, daerah khusus/terpencil, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional non-PNS)
4. Program Pendidikan Non-formal dan Informal : Peningkatan mutu Layanan kursus dan keterampilan
KESEHATAN
1. Pelayanan Kesehatan Dasar : akreditasi dan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dasar
2. Pelayanan Kesehatan Perorangan : a. Membangun sistem penanggulangan kegawat daruratan terpadu; b. Peningkatan pemenuhan layanan spesialistik; dan c. Peningkatan kepastian tenaga kesehatan strategis untuk mendukung target MDGs
3. Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana : Peningkatan/pengembangan Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
4. Program Jaminan Kesehatan dan Kefarmasian : a. Jaminan kesehatan, untuk pembayaran premi (Jamkesda Kalteng Sehat) agar masyarakat miskin yang belum menerima (JKN-PBI) dapat masuk dalam kartu Kalteng Sehat; b. Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan; dan c. Peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian
5. Penanggulangan Masalah Kesehatan : a. Penanganan krisis kesehatan; b. Penanganan rabies; c. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); d. Sistem Surveillance terpadu; e. Universal Child Immunization (UCI); f. Eliminasi Malaria; g. Pemberantasan Tb paru; h. Penemuan kasus HIV/AIDS; dan i. Penanggulangan filariasis

Sumber : RPJMN 2015-2019: Buku III: Agenda Pengembangan Wilayah

2. Telaah RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025

Sesuai RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, **visi pembangunan jangka panjang** daerah adalah **“Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri dan Adil”**. Adapun **misi pembangunan jangka panjang** dalam kerangka pembangunan berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

1. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022

Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

2. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan
3. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah
4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah
5. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
6. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Pada dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, sesuai tahapan RPJMD ke-tiga (tahun 2015-2020), pembangunan daerah ditujukan untuk lebih memantapkan kemandirian dan ketahanan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas



serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Dalam **5 (lima) tahun ketiga tahapan RPJPD (2015-2020), prioritas pembangunan** adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang V - 22 berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
6. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
8. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
9. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanganan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
11. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
12. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.



3. Telaah RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

Penataan ruang wilayah provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
- c. Perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;
- d. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan; perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi;
- e. Pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;
- f. Pengembangan potensi perekonomian melalui penetapan kawasan strategis provinsi; dan
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Dalam rangka pengembangan wilayah Kalimantan Tengah, Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas:

- a. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan;
- b. Sistem Jaringan Prasarana utama;
- c. Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi meliputi:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Palangka Raya di Kota Palangka Raya;
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas, Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara, Buntok di Kabupaten Barito Selatan; dan
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi Tamiyang Layang di Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau, Kasongan di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya, Sukamara di Kabupaten Sukamara,



Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau, dan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama meliputi :

a. Sistem jaringan transportasi darat:

1) Rencana jaringan lalu lintas angkutan jalan, mencakup:

Rencana pengembangan jaringan jalan:

Rencana pengembangan jalan arteri primer meliputi:

Basarang – Batanjung sepanjang 51,8 Km, Simpang Bangkal – Bangkal – Telaga Pulang – Kuala Pembuang – Teluk Sigintung sepanjang 110 Km; Pangkalan Bun – Sebuai sepanjang 45 Km; dan Jalan Lingkar Luar Kota Palangka Raya sepanjang 18,5 Km.

Rencana pengembangan jalan kolektor primer K1 (JKP-1) meliputi:

Tumbang Samba – Tumbang Hiran – Tumbang Sanamang – Tumbang Kaburai – Batas Provinsi Kalbar sepanjang 172 Km

Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer K3 (JKP-3) meliputi :

- Jl. Tjilik Riwut Km 31 – Lingkar Luar – Petak Bahandang (Kab. Katingan), sepanjang 33 Km;
- Bawan – Lahei – Batekong sepanjang 261,18 Km;
- Lanjutan Jl. Yos Sudarso (Palangka Raya) – Sebangau sepanjang 15 Km;
- Lanjutan Jl. G. Obos - Bukit Kaki – Pagatan sepanjang 125 Km;
- Kereng Bangkirai – Sp. Jl. Cilik Riwut sepanjang 25 Km;
- Pelabuhan Bukit Pinang – Kalampangan sepanjang 6,4 Km;
- Simpang Sepaku (Nanga Bulik) – Parigi – Pangkut – Rantau Pulut – Kuala Kuayan – Simpang Sei Babi – Tangar – Parenggean – Kalanaman – Buntut Bali – Takaras – Bawan;
- Tewah – Tumbang Miri – Tumbang Anoi sepanjang 83 Km;
- Simpang Batapah – Tumpung Laung – Muara Teweh;
- Kuala Kurun – Linau – Tumbang Jutuh sepanjang 45 Km;
- Simpang Trinsing (Muara Teweh) –Trinsing sepanjang 16 Km;
- Tampa – Pinang Tunggal – Jihi sepanjang 40 Km;
- Rikut Jawu (Buntok) – Tabak Kanilan – Simpang Patas sepanjang 41,5 Km; dan
- Simpang Penopa – Tapin Bini sepanjang 28 Km.
- Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama – Riam Durian sepanjang 56,5 Km;
- Palantaran – Parenggean - Tb.Sangai – Tb.Kalang sepanjang 90 Km;
- Mendawai – Pagatan sepanjang 39,05 Km;
- Sp.Kenawan – Riam Durian – Sukamara sepanjang 112,7 Km;



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

- Pulang Pisau – Pangkoh – Bahaur sepanjang 80 Km;
- Kuala Kapuas – Palingkau – Dadahup – Lamunti dan A5 sepanjang 94,7 Km;
- Simpang Pundu – Tb.Samba sepanjang 68 Km;
- Sampit – Samuda sepanjang 35,38 Km;
- Patung – Hayaping – Bentot sepanjang 34,8 Km;
- (24) Km.34 M.Teweh – Sp.Benangin sepanjang 55 Km.

2) Rencana jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan,
meliputi:

Jaringan angkutan sungai dan danau:

- Sungai Jelai: Balai Riam - Sukamara - Kuala Jelai;
- Sungai Bantu: Kecamatan Pantai Lunci/Kabupaten Sukamara – Sungai Arut Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Sungai Arut: Raja/Pangkalan Bun - Mendawai Seberang - Tanjung Putri;
- Sungai Kumai: Pangkalan Banteng - Kumai;
- Sungai Belantikan: Bayat - N. Belantikan;
- Sungai Lamandau: Tapin Bini - N. Belantikan - N. Bulik - Kotawaringin Lama - Mendawai Seberang;
- Sungai Seruyan: Mojang Baru - Rantau Pulut - Asam Baru - Pembuang Hulu - Telaga Pulang Kuala Pembuang;
- Sungai Tualan: Kota Baru (Padas)- Parenggean - Hanjalipan;
- Sungai Mentaya: Tb. Sangai - Kuala Kuayan - Hanjalipan - Kotabesi - Sampit - Bagendang - Samuda;
- Sungai Cempaga: Pantai Harapan - Cempaka Mulia - Kota Besi;
- Sungai Katingan: Bukit Raya – Kec. Sanaman Mantikei dan Kecamatan Petak Malai - Tb.Senamang – Tumbang Hiran - Tb. Samba - Pendahara - Kasongan - Baun Bango - Mendawai Pagatan;
- Sungai Sebangau: Kereng Bangkirai/Palangkaraya - Bantanan - Muara Sebangau;
- Sungai Kahayan: Tb. Miri - Tewah - Kuala Kurun - Sepang Simin - Bukit Liti - Palangkaraya -
- Pulang Pisau – Maluku - Pangkoh – Bahaur;
- Sungai Rungan: Tb. Jutuh - Takaras - Tangkiling – Palangka Raya;
- Sungai Kapuas: Sei Hanyu - Pujon - Timpah - Mantangai - Mandomai - Kuala Kapuas - Lupak Dalam;
- Sungai Barito: Puruk Cahu - Muara Teweh – Montalat - Buntok – Bangkuang – Mengkatip –
- Telang Baru - Jenamas – Banjarmasin;



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

- Anjir Serapat: Banjarmasin – Kapuas;
- Anjir Kelampayan: Pulang Pisau – Mandomai;
- Anjir Basarang: Kuala Kapuas – Basarang – Mintin;
- Terusan Raya: Kuala Kapuas – Bahaur; dan
- Terusan Hantipan: Pulau Hanaut – Pagatan.

Jaringan angkutan penyeberangan :

- Kumai – Kendal di Jawa Tengah (Lintas Penghubung Sabuk);
- Bahaur – Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk);
- Kumai – Paciran di Lamongan, Jawa Timur (Lintas Penghubung Sabuk); dan
- Bahaur – Kendal (Lintas Penghubung Sabuk).

b. Sistem jaringan transportasi perkeretaapian;

- Sistem Jaringan Jalur Kereta Api utama Provinsi, meliputi:
- Jalur kereta api Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung;
- Jalur kereta api Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang – Palangka Raya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas;
- Jalur kereta api Rabambang – Tumbang Samba – Sampit – Kuala Pembuang – Teluk Segintung;
- Jalur kereta api Tumbang Samba – Rantau Pulut – Nanga Bulik – Pangkalan Bun – Kumai; dan
- Jalur kereta api Kudangan – Nanga Bulik – Kumai.

2) Sistem Jaringan Jalur Kereta api antar kota berdasarkan Raperpres Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan yang meliputi Jalur Kereta api dengan:

- Prioritas tinggi, ruas jalan kereta api Palangka Raya – Banjarmasin;
- Prioritas sedang, ruas jalan kereta api Muara Teweh – Buntok – Tanjung; dan
- Prioritas rendah, ruas jalan kereta api Buntok – Palangka Raya, Palangka Raya – Sampit – Pangkalan Bun, Pangkalan Bun – Sanggau.

•

3) Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Barang di Kalimantan Tengah, meliputi : Stasiun Kota Palangka Raya, perkotaan Pangkalan Bun, Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur), Buntok (Kabupaten Barito Selatan), Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara), Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya), Pulang Pisau, Bahaur (Kabupaten Pulang Pisau), Kuala Kurun,



Rabambang (Kabupaten Gunung Mas), Nanga Bulik (Kabupaten Lamandau), Kuala Pembuang/Teluk Segintung, Rantau Pulut (Kabupaten Seruyan), dan Tumbang Samba (Kabupaten Katingan).

c. Sistem jaringan transportasi laut;

Rencana Pengembangan Pelabuhan Baru adalah :

- Pelabuhan Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Pelabuhan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan;
- Pelabuhan Tanjung Perawan di Kabupaten Pulang Pisau.

d. Sistem jaringan transportasi udara.

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas:

a. Rencana sistem jaringan energi, mencakup;

1) Pembangkit Tenaga Listrik;

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kapuas;

Pembangunan Pembangkit Listrik Mesin Gas (PLTMG) di Kabupaten Barito Utara;

- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kabupaten Katingan dan Pulang Pisau Kalimantan Tengah;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Katingan, Murung Raya, Barito Utara, dan Lamandau;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Mikrohidro (PLTMH) di Kabupaten Murung Raya, Katingan, Gunung Mas, Lamandau, Kapuas, Seruyan, dan Barito Utara;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) di Kabupaten Sukamara, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas;
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah khususnya di desa-desa terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN dan tidak ada potensi energi lain seperti angin dan mikrohidro di daerah tersebut.



2) Sistem Interkoneksi dan Jaringan Transmisi serta Jaringan Distribusi Listrik,

meliputi;

- Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Palangka Raya – Kasongan – Sampit; Sampit – Pangkalan Bun; Pangkalan Bun – Kumai; Pangkalan Bun – Nanga Bulik;
 - Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dari Bangkanai – Muara Teweh – Buntok – Palangka Raya;
 - Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV Muara Teweh – Puruk Cahu – Kuala Kurun – Kasongan dan Puruk Cahu – Muara Juloi;
 - Pembangunan Kabel listrik bawah laut dari Kabupaten Sukamara ke Jepara (Provinsi Jawa Tengah).
 - Perluasan pembangunan jaringan distribusi Tegangan Menengah dari Gardu Induk menuju pusat-pusat beban di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah; Perluasan jaringan tegangan rendah dari jaringan distribusi Tegangan Menengah ke wilayah pemukiman di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
- 3) Gardu Induk (GI),** terdiri atas; pembangunan Gardu Induk (GI) di Palangka Raya, Kapuas, Seruyan, Kuala Kurun, Kasongan, Sampit, Pangkalan Bun, Nanga Bulik, Buntok, Muara Teweh dan Puruk Cahu
- 4) Depo Bahan Bakar Minyak (BBM),** mencakup: Depo BBM di Pulang Pisau, Sampit, Muara Teweh, Sukamara, Kapuas, Tamiyang Layang, Murung Raya, Pangkalan Bun, Murung Raya, Katingan dan Buntok
- 5) Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi,** berupa Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi yang menghubungkan antara Pontianak – Palangka Raya – Banjarmasin

b. Rencana sistem jaringan telekomunikasi, terdiri dari;

1) Sistem Jaringan Backbone;

Jaringan backbone dalam bentuk kabel SKSO (Sistem Komunikasi Serat Optik) melalui jalur darat dengan sistem proteksi (sistem ring) dan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) melalui Jalur Laut

2) Remote Metro Junction (RMJ);

Jaringan RMJ dalam bentuk kabel SKSO dan Radio

3) Sistem Jaringan Akses

Jaringan Akses dalam bentuk kabel SKSO, kabel tembaga, Radio Akses dan VSAT (*Verry Small Aperture Terminal*)

c. Rencana sistem sumberdaya air, terdiri atas:

1) Wilayah Sungai (WS), mencakup;

a) Wilayah Sungai Lintas Provinsi, meliputi:



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Wilayah Sungai (WS) Jelai-Kendawangan, terdiri dari: DAS Arut, DAS Lamandau, D DAS Kumai, DAS Jelai; Wilayah Sungai (WS) Barito, terdiri dari DAS Barito dan DAS Kapuas;

b) Wilayah Sungai Strategis Nasional, yang meliputi: Wilayah Sungai (WS) Mentaya-Katingan yang terdiri dari DAS Mentaya dan DAS Katingan.

c) Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota meliputi:

Wilayah Sungai (WS) Seruyan, yaitu DAS Seruyan dan DAS Segitung; dan Wilayah Sungai (WS) Kahayan, yaitu DAS Sebangau dan DAS Kahayan.

2) **Bendung, Bendungan, Embung, Danau dan Situ**, meliputi;

a) **Bendung** Sekata Juri, Sekata Tewah, Gohong Rawai di Kabupaten Gunung Mas; Bendung Tampa, Talohen, Natampin, Baruh Rintis, Bendung Karau di Kabupaten Barito Timur; Bendung Tandrahean, Trinsing, Bawang, Jamut di Kabupaten Barito Utara; Bendung Kumai Kondang di Kabupaten Kotawaringin Barat; Bendung Bayat di Kabupaten Lamandau, Bendung Tanjung Harapan di Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Bendung Uwang di Kabupaten Barito Selatan;

b) **Bendungan** Muara Joloi di Kabupaten Murung Raya, Bendungan Riam Jerawi di Kabupaten Katingan, dan Bendungan Satongah di Kabupaten Lamandau;

c) **Embung** Sirau di Kabupaten Barito Timur, Embung Sababilah di Kabupaten Barito Selatan, Embung Tumbang Atei di Kabupaten Katingan, Embung PLTMH Ulung Siron di Kabupaten Murung Raya, Embung PLTMH Taja Urap di Kabupaten Gunung Mas, dan Embung Situ Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau;

d) **Danau** Sembuluh di Kabupaten Seruyan, Danau Malawen, Danau Medara, Danau Masura, Danau Limamuda, Danau Lelek, Danau Buang, Danau Bambunan, Danau Mutar, Danau Pupundak, Danau Raya, Danau Sadar, Danau Tarmasi di Kabupaten Barito Selatan, Danau Kamipang, Danau Telaga dan Danau Bulan di Kabupaten Katingan, Danau Sarai, Danau Burung, Danau Canjang, Danau Limus, Danau Liput, Danau Nampala, Danau Pamalasan, Danau Pianan, Danau Pulak Batu di Kabupaten Kotawaringin Timur, Danau Butong di Kabupaten Barito Utara, dan Danau Asem, Danau Gatel, Danau Gihitam, Danau Jalapangin, dan Danau Kandang di Kabupaten Kotawaringin Barat.

e) **Situ** Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau

3) **Daerah Irigasi (DI), Daerah Rawa (DR) dan Daerah Rawa Tambak**, terdiri dari;



- **Daerah Irigasi (DI)**
 - a) **Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Pusat** yaitu DI Karau di Kabupaten Barito Timur dengan luas pelayanan 4.294 Ha (integrasi dari DI Karau, DI Talohen, DI Netampin, dan DI Takwam); DI Tumbang Samba di Kabupaten Katingan dengan luas pelayanan 5.000 Ha, dan DI Tewang Menyangen di Kabupaten Katingan dengan luas pelayanan 5.000 Ha.
 - b) **Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Provinsi**, meliputi:
 - Kabupaten Barito Timur, yaitu:
 - DI Tampa (Luas Pelayanan 2.000 Ha); dan
 - DI Kalamus (Luas Pelayanan 1.000 Ha).
 - Kabupaten Barito Utara, yaitu DI. Lahei (Luas Pelayanan 3.000 Ha).
 - Kabupaten Katingan, yaitu:
 - DI Tumbang Kuai (Luas Pelayanan 1.500 Ha); dan
 - DI Tumbang Manggu (Luas Pelayanan 300 Ha)
 - c) **Daerah Irigasi yang merupakan Kewenangan Kabupaten** meliputi:
 - Kabupaten Kotawaringin Barat, mencakup 5 lokasi dengan luas pelayanan 1.519 Ha
 - Kabupaten Lamandau, 1 lokasi dengan luas pelayanan 25 Ha
 - Kabupaten Kotawaringin Timur, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 1.000 Ha
 - Kabupaten Pulang Pisau, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 400 Ha
 - Kabupaten Barito Selatan, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 750 Ha
 - Kabupaten Barito Timur, mencakup 3 lokasi dengan luas pelayanan 631 Ha
 - Kabupaten Barito Utara, mencakup 11 lokasi dengan luas pelayanan 3.750 Ha
 - Kabupaten Gunung Mas, mencakup 5 lokasi dengan luas pelayanan 2.220 Ha
 - Kabupaten Katingan, mencakup 2 lokasi dengan luas pelayanan 1.800 Ha

Daerah Rawa (DR)

a) Daerah

.925 Ha/13 lokasi) DR di Kabupaten Kapuas (Luas Pelayanan 13.675 Ha/7 Lokasi),

Daerah Rawa Tambak, di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten **Rawa Kewenangan Pusat**, meliputi:

DR di Kabupaten Seruyan (Luas Pelayanan 3.500 Ha/1 lokasi),

DR di Kabupaten Kotawaringin Timur (Luas Pelayanan 48.582 Ha/ 12 lokasi Kecamatan)



DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 9.200 Ha/2 lokasi)
DR di Kabupaten Pulang Pisau (Luas Pelayanan 49.170 Ha/11 lokasi)
DR di Kabupaten Kapuas (Luas Pelayanan 194.602 Ha/18 lokasi)
DR di Kabupaten Barito Selatan (Luas Pelayanan 10.000 Ha/lokasi Eks PLG).

b) **Daerah Rawa Kewenangan Provinsi**, meliputi:

DR di Kota Palangka Raya (Luas Pelayanan 2.164 Ha/2 lokasi)
DR di Kabupaten Kotawaringin Barat (Luas Pelayanan 5.000 Ha/ 5 lokasi)
DR di Kabupaten Sukamara (Luas Pelayanan 5.870 Ha/4 lokasi)
DR di Kabupaten Seruyan (Luas Pelayanan 15.515 Ha/8 lokasi)
DR di Kabupaten Kotawaringin Timur (Luas Pelayanan 69.526,25 Ha/ 36 lokasi)
DR di Kabupaten Katingan (Luas Pelayanan 11.875 Ha/8 lokasi)
DR di Kabupaten Pulang Pisau (Luas Pelayanan 21 Kotawaringin Timur

4) **Pengamanan Pantai**, terdiri atas: kegiatan pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai yang berada di sepanjang 751 Km, meliputi:

- pantai di Kabupaten Sukamara (Pantai Sei Cabang Barat, Kecamatan Lunci, Pantai Sei Damar, Pantai Sei Tabuk, Pantai Jelai, Pantai Sei Baru),
- pantai di Kabupaten Kotawaringin Barat (Pantai Desa Kubu, Pantai Sei Bakau, Pantai Desa Keraya, Pantai Desa Sebuai, dan Pantai Teluk Bogam);
- pantai di Kabupaten Seruyan (Pantai Sungai Bakau);
- pantai di Kabupaten Kotawaringin Timur (Pantai Ujung Pandaran),
- pantai di Kabupaten Pulang Pisau (Pantai Cemantan); dan
- pantai di Kabupaten Kapuas (Pantai Palampai, Pantai Cemara Labat, Pantai Batanjung dan Pantai Desa Pematang).

5) **Instalasi Pengolahan Air Minum**, mencakup:

- Penyediaan dan pengelolaan air baku meliputi air permukaan dan air tanah yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pertanian, meliputi:
- Air permukaan meliputi: sungai Arut, sungai Lamandau, sungai Kumai, sungai Jelai, sungai Seruyan, sungai Mentaya, sungai Katingan, sungai Kahayan, sungai Sebangau, sungai Barito dan sungai Kapuas beserta anak sungai
- Air tanah tersebar di beberapa cekungan air tanah yang potensial di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan lokasi yang sudah terbangun sebanyak 10 Kabupaten/Kota



6) **Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai**, meliputi kegiatan

pembangunan, rehabilitasi, serta Operasional dan Pemeliharaan (OP) prasarana dan saranapengendalian banjir, yang meliputi Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai yang terjadi pada wilayah sungai strategis nasional.

Adapun **rencana pola ruang provinsi** pada **kawasan budidaya** terdiri atas:

a. **kawasan peruntukan hutan produksi** meliputi:

- 1) Hutan produksi terbatas (HPT) seluas $\pm 3.335.571$ Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Hutan produksi tetap (HP) seluas $\pm 3.896.706$ Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 3) Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan luas $\pm 2.258.274$ Ha telah di berikan untuk lahan kelola masyarakat seluas $\pm 624.101.04$ Ha yang tersebar pada 377

b) desa/kelurahan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

b. **Non kawasan hutan** seluas $\pm 2.629.779$ Ha dengan peruntukan sebagai berikut:

1) **Kawasan peruntukan pertanian** meliputi:

- a) Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) dengan luas $+187.814,65$ Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b) Kawasan Pencadangan lahan tanaman pangan dengan luas $178.572,86$ Ha dimana
- c) didalamnya terdapat lahan pencadangan tanaman pangan seluas $\pm 64,001,81$ Ha, tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
- d) Kawasan Lahan untuk Pengembangan Hortikultura seluas $\pm 37,385$ Ha tersebar di 14 Kabupaten/Kota;
- e) Kawasan Tanah Adat tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dengan luas 900.000 Ha;

Kawasan sepanjang jalan dengan jarak 2.500 meter ($2,5$ Km) sebelah kanan dan 2.500 meter ($2,5$ Km) sebelah kiri jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang sesuai dengan fungsi peruntukannya, merupakan ruang kelola masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

- f) Kawasan sepanjang jalur sungai dan danau yang ada tempat permukiman desa dan/atau kelurahan dengan jarak 3.000 meter



dari kiri dan kanan sungai merupakan hak kelola Masyarakat Adat Kalimantan Tengah.

- 2) **Kawasan Peternakan** yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3) **Kawasan peruntukan perkebunan** tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 4) **Kawasan peruntukan perikanan laut** seluas (751 Km x 12 mil) yang berada di perairan laut dan seluas 134.810 Ha di perairan darat (sungai, danau dan rawa) di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 5) **Kawasan peruntukan industri** terdiri atas:
 - a) Kawasan sentra industri kecil dan kawasan industri menengah (Sentra IKM) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - b. Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Industri tersebar di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara.
- 6) **Kawasan peruntukan pariwisata** disesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah (RIPPARPROV) 2013 - 2028 terdiri dari 3 wilayah (Barat, Tengah dan Timur) yang meliputi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan manusia.
- 7) **kawasan peruntukan permukiman** terdiri atas:
 - a) Kawasan permukiman perkotaan berada pada kawasan APL yang tersebar diseluruh ibukota Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b) Kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman masyarakat adat seluas 300.000 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 8) **Kawasan peruntukan transmigrasi** yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 9) **Kawasan peruntukan technopark** perkebunan, *technopark* pertambangan, *technopark* perikanan, *technopark* kehutanan, *technopark* pertanian, *technopark* peternakan dan sebagainya yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.



- 10) **kawasan peruntukan lainnya**, yaitu:
- a) Kawasan tempat beribadah, kawasan penelitian dan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b) Kawasan peruntukan pertahanan keamanan hutan khusus untuk latihan militer (HKT-M) bagi kepentingan pemeliharaan, pertahanan dan keamanan Negara berdasarkan *geostrategic* nasional terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c) Hutan Monumental Nyaru Menteng seluas ± 65 Ha di Kota Palangka Raya; dan
 - d) Hutan Monumental seluas ± 600 Ha di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Wilayah Pertambangan dan Energi terdiri atas:

- a. **Kawasan peruntukan pertambangan** yang disebut wilayah pertambangan menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral logam dan non logam, mineral radioaktif, batuan dan batubara yang dikelompokkan menjadi wilayah usaha pertambangan (WUP) dengan luas kurang lebih 13.418.843 Ha, wilayah pencandangan nasional (WPN) di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas kurang lebih 1.393.000 Ha dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas kurang lebih 150.000 Ha serta kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
- b. **kawasan peruntukan pengembangan sumber daya energi** di 14 Kabupaten/Kota.

4. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Barito Selatan

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, isu-isu strategis pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, dan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Barito Selatan, maka dapat dirumuskan **isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Barito Selatan** sebagai berikut:



1. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah

Pembangunan daerah merupakan pengembangan setiap lini kehidupan masyarakat yang menyebabkan rasa nyaman, damai, dan sejahtera setiap individu yang tinggal di dalamnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hasil dari pembangunan daerah yang paling sering dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah pembangunan di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan masyarakat yang tumbuh dalam rasa kekeluargaan. Oleh karena itu, untuk memenuhi capaian target setiap bidang tersebut, perlu adanya penyempurnaan setiap fasilitas, sarana prasarana, dan infrastruktur yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Keuntungan dalam peningkatan aksesibilitas wilayah adalah terbentuknya jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah. Selain itu, kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Belum terpenuhinya infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan secara merata menjadi salah satu kendala utama pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang harus diutamakan pencapaiannya sebagai penyokong pembangunan di bidang lain.

2. Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja berdaya saing

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam melaksanakan reformasi global pembangunan daerah. Pemerintah memberikan perhatian khusus dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global sehingga mampu meningkatkan kapabilitas pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat baik bidang sosial maupun ekonomi.

Memiliki SDM yang berdaya saing tinggi akan menjadikan Kabupaten Barito Selatan siap menghadapi segala tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan segala peluang yang ada. Dengan peningkatan



SDM berdaya saing hingga level nasional akan menempatkan kualitas SDM Kabupaten Barito Selatan setara dengan kota-kota di Indonesia. Hal tersebut menjadikan SDM mampu bersaing pada kancah nasional maupun Internasional. Efek lain dari peningkatan kualitas SDM adalah pengembangan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Selatan menjadi lebih maksimal dan optimal dalam menyerap tenaga kerja lokal sehingga penyerapan tenaga kerja yang berasal dari luar Kabupaten Barito Selatan dapat diminimalisir.

Realisasi potensi sumber daya manusia yang telah menjadi tenaga kerja di Kabupaten Barito Selatan masih jauh dari harapan pemerintah daerah. Namun demikian tingkat Pengangguran di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan hasil yang positif dimana pada tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,9 persen. Dari besaran angka pengangguran ini, yang perlu digaris bawahi adalah kualitas sumber daya manusia yang menjaditenaga kerja baik berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja, maupun buruh/karyawan/ pegawai terindikasi masih memiliki daya saing yang rendah.

Sebagian besar penduduk yang bekerja di Kabupaten Barito Selatan hanya pernah mengenyam pendidikan hingga SD atau belum lulus SD bahkan ada yang tidak sekolah yakni sebesar 34,23 persen. Sedangkan tenaga kerja yang sekolah hingga perguruan tinggi hanya sebesar 12,27 persen, yakni yang memiliki pendidikan Diploma I/II/III dan jenjang S1/S2/S3.

Peningkatan tenaga kerja dari segi pendidikan dapat menjadi awal jawaban bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga secara otomatis akan meningkatkan daya saing tenaga kerja baik di daerah maupun luar daerah. Namun, pemerintah tidak boleh hanya berpacu pada pendidikan formal saja dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun tenaga kerja ini, akan tetapi pendidikan non formal seperti keterampilan khusus secara teknis akan memberi poin tersendiri pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Pengelolaan SDA dan LH melalui optimalisasi Investasi

Sebagai salah satu wilayah di Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah tropis sekaligus memiliki sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Barito Selatan berpotensi meningkatkan daya dukung perkembangan perekonomiannya melalui penggalan sumber daya



alam berbasis lingkungan hidup. Eksploitasi setiap sumber daya alam di Kabupaten Barito Selatan dapat dilakukan dengan melakukan optimalisasi investasi baik dalam maupun luar negeri dengan meningkatkan iklim investasi yang nyaman, aman, dan bersimbiosis mutualisme antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Optimalisasi investasi memiliki tujuan utama yakni mengembangkan perekonomian daerah dengan berimbang positif pada penyerapan tenaga kerja, peningkatan aksesibilitas wilayah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun infrastruktur.

4. Mewujudkan *Good Governance* secara menyeluruh

Good governance didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Dalam *good governance* mengandung pengertian terkait nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Mewujudkan *Good Governance* (tata pemerintahan) secara menyeluruh memiliki cakupan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat yang mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik sangat tergantung dari ketiga lembaga yang menyusun pemerintahan tersebut yaitu pemerintah (*government*), dunia usaha (swasta), dan masyarakat. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi dalam rangka mencapai tujuan. Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus berlandaskan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan asas transparansi, profesionalitas, dan memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, makmur, merata, dan berkesinambungan.

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagai aparatur pemerintah memiliki tugas dalam melayani masyarakat maupun swasta untuk berkembang dari sisi kuantitas maupun kualitasnya di segala bidang sehingga peran ini harus dijalankan dengan rasa amanah dan tanggungjawab yang tinggi agar tugas, pokok, dan fungsi pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan pembangunan daerah. Lain halnya dengan pemerintah daerah, swasta memiliki fokus utama dalam pengembangan perekonomian melalui pemberdayaan potensi sumber daya alam dan manusia tanpa mengindahkan degradasi kualitas lingkungan hidup. Sumber daya hutan yang selama ini menjadi



pendukung utama pembangunan daerah perlu diperhatikan keberlanjutan pengelolaannya agar dapat memenuhi kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Sampai saat ini masih terjadi berbagai kerusakan lahan, pencemaran udara, kebakaran dan bencana alam lain akibat pengelolaan sumber daya hutan yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Langkah-langkah untuk perlindungan dan konservasi sumber daya hutan juga perlu dilanjutkan, antara lain: optimalisasi pencegahan kebakaran lahan dan hutan di semua sektor pada wilayah rawan kebakaran lahan dan hutan; optimalisasi pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan nilai ekonomi khususnya pada lahan kritis; perlindungan hutan terhadap kebakaran dan mendorong pihak swasta untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan kebakaran; pemantapan pengelolaan kawasan konservasi; pengembangan sumber benih dan usaha perbenihan tanaman hutan; pelaksanaan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha; pelibatan masyarakat sekitar hutan dan peningkatan efektifitas kawasan konservasi.

5. Pemerataan kesejahteraan masyarakat

Kunci dari pembangunan adalah kemakmuran bersama yang akan tercapai dengan adanya pemerataan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kunci dari pemerataan kesejahteraan masyarakat ialah pembangunan yang adil dan merata serta menyentuh segala aspek bidang terkait kehidupan seluruh lapisan masyarakat sehingga akan didapatkan masyarakat yang hidup damai dan sejahtera. Dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat inilah menjadikan segala aspek pembangunan dapat terdongkrak dan berkembang dimana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah melalui optimalisasi manfaat hasil pembangunan daerah.

Perlu adanya perlakuan khusus bagi Kabupaten Barito Selatan dalam pemerataan hasil pembangunan daerah sebagai sarana pencapaian kesejahteraan masyarakat. Akses wilayah yang cukup sulit di banyak wilayah menjadikan hambatan tersendiri bagi Kabupaten Barito Selatan untuk berkembang. Hal tersebut tentu saja menjadikan masyarakat tidak leluasa menikmati hasil pembangunan karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki di setiap wilayah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki “pekerjaan rumah” yang khusus dalam



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

hal peningkatan aksesibilitas wilayah, baik di internal Kabupaten Barito Selatan, maupun dengan luar daerah Kabupaten Barito Selatan.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran disusun bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sebagai landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD.

Mengingat Visi, Misi, dan Program kepala daerah merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, maka Visi, Misi, dan Program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, *manageable*, dan selaras dengan Manajemen Pemerintahan Daerah, maka Visi dan Misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka periode Tahun 2017-2022 adalah merupakan periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan 2006-2026 yang bertujuan mewujudkan Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertakwa. Oleh sebab itu, rumusan Visi, Misi, dan Program Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022, dirumuskan dalam rangka untuk melakukan percepatan pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2022.

5.1 VISI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah daerah, telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Visi

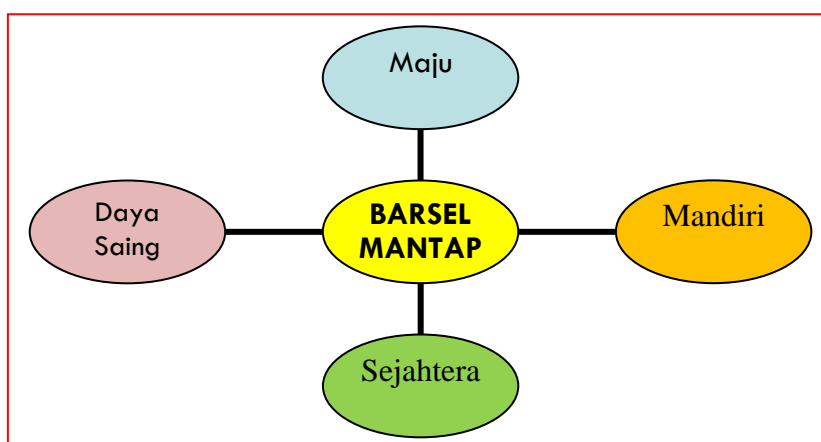
adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi yang dirumuskan untuk Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat Pilkada.

Berdasarkan janji-janji politik yang telah disampaikan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan terpilih periode 2017-2022, maka dirumuskan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA BARITO SELATAN SEBAGAI DAERAH YANG MAJU DAN MANDIRI, SEHINGGA TERCIPTANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA SECARA MERATA DAN MEMILIKI DAYA SAING DILANDASI IMAN DAN TAQWA”.

Visi tersebut mengandung 4 (empat) elemen pembangunan yaitu: **1) Maju; 2) Mandiri; 3) Sejahtera, dan 4) Daya Saing** yang bertujuan untuk mencapai **Barito Selatan yang MANTAP (Mandiri, Aman, Tertata, dan Padu)**, sebagaimana yang digambarkan pada gambar 5.1 sebagai berikut:

Gambar 5.1
Hubungan antar-elemen Visi



Barito Selatan yang MANTAP (Mandiri, Aman, Tertata, dan Padu)

Adapun yang dimaksud dengan **Terwujudnya Barito Selatan**



Sebagai Daerah Yang MAJU DAN MANDIRI, Sehingga Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang SEJAHTERA SECARA MERATA adalah:

1. Tercapai angka pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
2. Peningkatan dukungan infrastruktur.
3. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya kesenjangan pendapatan.
4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka
5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat dan membaiknya mutu lingkungan hidup.
6. Tercapainya pemerataan untuk menikmati hasil-hasil pembangunan

Adapun yang dimaksud dengan **Kabupaten Barito Selatan yang memiliki DAYA SAING dilandasi IMAN DAN TAQWA** adalah:

1. Terciptanya kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan sosial dan politik.
2. Kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati kepercayaan dan keyakinan masing-masing.
3. Terjaminnya masyarakat dengan perikehidupan secara benar, tertib dan teratur serta dengan disiplin yang tinggi, dan menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya.
4. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memiliki daya tahan dan daya saing terhadap gejolak sosial dan perekonomian dalam bentuk ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat.

5.2 MISI

Misi merupakan upaya umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiridengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan yang dirumuskan kedalam 5 (lima) Misi pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

- dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi..
 4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah.
 5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

Misi pembangunan jangka menengah daerah (tahun 2017-2022) tersebut di atas, memiliki keterkaitan dan konsistensi dengan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021), sebagai berikut:

Tabel 5.1.

Keterkaitan dan Konsistensi dengan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

	Misi RPJMD BARSEL 2017-2022	Misi RPJMD KALTENG 2016 - 2021
1	Misi 1: Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.	Misi 1: Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi Misi 2: Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Misi 3: Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
	Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia	Misi 6: Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

	Misi RPJMD BARSEL 2017-2022	Misi RPJMD KALTENG 2016 - 2021
	Misi 3: Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi..	Misi 3: Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai Misi 4: Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan Misi 7: Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Misi 8: Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Misi 4: Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah.	Misi 5: Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
	Misi 5: Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan public dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.	Misi 5: Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah

Adapun penjelasan masing-masing misi tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran adalah memenuhi kebutuhan pelayanan air minum/air bersih; pemenuhan kebutuhan listrik desa dan kecamatan dengan pembangunan instalasi kelistrikan yang dikelola secara mandiri di tiap-tiap desa yang jauh dari jaringan listrik dan; penyediaan perumahan sederhana dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah; penyelesaian dan penuntasan pembangunan ruas jalan provinsi, kabupaten, jembatan, dan infrastruktur.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia adalah meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing tinggi; meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pelayanan



puskesmas 24 jam lengkap rawat inap minimal satu buah di setiap kecamatan; meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; terus merealisasikan anggaran pendidikan 20 %; membangun sekolah unggulan berstandar nasional; meningkatkan kualitas guru kualifikasi S1; menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan mendorong usaha-usaha produktif; meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas peringkat 5 se Kalimantan Tengah.

3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi adalah meningkatkan revitalisasi pertanian dalam arti luas melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; meningkatkan kontribusi sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan, sumberdaya mineral yang mampu menyerap lapangan pekerjaan; terus memperbaiki sumberdaya alam melalui rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis; menyiapkan dan menata pertambangan rakyat; meningkatkan Investasi melalui regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan meningkatkan promosi investasi; melakukan identifikasi peluang usaha berbasis sumberdaya alam; meningkatkan ekspor non migas; meningkatkan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; mengelola kekayaan budaya, sejarah serta potensi pariwisata lainnya sebagai sumber devisa; dan memantapkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan.
4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah adalah meningkatkan ketertiban dan keamanan untuk menciptakan suasana yang kondusif dengan membangun sarana dan prasarana keamanan, penyempurnaan kelembagaan keamanan baik pemerintah dan masyarakat serta mendukung kelancaran proses demokrasi, khususnya pelaksanaan pemilu dengan peningkatan hubungan politik yang demokratis disertai dengan kewaspadaan terhadap ancaman dari dalam dan dari luar dalam keselarasan adat istiadat dengan penghayatan terhadap nilai-nilai budaya, karena nilai-nilai tersebut menjadi ciri identitas masyarakat, yang berkaitan erat dengan otentisitas perilaku atau visi hidup masyarakat.



5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel adalah meningkatkan kinerja dan koordinasi pemerintahan serta pengembangan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah, reformasi birokrasi, penataan dan penegakkan hukum; meningkatkan kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta antara pemerintah dengan lembaga; mengembangkan dan meningkatkan penataan wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan peran serta masyarakat luas dalam pemberantasan korupsi.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini dilakukan mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam Tujuan dan Sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dijelaskan diatas, maka dirumuskan beberapa Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 yang diuraikan sebagai berikut:



A. VISI Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan

"TERWUJUDNYA BARITO SELATAN SEBAGAI DAERAH YANG MAJU DAN MANDIRI, SEHINGGA TERCIPTANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA SECARA MERATA DAN MEMILIKI DAYA SAING DILANDASI IMAN DAN TAQWA".

B. Rumusan Tujuan dan Sasaran yang merujuk pada MISI Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa dari Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022, maka telah dirumuskan 5 (lima) MISI Pembangunan. Masing-masing MISI Pembangunan terdiri dari minimal satu atau lebih Tujuan Pembangunan, dan dari masing-masing Tujuan Pembangunan terdiri dari beberapa Sasaran Pembangunan.

Secara umum berdasarkan Visi dan Misi yang ada, telah dirumuskan sebanyak 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan, dan sebanyak 47 (Empat Puluh tujuh) sasaran Pembangunan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) **Misi 1 : Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.** Terdiri dari 1 (satu) Tujuan Pembangunan dengan 7 (tujuh) Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Tujuan pertama pada Misi 1 adalah "Meningkatkan konektivitas antarwilayah yang memperlancar distribusi orang, barang dan jasa, mendorong perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar wilayah", terdiri dari 5 Sasaran Pembangunan yaitu :

- 1.1 Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang handal dan terintegrasi.
- 1.2 Meningkatnya cakupan layanan kelistrikan.
- 1.3 Meningkatnya cakupan layanan air minum.



- 1.4 Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan lingkungan bersih dan sehat.
 - 1.5 Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi bagi pengembangan sektor pertanian.
 - 1.6 Pencapaian Kawasan Kumuh. dan
 - 1.7 Sanitasi Layak.
- 2) **Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia.** Terdiri dari 3 (tiga) Tujuan Pembangunan dengan 8 (delapan) Sasaran Pembangunan yaitu:
- 1. Tujuan Pertama pada Misi 2 adalah** “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Barito Selatan”, terdiri dari 5 (lima) Sasaran Pembangunan yaitu:
 - 1.1 Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat.
 - 1.2 Menurunnya angka kematian bayi.
 - 1.3 Menurunnya angka kematian ibu.
 - 1.4 Menurunnya angka gizi buruk, dan
 - 1.5 Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR).
 - 2. Tujuan Kedua pada Misi 2 adalah** “Meningkatkan kualitas kuantitas pendidikan masyarakat Barito Selatan” terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:
 - 2.1 Peningkatan Kualitas Guru pada semua jenjang pendidikan.
 - 2.2 Meningkatnya akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat.
 - 3. Tujuan Ketiga pada Misi 2 adalah** “Meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendorong kerukunan dan ketentraman daerah”, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Pembangunan yaitu:
 - 3.1 Meningkatnya Pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- 3) **Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung**



ekonomi. Terdiri dari 9 (Sembilan) Tujuan Pembangunan dengan 21 (Dua Puluh Satu) Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Tujuan Pertama pada Misi 3 adalah “Mengembangkan sektor pertanian yang menopang perekonomian masyarakat”, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Pembangunan yaitu:

1.1 Meningkatnya Produksi hasil Pertanian.

2. Tujuan Kedua pada Misi 3 adalah “Mengembangkan sektor perikanan yang menopang perekonomian masyarakat”, terdiri dari 3 (Tiga) Sasaran Pembangunan yaitu:

2.1 Meningkatnya produksi Hasil perikanan.

2.2 Meningkatnya Konsumsi Ikan.

2.3 Pengelolaan Sumber Daya Alam.

3. Tujuan Ketiga pada Misi 3 adalah “Mengembangkan sektor Ketahanan Pangan yang menopang perekonomian masyarakat”, terdiri dari 3 (Tiga) Sasaran Pembangunan yaitu:

3.1 Ketersediaan Pangan Utama dan Cadangan Pangan.

3.2 Mengembangkan Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapital.

3.3 Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan.

4. Tujuan Keempat pada Misi 3 adalah “Meningkatkan investasi daerah yang berbasis sumber daya lokal”, terdiri dari 6 (enam) Sasaran Pembangunan yaitu:

4.1 Terciptanya pranata hukum yang mendorong iklim investasi.

4.2 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.

4.3 Menurunnya angka kemiskinan.

4.4 Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.

4.5 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.

4.6 Meningkatnya daya beli masyarakat.

5. Tujuan Kelima pada Misi 3 adalah “Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berpihak kepada pengembangan koperasi dan UMKM”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:

5.1 Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal.

5.2 Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk unggulan daerah (Rotan, Karet, Kerbau Rawa, Nenas Parigi, Kakao dll).



6. Tujuan Keenam pada Misi 3 adalah “Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan”, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Pembangunan yaitu:

6.1 Meningkatnya pendapatan daerah terutama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

7. Tujuan Ketujuh pada Misi 3 adalah “Meningkatnya kunjungan wisatawan”, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Pembangunan yaitu:

7.1 Terpasarnya pariwisata daerah.

8. Tujuan Kedelapan pada Misi 3 adalah “Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian wilayah sekaligus pelestarian nilai budaya dan kekayaan alam Barito Selatan”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:

8.1 Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah.

8.2 Meningkatnya sektor ekonomi hijau.

9. Tujuan Kesembilan pada Misi 3 adalah “Mewujudkan pembangunan yang berbasis pengelolaan sumber daya alam yang lestari”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:

9.1 Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup.

9.2 Terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten.

4) **Misi 4 : Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah.** Terdiri dari 3 (tiga) Tujuan Pembangunan dengan 5 (lima) Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Tujuan Pertama pada Misi 4 adalah “Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:

1.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.

1.2 Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP, KK, dll).

2. Tujuan Kedua pada Misi 4 adalah “Membangun pondasi yang kuat bagi penyiapan pemuda dalam pembangunan sejak dini”, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Pembangunan yaitu:

2.1 Meningkatnya peran pemuda.

2.2 Meningkatnya prestasi olah raga.



3. Tujuan Ketiga pada Misi 4 adalah “Melestarikan dan menegakkan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi ciri masyarakat Barito Selatan”, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Pembangunan yaitu:

3.1 Meningkatnya perlindungan bagi hak adat dan tanah adat.

5) **Misi 5 : Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.** Terdiri dari 1 (satu) Tujuan Pembangunan dengan 6 (enam) Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Tujuan Pertama pada Misi 5 adalah “Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan”, terdiri dari 6 (enam) Sasaran Pembangunan yaitu:

- 1.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- 1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- 1.3 Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.
- 1.4 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.
- 1.5 Predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 1.6 Meningkatnya pengawasan bidang pemerintahan.

Selanjutnya untuk keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 5.2 di bawah ini.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 5.2
Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan

Visi: Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah Yang Maju Dan Mandiri, Sehingga Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera Secara Merata Dan Memiliki Daya Saing Dilandasi Iman Dan Taqwa											
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal (2016)	TARGET TAHUN					Kondisi Akhir	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Misi 1: Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran	1. Meningkatkan konektivitas antarwilayah yang memperlancar distribusi orang, barang dan jasa, mendorong perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar wilayah.	1.1	Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Panjang jalan kondisi mantap (km)	421,66	421,66	463,83	510,21	561,23	617,23	679,09
		1.2	Meningkatnya cakupan layanan kelistrikan	Rasio elektrifikasi (%)	90	90	100	100	100	100	100
		1.3	Meningkatnya cakupan layanan Air Minum	Persentase Penduduk berakses air minum (%)	55,5	55,5	61.05	100	100	100	100
		1.4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan lingkungan bersih dan sehat.	jumlah rumah layak huni (unit)	28.063	28.063	28.313	28.563	28.813	29.063	29.313
		1.5	Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi bagi pengembangan sektor pertanian	Rasio jaringan irigasi (Ha)	421,66	421,66	463,83	510,21	561,23	617,35	679,09
		1.6	Pecpaian Kawasan Kumuh	Rasio Kawasan Kumuh	15	10	5	0	0	0	0



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

		1.7	Sanitasi Layak	Rasio Kawasan Sanitasi Layak	65	85	90	100	100	100	100	
Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia	2.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Barito Selatan	2.1	Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,54	70,50	70,90	71,40	72	72,75	72,75
			2.2	Menurunnya angka kematian bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKB)	6	6	5,5	5	5	4,5	4,5
			2.3	Menurunnya angka kematian ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	89	89	89	89	89	45	45
			2.4	Menurunnya angka gizi buruk	Prevalensi gizi buruk	5%	4%	4%	3,5%	3,5%	3%	3%
			2.5	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	Jumlah pemakaian kontrasepsi (CPR)							
	3.	Meningkatkan kualitas kuantitas pendidikan masyarakat Barito Selatan	3.1	Peningkatan Kualitas Guru pada semua jenjang pendidikan	Jumlah pelaksanaan DIKLAT, dan BIMTEK							
			3.2	Meningkatnya akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat	Angka melek huruf	98,9	98,9	98,9	99	99,5	99,5	99,5
	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	12			12	12	12	12	12	12		
	4.	Meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendorong kerukunan dan ketentraman daerah	4.1	Meningkatnya pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat	Cakupan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memperoleh pembinaan (%)							
	Misi 3:	5.	Mengembangkan sektor pertanian yang menopang perekonomian masyarakat	5.1	Meningkatnya Produksi hasil pertanian	BIDANG TANAMAN PANGAN :						
Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan	Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan :											



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi.		Padi Sawah (Ku/Ha)	35,40	36,83	36,97	37,07	38,50	39,25	40,13
		Padi Ladang (Ku/Ha)	20,06	28,07	28,50	28,75	28,90	29,03	29,32
		Jagung (Ku/Ha)	25,60	50,00	55,20	60,00	60,50	70,00	70,60
		Kedelai (Ku/Ha)	12,70	13,00	13,20	13,30	13,40	13,50	13,60
		Ubi Kayu (Ku/Ha)	129,00	161,12	162,17	162,20	162,70	162,78	162,90
		Ubi Jalar (Ku/Ha)	100,90	101,00	101,50	102,00	102,50	103,00	103,50
		Kacang Tanah (Ku/Ha)	10,06	10,10	10,14	10,25	10,35	10,40	10,45
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan							
		Padi Sawah (Ton)	18.593,90	19.151,72	19.726,27	20.318,06	21.130,78	22.187,32	23.074,81
		Padi Ladang (Ton)	1.758,24	2.769,22	2.907,68	3.053,05	3.205,70	3.366,00	3.518,40
		Jagung (Ton)	92,01	1.000,00	2.208,00	3.600,00	4.840,00	7.000,00	8.472,00
		Kedelai (Ton)	18,00	26,00	30,36	33,25	35,51	37,80	40,80



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

		Ubi Kayu (Ku/Ha)	24.510,00	25.735,50	27.022,28	28.373,39	29.792,06	31.281,66	32.845,74
		Ubi Jalar (Ku/Ha)	8.720,00	9.156,00	9.613,80	10.094,49	10.599,21	11.129,18	11.685,63
		Kacang Tanah (Ku/Ha)	70,40	100,00	130,76	150,55	170,60	200,00	220,50
		Luas Panen Tanaman Pangan							
		Padi Sawah (Ha)	5.252,51	5.200,03	5.335,75	5.481,00	5.488,51	5.652,82	5.750,02
		Padi Ladang (Ha)	876,49	1.479,81	1.530,36	1.592,90	1.663,86	1.739,24	1.200,00
		Jagung (Ha)	35,94	200,00	400,00	600,00	800,00	1.000,00	1.200,00
		Kedelai (Ha)	14,17	20,00	23,00	25,00	26,50	28,00	2,50
		Ubi Kayu (Ha)	190,00	159,73	166,63	174,93	183,11	192,17	201,63
		Ubi Jalar (Ha)	86,42	90,65	94,72	98,97	103,41	108,05	1.129,05
		Kacang Tanah (Ha)	7,00	9,90	12,90	14,69	16,48	19,23	21,10
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura							



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

		Buah-buahan (Ton/Pohon)	145,40	3.083,60	3.145,27	3.302,54	3.467,66	3.641,05	3.713,87
		Sayuran (Ton/Ha)	429,90	667,99	691,80	726,39	762,71	800,84	840,89
		Tanaman Obat (Ton/Ha)	3,99	4,39	4,83	5,31	5,84	6,43	7,07
		Jumlah Produktivitas Tanaman Hortikultura							
		Buah-buahan (Ton/Ha)	0,60	5,19	5,45	5,72	6,01	6,31	6,62
		Sayuran (Ton/Ha)	1,25	1,34	1,36	1,40	1,41	1,46	1,53
		Tanaman Obat (Ton/Ha)	1,08	1,18	1,28	1,38	1,48	1,58	1,70
6.	Mengembangkan sektor perikanan yang menopang perekonomian masyarakat	6.1 Meningkatnya produksi Hasil perikanan	Produksi Perikanan	6.185,40	6.309,11	6.435,29	6.564,00	6.695,28	6.829,18
			Cakupan bina kelompok nelayan :						
			Jumlah Kelompok Budidaya/Nelayan Yang di Bina (Klpg)	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	64,00
			Jumlah Petugas Yang Mengikuti Diklat Teknis (Org)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

		Produksi Hasil Budidaya Ikan :							
		Kolam Ikan	2.467,72	2.517,07	2.567,42	2.618,76	2.671,14	2.724,56	2.724,56
		Keramba dan KJA	4.791,29	4.887,12	4.984,86	5.084,56	5.186,25	5.289,97	5.289,97
	6.2	Meningkatnya Konsumsi ikan	Konsumsi Ikan/Kapita/tahun (Kg)	40,58	41,39	42,21	43,05	43,91	44,79
	6.3	Pengelolaan Sumber Daya Alam	Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Yang Lestari :						
		Jumlah Pokmaswas Yang Di Bina (Klpk)	16,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00
		Jumlah Penanganan Kasus Illegal Fishing (Kasus)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		Jumlah Kegiatan Operasional Pengawasan Perikanan (Kali)	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00
		Pengembangan Wilayah Konservasi Sumber DayaPerikanan :							
		- Reservaat (Danau)	-	-	3,00	8,00	12,00	16,00	20,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

		- Restocking (Ekor)	-	-	450.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000	3.000.000
		- Rehabilitasi Dan Revitalisasi Beje (Buah)	-	-	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
7. Mengembangkan sektor Ketahanan Pangan yang menopang perekonomian masyarakat	7.1 Ketersediaan pangan utama dan Cadangan Pangan :	Ketersediaan pangan utama dan Cadangan Pangan :							
		Penguatan Cadangan Pangan (%)	60,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	64,00
		Informasi Pasokan,Harga da Akses Pangan di daerah %	90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	94,00
		Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%)	90,00	90,00	95,00	92,00	93,00	94,00	94,00
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat (%)	94,00	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00
		Penanganan Daerah Kerawanan Pangan (%)	60,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	64,00
	7.2 Mengembangkan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapital	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapital	90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	94,00
	7.3 Meningkatkan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	70,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	74,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

8. Meningkatkan investasi daerah yang berbasis sumber daya lokal	8.1	Terciptanya pranata hukum yang mendorong iklim investasi	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	8	8	8	8	8	8	8
	8.2	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Angka Indeks Gini Rasio	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,32
	8.3	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	5,4	5,4	4,65	3,91	3,17	2,43	2,43
	8.4	Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja	Laju Pertumbuhan Investasi (%)	25	25,55	30,76	32	34,25	36,5	36,5
	8.5	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	4,1	4	3,8	3,7	3,6	3,5	3,5
	8.6	Meningkatnya daya beli masyarakat	Laju pertumbuhan Ekonomi	7,1	7,1	7,3	7,5	7,65	7,8	7,8
9. Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berpihak kepada pengembangan koperasi dan UMKM	9.1	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal	Persentase K-UMKM aktif (%)	80	85	87	89	91	95	95
	9.2	Meningkatan daya saing dan pemasaran produk unggulan daerah (Rotan, Karet, Kerbau Rawa, Nenas Parigi, Kakao dll)	Stabilitas Harga Jual Produk Unggulan Daerah							



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

10.	Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan	10.1 meningkatnya pendapatan daerah terutama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kenaikan Pendapatan Daerah							
11.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	11.1 Terpasarnya pariwisata daerah	Jumlah wisatawan (%)	27	30	35	37	40	40	45
12.	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian wilayah sekaligus pelestarian nilai budaya dan kekayaan alam Barito Selatan	12.1 Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ribuan Rp)	568.009,01	568.009,01	575.308,75	582.708,75	594.708,87	598.009,01	668.009,01
		12.2 Meningkatnya sektor ekonomi hijau								
13.	Mewujudkan pembangunan yang berbasis pengelolaan sumber daya alam yang lestari	13.1 Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti (%)	70	70	72,5	80	83	85	85



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

			13.2	Terealisasinya perencanaan tataruang yang akomodatif dan konsisten								
Misi 4: Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah.	14.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	14.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih	Partisipasi hak pilihnya pada Pemilu	85	85	87	89	90	90	90
			14.2	Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP, KK, dll)	Dokumen Kependudukan							
	15.	Membangun pondasi yang kuat bagi penyiapan pemuda dalam pembangunan sejak dini	15.1	Meningkatnya peran pemuda	Cakupan Pembinaan Lembaga pemuda (%)	25	27	35	40	43	47	47
			15.2	Meningkatnya prestasi olah raga	Persentase prestasi olah raga (%)	15	20	25	30	35	35,5	35,5
	16.	Melestarikan dan menegakkan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi ciri masyarakat Barito Selatan	16.1	Meningkatnya perlindungan bagi hak adat dan tanah adat	Persentase SKTA yang diterbitkan	26,25	26,25	26,5	26,75	27	27,25	27,5
Misi 5 Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.	17.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	17.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
			17.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82	84	86	88	88	88



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

		17.3	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi		65	75	80	85	85	85
		17.4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Hasil penilaian kinerja pemerintah daerah	C	B	BB	BB	BB	A	A
		17.5	Predikat penyelenggara-raan pemerintahan daerah	Hasil predikat penyelenggara-raan pemerintahan	B	B	BB	BB	A	A	A
		17.6	Meningkatnya pengawasan bidang pemerintahan	Temuan Inspektorat Kabupaten							

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Setelah tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi atau teknis dalam menentukan program/kegiatan prioritas apa suatu target kinerja akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Metodologi itulah berupa perumusan strategi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi Informasi.

6.1 STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Disinipenting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus merupakan budaya berpikir strategik. Pemahaman strategis dan berpikir strategik

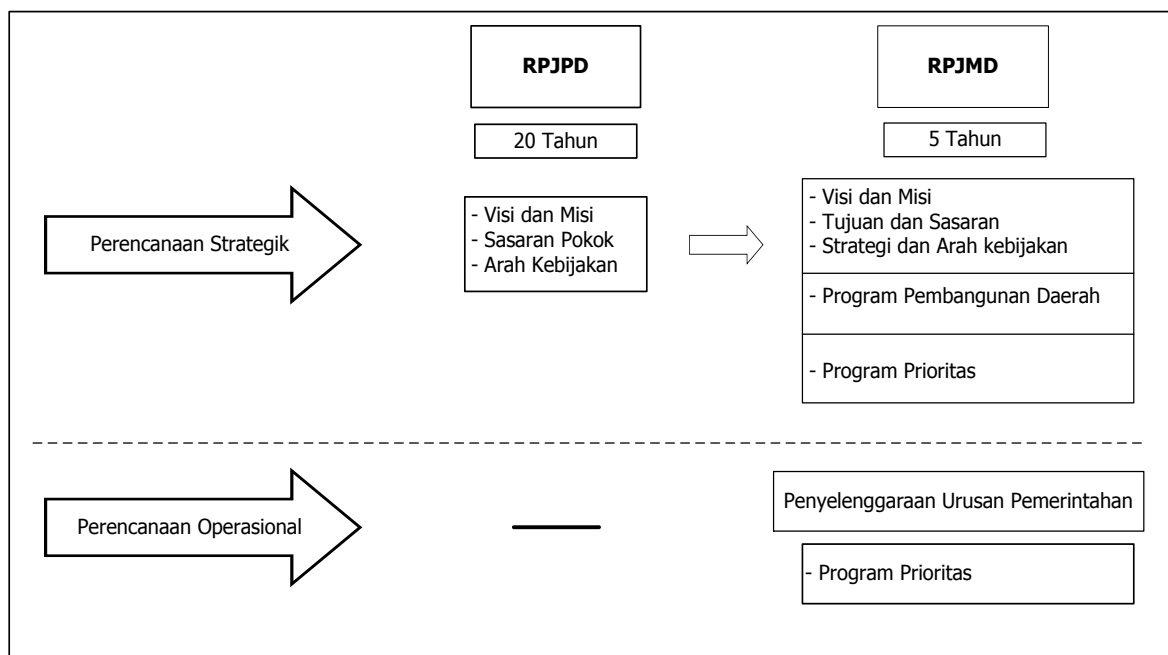
timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah, sekaligus menerjemahkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati ke dalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
2. Perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Selain hal tersebut diatas, perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.

Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 6.1
Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional



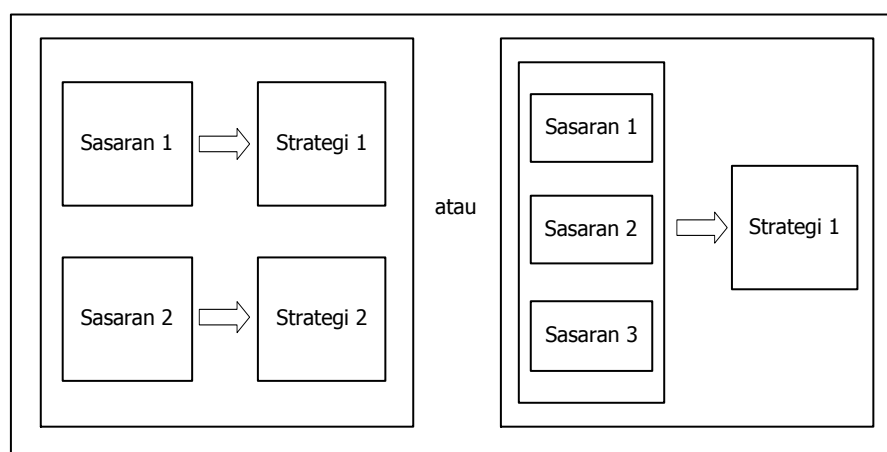
Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;

2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut:

Gambar 6.2
Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi



Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Selatan antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;



3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan kebijakan umum) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Berdasarkan kertas kerja yang telah dikembangkan, beberapa strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 yang mungkin dapat dilakukan yaitu terdiri dari 7 (tujuh) Strategi, dimana setiap strategi yang ada akan terhubung dengan satu atau lebih sasaran, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Selatan
(Tahun 2017-2022)

SASARAN		STRATEGI				
		2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6
1	Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Strategi (1) Pemerataan Infrastruktur Wilayah				
2	Meningkatnya cakupan layanan kelistrikan					
3	Meningkatnya cakupan layanan air minum					
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan lingkungan bersih dan sehat.					
5	Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi bagi pengembangan sektor pertanian					
6	Pencapaian Kawasan Kumuh					
7	Sanitasi Layak					



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

8	Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat	Strategi (2) Peningkatan pelayanan Kesehatan dan pendidikan yang berkualitas
9	Menurunnya angka kematian bayi	
10	Menurunnya angka kematian ibu	
11	Menurunnya angka gizi buruk	
12	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	
13	Peningkatan Kualitas Guru pada semua jenjang pendidikan	
14	Meningkatnya akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat	
15	Meningkatnya pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat	Strategi (3) Peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman dan tenteram
16	Meningkatnya Produksi hasil pertanian	Strategi (4) Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah
17	Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan	
18	Meningkatnya Konsumsi Ikan	
19	Pengelolaan Sumber Daya Alam	
20	Ketersediaan Pangan Utama dan Cadangan Pangan	
21	Mengembangkan Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita	
22	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	
23	Terciptanya pranata hukum yang mendorong iklim investasi	
24	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	
25	Menurunnya angka kemiskinan	
26	Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja	
27	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	
28	Meningkatnya daya beli masyarakat	
29	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi local	
30	Meningkatan daya saing dan pemasaran produk unggulan daerah (Rotan, Karet, Kerbau Rawa, Nenas Parigi, Kakao dll)	
31	meningkatnya pendapatan daerah terutama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
32	Terpasarnya pariwisata daerah	
33	Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah	
34	Meningkatnya sektor ekonomi hijau	
35	Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup	Strategi (5) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah



36	Terealisasinya perencanaan tataruang yang akomodatif dan konsisten	
37	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih	Strategi (6) Peningkatan partisipasi Publik
38	Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP, KK, dll)	
39	Meningkatnya peran pemuda	
40	Meningkatnya prestasi olah raga	
41	Meningkatnya perlindungan bagi hak adat dan tanah adat	
42	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Strategi (7) Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi
43	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
44	Meningkatnyakerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	
45	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	
46	Predikat penyelenggara-raan pemerintahan daerah	
47	Meningkatnya pengawasan bidang pemerintahan	

Berdasarkan tabel 6.1 di atas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai **prioritas pembangunan** (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah dijelaskan pada tabel 6.1 di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Penjelasan ketujuh Strategi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Pemerataan Infrastruktur Wilayah

Strategi pertama yang akan dilakukan adalah Pemerataan Infrastruktur Daerah. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan cakupan jaringan jalan yang handal dan terintegrasi.
2. Meningkatkan cakupan layanan kelistrikan.



3. Meningkatnya cakupan layanan air bersih.
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan lingkungan bersih dan sehat.
5. Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi bagi pengembangan sektor pertanian.

Infrastruktur wilayah seperti pembangunan jalan, jembatan, perhubungan, energi penyediaan air bersih, irigasi (pengairan), sarana dan prasarana kesehatan, serta infrastruktur pendidikan merupakan hal pokok dan mendasar sebagai pendukung kehidupan khususnya masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi penghambat laju perekonomian daerah dan aktifitas sosial ekonomi lainnya mengingat infrastruktur dasar merupakan aset penting dalam mendukung seluruh aspek pembangunan daerah.

Koordinasi yang baik dalam meningkatkan infrastruktur dasar menuju pusat-pusat layanan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan upaya yang tepat dalam mempercepat pelayanan publik sehingga efektifitas pelayanan masyarakat dapat tercapai; khususnya di daerah-daerah terpencil. Suksesnya peningkatan aksesibilitas sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi, baik daerah, nasional, maupun internasional.

Terkait dengan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, direncanakan peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan di Barito Selatanantara lainadalah:

Sistem jaringan transportasi darat meliputi:

(1) Jaringan jalan meliputi:

- a. jaringan jalan strategis nasional yang berstatus jalan nasional yaitu ruas jalan Kaliahien – Buntok – Ampah sepanjang 66,84 (*enam puluh enam koma delapan puluh empat*) kilometer.
- b. jaringan jalan kolektor K1 yang berstatus jalan nasional ruas jalan Ugang Sayu – Rampa Mea sepanjang 41,27 (*empat puluh satu koma dua puluh tujuh*) kilometer;
- c. jaringan jalan kolektor K2 yang berstatus jalan Provinsi terdiri dari : 1. ruas jalan Merdeka Raya sepanjang 0,71 (*nol koma tujuh puluh satu*) kilometer; 2. ruas jalan Tugu sepanjang 0,39 (*nol koma tiga puluh sembilan*) kilometer; 3. ruas jalan Jelapat sepanjang 1,21 (*satu koma dua puluh satu*) kilometer.
- d. jaringan jalan lokal primer yang berstatus jalan Kabupaten terdiri dari:



1. ruas jalan Simpang Rikut Jawu – Tabak Kanilan – HPH Km. 20– Sei Paken sepanjang 49,70 (*empat puluh sembilan koma tujuh puluh*) kilometer;
2. ruas jalan MTU – Bangkuang – Teluk Timbau – Damparan Lehai - Mangkatir – Kalanis –Adaro - Rantau Kujangsepanjang 56,61 (*lima puluh enam koma enam puluh satu*)kilometer;
3. ruas jalan Pendang – jalan strategis nasional sepanjang 22,97 (*dua puluh dua koma sembilan puluh tujuh*) kilometer;
4. ruas jalan Bangkuang (Barito Selatan) – Telang (Barito Timur) sepanjang 6,00 (*enam*) kilometer;
5. ruas jalanAsam– jalan strategis nasional sepanjang 11 (*sebelas*) kilometer;
6. ruas jalan Pararapak– jalan strategis nasional sepanjang 1,07 (*satu koma tujuh*) kilometer;
7. ruas jalan Mabuan – Kalahien sepanjang 4,03 (*empat koma tiga*) kilometer;
8. ruas jalan Sababilah – Danau Ganting– Keladan sepanjang 15,56 (*lima belas koma lima puluh enam*) kilometer;
9. ruas jalan Ugang Sayu – Dangka sepanjang 16,95 (*enam belas koma Sembilan puluh lima*) kilometer;
10. ruas jalan Pamangka – jalan strategis nasional sepanjang 3,58 (*tiga koma lima puluh delapan*) kilometer;
11. ruas jalan Gunung Rantau – Talekoi – Bundar – HPH KM. 20 sepanjang 30,44 (*tiga puluh koma empat puluh empat*) kilometer;
12. ruas jalan Tabak Kanilan –Muka Haji– Sire sepanjang 2,69 (*dua koma enam puluh Sembilan*) kilometer;
13. ruas jalan Tabak Kanilan – Kayumban sepanjang 3,69 (*tiga koma enam puluh Sembilan*) kilometer;
14. ruas jalan Dangka – Baruang sepanjang 15,09 (*lima belas koma Sembilan*) kilometer;
15. ruas jalan Sarimbuah – Gagutur sepanjang 5,46 (*lima koma empat puluh enam*) kilometer;
16. ruas jalan Sanggu – Majundre – Sei Telang sepanjang 24,34(*dua puluh empat koma tiga puluh tiga*) kilometer;
17. ruas jalan eks HPH KM.30 Rampa Mea – Hulu Tampang – Gunung Rantau sepanjang 35,12(*tiga puluh lima koma dua belas*) kilometer.
18. ruas jalan Rantau Kujang – Rantau Bahuang – Paminggir sepanjang 25 (*dua puluh lima*) kilometer.
19. ruas jalan mengkatip – Mahajandau – Sungai Jaya – Bukota – dadahup sepanjang 45 (*empat puluh lima*) kilometer.
20. ruas Batampang – Batilap – Muara Puning sepanjang 15 (*lima belas*) kilometer.



21. ruas Tampijak – Babai – Teluk Betung – Batilap 25 (*dua puluh lima*) kilometer.

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang Berkualitas

Strategi kedua adalah Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang berkualitas. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat.
2. Menurunnya angka kematian bayi.
3. Menurunnya angka kematian ibu.
4. Menurunnya angka gizi buruk.
5. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR).
6. Peningkatan Kualitas Guru pada semua jenjang pendidikan.
7. Meningkatnya akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan jati diri manusia dan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi dan kualitas manusia secara normatif. Dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing dengan SDM di dalam wilayah maupun di luar wilayah. Fokus utama bidang pendidikan yakni peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara merata. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang melek huruf dan kesadaran akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus digalakkan. Untuk mengatasi masalah pendidikan, khususnya bagi masyarakat miskin akan dibantu dalam penyelesaian pendidikan minimal pada jenjang S1, serta pemberian bea siswa pendidikan kepada masyarakat miskin dan siswa berprestasi. Selain itu, guna meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur desa, akan dilakukan diklat-diklat teknis dan bimbingan teknis kepada Kepala Desa.

Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas prima diperlukan perhatian pada relevansi dan mutu pendidikan. Rendahnya relevansi dan mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama terkait mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlu mengupayakan peningkatan relevansi dan mutu pendidikan secara lebih mendalam dan merata dan diselaraskan dengan evaluasi kinerja bidang pendidikan itu sendiri.



Pembangunan di bidang kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Peningkatan akses dan mutu di bidang kesehatan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Perhatian kepada bidang kesehatan menjadi semakin penting di masa desentralisasi ini karena kemampuan daerah menentukan arah dan kebijakan pembangunannya, akan menentukan pula pembangunan di bidang ini secara mendasar.

3. Peningkatan Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dalam Menciptakan Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat yang Aman dan Tentram

Strategi yang ketiga yaitu peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman dan tentram. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat

Upaya untuk menciptakan kondisi pengamalan agama yang baik adalah kerukunan antarumat beragama di antaranya agar terjadinya dialog atau diskusi antarumat beragama, pertemuan para alim ulama atau tokoh masing-masing agama, memberikan kebebasan kepada warga untuk beribadah tanpa mengusik mereka sesuai dengan kepercayaan yang dianut; dan meredam segala cikal bakal dan benih-benih yang dapat membuat antarumat beragama berseteru.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat terus akan dilakukan langkah-langkah antara lain: (1) melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; (2) menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; (3) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati ; (4) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan (5) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.



4. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah

Strategi pembangunan keempat adalah peningkatan kemandirian ekonomi daerah. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Produksi hasil pertanian.
2. Meningkatnya produksi hasil perikanan.
3. Meningkatnya konsumsi ikan.
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam.
5. Ketersediaan Pangan Utama dan Cadangan Pangan.
6. Mengembangkan Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita.
7. Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.
8. Terciptanya pranata hukum yang mendorong iklim investasi.
9. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
10. Menurunnya angka kemiskinan.
11. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.
12. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.
13. Meningkatnya daya beli masyarakat.
14. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi local.
15. Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk unggulan daerah (Rotan, Karet, Kerbau Rawa, Nenas Parigi, Kakao dll).
16. Meningkatnya pendapatan daerah terutama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
17. Terpasarnya pariwisata daerah.
18. Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah.
19. Meningkatnya sektor ekonomi hijau.

Strategi pembangunan ini dilaksanakan melalui pengelolaan pertanian dalam arti luas dengan berorientasi pasar yang didukung dengan kelembagaan, teknologi dan kemudahan permodalan serta informasi yang didukung oleh prasarana penunjang. Selain itu, Strategi ini dilaksanakan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang berpilar pada ekonomi lokal yang telah ada selama ini yang diselenggarakan oleh masyarakat menengah-bawah, termasuk yang berbasis hasil-hasil pertanian.

Dalam upaya untuk memicu agar ekonomi kerakyatan mendapat porsi yang memadai dalam pembangunan (ekonomi) daerah maka pengembangan kawasan di pedalaman juga harus diprioritaskan. Kajian tentang infrastruktur apa yang harus dipenuhi di masing-masing kawasan dimaksud, mutlak diperlukan. Pemaduan komponen



penggerak ekonomi lainnya juga perlu diperhatikan. Lembaga-lembaga keuangan, perdagangan, dan lain-lain, perlu difasilitasi kehadirannya. Pada akhirnya, sebagian komoditas yang dihasilkan dari ekonomi kerakyatan dipetakan untuk dapat diarahkan pada orientasi ekspor.

5. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Mendukung Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah

Strategi pembangunan kelima adalah pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten.

Strategi ini menekankan bahwa dalam pembangunan harus dilandasi dengan pendekatan pendayagunaan sumberdaya alam dengan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan. Pola konsumsi sumberdaya alam seharusnya memberi kesempatan dan peran-serta masyarakat serta memberdayakan masyarakat untuk dapat mengelola sumberdaya alam secara optimal dan lestari .

Penggalan dan pemanfaatan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) merupakan salah satu inti dari prioritas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ini, baik dari perencanaan dan pengembangannya di masa-masa datang dengan tetap mempertimbangkan upaya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Strategi ini juga tetap mengedepankan pengarusutamaan lingkungan hidup sebagai salah satu isu global yang harus diperhatikan. Pemetaan kawasan atau pusat-pusat unggulan ekonomi daerah tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan.

6. Peningkatan Partisipasi Publik

Strategi pembangunan keenam adalah peningkatan partisipasi publik. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.



2. Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP, KK, dll).
3. Meningkatnya peran pemuda.
4. Meningkatnya prestasi olah raga.
5. Meningkatnya perlindungan bagi hak adat dan tanah adat.

Partisipasi masyarakat (publik) merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebihluas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukanberdasarkan tingkat keikutsertaan (*level of involvement*) masyarakat dalam kegiatan tersebut. Partisipasimasyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebihbanyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif,efisien, dan berkelanjutan.

Alasan-alasan penggunaan pendekatan partisipatif bagi perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu (1) masyarakat berhak untuk ikut dan terlibat dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan mereka, berhak terlibat dalam keputusan-keputusan dan keberadaan mereka sehari-hari dan masa depan mereka, (2) jika masyarakat benar-benar diberi kesempatan (dan haknya), untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan, maka pembangunan diperkirakan berlangsung lebih efektif dan efisien.

7. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

Strategi pembangunan ketujuh adalah peningkatan kualitas reformasi birokrasi,. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public.
3. Meningkatnyakerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.
5. Predikat penyelengga-raan pemerintahan daerah.
6. Meningkatnya pengawasan bidang pemerintahan.

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.



Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, adil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah provinsi. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Di samping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten termasuk PD yang terlibat di dalamnya.

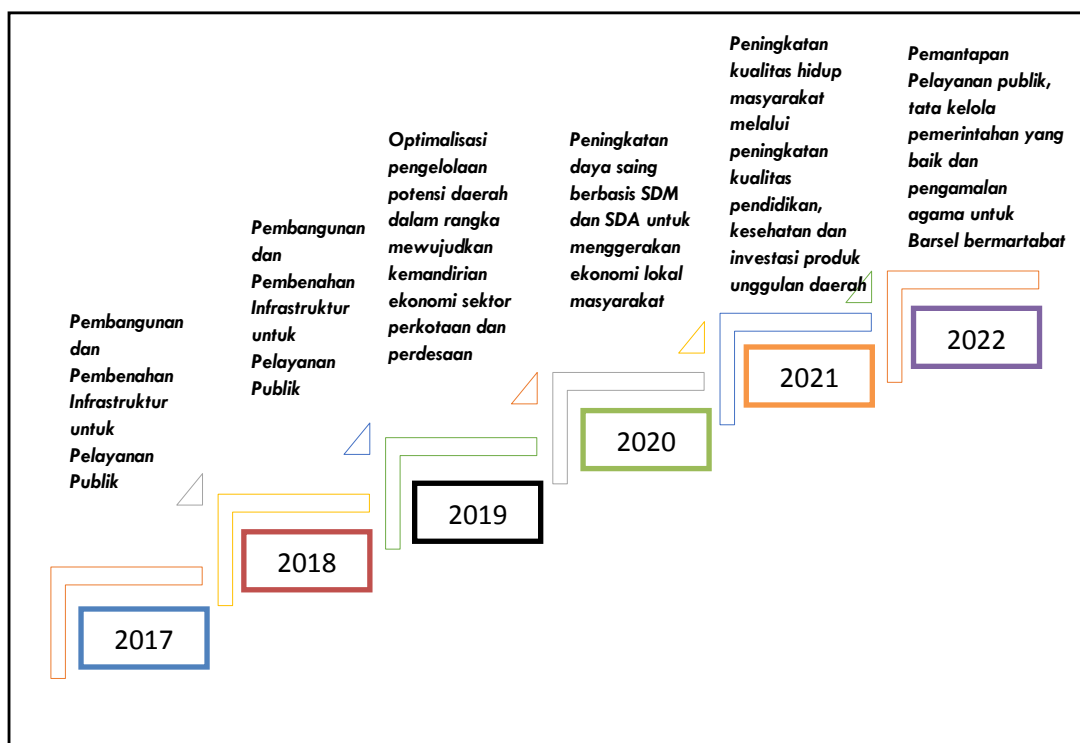
6.2.1 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPJMD di buat Fokus Tema Pembangunan Kabupaten Barito Selatan, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari Tahun 2017 sampai Tahun 2022 sebagai berikut :

Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada Gambar 6.1.

Gambar 6.1
Fokus/Tema Pembangunan Tahunan, RKPD Tahun 2017-2022





Berdasarkan gambar 6.2 diatas, dapat dipahami bahwa setiap tahun telah ditetapkan Tema-tema Pembangunan yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017-2018 yaitu sebagai berikut:

1.1 Tema Pembangunan pada Tahun 2017 :

“Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur untuk Pelayanan Publik”.

1.2 Tema Pembangunan pada Tahun 2018 :

“Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur untuk Pelayanan Publik”.

1.3 Tema Pembangunan pada Tahun 2019 :

“Optimalisasi pengelolaan potensi daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi sektor perkotaan dan perdesaan”.

1.4 Tema Pembangunan pada Tahun 2020 :

“Peningkatan daya saing berbasis SDM dan SDA untuk menggerakkan ekonomi lokal masyarakat”.

1.5 Tema Pembangunan pada Tahun 2021 :

“Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan investasi produk unggulan daerah”.

1.6 Tema Pembangunan pada Tahun 2022 :

“Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik dan pengamalan agama untuk Barsel bermartabat”.

6.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan RPJMD 2017-2022.

Memperhatikan arah kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan tema-tema pembangunan setiap tahun, maka selanjutnya akan ditetapkan arah pembangunan lima tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6.2, sedangkan untuk sinkronisasi antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Barito Selatan 2017-2022, dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut:



Tabel 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022

Strategi	Arah Kebijakan	Tahapan Pembangunan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pemerataan infrastruktur wilayah	1 Peningkatan sarana prasarana pendukung komunikasi dan informasi	x	x				
	2 Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur perhubungan	x	x	x	x	x	x
	3 Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar Kabupaten/ kota yang layak	x	x	x	x	x	x
	4 Peningkatan ketercukupan energi	x	x	x			
	5 Tersedianya akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok minuman 60 Ltr/Org/Hr	x	x	x			
	6 Meningkatnya rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh	x	x	x			
	7 Peningkatan ketersediaan sumber daya air	x	x	x	x		
2. Peningkatan pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang berkualitas	8 Peningkatan kualitas guru pada semua jenjang pendidikan		x	x	x		
	9 Optimalisasi manajemen pendidikan		x	x	x		
	10 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	x	x	x			
	11 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan			x	x	x	x
	12 Peningkatan promosi kesehatan masyarakat	x	x	x	x	x	x



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

		13	Peningkatan Akreditasi Sarana Kesehatan	x	x	x	x	x	x
3.	Peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman dan tenteram	14	Meningkatnya partisipasi tokoh agama dan tokoh masyarakat	x	x				
		15	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		x	x			
		16	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	x	x	x	x		x
4.	Peningkatan kemandirian ekonomi daerah	17	Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis	x	x	x	x	x	x
		18	Pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin	x	x	x	x	x	
		19	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah		x	x	x		
		20	Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan		x	x	x	x	
		21	Pengelolaan Potensi Sumberdaya Energi			x	x	x	x
		22	Pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di Barito Selatan	x	x	x	x		
		23	Peningkatan produksi hasil pada setiap subsektor pertanian	x	x	x	x	x	
		24	Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintahan dan swasta	x	x	x	x	x	x
		25	Pengembangan objek-objek pariwisata (alam dan budaya dan minat khusus)			x	x		
		26	Pengembangan pola kerjasama yang menyerap tenaga kerja lokal		x	x	x		
		27	Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah	x	x	x	x	x	x



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

5.	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah	28	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	x	x	x	x		
		29	Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis	x	x	x	x	x	x
		30	Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	x	x	x			
		31	Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan		x	x	x		
		32	Meningkatkan kegiatan diseminasi dan sosialisasi pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bencana.	x	x	x			
		33	Melakukan penyuluhan secara konsisten dan berkelanjutan dengan masyarakat potensial, baik satuan pemukiman, swasta maupun pemerintah dan masyarakat umum lainnya	x	x	x	x		
		34	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah	x	x	x			
		35	Pengembangan ekonomi unggulan yang memperhatikan pelestarian alam dan lingkungan.	x	x				
		36	Pengembangan ekonomi lokal	x	x	x	x		
6.	Peningkatan partisipasi publik	37	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	x	x				
		38	Meningkatnya cakupan kepemilikan kartu penduduk dan tingkat akurasi elemen datanya	x	x	x			
		39	Meningkatnya peran pemuda	x	x	x	x	x	x
		40	Rehabilitasi dan rekonsiliasi sarana dan prasarana olahraga		x	x	x		
		41	Meningkatnya prestasi olah raga		x	x			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

		42	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan				x	x	
		43	Meningkatnya minat baca masyarakat	x	x	x			
		44	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	x	x	x	x	x	x
		45	Presentase produk kebijakan yang responsif gender		x	x	x		
		46	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	x	x	x	x	x	
7.	Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi	47	Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik	x	x	x	x	x	x
		48	Meningkatkan implementasi dan pendelegasian sebagian kewenangan ke kecamatan			x	x	x	x
		49	Peningkatan SDM aparatur pelaksana pemerintahan	x	x				
		50	Peningkatan standar pelayanan publik	x	x	x			
		51	Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan		x	x			
		52	Peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi		x	x	x		
		53	Reformasi Birokrasi	x	x	x	x	x	x



Tabel 6.3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Barito Selatan 2017-2022

Visi: Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah Yang Maju Dan Mandiri, Sehingga Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera Secara Merata Dan Memiliki Daya Saing Dilandasi Iman Dan Taqwa							
MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2		3		4	5	
Misi 1:	1.	Meningkatkan konektivitas antarwilayah yang memperlancar distribusi orang, barang dan jasa, mendorong perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar wilayah.	1.1	Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Strategi (1) Pemerataan Infrastruktur Wilayah	1.1	Peningkatan sarana prasarana pendukung komunikasi dan informasi
Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran			1.2	Meningkatnya cakupan layanan kelistrikan		1.2	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur perhubungan
			1.3	Meningkatnya cakupan layanan air bersih			
			1.4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan lingkungan bersih dan sehat.		1.3	Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar Kabupaten/ kota yang layak
			1.5	Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi bagi pengembangan sektor pertanian		1.4	Peningkatan ketercukupan energi
			1.6	Pencapaian Kawasan Kumuh		1.5	Tersedianya akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok minuman 60 Ltr/Org/Hr
			1.7	Sanitasi Layak		1.6	Meningkatnya rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

						1.7	Peningkatan ketersediaan sumber daya air		
Misi 2:	2.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Barito Selatan	2.1	Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat	Strategi (2) Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas	2.1	Peningkatan kualitas guru pada semua jenjang pendidikan		
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia			2.2	Menurunnya angka kematian bayi		2.2	Optimalisasi manajemen pendidikan		
			2.3	Menurunnya angka kematian ibu		2.3	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan		
			2.4	Menurunnya angka gizi buruk		2.4	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan		
			2.5	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)		2.5	Peningkatan promosi kesehatan masyarakat		
		3.	Meningkatkan kualitas kuantitas pendidikan masyarakat Barito Selatan	3.1		Peningkatan Kualitas Guru pada semua jenjang pendidikan	2.6	Peningkatan Akriditasi Sarana Kesehatan	
				3.2		Meningkatnya akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat			
		4.	Meningkatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendorong kerukunan dan ketentraman daerah	4.1		Meningkatnya pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat	Strategi (3) Peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang aman dan tenteram	3.1	Meningkatnya partipasi tokoh agama dan tokoh masyarakat
								3.2	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
								3.3	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Misi 3: Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi.	5.	Mengembangkan sektor pertanian yang menopang perekonomian masyarakat	5.1	Meningkatnya Produksi hasil pertanian	Strategi (4) Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah	4.1	Menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok strategis
	6.	Mengembangkan sektor perikanan yang menopang perekonomian masyarakat	6.1	Meningkatnya produksi Hasil Perikanan		4.2	Pengurangan beban dan pemberdayaan masyarakat miskin
			6.2	Meningkatnya Konsumsi Ikan		4.3	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah
			6.3	Pengelolaan Sumber Daya Alam		4.4	Pengelolaan Potensi Sumberdaya Perikanan
	7.	Mengembangkan Sektor Ketahanan Pangan yang menopang Perekonomian	7.1	Ketersediaan Pangan Utama dan Cadangan Pangan		4.5	Pengelolaan Potensi Sumber Daya Energi
			7.1	Mengembangkan Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita			
			7.3	Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan			
	8.	Meningkatkan investasi daerah yang berbasis sumber daya lokal	8.1	Terciptanya pranata hukum yang mendorong iklim investasi		4.6	Pemberian kemudahan dalam berbagai investasi di Barito Selatan
			8.2	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat		4.7	Peningkatan produksi hasil pada setiap subsektor pertanian
			8.3	Menurunnya angka kemiskinan		4.8	Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintahan dan swasta



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

		8.4	Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja		4.9	Pengembangan objek-objek pariwisata (alam dan budaya dan minat khusus)
		8.5	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja		4.10	Pengembangan pola kerjasama yang menyerap tenaga kerja lokal
		8.6	Meningkatnya daya beli masyarakat		4.11	Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah
9.	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berpihak kepada pengembangan koperasi dan UMKM	9.1	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal			
		9.2	Meningkatan daya saing dan pemasaran produk unggulan daerah (Rotan, Karet, Kerbau Rawa, Nenas Parigi, Kakao dll)			
10.	Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan	10.1	meningkatnya pendapatan daerah terutama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
11.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	11.1	Terpasarnya pariwisata daerah			
12.	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian wilayah sekaligus pelestarian nilai budaya dan kekayaan alam Barito Selatan	12.1	Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah			
		12.2	Meningkatnya sektor ekonomi hijau			
13.	Mewujudkan pembangunan yang berbasis pengelolaan sumber daya alam yang	13.1	Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup	Strategi (5) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang	5.1	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

		lestari	13.2	Terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten	mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah	5.2	Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis
						5.3	Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup
						5.4	Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan
						5.5	Meningkatkan kegiatan diseminasi dan sosialisasi pencegahan, penanggulangan dan pengendalian bencana.
						5.6	Melakukan penyuluhan secara konsisten dan berkelanjutan dengan masyarakat potensial, baik satuan pemukiman, swasta maupun pemerintah dan masyarakat umum lainnya
						5.7	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah
						5.8	Pengembangan ekonomi unggulan yang memperhatikan pelestarian alam dan lingkungan.
						5.9	Pengembangan ekonomi lokal
Misi 4:	14.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	14.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih	Strategi (6) Peningkatan partisipasi Publik	6.1	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah						6.2	Meningkatnya cakupan kepemilikan kartu penduduk dan tingkat akurasi elemen datanya



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah.			14.2	Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP, KK, dll)		6.3	Meningkatnya peran pemuda
	15.	Membangun pondasi yang kuat bagi penyiapan pemuda dalam pembangunan sejak dini	15.1	Meningkatnya peran pemuda		6.4	Rehabilitasi dan rekonsiliasi sarana dan prasarana olahraga
			15.2	Meningkatnya prestasi olah raga		6.5	Meningkatnya prestasi olah raga
	16.	Melestarikan dan menegakkan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi ciri masyarakat Barito Selatan	16.1	Meningkatnya perlindungan bagi hak adat dan tanah adat		6.6	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
						6.7	Meningkatnya minat baca masyarakat
						6.8	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
						6.9	Presentase produk kebijakan yang responsif gender
						6.10	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
Misi 5	17.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	17.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Strategi (7) Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi	7.1	Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.					7.2	Meningkatkan implementasi dan pendelegasian sebagian kewenangan ke kecamatan
			17.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7.3	Peningkatan SDM aparatur pelaksana pemerintahan
			17.3	Meningkatnyakerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	7.4	Peningkatan standar pelayanan publik
			17.4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	7.5	Peningkatan tata kelola penyelenggara an pemerintahan
			17.5	Predikat penyelengga- raan pemerintahan daerah	7.6	Peningkatan pelayanan publik atas pengaduan masyarakat dan konsultasi
			17.6	Meningkatnya pengawasan bidang pemerintahan	7.7	Reformasi Birokrasi



6.3. Program Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah merupakan Program Kepala Daerah sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dandisusun berdasarkan bidang pemerintahan daerah yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun.

Program-program pembangunan daerah untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Selatan tahun 2017-2022 yang terdiri dari 5 (Satpa) Program yaitu :

1. Program Peningkatan Infrastruktur Fisik Sarana dan Prasarana.
2. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas Serta Bertaqwa.
3. Program Peningkatan Ekonomi Berbasis Lokal dan Lingkungan Hidup.
4. Program Peningkatan kerukunan hidup beragama, sosial dan budaya yang lestari, dan
5. Program Pengelolaan tata pemerintahan yang baik.

Selanjutnya lebih rinci dapat dilihat pada tabel 6.4 dibawah ini

Tabel 6.4.
Indikasi Rencana Program Pembangunan Daerah

Bidang	Indikasi Rencana Program Prioritas
1. Program Peningkatan Infrastruktur Fisik Sarana dan Prasarana	a. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan antara desa, dan kecamatan serta kabupaten. b. Peningkatan sarana air bersih. c. Pembangunan listrik dan mewujudkan Barsel terang. d. Peningkatan sarana transportasi darat, air dan udara. e. Pengembangan wilayah perkotaan dan pedesaan dengan pengelolaan tata ruang wilayah. f. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat. g. Mereview Rancangan Tata Ruang Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
2. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas Serta Bertaqwa	a. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis dan paramedis yang cukup dengan sistem pelayanan kesehatan yang murah dan mudah. b. Peningkatan pelayanan kesehatan khusus ibu dan anak serta pemberian bantuan kelahiran dan santunan kematian bagi keluarga tidak mampu. c. Menyediakan rumah layak huni, melalui kegiatan perbaikan rumah dan penataan lingkungan yang sehat. d. Mendorong pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun dan adanya sekolah berstandar internasional. e. Menyediakan sarana pendidikan PAUD, SD, dan SMP disetiap desa,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

	<p>serta menyiapkan tenaga Pendidik dan pemberian Beasiswa.</p> <p>f. Mengembangkan perpustakaan desa dan sarana informasi pedesaan.</p> <p>g. Membangun sarana prasarana pembinaan generasi muda dan olahraga.</p>
<p>3. Peningkatan Ekonomi Berbasis Lokal dan Lingkungan Hidup</p>	<p>a. Mengembangkan Sentra Ekonomi Berbasis Kecamatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dusun Selatan, sebagai pusat pemerintahan, kota pendidikan dan perdagangan, pengembangan pertanian dan perikanan serta pariwisata danau.2. Dusun Utara, pengembangan perkebunan dan pertanian.3. Gunung Bintang Awai, Pengelolaan Industri Pertambangan dan Pertanian.4. Karau Kuala, Pengembangan Industri rotan berkualitas ekspor.5. Jenamas. Pengembangan Komoditi ternak kerbau rawa dan perikanan.6. Dusun Hilir, Pengembangan pertanian sawah kualitas ekspor. <p>b. Meningkatkan Kapasitas tenaga kerja lokal menjadi wirausaha.</p> <p>c. Menciptakan lapangan kerja baru guna menampung tenaga kerja masyarakat.</p> <p>d. Memperkuat fungsi pasar dan Koperasi UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah.</p> <p>e. Mengembangkan potensi wisata alam dan investasi di bidang pariwisata.</p> <p>f. Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.</p>
<p>4. Peningkatan kerukunan hidup beragama, sosial dan budaya yang lestari</p>	<p>a. Menyediakan sarana prasarana ibadah, tenaga kerohanian dalam rangka pengamalan agama.</p> <p>b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sosial budaya.</p> <p>c. Meningkatkan budaya gotong royong masyarakat.</p> <p>d. Menata kelestarian alam hulu dan hilir serta penanggulangan bencana alam.</p> <p>e. Melestarikan adat istiadat dengan memugar cagar-cagar budaya dan tempat bersejarah.</p> <p>f. Membina organisasi kemasyarakatan, keagamaan, sosial politik dan kelompok seni budaya dan pembinaan suku terasing.</p>
<p>5. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik</p>	<p>a. Rekrutmen dan penempatan aparatur pemerintah daerah yang merata sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah.</p> <p>b. Pelayanan yang cepat, ramah dan mudah bagi masyarakat yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.</p> <p>c. Mendukung dan mendorong inovasi dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.</p> <p>d. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memberikan peluang investasi.</p>



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan

Secara umum kerangka pendanaan adalah pengalokasian sumber-sumber pembiayaan/pendanaan yang dimiliki oleh daerah atau kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan kedalam berbagai Kelompok Prioritas. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Secara lengkap mengenai kerangka pendanaan, telah dibahas pada Bab III dari, dan merupakan bagian yang menjadi kesatuan dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 Rencana

7.2 Program Perangkat Daerah

Program pembangunan daerah, diterjemahkan dalam masing-masing program setiap perangkat daerah. Pelaksanaan program-program masing-masing Perangkat Daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pada bagian ini disajikan semua program-program masing-masing perangkat daerah disertai dengan pendanaan untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 maupun untuk pemenuhan layanan SOPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Program perangkat daerah dibuat untuk masa lima tahun bagi masing-masing perangkat daerah. Untuk menunjukkan sejauhmana capaian rencana pembangunan akan dicapai, maka program perangkat daerah dilengkapi dengan target indikator kinerja.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah melaksanakan **urusan pemerintahan konkuren**,



yang mencakup **urusan wajib dan urusan pilihan**, yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut, terdiri dari:

1. **Urusan Pemerintahan Wajib** yang berkaitan dengan **Pelayanan Dasar**, meliputi 6 (enam) urusan yakni:
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - 6) sosial.
2. **Urusan Pemerintahan Wajib** yang **tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**, meliputi 18 (delapan belas) urusan yakni:
 - 1) tenaga kerja;
 - 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3) pangan;
 - 4) pertanahan;
 - 5) lingkungan hidup;
 - 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7) pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 9) perhubungan;
 - 10) komunikasi dan informatika;
 - 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 12) penanaman modal;
 - 13) kepemudaan dan olah raga;
 - 14) statistik;
 - 15) persandian;
 - 16) kebudayaan;
 - 17) perpustakaan;
 - 18) kearsipan.
3. **Urusan Pemerintahan Pilihan**, meliputi 8 (delapan) urusan yakni:
 - 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pariwisata;
 - 3) pertanian;
 - 4) kehutanan;
 - 5) energi dan sumber daya mineral;



- 6) perdagangan;
- 7) perindustrian;
- 8) transmigrasi

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, yakni:

- a. Perencanaan
- b. Keuangan
- c. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
- d. Penelitian dan pengembangan
- e. Fungsi penunjang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mencakup:
 - 1) Sekretariat Daerah
 - 2) Sekretariat DPRD
 - 3) Inspektorat

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sesuai Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, meliputi:

1. Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 7) Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 8) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 9) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- 10) Dinas Lingkungan Hidup;
- 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 12) Dinas Perhubungan;
- 13) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 14) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 16) Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- 17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;



- 2. Badan Daerah dan Kesatuan Kabupaten**, terdiri dari:
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 - 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 4) Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
 - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3. Sekretariat Daerah**, terdiri dari:
 - 1) Bagian Pemerintahan
 - 2) Bagian Hukum
 - 3) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
 - 4) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - 5) Bagian Administrasi Pembangunan
 - 6) Bagian Pengadaan Barang/Jasa
 - 7) Bagian Organisasi
 - 8) Bagian Umum
 - 9) Bagian Protokol dan Komunikasi Publik
- 4. Sekretariat DPRD**
- 5. Inspektorat**
- 6. RSUD Jaraga Samameh**
- 7. Kecamatan**

Program-program prioritas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, disamping untuk mendukung visi dan misi kepala daerah secara langsung juga dimaksudkan untuk mencapai visi dan misi Renstra Perangkat Daerah, yang antara lain dimaksudkan sebagai fungsi pelayanan Perangkat Daerah kepada masyarakat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program-program berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan misi Renstra Perangkat Daerah, namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

Secara lengkap program-program tersebut disajikan pada tabel 7.1 tentang Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk mencapai Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kemudian untuk layanan Perangkat Daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, disajikan tabel 7.2 tentang Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah untuk mencapai Visi, Misi dan Layanan SOPD dalam rangka menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah.



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan dibahas pada Bab ini adalah berkaitan khususnya dengan Penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah pada dasarnya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022, Indikator Kinerja Utama yang menjadi tolok ukur adalah diambil dari indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Bab V terdahulu sebagaimana pada tabel 8.1 dibawah ini:



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Selatan

SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2016)	TARGET TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
3		4	5	6	7	8	9	10
1.1	Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang handal dan terintegrasi	Panjang jalan kondisi mantap (km)	421,66	421,66	463,83	510,21	561,23	617,23
1.2	Meningkatnya cakupan layanan kelistrikan	Rasio elektrifikasi (%)	90	90	100	100	100	100
1.3	Meningkatnya cakupan layanan Air Minum	Persentase Penduduk berakses air minum (%)	55,5	55,5	61.05	100	100	100
1.4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan lingkungan bersih dan sehat.	jumlah rumah layak huni (unit)	28.063	28.063	28.313	28.563	28.813	29.063
1.5	Meningkatnya ketersediaan jaringan irigasi bagi pengembangan sektor pertanian	Rasio jaringan irigasi (Ha)	421,66	421,66	463,83	510,21	561,23	617,35
1.6	Pecpaian Kawasan Kumuh	Rasio Kawasan Kumuh	15	10	5	0	0	0
1.7	Sanitasi Layak	Rasio Kawasan Sanitasi Layak	65	85	90	100	100	100
2.1	Meningkatkan usia harapan hidup masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,54	70,50	70,90	71,40	72	72,75
2.2	Menurunnya angka kematian bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKB)	6	6	5,5	5	5	4,5
2.3	Menurunnya angka kematian ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	89	89	89	89	89	45



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

2.4	Menurunnya angka gizi buruk	Prevalensi gizi buruk	5%	4%	4%	3,5%	3,5%	3%
2.5	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	Jumlah pemakaian kontrasepsi (CPR)						
3.1	Peningkatan Kualitas Guru pada semua jenjang pendidikan	Jumlah pelaksanaan DIKLAT, dan BIMTEK						
3.2	Meningkatnya akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat	Angka melek huruf	98,9	98,9	98,9	99	99,5	99,5
		Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	12	12	12	12	12	12
4.1	Meningkatnya pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat	Cakupan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memperoleh pembinaan (%)						
5.1	Meningkatnya Produksi hasil pertanian	BIDANG TANAMAN PANGAN :						
		Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan :						
		Padi Sawah (Ku/Ha)	35,40	36,83	36,97	37,07	38,50	39,25
		Padi Ladang (Ku/Ha)	20,06	28,07	28,50	28,75	28,90	29,03
		Jagung (Ku/Ha)	25,60	50,00	55,20	60,00	60,50	70,00
		Kedelai (Ku/Ha)	12,70	13,00	13,20	13,30	13,40	13,50
		Ubi Kayu (Ku/Ha)	129,00	161,12	162,17	162,20	162,70	162,78
		Ubi Jalar (Ku/Ha)	100,90	101,00	101,50	102,00	102,50	103,00
		Kacang Tanah (Ku/Ha)	10,06	10,10	10,14	10,25	10,35	10,40
		Jumlah Produksi Tanaman						



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

	Pangan						
	Padi Sawah (Ton)	18.593,90	19.151,72	19.726,27	20.318,06	21.130,78	22.187,32
	Padi Ladang (Ton)	1.758,24	2.769,22	2.907,68	3.053,05	3.205,70	3.366,00
	Jagung (Ton)	92,01	1.000,00	2.208,00	3.600,00	4.840,00	7.000,00
	Kedelai (Ton)	18,00	26,00	30,36	33,25	35,51	37,80
	Ubi Kayu (Ku/Ha)	24.510,00	25.735,50	27.022,28	28.373,39	29.792,06	31.281,66
	Ubi Jalar (Ku/Ha)	8.720,00	9.156,00	9.613,80	10.094,49	10.599,21	11.129,18
	Kacang Tanah (Ku/Ha)	70,40	100,00	130,76	150,55	170,60	200,00
	Luas Panen Tanaman Pangan						
	Padi Sawah (Ha)	5.252,51	5.200,03	5.335,75	5.481,00	5.488,51	5.652,82
	Padi Ladang (Ha)	876,49	1.479,81	1.530,36	1.592,90	1.663,86	1.739,24
	Jagung (Ha)	35,94	200,00	400,00	600,00	800,00	1.000,00
	Kedelai (Ha)	14,17	20,00	23,00	25,00	26,50	28,00
	Ubi Kayu (Ha)	190,00	159,73	166,63	174,93	183,11	192,17
	Ubi Jalar (Ha)	86,42	90,65	94,72	98,97	103,41	108,05
	Kacang Tanah (Ha)	7,00	9,90	12,90	14,69	16,48	19,23
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura						
	Buah-buahan (Ton/Pohon)	145,40	3.083,60	3.145,27	3.302,54	3.467,66	3.641,05
	Sayuran (Ton/Ha)	429,90	667,99	691,80	726,39	762,71	800,84
	Tanaman Obat (Ton/Ha)	3,99	4,39	4,83	5,31	5,84	6,43
	Jumlah Produktivitas Tanaman						



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

		Hortikultura						
		Buah-buahan (Ton/Ha)	0,60	5,19	5,45	5,72	6,01	6,31
		Sayuran (Ton/Ha)	1,25	1,34	1,36	1,40	1,41	1,46
		Tanaman Obat (Ton/Ha)	1,08	1,18	1,28	1,38	1,48	1,58
6.1	Meningkatnya produksi Hasil perikanan	Produksi Perikanan	6.185,40	6.309,11	6.435,29	6.564,00	6.695,28	6.829,18
		Cakupan bina kelompok nelayan :						
		Jumlah Kelompok Budidaya/Nelayan Yang di Bina (Klpk)	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	64,00
		Jumlah Petugas Yang Mengikuti Diklat Teknis (Org)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		Produksi Hasil Budidaya Ikan :						
		Kolam Ikan	2.467,72	2.517,07	2.567,42	2.618,76	2.671,14	2.724,56
		Keramba dan KJA	4.791,29	4.887,12	4.984,86	5.084,56	5.186,25	5.289,97
6.2	Meningkatnya Konsumsi ikan	Konsumsi Ikan/Kapita/tahun (Kg)	40,58	41,39	42,21	43,05	43,91	44,79
6.3	Pengelolaan Sumber Daya Alam	Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Yang Lestari :						



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

	Jumlah Pokmaswas Yang Di Bina (Klpk)	16,00	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00
	Jumlah Penanganan Kasus Illegal Fishing (Kasus)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Jumlah Kegiatan Operasional Pengawasan Perikanan (Kali)	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00
	Pengembangan Wilayah Konservasi Sumber Daya Perikanan :						
	- Reservoir (Danau)	-	-	3,00	8,00	12,00	16,00
	- Restocking (Ekor)	-	-	450.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
	- Rehabilitasi Dan Revitalisasi Beje (Buah)	-	-	20,00	30,00	40,00	50,00
7.1	Ketersediaan pangan utama dan Cadangan Pangan :	Ketersediaan pangan utama dan Cadangan Pangan :					
	Penguatan Cadangan Pangan (%)	60,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00
	Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di daerah %	90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%)	90,00	90,00	95,00	92,00	93,00	94,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat (%)	94,00	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00
		Penanganan Daerah Kerawanan Pangan (%)	60,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00
7.2	Mengembangkan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapital	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapital	90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
7.3	Meningkatnya Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	70,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00
8.1	Terciptanya pranata hukum yang mendorong iklim investasi	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	8	8	8	8	8	8
8.2	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Angka Indeks Gini Rasio	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36
8.3	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	5,4	5,4	4,65	3,91	3,17	2,43
8.4	Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja	Laju Pertumbuhan Investasi (%)	25	25,55	30,76	32	34,25	36,5
8.5	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Angka partisipasi angkatan kerja	4,1	4	3,8	3,7	3,6	3,5
8.6	Meningkatnya daya beli masyarakat	Laju pertumbuhan Ekonomi	7,1	7,1	7,3	7,5	7,65	7,8
9.1	Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan	Persentase K-UMKM aktif (%)	80	85	87	89	91	95



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

	ekonomi lokal							
9.2	Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk unggulan daerah (Rotan, Karet, Kerbau Rawa, Nenas Parigi dll)	Stabilitas Harga Jual Produk Unggulan Daerah						
10.1	meningkatnya pendapatan daerah terutama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kenaikan Pendapatan Daerah						
11.1	Terpasarnya pariwisata daerah	Jumlah wisatawan (%)	27	30	35	37	40	40
12.1	Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ribuan Rp)	568.009,01	568.009,01	575.308,75	582.708,75	594.708,87	598.009,01
12.2	Meningkatnya sektor ekonomi hijau							
13.1	Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase pengaduan masy akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti (%)	70	70	72,5	80	83	85
13.2	Terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten							
14.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih	Partisipasi hak pilihnya pada Pemilu	85	85	87	89	90	90



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

14.2	Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP, KK, dll)	Dokumen Kependudukan						
15.1	Meningkatnya peran pemuda	Cakupan Pembinaan Lembaga pemuda (%)	25	27	35	40	43	47
15.2	Meningkatnya prestasi olah raga	Persentase prestasi olah raga (%)	15	20	25	30	35	35,5
16.1	Meningkatnya perlindungan bagi hak adat dan tanah adat	Persentase SKTA yang diterbitkan	26,25	26,25	26,5	26,75	27	27,25
17.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
17.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82	84	86	88	88
17.3	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi		65	75	80	85	85
17.4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Hasil penilaian kinerja pemerintah daerah	C	B	BB	BB	BB	A
17.5	Predikat penyelenggara-raan pemerintahan daerah	Hasil predikat penyelenggara-raan pemerintahan	B	B	BB	BB	A	A



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

17.6	Meningkatnya pengawasan bidang pemerintahan	Temuan Inspektorat Kabupaten						
------	---	------------------------------	--	--	--	--	--	--

8.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sebagaimana yang telah diuraikan pada awal Bab ini, penetapan indikator kinerja daerah pada dasarnya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2017-2022 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam pembahasan terkait Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat 2 (dua) Aspek dan Indikator yaitu: 1) Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (*dampak/impact*) Pemerintah Daerah; dan 2) Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah. Kedua aspek tersebut selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

A. Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (*dampak/impact*) Pemerintah Daerah

Pada Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (*dampak/impact*) Pemerintah Daerah, penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada Aspek kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Aspek Kesejahteraan Masyarakat dapat diukur antara lain dari Pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, PDRB per Kapita, Angka Melek Huruf dan beberapa indikator lainnya. Sedangkan Pada aspek daya saing daerah penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tanggal per Kapita, Nilai Tukar Petani, Persentase Pengeluaran Konsumsi non pangan perkapita, produktivitas total daerah dan beberapa indikator lainnya dan dapat dilihat pada Tabel 8.2.

B. Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah

Pada Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah, penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada seluruh Aspek yang berkaitan dengan pelayanan umum berdasarkan urusan pemerintahan baik yang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, serta Unsur Penunjang Pemerintahan. Selanjutnya Aspek dan Indikator tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel 8.3.



BAB IX PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaanstrategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana daerah Barito Selatan akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2012-2022); bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Periode RPJMD Kabupaten Barito Selatan ini disesuaikan masa jabatan kepala daerah terpilih, yakni 2017-2022.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.. Selain itu juga mempertimbangkan sinkronisasi dan harmonisasi dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Rencana Tata Ruang Kabupaten Barito Selatan 2014-2035.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Barito Selatan. Selanjutnya RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan, yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode Kabupaten Barito Selatan selama satu tahun.

9.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012-2022 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2017 hingga 2022. Sedangkan perencanaan pembangunan tahun 2022 mempergunakan RPJMD Transisi Tahun 2022 sebelum RPJMD Kabupaten



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Barito Selatan Tahun 2022-2027 disusun, yang akan memuat visi, misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan tahun 2022. Pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada RPJMD Transisi Tahun 2022.

Program-program transisi disusun sebagai rancangan program indikatif satu tahun ke depan (2022) setelah periode RPJMD Kabupaten Barito Selatan berakhir tahun 2022, dengan tujuan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 telah ditetapkan agenda pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selama kurun waktu kepemimpinan kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia.
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi.
4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah.
5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh lembaga perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh *stakeholders* dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan periode berikutnya.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukannya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di bidang pendidikan, dan kesehatan, perekonomian rakyat yang semakin berdaya, makin berkurangnya jumlah penduduk dan keluarga miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran, tetapi sekaligus mampu mewujudkan masyarakat Barito Selatan yang memiliki kepedulian terhadap sesama, berkualitas dan beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, dalam periode lima tahun ke depan, diharapkan kesenjangan atau disparitas antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju dapat berkurang secara signifikan, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Kabupaten Barito Selatan juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Program transisi tahun 2022 sudah barang tentu akan dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan dapat lebih banyak berorientasi pada upaya memfasilitasi dan memberiberbagai kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata, dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang adil kepada masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumber-sumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal didukung kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2017-2022 ini dengan sebaik-baiknya.
2. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-SOPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan/Dinas/Unit Satuan Organisasi (Renja-SOPD).

3. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dilingkungan Barito Selatan berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja.
4. Konsepsi prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas.
5. Konsepsi deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan berkewajiban melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah maka Bappeda Kabupaten Barito Selatan berkewajiban melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-SOPD).

Bupati Barito Selatan,

ttd

H. EDDY RAYA SAMSURI

Tabel 7.1
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022
Untuk Mencapai Visi dan Misi

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Misi 1																	
Membangun dan Membenahi Infrastruktur																	
		Program pembangunan jalan dan jembatan	Tersedianya transportasi pada daerah yang masih terisolir	613,12 km (59,24%)	25 km	15.867.500.000	25 km	17.454.250.000	25 km	19.199.675.000	25 km	21.119.642.500	25 km	23.231.606.750	1	96.872.674.250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program peningkatan jalan dan jembatan	Terpenuhinya kelancaran transportasi yang lebih efektif	613,12 km (59,24%)		53.322.500.000		58.654.750.000	paket	64.520.225.000	paket	70.972.247.500	paket	78.069.472.250		325.539.194.750	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Terpeliharanya jalan dan jembatan sesuai fungsinya			2.189.000.000		2.407.900.000	paket	2.648.690.000	paket	2.913.559.000	paket	3.204.914.900		13.364.063.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pembangunan saluran drainase/ gorong gorong	Tertatanya saluran/drainase perkotaan/perdesaan sesuai fungsi			780.913.100		859.004.410	1 paket	944.904.851		1.039.395.336	paket	1.143.334.870		4.767.552.567	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Air Minum	Tersedianya air bersih yang memenuhi syarat kualitas untuk kebutuhan masyarakat			6.175.000.000		6.792.500.000	1 paket	7.471.750.000		8.218.925.000	paket	9.040.817.500		37.698.992.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program perluasan dan peningkatan SR	Terjangkauny a kebutuhan air bersih yang berkualitas untuk masyarakat			500.000.000		550.000.000	1 paket	605.000.000		665.500.000	paket	732.050.000		3.052.550.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pembangunan Sarana Pengolahan Air Minum (SPAM)	Tersedianya sistem pengolahan air bersih yang memenuhi syarat			3.500.000.000		3.850.000.000		4.235.000.000		4.658.500.000		5.124.350.000	paket	21.367.850.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pembangunan Prasarana Sanitasi	Tertatanya sistem sanitasi yang baik			2.600.000.000	1 paket	2.860.000.000	1 paket	3.146.000.000	paket	3.460.600.000	paket	3.806.660.000	paket	15.873.260.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP)	Terlaksananya a lingkungan permukiman yang sehat			12.000.000.000	1 paket	13.200.000.000	1 paket	14.520.000.000	paket	15.972.000.000	paket	17.569.200.000	paket	73.261.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa	Terkelolanya bangunan dan jaringan irigasi yang baik dan sesuai fungsinya			1.006.641.000	1 paket	1.107.305.100	1 paket	1.218.035.610	paket	1.339.839.171	paket	1.473.823.088	paket	6.145.643.969	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa	Terkelolanya air baku untuk kebutuhan irigasi yang lebih baik			8.850.000.000	1 paket	9.735.000.000	1 paket	10.708.500.000	paket	11.779.350.000	paket	12.957.285.000	paket	54.030.135.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengamanan dan Perlindungan Sumber Air	Terpeliharany a sumber air baku untuk kepentingan masyarakat			150.000.000	1 paket	165.000.000	1 paket	181.500.000	paket	199.650.000	paket	219.615.000	paket	915.765.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Penataan Ruang Kabupaten	Terciptanya penataan ruang kota yang baik			4.100.000.000	1 paket	4.510.000.000	1 paket	4.961.000.000	paket	5.457.100.000	paket	6.002.810.000	paket	25.030.910.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pembinaan jasa Konstruksi	Tersedianya tenaga-tenaga teknis yang handal dan bersertifikat			1.052.600.000	1 paket	1.157.860.000	1 paket	1.273.646.000	paket	1.401.010.600	paket	1.541.111.660	paket	6.426.228.260	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Bna Teknik/Program	Tercapainya kegiatan pembangunan yang memenuhi syarat mutu			1.264.869.500	1 paket	1.391.356.450	1 paket	1.530.492.095	paket	1.683.541.305	paket	1.851.895.435	paket	7.722.154.784	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Progrm Perencanaan Bina Marga	Terencananya kegiatan pembangunan di bidang Bina Marga			550.000.000	1 paket	605.000.000	1 paket	665.500.000	paket	732.050.000	paket	805.255.000	paket	3.357.805.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Perencanaan Cipta Karya	Terencananya kegiatan pembangunan di bidang Cipta Karya			275.000.000	1 paket	302.500.000	1 paket	332.750.000	paket	366.025.000	paket	402.627.500	paket	1.678.902.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan wilayah sesuai tata ruang	Kawasan strategis cepat tumbuh														Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Survey/Perencanaan Sumber Daya Air	Terencananya kegiatan pembangunan di bidang Sumber Daya Air			250.000.000	1 paket	275.000.000	1 paket	302.500.000	paket	332.750.000	paket	366.025.000	paket	1.526.275.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah		paket	paket	550.000.000	paket	825.000.000	paket	975.000.000	paket	1.200.000.000	paket	1.325.000.000	paket	4.875.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Pembangunan dan Penataan Kawasan Pengembang		paket	paket	2.650.000.000	paket	2.900.000.000	paket	3.150.000.000	paket	3.400.000.000	paket	3.650.000.000	paket	15.750.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		Program Pembangunan dan Penataan Kawasan Kumuh		paket	paket	1.750.000.000	paket	1.750.000.000	paket	1.100.000.000	paket	1.400.000.000	paket	950.000.000	paket	6.950.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		Program Penataan Jalan Lingkungan				5.400.000.000		6.450.000.000		7.000.000.000		8.000.000.000		8.550.000.000		35.400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		Program Penataan dan Pemeliharaan Makam				1.925.000.000		2.125.000.000		2.470.000.000		2.595.000.000		2.525.000.000		11.640.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau				2.075.000.000		2.325.000.000		2.375.000.000		2.400.000.000		2.425.000.000		11.600.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		Program Penataan Fasilitas Umum Kota/PJU				1.550.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000		7.750.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		Program Peningkatan Kapasitas Bidang Pertanahan				1.000.000.000		1.500.000.000		1.725.000.000		1.350.000.000		1.500.000.000		7.075.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Pengelolaan Data dan Informasi Serta Jaringan Komunikasi dan Persandian		7 kegiatan	7 kegiatan	300.000.000	7 kegiatan	330.000.000	7 kegiatan	363.000.000	7 kegiatan	399.300.000	7 kegiatan	439.230.000		1.831.530.000	DISKOMINF O
		Program Publikasi Informasi Daerah dan Kerjasama Informasi Dengan Media Massa		4 kegiatan	4 kegiatan	1.270.000.000	4 kegiatan	1.397.000.000	4 kegiatan	1.536.700.000	4 kegiatan	1.690.370.000	4 kegiatan	1.859.407.000	0 kegiatan	7.753.477.000	DISKOMINF O
		Program Pelayanan dan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Penyiaran		1 paket; 12 kegiatan;	1 paket; 12 kegiatan;	390.500.000	1 paket; 12 kegiatan;	429.550.000	1 paket; 12 kegiatan;	472.505.000	1 paket; 12 kegiatan;	519.755.500	1 paket; 12 kegiatan;	571.731.050		2.384.041.550	DISKOMINF O
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase jumlah masyarakat yang terlayani angkutan darat/laut/udara	5 Kegiatan	5 Kegiatan	20.000.000	5 Kegiatan	200.000.000	5 Kegiatan	300.000.000	5 Kegiatan	400.000.000	5 Kegiatan	500.000.000	5 Kegiatan	1.420.000.000	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan pelayanan angkutan	Persentase jumlah masyarakat yang terlayani angkutan darat/laut/udara	8 kegiatan	8 kegiatan	375.000.000	8 kegiatan	375.000.000	8 kegiatan	375.000.000	8 kegiatan	390.000.000	8 kegiatan	400.000.000	8 kegiatan	1.915.000.000	Dinas Perhubungan
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan sungai dalam kondisi baik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	110.000.000	3 Kegiatan	120.000.000	3 Kegiatan	240.000.000	3 Kegiatan	240.000.000	3 Kegiatan	250.000.000	3 Kegiatan	960.000.000	Dinas Perhubungan
		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase berkurangnya angka kecelakaan angkutan umum	5 Kegiatan	5 Kegiatan	80.000.000	5 Kegiatan	80.000.000	5 Kegiatan	90.000.000	5 Kegiatan	95.000.000	5 Kegiatan	100.000.000	5 Kegiatan	445.000.000	Dinas Perhubungan
		PAGU MISI 1				133.879.523.600		148.233.975.960		162.187.373.556		177.941.110.912		194.138.222.003		816.380.206.030	

Tabel 7.1
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022
Untuk Mencapai Visi dan Misi

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Misi 2																	
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat																	
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan			963.743.000		963.743.000		963.743.000		963.743.000		963.743.000		4.818.715.000	Dinas Kesehatan
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat				1.083.400.000		1.191.740.000		1.310.914.000		1.442.005.400		1.586.205.940		6.614.265.340	Dinas Kesehatan
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat				148.761.200		163.737.320		180.001.052		198.001.157		217.801.273		908.302.002	Dinas Kesehatan
		Program Pengawasan Obat dan Makanan				4.590.000		5.049.000		5.553.900		6.109.290		6.720.219		28.022.409	Dinas Kesehatan
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				453.063.891		498.370.280		548.207.308		603.028.039		663.330.843		2.766.000.361	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat				418.990.000		460.889.000		506.977.900		557.675.690		613.443.259		2.557.975.849	Dinas Kesehatan
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				946.460.000		1.041.106.000		1.145.216.600		1.259.738.260		1.385.712.086		5.778.232.946	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan				55.196.000		60.715.600		66.787.160		73.465.876		80.812.464		336.977.100	Dinas Kesehatan

		Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan				18.200.000		20.020.000		22.022.000		24.224.200		26.646.620		111.112.820	Dinas Kesehatan
		Program Kegiatan DAK NON FISIK				8.525.821.000		8.525.821.000		8.525.821.000		8.525.821.000		8.525.821.000		42.629.105.000	Dinas Kesehatan
		Program Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP (Dana bersumber dari BPJS Pusat)				3.068.916.700		3.375.808.370		3.713.389.207		4.084.728.128		4.493.200.940		18.736.043.345	Dinas Kesehatan
		Program Pengadaan, peningkatan sarana dan Prasarana RS/RSJ/RSParu/R SMata				3.130.000.000		3.443.000.000		3.787.300.000		4.166.030.000		4.582.633.000		19.108.963.000	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD				26.000.000.000		28.600.000.000		31.460.000.000		34.606.000.000		38.066.600.000		158.732.600.000	Dinas Kesehatan
		Program Pendidikan Anak Usia Dini				1.825.220.000		2.007.742.000	1 tahun	Rp 2.007.742.000		2.208.516.200		Rp 2.208.516.200		10.257.736.400	Dinas Pendidikan
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				Rp 20.290.163.500		22.319.179.850	1 tahun	Rp 22.319.179.850		24.551.097.835		Rp 24.551.097.835		114.030.718.870	Dinas Pendidikan
		Program Pendidikan Non Formal dan Informal				Rp 174.350.000		Rp 191.785.000	1 tahun	Rp 191.785.000		Rp 210.963.500		Rp 210.963.500		979.847.000	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga				Rp 1.173.203.500		1.290.523.850	1 tahun	Rp 1.290.523.850		1.419.576.235		Rp 1.419.576.235		6.593.403.670	Dinas Pendidikan
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				Rp 801.446.700		Rp 881.591.370	1 tahun	Rp 881.591.370		969.750.507		Rp 969.750.507		4.504.130.454	Dinas Pendidikan
		Program Pendidikan Tinggi				Rp 764.850.000		Rp 841.335.000	65%	Rp 841.335.000		925.468.500		Rp 925.468.500		4.298.457.000	Dinas Pendidikan
		Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Pedesaan				800.000.000		800.000.000		800.000.000		900.000.000		1.000.000.000		4.300.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pedamping Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya . Pelatihan untuk keluarga miskin	Jumlah fakir miskin yang tertangani 1.350 orang		220.000.000		270.000.000		335.000.000		400.000.000		465.000.000		1.690.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.500.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal	Jumlah Kepala Keluarga 500 KK		155.000.000		175.000.000		195.000.000		215.000.000		235.000.000		975.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				250.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		1.350.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
		PAGU MISI 2				71.571.375.491		77.702.156.640		81.673.090.197		88.885.942.817		93.773.043.421		413.605.608.566	

Tabel 7.1
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022
Untuk Mencapai Visi dan Misi

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Misi 3																	
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah																	
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya pelayanan	298.000.000		555.000.000		585.000.000		664.000.000		646.000.000		1.233.000.000		3.683.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya		300.000.000		955.000.000		2.729.750.000		2.699.300.000		3.489.230.000		4.283.152.400		14.156.432.400	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan		360.370.000		595.000.000		963.000.000		625.000.000		680.000.000		860.000.000		3.723.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		1.606.350.000		Rp 3.601.250.000		3.705.500.000		3.929.000.000		3.971.000.000		5.056.000.000		20.262.750.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan		710.418.000		745.938.900		783.235.845		822.397.637		863.517.519		906.693.395		4.121.783.296	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan		2.248.634.000		2.473.497.400		2.720.847.140		2.992.931.854		3.292.225.039		958.253.450		12.437.754.883	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		461.500.000		1.475.500.000		1.560.000.000		1.620.500.000		1.655.500.000		1.705.000.000		8.016.500.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

		Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak		256.500.000		246.500.000		308.000.000		297.000.000		330.000.000		325.000.000		1.506.500.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kelembagaan		1.442.370.000		2.058.000.000		2.091.000.000		2.123.000.000		2.155.000.000		2.197.000.000		10.624.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap		621.550.000		614.130.000		621.500.000		683.647.000		817.407.030		899.147.733		3.635.831.763	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		210.000.000		324.000.000		377.150.000		434.477.500		485.529.625		542.827.619		2.163.984.744	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar		286.430.000		315.073.000		346.580.300		381.238.330		419.362.163		461.298.379		1.923.552.172	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UKM				267.000.000		293.700.000		323.070.000		355.377.000		390.914.700		1.630.061.700	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Kewirausahaan dan Keunggulan Koperasi dan UKM				441.219.310		485.341.241		533.875.365		587.262.902		645.989.192		2.693.688.009	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				841.012.564		925.113.820		1.017.625.202		1.119.387.723		1.231.326.495		5.134.465.804	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		Program Pembinaan Dagang Kecil dan Menengah (DKM)				2.922.516.306		3.214.767.937		3.536.244.730		3.889.869.203		4.278.856.124		17.842.254.300	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

		Program Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)				566.137.100		622.750.810		685.025.891		753.528.480		828.881.328		3.456.323.609	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
		PAGU MISI 3		8.802.122.000		18.996.774.580		22.333.237.093		23.368.333.510		25.510.196.684		26.803.340.814		117.011.882.681	

Tabel 7.1
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022
Untuk Mencapai Visi dan Misi

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Misi 4																	
Berpartisipasi Dalam Pembangunan Daerah																	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				90.000.000		99.000.000		108.900.000		119.790.000		131.769.000		549.459.000	Kantor SATPOL-PP
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				1.113.829.600		1.225.212.560		1.347.733.816		1.482.507.198		1.630.757.917		6.800.041.091	Kantor SATPOL-PP
		Program Pencegah Tindakan Pelanggaran Keamanan Ketertiban Umum				168.249.000		185.073.900		203.581.290		223.939.419		246.333.361		1.027.176.970	Kantor SATPOL-PP
		Program Penegakan Hukum, Perda, Perkada dan Perundang-undangan				101.000.000		111.100.000		122.210.000		134.431.000		147.874.100		616.615.100	Kantor SATPOL-PP
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi, posko, monitoring	100%	12 bln	194.475.000	12 bln	213.922.500	12 bln	235.314.750	12 bln	258.846.225	12 bln	284.730.847	100%	1.187.289.322	BPBD KAB. BARSEL
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terselenggaranya Pendataan Dampak Bencana, Rehab-Rekon pasca bencana, program Rencana Rehab-Rekon	100%	12 bln	87.700.000	12 bln	96.470.000	12 bln	106.117.000	12 bln	116.728.700	12 bln	128.401.570	100%	535.417.270	BPBD KAB. BARSEL

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Kedaruratan dan Logistik	Terselenggaranya Survei dan pemetaan daerah rawan bencana, pengadaan logistik, mengerahkan SDM peralatan & logistik	100%	12 bln	179.200.000	12 bln	197.120.000	12 bln	216.832.000	12 bln	238.515.200	12 bln	262.366.720	100%	1.094.033.920	BPBD KAB. BARSEL
		Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Pedesaan				800.000.000		800.000.000		800.000.000		900.000.000		1.000.000.000		4.300.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pedamping Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS	Jumlah fakir miskin yang tertanga ni 1.350 orang	15%	220.000.000	20%	270.000.000	20%	335.000.000	20%	400.000.000	20%	465.000.000	100%	1.690.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.500.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal	Jumlah Kepala Keluarga 500 KK	20%	155.000.000	20%	175.000.000	20%	195.000.000	20%	215.000.000	20%	235.000.000	100%	975.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				250.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		1.350.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Terhimpunnya Jumlah Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Purna Tugas di Wilayah Kab. Barito Selatan			196.309.000		196.309.000		204.000.000		204.000.000		204.000.000		1.004.618.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan Pemahaman Norma Ketenagakerjaan bagi Pengusaha dan Pekerja			56.235.000		56.235.000		58.000.000		58.000.000		58.000.000		286.470.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Transmigrasi Lokal				24.001.000		24.001.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		120.002.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Perencanaan dan Penyiapan Kawasan				94.460.000		94.460.000		95.000.000		95.000.000		110.000.000		488.920.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pembangunan Pemukiman dan Penempatan				59.123.000		59.123.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		328.246.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas dan kinerja pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil		12 bln	836.356.000	12 bln	919.991.600	12 bln	1.011.990.760	12 bln	1.113.189.836	12 bln	1.224.508.820	100%	4.269.681.017	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengolahan Data, Penyediaan Informasi dan Penyusunan Kebijakan Kependudukan	Tersediannya Data Base, Informasi, dan regulasi kependudukan		12 bln	122.100.000	12 bln	134.310.000	12 bln	147.741.000	12 bln	162.515.100	12 bln	178.766.610	100%	623.332.711	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Data dan Informasi Serta Jaringan Komunikasi dan Persandian		7 keg	7 keg	300.000.000	7 keg	330.000.000	7 keg	363.000.000	7 keg	399.300.000	7 keg	439.230.000		1.831.530.000	DISKOMINFO
		Program Publikasi Informasi Daerah dan Kerjasama Informasi Dengan Media Massa		4 keg	4 keg	1.270.000.000	4 keg	1.397.000.000	4 keg	1.536.700.000	4 keg	1.690.370.000	4 keg	1.859.407.000	kegiatan	7.753.477.000	DISKOMINFO
		Program Pelayanan dan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Penyiaran		1 paket; 12 keg;	1 paket; 12 keg	390.500.000	1 paket; 12 keg	429.550.000	1 paket; 12 keg	472.505.000	1 paket; 12 keg	519.755.500	1 paket; 12 keg	571.731.050		2.384.041.550	DISKOMINFO
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				829.660.000		889.660.000		949.660.000		1.009.660.000		1.069.660.000		4.748.300.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga				50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	100%	350.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				81.350.000		91.350.000		101.350.000		111.350.000		121.350.000	100%	506.750.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Destinasi Parwisata				45.000.000		65.000.000		85.000.000		105.000.000		125.000.000	100%	425.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Pasar Parwisata				235.500.000		295.500.000		355.500.000		415.500.000		475.500.000	100%	1.777.500.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kemitraaan				79.400.000		109.400.000		139.400.000		169.400.000		199.400.000	100%	697.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Nilai Budaya				188.321.000		228.321.000		268.321.000		308.321.000		348.321.000	100%	1.341.605.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				201.759.000		271.759.000		341.759.000		411.759.000		481.759.000	100%	1.708.795.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya				410.170.000		460.170.000		510.170.000		560.170.000		610.170.000		2.550.850.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah			16.500.000		17.000.000		17.500.000		18.000.000		19.000.000		88.000.000	Kecamatan Dusun Hilir
		Program Pemberdayaan Masyarakat			1 tahun	113.460.000	1 tahun	147.498.000	1 tahun	191.711.400	1 tahun	249.224.820	1 tahun	323.992.266	100%	1.025.886.486	Kecamatan Dusun Utara
		Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah			1 tahun	50.000.000	1 tahun	60.000.000	1 tahun	72.000.000	1 tahun	86.400.000	1 tahun	103.680.000	100%	372.080.000	Kecamatan Karau Kuala

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah			1 tahun	10.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	100%	80.000.000	Kecamatan Jenamas
		Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Berkembangnya layanan informasi dan komunikasi publik			186.500.000		201.125.000		207.881.250		210.775.313		213.814.078	100%	1.020.095.641	BAPPEDA
		Program Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran	Berkembangnya infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan penyiaran			52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078	100%	290.095.641	BAPPEDA
		Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Terselenggaranya layanan pos dan informasi			52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078		290.095.641	BAPPEDA
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya kualitas perencanaan pengembangan wilayah pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang			105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156	100%	580.191.281	BAPPEDA
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi				286.931.370		315.624.507		347.186.958		381.905.653		420.096.219		1.751.744.707	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		PAGU MISI 4				10.003.088.970		11.036.786.067		#####		#####		14.733.875.870		60.319.340.347	

Tabel 7.1
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022
Untuk Mencapai Visi dan Misi

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Misi 5																	
Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah																	
	4.08-15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Temuan LHP		100%	1.716.376.400	100%	1.888.014.040	100%	2.076.815.444	100%	2.284.496.988	100%	2.512.946.687	100%	2.764.241.356	Inspektorat
	4.08-16	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas yang berkinerja baik		100%	207.600.000	100%	228.360.000	100%	251.196.000	100%	276.315.600	100%	303.947.160	100%	1.267.418.760	Inspektorat
	4.08-21	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah laporan kasus dan laporan kerugian negara		100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000	100%	80.525.500	Inspektorat
		Peningkatan Koordinasi dan komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah			100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	73.205.000	100%	305.255.000	Inspektorat
	4.08-20	Program Peningkatan Tata Kelola Penyelenggara Pemerintah Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah	Jumlah laporan hasil evaluasi terhadap LKPPD , laporan hasil monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan														
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		75%	1 tahun	50.000.000	1 tahun	52.500.000	1 tahun	52.500.000	1 tahun	52.500.000	1 tahun	52.500.000	100%	260.000.000	Sekretariat Daerah
		Program Pengembangan Nilai Budaya			1 tahun	1.895.280.000	1 tahun	1.910.280.000	1 tahun	1.926.780.000	1 tahun	1.944.930.000	1 tahun	1.964.895.000	100%	9.642.165.000	Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		70%	1 tahun	110.000.000	1 tahun	121.000.000	1 tahun	133.100.000	1 tahun	146.410.000	1 tahun	161.051.000	100%	671.561.000	Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		85%	1 tahun	680.000.000	1 tahun	748.000.000	1 tahun	822.800.000	1 tahun	905.080.000	1 tahun	995.588.000	100%	4.151.468.000	Sekretariat Daerah
		Program Kerjasama Pembangunan		80%	1 tahun	220.800.000	1 tahun	242.880.000	1 tahun	267.168.000	1 tahun	293.884.800	1 tahun	323.273.280	100%	1.348.006.080	Sekretariat Daerah
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		90%	1 tahun	725.000.000	1 tahun	797.500.000	1 tahun	877.250.000	1 tahun	964.975.000	1 tahun	1.061.472.500	100%	4.426.197.500	Sekretariat Daerah
		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		80%	1 tahun	125.000.000	1 tahun	125.000.000	1 tahun	125.000.000	1 tahun	125.000.000	1 tahun	125.000.000	100%	625.000.000	Sekretariat Daerah

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Pelayanan Pengadaan Pemerintah			1 tahun	1.492.300.000	1 tahun	1.650.000.000	1 tahun	1.650.000.000	1 tahun	1.725.000.000	1 tahun	1.800.000.000	100%	8.317.300.000	Sekretariat Daerah
		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan			1 tahun	25.000.000	1 tahun	35.000.000	1 tahun	45.000.000	1 tahun	45.000.000	1 tahun	50.000.000	100%	200.000.000	Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD Setda Kab. Barsel tersusunnya laporan keuangan akhir tahun, penatausahaan keuangan SKPD Setda, Akuntansi dan Laporan keuangan Setda Barsel	7%	1 tahun	80.000.000	1 tahun	238.000.000	1 tahun	261.800.000	1 tahun	287.980.000	1 tahun	316.778.000	100%	1.184.558.000	Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya tindak lanjut hasil pengawasan	80%	1 tahun	200.000.000,00	1 tahun	1.580.000.000,00	1 tahun	1.738.000.000,00	1 tahun	1.911.800.000,00	1 tahun	2.102.980.000,00	100%	7.532.780.000	Sekretariat Daerah
		Program Penataan Peraturan perundang-undangan	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Peundang-Undangan Daerah	80%	1 tahun	815.000.000	1 tahun	1.508.320.000	1 tahun	988.150.000	1 tahun	1.086.965.000	1 tahun	1.195.661.500	100%	5.594.096.500	Sekretariat Daerah
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		80%	1 tahun	25.000.000	1 tahun	137.500.000	1 tahun	151.250.000	1 tahun	166.375.000	1 tahun	183.013.000	100%	663.138.000	Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyiapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)	90%	1 tahun	165.000.000	1 tahun	170.000.000	1 tahun	195.000.000	1 tahun	205.000.000	1 tahun	245.000.000	100%	980.000.000	Sekretariat Daerah
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	70%	1 tahun	280.000.000	1 tahun	304.000.000	1 tahun	304.000.000	1 tahun	304.000.000	1 tahun	304.000.000	100%	1.496.000.000	Sekretariat Daerah

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		60%	1 tahun	1.635.000.000	1 tahun	1.720.500.000	1 tahun	1.720.500.000	1 tahun	1.720.500.000	1 tahun	1.720.500.000	100%	8.517.000.000	Sekretariat Daerah
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	19 dokumen	19 dokumen	2935000 000,	19 dokumen	4230000 000,	19 dokumen	4684000 000,	19 dokumen	4987600 000,	19 dokumen	9000000 000,	19 dokumen	25836600 000,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	12 dokumen	12 dokumen	1225000 000,	12 dokumen	1500000 000,	12 dokumen	1900000 000,	12 dokumen	2300000 000,	12 dokumen	3500000 000,	12 dokumen	10425000 000,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar	200 buku 1 peraturan 46 SKPD	200 buku 1 peraturan 46 SKPD	9594500 000,	200 buku 1 peraturan 46 SKPD	7670000 000,	200 buku 1 peraturan 46 SKPD	7740000 000,	200 buku 1 peraturan 46 SKPD	7802000 000,	200 buku 1 peraturan 46 SKPD	8100000 000,	200 buku 1 peraturan 46 SKPD	40906500 000,	Badan Keuangan Daerah
		Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah PNS bagian keuangan mendapat pembinaan	0,	42 raperda/Ra perbub/300 orang	1200000 000,	42 raperda/Ra perbub/300 orang	1380000 000,	42 raperda/Ra perbub/300 orang	1414000 000,	42 raperda/Ra perbub/300 orang	1450500 000,	42 raperda/Ra perbub/300 orang	1763080 000,	42 raperda/R a perbub/3 00 orang	7207580 000,	Badan Keuangan Daerah
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/kelurahan	Jumlah kampung yang telah menyampaikan laporan keungan pemerintahan kampung yang baik	14 laporan14 keputusan	0,	0,	14 laporan14 keputusan	350000 000,	14 laporan14 keputusan	360000 000,	14 laporan14 keputusan	391300 000,	14 laporan14 keputusan	432700 000,	14 laporan14 keputusan	1534000 000,	Badan Keuangan Daerah
		Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Persentase selisih perhitungan nilai aset oleh Bid Asset Badan Keuangan Daerah dengan audit BPK	1 Dokumen	1 Dokumen	2550000 000,	1 Dokumen	3330000 000,	1 Dokumen	3450000 000,	1 Dokumen	3505000 000,	1 Dokumen	4050000 000,	5 dokumen	16885000 000,	Badan Keuangan Daerah
		Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah temuan pelanggaran keuda yang itindaklanjuti	0,	0,	0,	1 buah	210000 000,	1 buah	217700 000,	1 buah	240600 000,	1 buah	334400 000,	1 buah	1002700 000,	Badan Keuangan Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	1,	1,	128943 857,	1,	97000 000,	1,	98800 000,	1,	99900 000,	1,	100900 000,	1,	525543 857,	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Pembinaan ASN Kabupaten Barito Selatan	Pengurusan Kartu Taspen, Karis, Karsu dan Karpeg; Penyelesaian Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS; Biaya Pemulangan PNS yang Pensiun; Pendataan dan Penyimpanan Data PNS Kab. Barsel (SAPIK)			307.689.000		338.457.540		372.203.690		409.134.059		452.487.465		1.879.971.754	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Pengurusan Usul Penetapan NIP; Penyusunan dan Pengurusan Formasi PNS Kabupaten Barito Selatan; Penyelesaian UKP PNS; Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang Perhitungan PAK Jabatan Fungsional; Penyusunan DUK dan Daftar Nominatif PNS Kabupaten Barito Selatan			482.452.520		470.197.772		429.247.500		642.144.304		705.088.735		2.729.130.831	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi				286.931.370		315.624.507		347.186.958		381.905.653		420.096.219		1.751.744.707	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Kelembagaan KORPRI/ASN				173.240.000		190.575.000		183.877.650		202.265.415		222.491.157		972.449.222	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Akurasi Data & Kinerja Pelayanan Adminitrasi Kependudukan		12 bulan	132.900.000	12 bulan	146.190.000	12 bulan	160.809.000	12 bulan	176.889.900	12 bulan	194.578.890	100,00%	678.467.791	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas dan kinerja pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil		12 bulan	836.356.000	12 bulan	919.991.600	12 bulan	1.011.990.760	12 bulan	1.113.189.836	12 bulan	1.224.508.820	100,00%	4.269.681.017	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengolahan Data, Penyediaan Informasi dan Penyusunan Kebijakan Kependudukan	Tersediannya Data Base, Informasi, dan regulasi kependudukan		12 bulan	122.100.000	12 bulan	134.310.000	12 bulan	147.741.000	12 bulan	162.515.100	12 bulan	178.766.610	100,00%	623.332.711	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Penataan Administrasi Kependudukan			12 bulan	665.390.000	12 bulan	731.929.000	12 bulan	805.121.900	12 bulan	885.634.090	12 bulan	974.197.499	100,00%	3.396.882.490	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Pelayanan Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi				553.000.000		563.000.000		573.000.000		513.000.000		523.000.000		2.725.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)				67.500.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		397.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		200.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas				275.000.000		280.000.000		285.000.000		290.000.000		295.000.000		1.425.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Keserasian dan Kebijakan Pendataan Kependudukan				182.500.000		467.500.000		182.500.000		182.500.000		467.500.000		1.482.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan				95.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		495.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga				100.000.000		114.000.000		130.000.000		150.000.000		170.000.000		664.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak				80.000.000		85.000.000		87.000.000		90.000.000		90.000.000		432.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan				85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		425.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Hak Anak				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		250.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		150.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				335.000.000	1 Perda	368.500.000		405.350.000	1 Perda	445.885.000		490.473.500	2 Perda	539.520.850	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		1 Lokasi	1 lokasi	61.600.000	1 lokasi	67.760.000	1 lokasi	74.536.000	1 lokasi	81.989.600	1 lokasi	90.188.560	5 lokasi	376.074.160	Dinas Lingkungan Hidup

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH		12 bulan	45.000.000	12 bulan	49.500.000	12 bulan	54.450.000	12 bulan	59.895.000	12 bulan	65.884.500	1 paket	274.729.500	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Pengembangan Data dan Informasi SDA dan LH			205.000.000		225.500.000		248.050.000		272.855.000		300.140.500		1.251.545.500	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan				50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		305.255.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan		12 bulan	40.000.000	12 bulan	44.000.000	12 bulan	48.400.000	12 bulan	53.240.000	12 bulan	58.564.000		244.204.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000		122.102.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Persampahan dan Limbah Lingkungan				3.069.900.000		3.376.890.000		3.714.579.000		4.086.036.900		4.494.640.590		18.742.046.490	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Adiwiyata	Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup			60.000.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000		87.846.000		366.306.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Sarana dan Prasarana Kebersihan				480.839.000		528.922.900		581.815.190		639.996.709		703.996.380		2.935.570.179	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Kapasitas UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)				397.600.000		437.360.000		481.096.000		529.205.600		582.126.160		2.427.387.760	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penataan Hukum/Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup				92.000.000		101.200.000		111.320.000		122.452.000		134.697.200		561.669.200	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Data dan Informasi Serta Jaringan Komunikasi dan Persandian		7 kegiatan	7 kegiatan	300.000.000	7 kegiatan	330.000.000	7 kegiatan	363.000.000	7 kegiatan	399.300.000	7 kegiatan	439.230.000		1.831.530.000	DISKOMINFO
		Program Publikasi Informasi Daerah dan Kerjasama Informasi Dengan Media Massa		4 kegiatan	4 kegiatan	1.270.000.000	4 kegiatan	1.397.000.000	4 kegiatan	1.536.700.000	4 kegiatan	1.690.370.000	4 kegiatan	1.859.407.000	0 kegiatan	7.753.477.000	DISKOMINFO
		Program Pelayanan dan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Penyiaran		1 paket; 12 kegiatan;	1 paket; 12 kegiatan;	390.500.000	1 paket; 12 kegiatan;	429.550.000	1 paket; 12 kegiatan;	472.505.000	1 paket; 12 kegiatan;	519.755.500	1 paket; 12 kegiatan;	571.731.050		2.384.041.550	DISKOMINFO

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			4 kegiatan	315.000.000	4 kegiatan	346.500.000	4 kegiatan	381.150.000	4 kegiatan	419.265.000	4 kegiatan	461.191.500		1.923.106.500	DISKOMINFO
		Program Pengawasan dan Pengendalian Perijinan				134.450.000		147.895.000		165.000.000		165.000.000		175.000.000		787.345.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan				102.450.000		110.000.000		118.000.000		118.000.000		118.000.000		566.450.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Penanganan Pengaduan				71.000.000		86.000.000		86.000.000		86.000.000		86.000.000		415.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pameran Promosi Investasi				155.004.000		178.000.000		188.000.000		188.000.000		188.000.000		897.004.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				829.660.000		889.660.000		949.660.000		1.009.660.000		1.069.660.000		4.748.300.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Program pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga				50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	100%	350.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga				81.350.000		91.350.000		101.350.000		111.350.000		121.350.000	100%	506.750.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Destinasi Parwisata				45.000.000		65.000.000		85.000.000		105.000.000		125.000.000	100%	425.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Pasar Parwisata				235.500.000		295.500.000		355.500.000		415.500.000		475.500.000	100%	1.777.500.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Pengembangan Kemitraaan				79.400.000		109.400.000		139.400.000		169.400.000		199.400.000	100%	697.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Nilai Budaya				188.321.000		228.321.000		268.321.000		308.321.000		348.321.000	100%	1.341.605.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				201.759.000		271.759.000		341.759.000		411.759.000		481.759.000	100%	1.708.795.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya				410.170.000		460.170.000		510.170.000		560.170.000		610.170.000		2.550.850.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya pelayanan	298.000.000		555.000.000		585.000.000		664.000.000		646.000.000		1.233.000.000		3.683.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Pemberdayaan Masyakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya		300.000.000		955.000.000		2.729.750.000		2.699.300.000		3.489.230.000		4.283.152.400		14.156.432.400	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan		360.370.000		595.000.000		963.000.000		625.000.000		680.000.000		860.000.000		3.723.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		1.606.350.000		Rp 3.601.250.000		3.705.500.000		3.929.000.000		3.971.000.000		5.056.000.000		20.262.750.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan		710.418.000		745.938.900		783.235.845		822.397.637		863.517.519		906.693.395		4.121.783.296	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan		2.248.634.000		2.473.497.400		2.720.847.140		2.992.931.854		3.292.225.039		958.253.450		12.437.754.883	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan		461.500.000		1.475.500.000		1.560.000.000		1.620.500.000		1.655.500.000		1.705.000.000		8.016.500.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak		256.500.000		246.500.000		308.000.000		297.000.000		330.000.000		325.000.000		1.506.500.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kelembagaan		1.442.370.000		2.058.000.000		2.091.000.000		2.123.000.000		2.155.000.000		2.197.000.000		10.624.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap		621.550.000		614.130.000		621.500.000		683.647.000		817.407.030		899.147.733		3.635.831.763	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		210.000.000		324.000.000		377.150.000		434.477.500		485.529.625		542.827.619		2.163.984.744	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar		286.430.000		315.073.000		346.580.300		381.238.330		419.362.163		461.298.379		1.923.552.172	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Program Pengembangan Data/Informasi	Berkembangnya layanan data dan informasi yang disediakan	1 paket	1 paket	724.500.000	1 paket	760.725.000	1 paket	798.761.250	1 paket	838.699.313	1 paket	880.634.278	5 paket	4.003.319.841	BAPPEDA
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1 paket	1 paket	882.000.000	1 paket	926.100.000	1 paket	972.405.000	1 paket	1.021.025.250	1 paket	1.072.076.513	5 paket	4.873.606.763	BAPPEDA
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi	1 paket	1 paket	378.000.000	1 paket	396.900.000	1 paket	416.745.000	1 paket	437.582.250	1 paket	459.461.363	5 paket	2.088.688.613	BAPPEDA
		Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Meningkatnya kualitas perencanaan sosial dan budaya			105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156		580.191.281	BAPPEDA
		Program Perencanaan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	Meningkatnya kualitas perencanaan infrastruktur dan prasarana wilayah			441.000.000		463.050.000		486.202.500		510.512.625		536.038.256	100%	2.436.803.381	BAPPEDA
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah rawan bencana			105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156	100%	580.191.281	BAPPEDA

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program perencanaan pendidikan dan Kesra	Meningkatnya kualitas perencanaan pendidikan dan kesra			315.000.000		330.750.000		347.287.500		364.651.875		382.884.469	100%	1.740.573.844	BAPPEDA
		Program Perencanaan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan	Meningkatnya kuaitas perencanaan bidang kependudukan dan pemerintahan			115.500.000		121.275.000		127.338.750		133.705.688		140.390.972	5 paket	638.210.409	BAPPEDA
		Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Berkembangnya layanan informasi dan komunikasi publik			186.500.000		201.125.000		207.881.250		210.775.313		213.814.078	100%	1.020.095.641	BAPPEDA
		Program Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran	Berkembangya infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan penyiaran			52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078	100%	290.095.641	BAPPEDA
		Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Terselenggaranya layanan pos dan informasi			52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078		290.095.641	BAPPEDA
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya kualitas perencanaan pengembangan wilayah pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang			105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156	100%	580.191.281	BAPPEDA
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Kinerja Pendapatan Daerah			1 Buku	655.628.000	1 Buku	714.776.000	1 Buku	773.924.000	1 Buku	833.072.000	1 Buku	892.220.000	100%	3.463.992.000	BPKAD
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah				1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000	100%	6.500.000.000	BPKAD
		Program Peningkatan dan Penagihan				821.128.000	1 Buku	893.776.000	1 Buku	970.000.000	1 Buku	1.045.072.000	1 Buku	1.119.720.000	100%	4.133.568.000	BPKAD
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				3.431.153.000	1 Buku	3.740.026.000	1 Buku	4.048.899.000	1 Buku	4.357.772.000	1 Buku	4.551.445.000	100%	17.013.142.000	BPKAD
		Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Pedesaan				800.000.000		800.000.000		800.000.000		900.000.000		1.000.000.000		4.300.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pedamping Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya . Pelatihan untuk keluarga miskin	Jumlah fakir miskin yang tertangani 1.350 orang	15%	220.000.000	20%	270.000.000	20%	335.000.000	20%	400.000.000	20%	465.000.000	100%	1.690.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.500.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal	Jumlah Kepala Keluarga 500 KK	20%	155.000.000	20%	175.000.000	20%	195.000.000	20%	215.000.000	20%	235.000.000	100%	975.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				250.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		1.350.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				600.000.000		600.000.000	-	600.000.000	-	650.000.000	-	650.000.000		3.100.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma				40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		300.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Penyusunan Dokumentasi Perencanaan			810.000.000		835.000.000	-	865.000.000	-	945.000.000	-	965.000.000		4.420.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pembinaan eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks. Nara - pidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial			30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	100%	200.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial			45.000.000		45.000.000	-	45.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000		235.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat			215.000.000		245.000.000	-	280.000.000	-	295.000.000	-	305.000.000		1.340.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD (2022)		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan (Pengadaan sarana dan prasarana Karang Taruna)			100.000.000	18%	110.000.000	18%	120.000.000	23%	130.000.000	23%	140.000.000	100%	600.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.	Ketersediaan akses layanan informasi arsip		12 bulan	135.500.000	100	204.050.000	100	224.455.000	100	246.900.500	100	271.590.550	12 bulan	1.082.496.050	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Program Pemeliharaan Rutin / Program Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan.	Sarana Prasarana Kearsipan dan Dokumen/Arsip Yang Terpelihara			25.000.000	100	52.500.000	100	57.750.000	100	63.525.000	100	69.877.500	100%	268.652.500	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasarana aparatur yang lengkap dan modern		1 laporan	78.200.000	100,00	612.545.000	100,00	195.299.500	100,00	214.829.450	100,00	236.312.395	100%	1.337.186.345	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional			45.200.000	100	108.000.000	100,00	118.800.000	100,00	130.680.000	100,00	143.748.000	100%	546.428.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Program Peningkatan disiplin aparatur.	Aparatur yang tertib dan disiplin.			22.880.000	100	25.168.000	100	27.684.800	100,00	30.453.280	100,00	33.498.608	100%	139.684.688	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Kantor Yang Berbasis Kinerja			725.558.000	100,00	798.113.800	100,00	877.925.180	100,00	965.717.698	100,00	1.062.289.468	100%	4.429.604.146	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Pelaporan SKPD yang akurat dan tepat waktu			20.000.000	100,00	22.000.000	100,00	24.200.000	100,00	26.620.000	3,00	29.282.000	100%	122.102.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah.	Tertibnya pengelolaan aset.			15.000.000	100,00	16.500.000	100,00	18.150.000	100,00	19.965.000	100,00	21.961.500	100%	91.576.500	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		PAGU MISI 5				70.523.998.447	80558%	80.869.310.444	80558%	84.325.150.143	80563%	90.584.360.171	70863%	101.759.706.011	5300%	412.623.044.867	

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk mencapai Visi, Misi
dan Layanan SOPD untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1			URUSAN WAJIB															
1	01		PENDIDIKAN															
1	01	01	DINAS PENDIDIKAN															Dinas Pendidikan
1	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	100%	12 bulan	Rp 7.155.470.000	12 bln	7.871.017.000	12 bln	Rp 7.871.017.000	12 bln	Rp 8.658.118.700	12 bln	Rp 8.658.118.700	100%	40.213.741.400	Dinas Pendidikan
		2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan gedung, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan kantor, pemeliharaan rutin, pemeliharaan perlengkapan gedung	100%	12 bulan	Rp 1.626.220.000	12 bulan	1.788.842.000	12 bulan	Rp 1.788.842.000	12 bulan	1.967.726.200	12 bulan	Rp 1.967.726.200	100%	9.139.356.400	Dinas Pendidikan
		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		1 kegiatan	Rp 40.000.000	1 kegiatan	44.000.000	1 kegiatan	Rp 44.000.000	1 kegiatan	48.400.000	1 kegiatan	Rp 48.400.000	100%	224.800.000	Dinas Pendidikan
		4	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APM PAUD		1 tahun	Rp 1.825.220.000	1 tahun	2.007.742.000	1 tahun	Rp 2.007.742.000	1 tahun	2.208.516.200	1 tahun	Rp 2.208.516.200	100%	10.257.736.400	Dinas Pendidikan
		5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah Sekolah sasaran		1 tahun	Rp 20.290.163.500	1 tahun	22.319.179.850	1 tahun	Rp 22.319.179.850	1 tahun	24.551.097.835	1 tahun	Rp 24.551.097.835	100%	114.030.718.870	Dinas Pendidikan
		6	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	jumlah Peserta pendidikan non formal		1 tahun	Rp 174.350.000	1 tahun	Rp 191.785.000	1 tahun	Rp 191.785.000	1 tahun	Rp 210.963.500	1 tahun	Rp 210.963.500	100%	979.847.000	Dinas Pendidikan
		7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		1 tahun	Rp 1.173.203.500	1 tahun	1.290.523.850	1 tahun	Rp 1.290.523.850	1 tahun	1.419.576.235	1 tahun	Rp 1.419.576.235	100%	6.593.403.670	Dinas Pendidikan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase sekolah yang sudah menerapkan prinsip- prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)		1 tahun	Rp 801.446.700	1 tahun	Rp 881.591.370	1 tahun	Rp 881.591.370	1 tahun	969.750.507	1 tahun	Rp 969.750.507	100%	4.504.130.454	Dinas Pendidikan
	01	9	Program Pendidikan Tinggi	Jumlah sekolah tinggi yang difasilitasi/dibantu (buah)	50%	55%	Rp 764.850.000	60%	Rp 841.335.000	65%	Rp 841.335.000	65%	925.468.500	70%	Rp 925.468.500	70%	4.298.457.000	Dinas Pendidikan
JUMLAH							35.787.823.700		39.366.606.070		43.303.266.677		47.633.593.345		52.396.952.679		218.488.242.471	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	03		KESEHATAN															
1	03	01	DINAS KESEHATAN															Dinas Kesehatan
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	100%	100%	9.082.421.813	100%	9.990.663.994	100%	10.989.770.393	100%	12.088.747.432	100%	13.297.589.176	100%	55.449.192.807	Dinas Kesehatan
		2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan gedung, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan kantor, pemeliharaan rutin, perlengkapan gedung	100%	100%	2.901.815.000	100%	3.191.996.500	100%	3.511.196.150	100%	3.862.315.765	100%	4.248.547.342	100%	17.715.870.757	Dinas Kesehatan
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Pegawai	N/A					1 Paket	30.000.000	1 Pkt	33.000.000	1 Pkt	36.300.000	1 Pkt	99.300.000	Dinas Kesehatan
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Kualitas SDM Kesehatan, standar pelayanan, terakreditasi, terlatih, terusunnya data kepegawaian dan penyuluhan bahaya Napza dan penyakit menular sex (PMS)	1 Paket	1 paket	254.191.300	1 paket	279.610.430	1 paket	307.571.473	1 paket	338.328.620	1 paket	372.161.482	1 paket	1.551.863.306	Dinas Kesehatan
		5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	• Dokumen perencanaan dan penganggaran • Tersusunnya Profil, LPPD dan Lakip • Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan Pkm • Tersusunnya Dokumen DHA Kabupaten	4 Laporan	5 laporan	138.275.000	5 laporan	152.102.500	5 laporan	167.312.750	5 laporan	184.044.025	5 laporan	202.448.428	5 laporan	844.182.703	Dinas Kesehatan
		6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100%	100%	963.743.000	100%	963.743.000	100%	963.743.000	100%	963.743.000	100%	963.743.000	100%	4.818.715.000	Dinas Kesehatan
		7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	1.083.400.000	100%	1.191.740.000	100%	1.310.914.000	100%	1.442.005.400	100%	1.586.205.940	100%	6.614.265.340	Dinas Kesehatan
1		8	Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk	100%	< 5%	148.761.200	< 5%	163.637.320	< 5%	180.001.052	< 5%	198.001.157	< 5%	217.801.273	< 5%	908.202.002	Dinas Kesehatan
		9	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase kasus obat dan makanan yang tidak aman		100%	4.590.000	100%	5.049.000	100%	5.553.900	100%	6.109.290	100%	6.720.219	100%	28.022.409	Dinas Kesehatan
		10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	• Tersebar nya Informasi Kesehatan melalui Media Komunikasi • Terbentuknya Desa Siaga		100%	453.063.891	100%	498.370.280	100%	548.207.308	100%	603.028.039	100%	663.330.843	100%	2.766.000.361	Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		11	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Penyehatan SAB dan Sanitasi Dasar, Pengawasan Kualitas Lingkungan, Pengembangan Wilayah Sehat, Pengendalian Pencemaran	100%	100%	418.990.000	100%	460.889.000	100%	506.977.900	100%	557.675.690	100%	613.443.259	100%	2.557.975.849	Dinas Kesehatan
		12	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	• Terlaksananya Pengawasan Kualitas Air dan sanitasi lingkungan, penembangan wilayah sehat, dan pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan	100%	100%	946.460.000	100%	1.041.106.000	100%	1.145.216.600	100%	1.259.738.260	100%	1.385.712.086	100%	5.778.232.946	Dinas Kesehatan
		13	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	• Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan • Neonatal, bayi dan anak Balita	Data Audit Materil	100%	55.196.000	100%	60.715.600	100%	66.787.160	100%	73.465.876	100%	80.812.464	100%	336.977.100	Dinas Kesehatan
		14	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Peningkatan pengawasan kesehatan makanan	100%	100%	18.200.000	100%	20.020.000	100%	22.022.000	100%	24.224.200	100%	26.646.620	100%	111.112.820	Dinas Kesehatan
		15	Program Kegiatan DAK NON FISIK	Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif bersumber DAK Non Fisik	100%	70%	8.525.821.000	70%	8.525.821.000	70%	8.525.821.000	70%	8.525.821.000	70%	8.525.821.000	70%	42.629.105.000	Dinas Kesehatan
		16	Program Dana Kapitalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP (Dana bersumber dari BPJS Pusat)	Terlaksanya Dana Kapitalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80	83%	3.068.916.700	83%	3.375.808.370	83%	3.713.389.207	83%	4.084.728.128	83%	4.493.200.940	83%	18.736.043.345	Dinas Kesehatan
		17	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan Prasarana RS	Cakupan layanan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit	C	100%	3.130.000.000	100%	3.443.000.000	100%	3.787.300.000	100%	4.166.030.000	100%	4.582.633.000	100%	19.108.963.000	Dinas Kesehatan
		18	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase layanan kesehatan yang memenuhi standar	100%	100%	26.000.000.000	100%	28.600.000.000	100%	31.460.000.000	100%	34.606.000.000	100%	38.066.600.000	100%	158.732.600.000	Dinas Kesehatan
JUMLAH							57.193.844.904		61.964.272.994		67.241.783.893		73.017.005.883		79.369.717.072		338.786.624.745	

Kode				Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	03			PEKERJAAN UMUM															
1	03	01		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah		1 tahun	2.955.200.000	1 tahun	3.250.720.000	1 tahun	3.575.792.000	1 tahun	3.933.371.200	1 tahun	4.326.708.320	1 tahun	18.041.791.520	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi/pe meliharaan gedung dan peralatan kantor		1 tahun	1.110.000.000	1 tahun	1.221.000.000	1 tahun	1.343.100.000	1 tahun	1.477.410.000	1 tahun	1.625.151.000	1 tahun	6.776.661.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tercapainya tingkat kinerja pegawai yang efektif		1 tahun	125.000.000	1 tahun	137.500.000	1 tahun	151.250.000	1 tahun	166.375.000	1 tahun	183.012.500	1 tahun	763.137.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya aparatur yang berkualitas dan berpengalaman	1 paket	paket	200.000.000	paket	220.000.000	paket	242.000.000	paket	266.200.000	paket	292.820.000	paket	1.221.020.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			5	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Terlaksananya sistem informasi yang akuntable		1 tahun	285.000.000		313.500.000		344.850.000		379.335.000	1 tahun	417.268.500	1 tahun	1.739.953.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya sistem manajemen pelaporan melalui aplikasi internet		1 tahun	235.000.000		258.500.000	paket	284.350.000	paket	312.785.000	1 tahun	344.063.500	paket	1.434.698.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			7	Program pembangunan jalan dan jembatan	Tersedianya transportasi pada daerah yang masih terisolir		1 tahun	15.867.500.000		17.454.250.000	paket	19.199.675.000	paket	21.119.642.500	1 tahun	23.231.606.750	paket	96.872.674.250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			8	Program peningkatan jalan dan jembatan	Terpenuhinya kelancaran transportasi yang lebih efektif		1 tahun	53.322.500.000		58.654.750.000	paket	64.520.225.000	paket	70.972.247.500	1 tahun	78.069.472.250	paket	325.539.194.750	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		9	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Terpeliharanya jalan dan jembatan sesuai fungsinya		1 tahun	2.189.000.000		2.407.900.000	paket	2.648.690.000	paket	2.913.559.000	1 tahun	3.204.914.900	paket	13.364.063.900	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		10	Program Pembangunan saluran drainase/ gorong gorong	Tertatanya saluran/drainase perkotaan/perdesaan sesuai fungsi		1 tahun	780.913.100	1 paket	859.004.410	1 paket	944.904.851	paket	1.039.395.336	1 tahun	1.143.334.870	paket	4.767.552.567	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		11	Program Pengembangan Air Minum	Tersedianya air bersih yang memenuhi syarat kualitas untuk kebutuhan masyarakat		1 tahun	6.175.000.000	1 paket	6.792.500.000	1 paket	7.471.750.000	paket	8.218.925.000	1 tahun	9.040.817.500	paket	37.698.992.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		12	Program perluasan dan peningkatan SR	Terjangkaunya kebutuhan air bersih yang berkualitas untuk masyarakat		1 tahun	500.000.000	1 paket	550.000.000	1 paket	605.000.000	paket	665.500.000	1 tahun	732.050.000	paket	3.052.550.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		13	Program Pembangunan Sarana Pengolahan Air Minum (SPAM)	Tersedianya sistem pengolahan air bersih yang memenuhi syarat		1 tahun	3.500.000.000	1 paket	3.850.000.000	1 paket	4.235.000.000	paket	4.658.500.000	1 tahun	5.124.350.000	paket	21.367.850.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		14	Program Pembangunan Prasarana Sanitasi	Tertatanya sistem sanitasi yang baik		1 tahun	2.600.000.000	1 paket	2.860.000.000	1 paket	3.146.000.000	paket	3.460.600.000	1 tahun	3.806.660.000	paket	15.873.260.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		15	Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP)	Terlaksananya lingkungan permukiman yang sehat		1 tahun	12.000.000.000	1 paket	13.200.000.000	1 paket	14.520.000.000	paket	15.972.000.000	1 tahun	17.569.200.000	paket	73.261.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		16	Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa	Terkelolanya bangunan dan jaringan irigasi yang baik dan sesuai fungsinya		1 tahun	1.006.641.000	1 paket	1.107.305.100	1 paket	1.218.035.610	paket	1.339.839.171	1 tahun	1.473.823.088	paket	6.145.643.969	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		17	Program Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa	Terkelolanya air baku untuk kebutuhan irigasi yang lebih baik		1 tahun	8.850.000.000	1 paket	9.735.000.000	1 paket	10.708.500.000	paket	11.779.350.000	1 tahun	12.957.285.000	paket	54.030.135.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		18	Program Pengamanan dan Perlindungan Sumber Air	Terpeliharanya sumber air baku untuk kepentingan masyarakat		1 tahun	150.000.000	1 paket	165.000.000	1 paket	181.500.000	paket	199.650.000	1 tahun	219.615.000	paket	915.765.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		19	Program Penataan Ruang Kabupaten	Terciptanya penataan ruang kota yang baik		1 tahun	4.100.000.000	1 paket	4.510.000.000	1 paket	4.961.000.000	paket	5.457.100.000	1 tahun	6.002.810.000	paket	25.030.910.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		20	Program Pembinaan jasa Konstruksi	Tersedianya tenaga-tenaga teknis yang handal dan bersertifikat		1 tahun	1.052.600.000	1 paket	1.157.860.000	1 paket	1.273.646.000	paket	1.401.010.600	1 tahun	1.541.111.660	paket	6.426.228.260	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		21	Program Bna Teknik/Program	Tercapainya kegiatan pembangunan yang memenuhi syarat mutu		1 tahun	1.264.869.500	1 paket	1.391.356.450	1 paket	1.530.492.095	paket	1.683.541.305	1 tahun	1.851.895.435	paket	7.722.154.784	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		22	Progrm Perencanaan Bina Marga	Terencananya kegiatan pembangunan di bidang Bina Marga		1 tahun	550.000.000	1 paket	605.000.000	1 paket	665.500.000	paket	732.050.000	1 tahun	805.255.000	paket	3.357.805.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		23	Program Perencanaan Cipta Karya	Terencananya kegiatan pembangunan di bidang Cipta Karya		1 tahun	275.000.000	1 paket	302.500.000	1 paket	332.750.000	paket	366.025.000	1 tahun	402.627.500	paket	1.678.902.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		24	Program Survey/Perencanaan Sumber Daya Air	Terencananya kegiatan pembangunan di bidang Sumber Daya Air		1 tahun	250.000.000	1 paket	275.000.000	1 paket	302.500.000	paket	332.750.000	1 tahun	366.025.000	paket	1.526.275.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
JUMLAH							113.169.223.600		124.486.145.960		136.934.760.556		150.628.236.612		165.691.060.273		690.909.427.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	05		PENATAAN RUANG															
1	05	01	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan															
1	05	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	100%	100%	2.000.000.000	100%	2.250.000.000	100%	2.250.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.750.000.000	100%	11.750.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya rehabilitasi da pemeliharaan rutin, pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan	100%	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	350.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian pegawai yang memadai	1 paket	1 paket	70.000.000	1 paket	70.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	paket	365.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	paket	paket	65.000.000	paket	70.000.000	paket	70.000.000	paket	75.000.000	paket	75.000.000	paket	355.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		5	Program Perencanaan dan Penelitian SDM	Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya	1 paket	1 paket	27.000.000	1 paket	27.000.000	1 paket	27.000.000	1 paket	27.000.000	1 paket	27.000.000	paket	135.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
		6	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah	Jumlah rehabilitasi dan pembangunan yang dikembangkan	paket	paket	550.000.000	paket	825.000.000	paket	975.000.000	paket	1.200.000.000	paket	1.325.000.000	paket	4.875.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		7	Program Pembangunan dan Penataan Kawasan Pengembang	Panjang drainase yang dibangun	paket	paket	2.650.000.000	paket	2.900.000.000	paket	3.150.000.000	paket	3.400.000.000	paket	3.650.000.000	paket	15.750.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
		8	Program Pembangunan dan Penataan Kawasan Kumuh	Tersedianya jalan lingkungan, drainase, penanganan persampahan dan instalasi pengelolaan limbah komunal pada kawasan kumuh kota; Tersedianya sistem air bersih bagi warga kota'	paket	paket	1.750.000.000	paket	1.750.000.000	paket	1.100.000.000	paket	1.400.000.000	paket	950.000.000	paket	6.950.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
		9	Program Penataan Jalan Lingkungan	Panjang jalan yang ditingkatkan/dibangun (km)			5.400.000.000		6.450.000.000		7.000.000.000		8.000.000.000		8.550.000.000		35.400.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
		10	Program Penataan dan Pemeliharaan Makam	jumlah paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan teknis jalan dan jembatan			1.925.000.000		2.125.000.000		2.470.000.000		2.595.000.000		2.525.000.000		11.640.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
		11	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Perda RTRWP/K			2.075.000.000		2.325.000.000		2.375.000.000		2.400.000.000		2.425.000.000		11.600.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
		12	Program Penataan Fasilitas Umum Kota/PJU	Konsistensi Pemanfaatan Ruang dengan meningkatnya SDM dalam Penataan Ruang			1.550.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000		7.750.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
		13	Program Peningkatan Kapasitas Bidang Pertanahan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik			1.000.000.000		1.500.000.000		1.725.000.000		1.350.000.000		1.500.000.000		7.075.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	
JUMLAH							19.147.000.000		21.927.000.000		22.827.000.000		24.632.000.000		25.462.000.000		113.995.000.000		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	08		DINAS LINGKUNGAN HIDUP															
1	08	01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP															Dinas Lingkungan Hidup
1	08	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	1 paket	1 paket	1.101.951.400	1 paket	1.212.148.540	1 paket	1.333.361.194	1 paket	1.466.697.313	1 paket	1.613.367.044		6.727.525.491	Dinas Lingkungan Hidup
1	08	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan	1 paket	1 paket	285.000.000	1 paket	313.500.000	1 paket	344.850.000	1 paket	379.335.000	1 paket	417.268.500		1.739.953.500	Dinas Lingkungan Hidup
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pelanggaran Pegawai Negeri Sipil		1 tahun	30.000.000	1 paket	33.000.000	1 paket	36.300.000	1 paket	39.930.000	1 tahun	43.923.000		183.153.000	Dinas Lingkungan Hidup
	08	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		100%	25.000.000	1 orang	27.500.000	1 orang	30.250.000	1 orang	33.275.000	100%	36.602.500		152.627.500	Dinas Lingkungan Hidup
1	08	5	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan		100%	41.500.000		45.650.000		50.215.000		55.236.500	100%	60.760.150		253.361.650	Dinas Lingkungan Hidup
1	08	6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		52%	335.000.000	1 Perda	368.500.000		405.350.000	1 Perda	445.885.000	80%	490.473.500	2 Perda	539.520.850	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	08	7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		1 Lokasi	1 lokasi	61.600.000	1 lokasi	67.760.000	1 lokasi	74.536.000	1 lokasi	81.989.600	1 lokasi	90.188.560	5 lokasi	376.074.160	Dinas Lingkungan Hidup
1	08	8	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH		12 bulan	45.000.000	12 bulan	49.500.000	12 bulan	54.450.000	12 bulan	59.895.000	12 bulan	65.884.500	1 paket	274.729.500	Dinas Lingkungan Hidup
1	08	9	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Pengembangan Data dan Informasi SDA dan LH		100%	205.000.000		225.500.000		248.050.000		272.855.000	100%	300.140.500		1.251.545.500	Dinas Lingkungan Hidup
	08	10	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan	Jumlah kawasan konservasi yang dikembangkan ekowisata dan jasa lingkungan		50%	50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000	80%	73.205.000		305.255.000	Dinas Lingkungan Hidup
1	08	11	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan		12 bulan	40.000.000	12 bulan	44.000.000	12 bulan	48.400.000	12 bulan	53.240.000	12 bulan	58.564.000		244.204.000	Dinas Lingkungan Hidup
		12	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		100%	20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000	100%	29.282.000		122.102.000	Dinas Lingkungan Hidup
		13	Program Penanganan Persampahan dan Limbah Lingkungan	Persentase penanganan sampah dan Limbah Lingkungan		0	3.069.900.000		3.376.890.000		3.714.579.000		4.086.036.900	90	4.494.640.590		18.742.046.490	Dinas Lingkungan Hidup
		14	Program Adiwiyata	Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup		100%	60.000.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000	100%	87.846.000		366.306.000	Dinas Lingkungan Hidup
		15	Program Sarana dan Prasarana Kebersihan	Pemenuhan sarana dan prasarana kebersihan		100%	480.839.000		528.922.900		581.815.190		639.996.709	100%	703.996.380		2.935.570.179	Dinas Lingkungan Hidup
		16	Program Peningkatan Kapasitas UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Persentase Kapasitas UPTD		100%	397.600.000		437.360.000		481.096.000		529.205.600	100%	582.126.160		2.427.387.760	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	08	17	Program Penataan Hukum/Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup	Jumlah Perda		100%	92.000.000		101.200.000		111.320.000		122.452.000	100%	134.697.200		561.669.200	Dinas Lingkungan Hidup
JUMLAH							6.340.390.400		6.974.431.440		7.671.872.384		8.439.059.622		9.282.965.584		37.203.031.780	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri															
1	19	01	Badan Kesbang-polinmas															Badan Kesbang-polinmas
1		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	1 tahun	1 tahun	515.080.300	1 tahun	515.080.300	1 tahun	515.080.300	1 tahun	515.080.300	1 tahun	515.080.300		2.575.401.500	Badan Kesbang-polinmas
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan		1 tahun	22.500.000	1 tahun	22.500.000	1 tahun	22.500.000	1 tahun	22.500.000	1 tahun	22.500.000		112.500.000	Badan Kesbang-polinmas
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pelanggaran Pegawai Negeri Sipil		1 tahun	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	1 tahun	25.000.000		125.000.000	Badan Kesbang-polinmas
		4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		1 tahun	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	1 tahun	25.000.000		125.000.000	Badan Kesbang-polinmas
1		5	Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Jumlah Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP		1 tahun	465.800.000	1 tahun	465.800.000	1 tahun	465.800.000	1 tahun	465.800.000	1 tahun	465.800.000		2.329.000.000
1		6	Program Pencegahan Dini dan Penanganan Konflik	Menurunnya jumlah konflik di daerah		1 tahun	274.450.000	1 tahun	274.450.000	1 tahun	274.450.000	1 tahun	274.450.000	1 tahun	274.450.000		1.372.250.000	Badan Kesbang-polinmas

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1		7	Program Pemberdayaan Organisasi Kelembagaan Masyarakat Untuk Organisasi Politik	Indeks Demokrasi Indonesia	1 tahun	463.080.000	1 tahun	463.080.000	1 tahun	463.080.000	1 tahun	463.080.000	1 tahun	463.080.000			2.315.400.000	Badan Kesbang-polinmas
JUMLAH						1.790.910.300		1.790.910.300		1.790.910.300		1.790.910.300		1.790.910.300			8.954.551.500	

Kode				Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	19			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri															
1	19	01		Kantor SATPOL-PP															Kantor SATPOL-PP
1			1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah		100%	1.221.800.500		1.343.980.550		1.478.378.605		1.626.216.466		1.788.838.112		7.459.214.233	Kantor SATPOL-PP
1			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan		100%	82.000.000	100%	90.200.000	100%	99.220.000	100%	109.142.000	100%	120.056.200		500.618.200	Kantor SATPOL-PP
1			3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kemampuan aparatur			67.900.000		74.690.000	-	82.159.000	-	90.374.900	-	99.412.390		414.536.290	Kantor SATPOL-PP
1			4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya			363.200.000		399.520.000		439.472.000		483.419.200		531.761.120		2.217.372.320	Kantor SATPOL-PP
			5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)			90.000.000		99.000.000	-	108.900.000	-	119.790.000	-	131.769.000		549.459.000	Kantor SATPOL-PP
			6	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase korban bencana yang menerima bansos selama masa tanggap darurat			1.113.829.600		1.225.212.560	-	1.347.733.816	-	1.482.507.198	-	1.630.757.917		6.800.041.091	Kantor SATPOL-PP
			7	Program Pencegah Tindakan Pelanggaran Keamanan Ketertiban Umum	Jumlah kantrantibmas			168.249.000		185.073.900	-	203.581.290	-	223.939.419	-	246.333.361		1.027.176.970	Kantor SATPOL-PP
			8	Program Penegakan Hukum, Perda, Perkada dan Perundang-undangan	Tersedianya peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum kerjasama dalam dan luar negeri di bidang penanggulangan bencana			101.000.000		111.100.000	-	122.210.000	-	134.431.000	-	147.874.100		616.615.100	Kantor SATPOL-PP
JUMLAH								3.207.979.100		3.528.777.010		3.881.654.711		4.269.820.182		4.696.802.200		19.585.033.203	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pengembangan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	05	01	Urusan Wajib															
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah															
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran ; jasa ; surat menyurat, komunikasi, air listrik, rutin kantor, koordinasi, monitoring dll	100%	12 bln	453.950.000	12 bln	499.345.000	12 bln	549.279.500	12 bln	604.207.450	12 bln	664.628.195	100%	2.771.410.145	BPBD KAB. BARSEL
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor, kendaraan, pengadaan perlengkapan	100%	12 bln	69.655.000	12 bln	76.620.500	12 bln	84.282.550	12 bln	92.710.805	12 bln	101.981.885	100%	425.250.740	BPBD KAB. BARSEL
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	100%	12 bln	10.400.000	12 bln	11.440.000	12 bln	12.584.000	12 bln	13.842.400	12 bln	15.226.640	100%	63.493.040	BPBD KAB. BARSEL
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	100%	1 keg	53.000.000	1 keg	58.300.000	1 keg	64.130.000	1 keg	70.543.000	1 keg	77.597.300	100%	323.570.300	BPBD KAB. BARSEL
		5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Terpenuhinya pelaporan / dokumen kinerja dan keuangan	100%	12 bln	71.264.200	12 bln	78.390.620	12 bln	86.229.682	12 bln	94.852.650	12 bln	104.337.915	100%	435.075.067	BPBD KAB. BARSEL
		6	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi, posko, monitoring	100%	12 bln	194.475.000	12 bln	213.922.500	12 bln	235.314.750	12 bln	258.846.225	12 bln	284.730.847	100%	1.187.289.322	BPBD KAB. BARSEL
		7	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terselenggaranya Pendataan Dampak Bencana, Rehab-Rekon	100%	12 bln	87.700.000	12 bln	96.470.000	12 bln	106.117.000	12 bln	116.728.700	12 bln	128.401.570	100%	535.417.270	BPBD KAB. BARSEL
		8	Program Kedaruratan dan Logistik	Terselenggaranya Survei dan pemetaan daerah rawan bencana, pengadaan logistik, mengarahkan SDM peralatan & logistik	100%	12 bln	179.200.000	12 bln	197.120.000	12 bln	216.832.000	12 bln	238.515.200	12 bln	262.366.720	100%	1.094.033.920	BPBD KAB. BARSEL
JUMLAH							1.119.644.200		1.231.608.620		1.354.769.482		1.490.246.430		1.639.271.072		6.835.539.804	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	13		Sosial															
1	13	01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	100%	100%	1.526.400.000	100%	1.605.369.000	100%	1.637.369.000	100%	1.722.369.000	100%	8.154.876.000	100%	14.646.383.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan	100%	100%	50.600.000	100%	52.500.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	313.100.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Motivasi dan disiplin PNS meningkat	100%	100%	18.100.000	100%	20.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	128.100.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1		4	Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kemampuan aparatur dana perencanaan pembangunan	100%	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	320.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		5	Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah kelembagaan masyarakat pedesaan yang dibina			800.000.000		800.000.000		800.000.000		900.000.000		1.000.000.000		4.300.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1		6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pedamping Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya . Pelatihan untuk keluarga miskin	Jumlah fakir miskin yang tertangani 1.350 orang	15%	220.000.000	20%	270.000.000	20%	335.000.000	20%	400.000.000	20%	465.000.000	100%	1.690.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah LPM berpartisipasi aktif dalam pembangunan			300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.500.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1		8	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, dan Anak Nakal	Jumlah Kepala Keluarga 500 KK	20%	155.000.000	20%	175.000.000	20%	195.000.000	20%	215.000.000	20%	235.000.000	100%	975.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		9	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah kelompok usaha Ekonomi Produktif masyarakat pedesaan yang aktif			250.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		1.350.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		10	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa				600.000.000		600.000.000	-	600.000.000	-	650.000.000	-	650.000.000		3.100.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		11	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan			40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		300.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		12	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Penyusunan Dokumentasi Perencanaan			810.000.000		835.000.000	-	865.000.000	-	945.000.000	-	965.000.000		4.420.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		13	Program Pembinaan eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks. Nara - pidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial			30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	100%	200.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		14	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial			45.000.000		45.000.000	-	45.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000		235.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		15	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat			215.000.000		245.000.000	-	280.000.000	-	295.000.000	-	305.000.000		1.340.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		16	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan (Pengadaan sarana dan prasarana Karang Taruna)			100.000.000	18%	110.000.000	18%	120.000.000	23%	130.000.000	23%	140.000.000	100%	600.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			JUMLAH				4.569.388.200		5.026.327.020		5.528.959.722		6.081.855.694		6.690.041.264		27.896.571.900	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	14		Tenaga Kerja															
1	14	01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi															Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah		12 bulan	863.338.000	12 bulan	863.338.000	12 bulan	886.123.000	12 bulan	906.123.000	12 bulan	934.123.000	terpenuhinya pelayanan kantor	4.453.045.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan			173.500.000		173.500.000		188.000.000		188.000.000		188.000.000		911.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Motivasi dan disiplin PNS meningkat			28.800.000		28.800.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		147.600.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kemampuan aparatur			35.000.000		35.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000		230.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1		5	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Terpenuhinya pelaporan / dokumen kinerja dan keuangan			30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		150.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1		6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja			223.750.000		223.750.000		255.000.000		295.000.000		405.000.000		1.402.500.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1		7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase angkatan kerja			194.100.000		194.100.000		205.000.000		225.000.000		225.000.000		1.043.200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1		8	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat				19.761.000		19.761.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		99.522.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1		9	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi			78.622.000		78.622.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		397.244.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1		10	Program Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Terhimpunnya Jumlah Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Purna Tugas di Wilayah Kab. Barito Selatan		196.309.000		196.309.000		204.000.000		204.000.000		204.000.000		1.004.618.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1		11	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan Pemahaman Norma Ketenagakerjaan bagi Pengusaha dan Pekerja		56.235.000		56.235.000		58.000.000		58.000.000		58.000.000		286.470.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		12	Program Transmigrasi Lokal	Jumlah Transmigran Lokal (KK)		24.001.000		24.001.000		24.000.000		24.000.000		24.000.000		120.002.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	08	13	Program Perencanaan dan Penyiapan Kawasan	Jumlah kawasan yang direncanakan dan disiapkan untuk dibangun		94.460.000		94.460.000		95.000.000		95.000.000		110.000.000		488.920.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		14	Program Pembangunan Pemukiman dan Penempatan	Jumlah kawasan pemukiman dan penempatan yang dibangun		59.123.000		59.123.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		328.246.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
JUMLAH						2.076.999.000		2.076.999.000		2.185.123.000		2.275.123.000		2.448.123.000		11.062.367.000		

Kode				Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	11			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
1	11	01		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	11	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya penyusunan data base		100%	1.105.300.000	100%	1.105.300.000	100%	1.105.300.000	100%	1.105.300.000	100%	1.105.300.000	100%	5.526.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1			2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan		100%	1.850.000.000	100%	1.850.000.000	100%	1.850.000.000	100%	1.850.000.000	100%	1.850.000.000	100%	9.250.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Motivasi dan disiplin PNS meningkat		paket	31.000.000	paket	15.000.000	paket	31.000.000	paket	15.000.000	paket	31.000.000	paket	123.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			4	Program Pelayanan Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi	Persentase peserta KB aktif terhadap PUS, dan Jumlah pasangan usia subur ber-KB			553.000.000		563.000.000		573.000.000		513.000.000		523.000.000		2.725.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			5	Program Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Data Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil			67.500.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		397.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			6	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah remaja per kec/kelurahan mengikuti Program Kesehatan Reproduksi Remaja			40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		200.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		7	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	Meningkatnya kelembagaan keluarga kecil berkualitas			275.000.000		280.000.000		285.000.000		290.000.000		295.000.000		1.425.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		8	Program Keresasian dan Kebijakan Pendataan Kependudukan	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil yang sesuai dan sejalan kebijakan kependudukan dan kependudukan dan			182.500.000		467.500.000		182.500.000		182.500.000		467.500.000		1.482.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1		9	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi bagi masyarakat tentang KDRT			95.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		495.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		10	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya keluarga kecil berkualitas			100.000.000		114.000.000		130.000.000		150.000.000		170.000.000		664.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		11	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase tersedianya bahan informasi tentang pengasuhan tumbuh kembang anak dikelompok BKB,BKR dan BKL			80.000.000		85.000.000		87.000.000		90.000.000		90.000.000		432.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		12	Program Perlindungan Perempuan	Persentase tersedianya bahan informasi tentang pengasuhan tumbuh kembang anak dikelompok BKB,BKR dan BKL			85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		85.000.000		425.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		13	Program Perlindungan Hak Anak	Persentase tersedianya bahan informasi tentang pengasuhan tumbuh kembang anak dikelompok BKB,BKR dan BKL			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		250.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		14	Program Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		150.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
JUMLAH							4.544.300.000		4.859.800.000		4.628.800.000		4.585.800.000		4.926.800.000		23.545.500.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun		SKPD Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	04		URUSAN PILIHAN															
2	04	01	PERTANIAN															
			Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		
2		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah	2.609.891.200		2.650.600.000		2.707.100.000		2.761.600.000		2.816.100.000	100	2.859.600.000	100	13.795.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan berkala gedung kantor, kendaraan dinas, penimbunan halaman kantor	285.508.800		445.000.000		379.000.000		333.000.000		337.000.000	100	341.000.000	100	1.835.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
1		3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengembangan SDM Aparatur dan Penyediaan Data Base	194.347.500		23.500.000		199.950.000		208.950.000		26.500.000	100	210.950.000	100	669.850.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
1		4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Meningkatnya pemantapan dan sinkronisasi program, konsultasi dan koordinasi dan monitoring	289.032.000		380.000.000		389.000.000		398.000.000		407.000.000	100	416.000.000	100	1.990.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya pelayanan	298.000.000		555.000.000		585.000.000		664.000.000		646.000.000		1.233.000.000		3.683.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		6	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya	Persentase jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan /workshop dengan jumlah penyuluh yang ada (%)	300.000.000		955.000.000		2.729.750.000		2.699.300.000		3.489.230.000		4.283.152.400		14.156.432.400	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Penyuluhan peningkatan produktivitas komoditi perkebunan (orang/tahun)	360.370.000		595.000.000		963.000.000		625.000.000		680.000.000		860.000.000		3.723.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		8	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas hasil pertanian/perkebunan 6 komoditas (kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, lada dan kopi) (Kg/Ha)	1.606.350.000		Rp 3.601.250.000		3.705.500.000		3.929.000.000		3.971.000.000		5.056.000.000		20.262.750.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		9	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah hasil produksi pertanian yang dipasarkan (%)	710.418.000		745.938.900		783.235.845		822.397.637		863.517.519		906.693.395		4.121.783.296	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pengembangan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun		SKPD Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		10	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah hasil tangkapan dalam setiap upaya penangkapan (Ton/Tahun)	2.248.634.000		2.473.497.400		2.720.847.140		2.992.931.854		3.292.225.039		958.253.450		12.437.754.883	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		11	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi konsumsi (ton/tahun); dan produksi benih (ekor)	461.500.000		1.475.500.000		1.560.000.000		1.620.500.000		1.655.500.000		1.705.000.000		8.016.500.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		12	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase ternak yang terkena penyakit (%)	256.500.000		246.500.000		308.000.000		297.000.000		330.000.000		325.000.000		1.506.500.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		13	Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kelembagaan	Jumlah pembuatan unit percontohan/demplot penyuluhan pertanian, perikanan dan pertanian (unit)	1.442.370.000		2.058.000.000		2.091.000.000		2.123.000.000		2.155.000.000		2.197.000.000		10.624.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		14	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	dokumen pengelolaan aset/barang daerah	621.550.000		614.130.000		621.500.000		683.647.000		817.407.030		899.147.733		3.635.831.763	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		15	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Produksi konsumsi (ton/tahun); dan produksi benih (ekor)	210.000.000		324.000.000		377.150.000		434.477.500		485.529.625		542.827.619		2.163.984.744	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		16	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Luasan yang dikelola (ha)	286.430.000		315.073.000		346.580.300		381.238.330		419.362.163		461.298.379		1.923.552.172	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
JUMLAH							17.457.989.300		20.466.613.285		20.974.042.321		22.391.371.376		23.254.922.976		104.544.939.258	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	10		Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
1	10	01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah		12 bulan	877.508.000	12 bulan	965.258.800	12 bulan	1.061.784.680	12 bulan	1.167.963.148	12 bulan	1.284.759.463	100,00%	5.357.274.091	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan		12 bulan	535.550.000	12 bulan	589.105.000	12 bulan	648.015.500	12 bulan	712.817.050	12 bulan	784.098.755	100,00%	3.269.586.305	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3	Program Peningkatan Disiplin aparatur	Tersedianya pakaian pegawai yang memadai		12 bulan	24.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	25.500.000	12 bulan	26.000.000	12 bulan	27.500.000		128.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kemampuan menangani masalah kependudukan dan Pencatatan sipil		12 bulan	311.200.000	12 bulan	342.320.000	12 bulan	376.552.000	12 bulan	414.207.200	12 bulan	455.627.920	100,00%	1.899.907.120	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		5	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Dokumen pengelolaan aset/barang daerah		12 bulan	45.000.000	12 bulan	49.500.000	12 bulan	54.450.000	12 bulan	59.895.000	12 bulan	65.884.500	100,00%	274.729.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		6	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Akurasi Data & Kinerja Pelayanan Adminitrasi Kependudukan		12 bulan	132.900.000	12 bulan	146.190.000	12 bulan	160.809.000	12 bulan	176.889.900	12 bulan	194.578.890	100,00%	678.467.791	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		7	Program Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas dan kinerja pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil		12 bulan	836.356.000	12 bulan	919.991.600	12 bulan	1.011.990.760	12 bulan	1.113.189.836	12 bulan	1.224.508.820	100,00%	4.269.681.017	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		8	Program Pengolahan Data, Penyediaan Informasi dan Penyusunan Kebijakan Kependudukan	Tersediannya Data Base, Informasi, dan regulasi kependudukan		12 bulan	122.100.000	12 bulan	134.310.000	12 bulan	147.741.000	12 bulan	162.515.100	12 bulan	178.766.610	100,00%	623.332.711	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		9	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik		12 bulan	665.390.000	12 bulan	731.929.000	12 bulan	805.121.900	12 bulan	885.634.090	12 bulan	974.197.499	100,00%	3.396.882.490	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
JUMLAH							3.550.004.000		3.903.604.400		4.291.964.840		4.719.111.324		5.189.922.456		21.654.607.020	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	07		PERHUBUNGAN															
1	07	01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															DISKOMINFO
1	07	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah			649.215.000		703.820.000		770.002.000		836.822.200		910.704.420		3.870.563.620	DISKOMINFO
1	07	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya rehabilitasi da pemeliharaan rutin, pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan			100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		610.510.000	DISKOMINFO
1	07	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya sumberdaya aparatur			60.000.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000		87.846.000		366.306.000	DISKOMINFO
1	07	4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah			195.250.000		214.775.000		236.252.500		259.877.750		285.865.525		1.192.020.775	DISKOMINFO
		5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas			35.000.000		38.500.000		42.350.000		46.585.000		51.243.500		213.678.500	DISKOMINFO
1	07	6	Program Pelayanan dan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Penyiaran	Cakupan layanan komunikasi, informasi dan media massa			440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000		644.204.000		2.686.244.000	DISKOMINFO

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		7	Program Informasi Serta Jaringan Komuniasi dan Persandian	Jumlah sistem informasi yang termanfaatkan dengan optimal			142.500.000		156.750.000		172.425.000		189.667.500		208.634.250		869.976.750	DISKOMINFO
		8	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase peningkatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa			455.000.000		500.500.000		550.550.000		605.605.000		666.165.500		2.777.820.500	DISKOMINFO
1	07	9	Program Publikasi Informasi Daerah dan Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi			1.215.000.000		1.336.500.000		1.470.150.000		1.617.165.000		1.778.881.500		7.417.696.500	DISKOMINFO
JUMLAH							3.291.965.000		3.610.845.000		3.967.729.500		4.354.322.450		4.779.954.695		20.004.816.645	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	15		Koperasi Usaha Kecil dan Menengah															
1	14	01	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah													Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		
1		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah		100%	921.685.700	100%	1.013.854.270	100%	1.115.239.697	100%	1.226.763.667	100%	1.349.440.033	100%	5.626.983.367	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan		100%	133.536.320	100%	146.889.952	100%	161.578.947	100%	177.736.842	100%	195.510.526	100%	815.252.587	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		3	Program Peningkatan Disiplin aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas			71.000.000	100%	78.100.000	100%	85.910.000	100%	94.501.000	100%	103.951.100	100%	433.462.100	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kemampuan aparatur		100%	165.000.000	100%	181.500.000	100%	199.650.000	100%	219.615.000	100%	241.576.500	100%	1.007.341.500	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1		5	Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UKM	dokumen pengelolaan aset/barang daerah		100%	267.000.000	100%	293.700.000	100%	323.070.000	100%	355.377.000	100%	390.914.700	100%	1.630.061.700	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1		6	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Kewirausahaan dan Keunggulan Koperasi dan UKM	Persentase jumlah wirausaha		100%	441.219.310	100%	485.341.241	100%	533.875.365	100%	587.262.902	100%	645.989.192	100%	2.693.688.009	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1		7	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah		100%	841.012.564	100%	925.113.820	100%	1.017.625.202	100%	1.119.387.723	100%	1.231.326.495	100%	5.134.465.804	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1		8	Program Pembinaan Dagang Kecil dan Menengah (DKM)	Persentase Jumlah UMKM		100%	2.922.516.306	100%	3.214.767.937	100%	3.536.244.730	100%	3.889.869.203	100%	4.278.856.124	100%	17.842.254.300	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1		9	Program Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Jumlah lembaga keuangan mikro		100%	566.137.100	100%	622.750.810	100%	685.025.891	100%	753.528.480	100%	828.881.328	100%	3.456.323.609	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
JUMLAH						6.329.107.300		6.962.018.030		7.658.219.833		8.424.041.816		9.266.445.998		38.639.832.977		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	02		URUSAN WAJIB															
2	02	01	Pemerintahan Umum															
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu															Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2		1	Program Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah			134.450.000		147.895.000		165.000.000		165.000.000		175.000.000		787.345.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan investasi			102.450.000		110.000.000		118.000.000		118.000.000		118.000.000		566.450.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		3	Program Penanganan Pengaduan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah			71.000.000		86.000.000		86.000.000		86.000.000		86.000.000		415.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		4	Program Pameran Promosi Investasi	Jumlah promosi dan kerjasama investsi			155.004.000		178.000.000		188.000.000		188.000.000		188.000.000		897.004.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
JUMLAH							462.904.000		521.895.000		557.000.000		557.000.000		567.000.000		2.665.799.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	15		Kebudayaan															
1	14	01	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan														Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	
1		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah		889.498.900		1.029.498.900		1.169.498.900		1.309.498.900		1.449.498.900	100%	5.847.494.500	DISPORAPARBUD	
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			173.675.000		223.675.000		273.675.000		323.675.000		373.675.000	100%	1.368.375.000	DISPORAPARBUD	
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan		42.765.000		52.765.000		62.765.000		72.765.000		82.765.000	100%	313.825.000	DISPORAPARBUD	
1		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal		40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000	100%	300.000.000	DISPORAPARBUD	
1		5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Meningkatnya kemampuan aparatur		65.000.000		85.000.000		105.000.000		125.000.000		145.000.000	100%	525.000.000	DISPORAPARBUD	
1		6	Program Peningkatan Peran Serta	Jumlah organisasi pemuda yang aktif		829.660.000		889.660.000		949.660.000		1.009.660.000		1.069.660.000		4.748.300.000	DISPORAPARBUD	
1		7	Program pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Jumlah organisasi olahraga		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	100%	350.000.000	DISPORAPARBUD	
1		8	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah cabang olah raga yang dibina; persentase peningkatan pembinaan olah raga		81.350.000		91.350.000		101.350.000		111.350.000		121.350.000	100%	506.750.000	DISPORAPARBUD	
		9	Program Pengembangan Destinasi Parwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan		45.000.000		65.000.000		85.000.000		105.000.000		125.000.000	100%	425.000.000	DISPORAPARBUD	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		10	Program Pengembangan Pasar Parwisata	Jumlah kunjungan wisata			235.500.000		295.500.000		355.500.000		415.500.000		475.500.000	100%	1.777.500.000	DISPORAPARBUD
2	08	11	Program Pengembangan Kemitraaan	Tingkat Hunian Hotel			79.400.000		109.400.000		139.400.000		169.400.000		199.400.000	100%	697.000.000	DISPORAPARBUD
2		12	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah pegelaran seni dan budaya			188.321.000		228.321.000		268.321.000		308.321.000		348.321.000	100%	1.341.605.000	DISPORAPARBUD
		13	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu			201.759.000		271.759.000		341.759.000		411.759.000		481.759.000	100%	1.708.795.000	DISPORAPARBUD
		14	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah pagelaran seni dan budaya			410.170.000		460.170.000		510.170.000		560.170.000		610.170.000		2.550.850.000	DISPORAPARBUD
				JUMLAH			3.332.098.900		2.951.848.900		3.371.848.900		3.791.848.900		4.211.848.900		16.859.244.500	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1			PENDIDIKAN															
1	2		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah															
		1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	Meningkatnya Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.	12 bulan	100	195.150.000	100	499.065.000	100	557.236.500	100	618.000.150	100	681.615.165	12 bulan	2.551.066.815	Dinas Perpustakaa n dan Arsip Daerah
		2	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.	Meningkatnya Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.	12 bulan	12 bulan	319.132.200	100	426.045.420	100	468.649.962	100	515.514.958	100	567.066.454	12 bulan	2.296.408.994	Dinas Perpustakaa n dan Arsip Daerah
		3	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.	Digitalisasi arsip berbasis IT		1,00	40.700.000	100	130.000.000	100	143.000.000	100	157.300.000	100	173.030.000		644.030.000	Dinas Perpustakaa n dan Arsip Daerah
		4	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah.	Ketersediaan arsip yang otentik, utuh dan terpercaya		1 paket	54.000.000	100	59.400.000	100	65.340.000	100	71.874.000	100	79.061.400	100%	329.675.400	Dinas Perpustakaa n dan Arsip Daerah
		5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Ketersediaan akses layanan informasi arsip		12 bulan	135.500.000	100	204.050.000	100	224.455.000	100	246.900.500	100	271.590.550	12 bulan	1.082.496.050	Dinas Perpustakaa n dan Arsip Daerah
		6	Program Pemeliharaan Rutin / Program Berkala Sarana	Sarana Prasarana Kearsipan dan Dokumen/Arsip Yang Terpelihara			25.000.000	100	52.500.000	100	57.750.000	100	63.525.000	100	69.877.500	100%	268.652.500	Dinas Perpustakaa n dan Arsip Daerah
		7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasarana aparatur yang lengkap dan modern		1 laporan	78.200.000	100,00	612.545.000	100,00	195.299.500	100,00	214.829.450	100,00	236.312.395	100%	1.337.186.345	Dinas Perpustakaa n dan Arsip Daerah
		8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional			45.200.000	100	108.000.000	100,00	118.800.000	100,00	130.680.000	100,00	143.748.000	100%	546.428.000	Dinas Perpustakaa n dan Arsip Daerah
		9	Program Peningkatan disiplin aparatur.	Aparatur yang tertib dan disiplin.			22.880.000	100	25.168.000	100	27.684.800	100,00	30.453.280	100,00	33.498.608	100%	139.684.688	Dinas Perpustakaa n dan Arsip
		10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Kantor Yang Berbasis Kinerja			725.558.000	100,00	798.113.800	100,00	877.925.180	100,00	965.717.698	100,00	1.062.289.468	100%	4.429.604.146	Dinas Perpustakaa n dan Arsip Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		11	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Pelaporan SKPD yang akurat dan tepat waktu			20.000.000	100,00	22.000.000	100,00	24.200.000	100,00	26.620.000	100,00	29.282.000	100%	122.102.000	Dinas Perpustakaa n dan Arsip Daerah
		12	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah.	Tertibnya pengelolaan aset.			15.000.000	100,00	16.500.000	100,00	18.150.000	100,00	19.965.000	100,00	21.961.500	100%	91.576.500	Dinas Perpustakaa n dan Arsip Daerah
JUMLAH							1.676.320.200		2.953.387.220		2.778.490.942		3.061.380.036		3.369.333.040		#####	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	20		Pemerintahan Umum															
	20	01	Sekretariat Daerah						-	-	-	-	-	-	-		-	Sekretariat Daerah
1		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah; honprarium non PNS	90%	1 Tahun	4.035.400.000	1 Tahun	4.215.420.000	1 Tahun	4.215.420.000	1 Tahun	4.215.420.000	1 Tahun	4.215.420.000	100%	20.897.080.000	SETDA, Bagian Umum
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya rehabilitasi pemeliharaan berkala rumah jabatan dan jaringan listrik , perlengkapan gedung, pembelian peralatan komputer laptop, pembangunan workshop Damkar, Pembangunan gedung Distako KPP, Kantor SANTELDA, tahap stadion Bulutangkis, gedung	70%	rehab 1 paket; pemb kantor 2 paket; pemb works-shop 1 paket, rehab Ged. KNPI, Rehab St. olah raga 1	4.491.915.000	3 paket; 1 tahun	4.410.000.000	4 paket ; 1 tahun	4.410.000.000	2 paket; 1 tahun	4.410.000.000	2 paket; 1 tahun	4.410.000.000	100%	22.131.915.000	SETDA, Bagian Umum
1		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya dialog dengan tokoh masyarakat, pimpinan ormas, Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara, Rakor Pejabat Pemerintah daerah dan terlayani kunjungankerja kepala daerah dan pengadaan pakaian khusus dinas dan hari-hari khusus	60%	2 kegiatan	500.000.000	3 Paket	455.000.000	3 Paket	455.000.000	3 Paket	455.000.000	3 Paket	455.000.000	100%	2.320.000.000	SETDA, Bagian Umum
		4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		70%	1 tahun	280.000.000	1 tahun	304.000.000	1 tahun	304.000.000	1 tahun	304.000.000	1 tahun	304.000.000	100%	1.496.000.000	SETDA, Bagian Umum

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		5	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		60%	1 tahun	1.635.000.000	1 tahun	1.720.500.000	1 tahun	1.720.500.000	1 tahun	1.720.500.000	1 tahun	1.720.500.000	100%	8.517.000.000	SETDA, Bagian Umum
		6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		75%	1 tahun	50.000.000	1 tahun	52.500.000	1 tahun	52.500.000	1 tahun	52.500.000	1 tahun	52.500.000	100%	260.000.000	SETDA, Bagian Umum
		7	Program pelayanan Administrasi Perkantoran				450.000.000		452.000.000		463.000.000		456.000.000		458.000.000		2.279.000.000	SETDA, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				475.000.000		75.000.000		275.000.000		75.000.000		75.000.000		975.000.000	SETDA, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tertatanya kelembagaan, orientasi tugas, workshop, konsultasi dan	70%	1 tahun	300.000.000	1 tahun	300.000.000	1 tahun	300.000.000	1 tahun	300.000.000	1 tahun	300.000.000	100%	1.500.000.000	SETDA, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		10	Program Pelayanan Pengadaan Pemerintah			1 tahun	1.492.300.000	1 tahun	1.650.000.000	1 tahun	1.650.000.000	1 tahun	1.725.000.000	1 tahun	1.800.000.000	100%	8.317.300.000	SETDA, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
		11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				450.026.000		455.026.000		460.026.000		466.576.000		473.231.000		2.304.885.000	SETDA, Bagian Pembangunan
		12	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		90%	1 tahun	725.000.000	1 tahun	797.500.000	1 tahun	877.250.000	1 tahun	964.975.000	1 tahun	1.061.472.500	100%	4.426.197.500	SETDA, Bagian Pembangunan
		13	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya tindak lanjut hasil pengawasan	80%	1 tahun	100.000.000	1 tahun	110.000.000	1 tahun	121.000.000	1 tahun	133.100.000	1 tahun	146.410.000	100%	610.510.000	SETDA, Bagian Pembangunan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		14	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD Setda Kab. Barsel tersusunnya laporan keuanganakhir tahu, penatausahaan keuangan SKPD Setda, Akuntansi dan	7%	1 tahun	80.000.000	1 tahun	238.000.000	1 tahun	261.800.000	1 tahun	287.980.000	1 tahun	316.778.000	100%	1.184.558.000	SETDA, Bagian Pembangunan
1		15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya tindak lanjut hasil pengawasan	80%	1 tahun	200.000.000,00	1 tahun	1.580.000.000,00	1 tahun	1.738.000.000,00	1 tahun	1.911.800.000,00	1 tahun	2.102.980.000,00	100%	7.532.780.000	SETDA, Bagian Pembangunan
		16	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo dan Layanan Elektronik		60%	1 tahun	75.000.000	1 tahun	82.500.000	1 tahun	90.750.000	1 tahun	99.825.000	1 tahun	109.807.500	100%	457.882.500	SETDA, Bagian Pembangunan
		17	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK		60%	1 tahun	135.000.000	1 tahun	148.500.000	1 tahun	163.350.000	1 tahun	179.685.000	1 tahun	197.653.500	100%	824.188.500	SETDA, Bagian Pembangunan
		18	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		610.510.000	SETDA, Bagian Pembangunan
		19	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya tindak lanjut hasil pengawasan			170.000.000		187.000.000		205.700.000		226.270.000		248.897.000		1.037.867.000	SETDA, Bagian Pembangunan
		20	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		60%	1 tahun	285.000.000	1 tahun	313.500.000	1 tahun	344.850.000	1 tahun	379.335.000	1 tahun	417.268.500	100%	1.739.953.500	SETDA, Bagian Pembangunan
		21	Program Pengembangan Data/Informasi		60%	1 tahun	75.000.000	1 tahun	82.500.000	1 tahun	90.750.000	1 tahun	99.825.000	1 tahun	109.807.500	100%	457.882.500	SETDA, Bagian Pembangunan

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1		22	Program Penataan Peraturan perundang-undangan	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Peundang-	80%	1 tahun	815.000.000	1 tahun	1.508.320.000	1 tahun	988.150.000	1 tahun	1.086.965.000	1 tahun	1.195.661.500	100%	5.594.096.500	SETDA, Bagian Hukum
		23	Program Kerjasama Pembangunan		80%	1 tahun	220.800.000	1 tahun	242.880.000	1 tahun	267.168.000	1 tahun	293.884.800	1 tahun	323.273.280	100%	1.348.006.080	SETDA, Bagian Hukum
		24	Program Penataan Peraturan perundang-undangan				75.000.000	1 tahun	105.000.000	1 tahun	115.500.000	1 tahun	127.050.000	1 tahun	139.755.000	100%	562.305.000	SETDA, Bagian Pemerintah an
		25	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa				75.000.000	1 tahun	382.500.000	1 tahun	420.750.000	1 tahun	462.825.000	1 tahun	509.107.500	100%	1.850.182.500	SETDA, Bagian Pemerintah an
		26	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Terlaksananya tindak lanjut hasil pengawasan			50.000.000	1 tahun	55.000.000	1 tahun	60.500.000	1 tahun	66.550.000	1 tahun	73.205.000	100%	305.255.000	SETDA, Bagian Pemerintah an
		27	Program Penataan Daerah Ekonomi Baru					1 tahun	375.000.000	1 tahun	82.500.000	1 tahun	90.750.000	1 tahun		100%	548.250.000	SETDA, Bagian Pemerintah an
		28	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				1.655.000.000	1 tahun	1.920.500.000	1 tahun	2.112.550.000	1 tahun	2.323.805.000	1 tahun	2.556.185.500	100%	10.568.040.500	SETDA, Bagian Kesra
1		29	Program Pengembangan Data/Informasi		60%	1 tahun	70.000.000	1 tahun	77.000.000	1 tahun	84.700.000	1 tahun	93.170.000	1 tahun	102.487.000	100%	427.357.000	SETDA, Bagian Kesra
		30	Program Pengembangan Nilai Budaya			1 tahun	1.895.280.000	1 tahun	1.910.280.000	1 tahun	1.926.780.000	1 tahun	1.944.930.000	1 tahun	1.964.895.000	100%	9.642.165.000	SETDA, Bagian Kesra
		31	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		70%	1 tahun	110.000.000	1 tahun	121.000.000	1 tahun	133.100.000	1 tahun	146.410.000	1 tahun	161.051.000	100%	671.561.000	SETDA, Bagian Kesra

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		32	Program Pembangunan Ekonomi			1 tahun	710.000.000	1 tahun	805.000.000		880.000.000	1 tahun	905.000.000		980.000.000	1 tahun	4.280.000.000	SETDA, Bagian Perekonomian dan SDA
		33	Program Kerjasama Pembangunan			1 tahun	495.000.000	1 tahun	525.000.000		495.000.000	1 tahun	200.000.000		150.000.000	1 tahun	1.865.000.000	SETDA, Bagian Perekonomian dan SDA
		34	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			1 tahun	125.000.000	1 tahun	125.000.000		125.000.000	1 tahun	125.000.000		125.000.000	1 tahun	625.000.000	SETDA, Bagian Perekonomian dan SDA
1		35	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			1 tahun	1.035.200.000	1 tahun	1.170.000.000		1.280.000.000	1 tahun	1.405.000.000		1.565.000.000	1 tahun	6.455.200.000	SETDA, Bagian Keuangan dan Aset
		36	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1 tahun	1.119.150.000	1 tahun	1.260.700.000		1.610.000.000	1 tahun	2.460.000.000		2.125.000.000	1 tahun	8.574.850.000	SETDA, Bagian Keuangan dan Aset
		37	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan			1 tahun	545.400.000	1 tahun	625.000.000		699.100.000	1 tahun	785.500.000		825.000.000	1 tahun	3.480.000.000	SETDA, Bagian Keuangan dan Aset
JUMLAH							25.100.471.000		28.947.126.000		29.600.694.000		31.112.730.800		31.916.756.280		146.677.778.080	

Kode				Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
							2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	20		Pemerintahan Umum																
	20		Sekretariat DPRD																Sekretariat DPRD
1		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat 3000 surat, komunikasi 4 unit kantor dan gudang , rutin kantor untuk 72 PNS dan 25 DPRD, rakor, konsultasi keluar daerah	1 tahun	1 tahun	6.441.882.125	1 tahun	6.457.072.500	1 tahun	6.508.072.500	1 tahun	6.514.622.500	1 tahun	6.514.622.500	3000 surat	32.436.272.125	Sekretariat DPRD	
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan	1 tahun	1 tahun	1.602.323.000	1 tahun	675.800.000	1 tahun	675.800.000	1 tahun	675.800.000	1 tahun	1.025.800.000		4.655.523.000	Sekretariat DPRD	
1		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kedisiplinan berpakaian anggota DPRD dan pegawai SETWAN	1 paket	1 paket	409.275.000	1 paket	560.000.000	1 paket	410.000.000	1 paket	810.000.000	1 paket	710.000.000		2.899.275.000	Sekretariat DPRD	
		4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan				386.525.000		386.525.000	-	386.525.000	-	386.525.000	-	386.525.000		1.932.625.000	Sekretariat DPRD	
1		5	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rayat Daerah	Terserapnya aspirasi masyarakat ; tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan; berfungsinya Badan Kehormatan Dewan; dan pembahasan 10 Raperda	Terlaksananya reses dan pembahasan Raperda	Orang dan Raperda	6.202.817.875		6.962.000.000		6.962.000.000		7.062.000.000		7.062.000.000		1.932.625.000	Sekretariat DPRD	
JUMLAH							15.042.823.000		15.041.397.500		14.942.397.500		15.448.947.500		15.698.947.500		43.856.320.125		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	20		Pemerintahan Umum															
	20		Kecamatan															
	20	01	Kecamatan Dusun Selatan					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Dusun Selatan
1		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah		1 tahun	1.150.223.000	1 tahun	1.207.785.950	1 tahun	1.250.682.600	1 tahun	1.346.112.150	1 tahun	1.427.916.294	100%	6.382.719.994	Kecamatan Dusun Selatan
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan berkala gedung kantor dan terbelinnya Genset , teralis kantor, dan penimbunan dan pemasangan paving stone kantor kecamatan		1 tahun	180.950.000	1 tahun	140.300.000	1 tahun	99.480.000	1 tahun	121.997.000	1 tahun	212.589.125	100%	755.316.125	Kecamatan Dusun Selatan
1		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian Dinas		1 paket	66.000.000	1 paket	62.235.000	1 paket	75.000.000	1 paket	38.000.000	1 paket	86.000.000	100%	327.235.000	Kecamatan Dusun Selatan
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya dana operasional kecamatan/kekurahan , TP-PKK		1 tahun	550.775.000	1 tahun	559.558.000	1 tahun	1.421.068.000	1 tahun	605.200.000	1 tahun	624.547.000	100%	3.761.148.000	Kecamatan Dusun Selatan
		5	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan			1 tahun	45.040.000	1 tahun	48.294.000	1 tahun	50.146.000	1 tahun	53.203.510	1 tahun	96.068.685	100%	292.752.195	Kecamatan Dusun Selatan
		6	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			1 tahun	10.000.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	43.000.000	1 tahun	36.000.000	1 tahun	39.600.000	100%	158.600.000	Kecamatan Dusun Selatan
JUMLAH							2.002.988.000		2.048.172.950	-	2.939.376.600	-	2.200.512.660	-	2.486.721.104		11.677.771.314	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
						2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	20		Pemerintahan Umum																
	20		Kecamatan																
	20	01	Kecamatan Dusun Hilir					-	-	-	-	-	-	-	-		-	Kecamatan Dusun Hilir	
1		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah		1 tahun	503.100.000	1 tahun	517.000.000	1 tahun	536.200.000	1 tahun	557.000.000	1 tahun	624.000.000	100%	2.737.300.000	Kecamatan Dusun Hilir	
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan berkala gedung kantor dan meubelair		1 tahun	1.094.500.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	165.500.000	1 tahun	177.000.000	1 tahun	188.000.000	100%	1.775.000.000	Kecamatan Dusun Hilir	
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terciptanya disiplin kinerja aparatur			47.500.000		47.500.000		47.500.000		47.500.000		47.500.000		237.500.000	Kecamatan Dusun Hilir	
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tersedianya SDM yang handal dan profesional		1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	50.000.000	100%	250.000.000	Kecamatan Dusun Hilir	
		5	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur			412.500.000		418.000.000		413.000.000		419.000.000		424.500.000		2.087.000.000	Kecamatan Dusun Hilir	
		6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah			16.500.000		17.000.000		17.500.000		18.000.000		19.000.000		88.000.000	Kecamatan Dusun Hilir	
1		7	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan setiap tahunnya		1 tahun	13.500.000	1 tahun	14.000.000	1 tahun	19.500.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	100%	123.500.000	Kecamatan Dusun Hilir	
JUMLAH							2.137.600.000		488.441.800		537.285.980		591.014.578		650.116.036		2.987.934.394		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp341.456	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	20		Pemerintahan Umum															
	20		Kecamatan															
	20	01	Kecamatan Dusun Utara					-	-	-	-	-	-	-	-		-	Kecamatan Dusun Utara
1		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah		1 tahun	849.762.400	1 tahun	1.093.161.120	1 tahun	1.454.341.456	1 tahun	1.863.729.292	1 tahun	2.424.017.559	100%	7.685.011.827	Kecamatan Dusun Utara
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan berkala gedung kantor dan terbelinnya Laptop, dan pakaian dinas pegawai		1 tahun	1.424.790.000	1 tahun	1.493.935.000	1 tahun	677.139.500	1 tahun	1.041.181.350	1 tahun	972.395.755	100%	5.609.441.605	Kecamatan Dusun Utara
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		1 tahun	70.000.000	1 tahun	91.000.000	1 tahun	118.300.474	1 tahun	153.790.000	1 tahun	199.927.000	100%	633.017.474	Kecamatan Dusun Utara
1		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya dana operasional kecamatan/kelurahan, TP-PKK, dan Musrenbang Kecamatan		1 tahun	432.874.600	1 tahun	462.197.000	1 tahun	731.584.474	1 tahun	951.059.816	1 tahun	1.236.377.680	100%	3.814.093.570	Kecamatan Dusun Utara
		5	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase masyarakat yang tidak bekerja menurun		1 tahun	113.460.000	1 tahun	147.498.000	1 tahun	191.711.400	1 tahun	249.224.820	1 tahun	323.992.266	100%	1.025.886.486	Kecamatan Dusun Utara
JUMLAH							2.890.887.000		3.287.791.120		3.173.077.304		4.258.985.278		5.156.710.260		18.767.450.962	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
-	20		Pemerintahan Umum															
	20		Kecamatan															
	20	01	Kecamatan Gunung Bintang Awai					-	-	-	-	-	-	-	-		-	Kecamatan Gunung Bintang Awai
1		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran		1 tahun	497.540.000	1 tahun	547.294.000	1 tahun	602.023.400	1 tahun	662.225.740	1 tahun	728.448.314	1 tahun	3.037.531.454	Kecamatan Gunung Bintang Awai
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan berkala gedung kantor dan pembelian printer, dan perawatan meubelair, komputer dan genset		1 tahun	45.950.000	1 tahun	50.545.000	1 tahun	55.599.500	1 tahun	61.159.450	1 tahun	67.275.395	1 tahun	280.529.345	Kecamatan Gunung Bintang Awai
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan fasilitas aparatur		1 tahun	15.640.000	1 tahun	17.204.000	1 tahun	18.924.400	1 tahun	20.816.840	1 tahun	22.898.524	1 tahun	95.483.764	Kecamatan Gunung Bintang Awai
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan diklat, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM, terpenuhinya laporan asset kecamatan, dokumen tata batas dan patok yang akurat sesuai fakta		1 tahun	291.050.000	1 tahun	320.155.000	1 tahun	352.170.500	1 tahun	387.387.550	1 tahun	426.126.305	1 tahun	1.776.889.355	Kecamatan Gunung Bintang Awai
1		5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Aparatur	Peningkatan dan pembangunan gedung kantor, GPU, rujab camat dan sekcama, mess pegawai, tempat parkir, pagar kantor		1 tahun	2.150.200.000	1 tahun	2.365.220.000	1 tahun	2.601.742.000	1 tahun	2.861.916.200	1 tahun	3.148.107.820	1 tahun	13.127.186.020	Kecamatan Gunung Bintang Awai
JUMLAH							3.000.380.000		3.300.418.000		3.630.459.800		3.993.505.780		4.392.856.358		18.317.619.938	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
						2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	20		Pemerintahan Umum																
	20		Kecamatan																
	20	01	Kecamatan KARAU KUALA																
1		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah		1 tahun	748.000.000	1 tahun	897.600.000	1 tahun	1.077.120.000	1 tahun	1.292.544.000	1 tahun	1.551.052.800	100%	5.566.316.800	Kecamatan Karau Kuala	
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya rehabilitasi pemeliharaan berkala gedung kantor dan pembelian printer, dan perawatan		1 tahun	710.000.000	1 tahun	1.367.000.000	1 tahun	2.017.400.000	1 tahun	1.377.880.000	1 tahun	685.456.000	100%	6.157.736.000	Kecamatan Karau Kuala	
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Penyediaan Pakaian Olahraga		1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	20.000.000	100%	70.000.000	Kecamatan Karau Kuala	
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya		1 tahun	271.600.000	1 tahun	325.920.000	1 tahun	391.104.000	1 tahun	469.324.800	1 tahun	563.189.760	100%	2.021.138.560	Kecamatan Karau Kuala	
		5	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah		1 tahun	30.000.000	1 tahun	36.000.000	1 tahun	43.200.000	1 tahun	51.840.000	1 tahun	62.208.000	100%	223.248.000	Kecamatan Karau Kuala	
		6	Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah	Persentase selisih perhitungan nilai aset oleh Bid Asset Badan Keuangan Daerah dengan audit BPK		1 tahun	50.000.000	1 tahun	60.000.000	1 tahun	72.000.000	1 tahun	86.400.000	1 tahun	103.680.000	100%	372.080.000	Kecamatan Karau Kuala	
JUMLAH							1.819.600.000		2.696.520.000		3.620.824.000		3.287.988.800		2.985.586.560		14.410.519.360		

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capai Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
-	20		Pemerintahan Umum															
	20		Kecamatan															
	20	01	Kecamatan Jenamas															Kecamatan Jenamas
1		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar		1 tahun	639.900.000	1 tahun	644.400.000	1 tahun	699.900.000	1 tahun	699.900.000	1 tahun	699.900.000	100%	3.384.000.000	Kecamatan Jenamas
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan berkala gedung kantor, rumah dinas, dan pembelian printer, dan perawatan meubelair		1 tahun	1.683.500.000	1 tahun	444.500.000	1 tahun	532.000.000	1 tahun	392.000.000	1 tahun	337.000.000	100%	3.389.000.000	Kecamatan Jenamas
		3	Program Peningkatan Disiplin	Tersedianya pakaian dinas		1 tahun	24.400.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	35.000.000	1 tahun	35.000.000	1 tahun	35.000.000	100%	159.400.000	Kecamatan Jenamas
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya dana operasional kecamatan/kelurahan , TP-PKK		1 tahun	290.750.000	1 tahun	700.000.000	1 tahun	354.500.000	1 tahun	357.000.000	1 tahun	359.500.000	100%	2.061.750.000	Kecamatan Jenamas
		5	Program Kerja Tahunan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan setiap tahunnya		1 tahun	40.000.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	60.000.000	1 tahun	60.000.000	1 tahun	60.000.000	100%	260.000.000	Kecamatan Jenamas
1		6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase selisih perhitungan nilai aset oleh Bid Asset Badan Keuangan Daerah dengan audit BPK		1 tahun	10.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	15.000.000	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.000.000	100%	80.000.000	Kecamatan Jenamas
			JUMLAH				2.688.550.000		1.873.900.000	-	1.696.400.000	-	1.563.900.000	-	1.511.400.000		9.334.150.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	20		Pemerintahan Umum															
	20	01	Inspektorat					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Inspektorat
1		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah		586.726.000		632.726.000		660.846.000		714.310.000		724.310.000			3.318.918.000	Inspektorat
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan		74.600.000		94.600.000		129.600.000		124.600.000		154.600.000			578.000.000	Inspektorat
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam pelaksanaan tugas		32.500.000		39.000.000		39.000.000		44.500.000		44.500.000			199.500.000	Inspektorat
		4	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	dokumen pengelolaan aset/barang daerah		40.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000			240.000.000	Inspektorat
		5	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan hasil reviu keuangan (LHR)		20.000.000		20.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000			115.000.000	Inspektorat
		6	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasa yang berkinerja baik		192.600.000		157.600.000		157.600.000		207.600.000		207.600.000			923.000.000	Inspektorat
1		7	Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat	Jumlah laporan kasus dan laporan kerugian negara		50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			450.000.000	Inspektorat

1		8	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Jumlah Temuan LHP			1.816.376.400		1.896.376.400		1.901.376.400		1.901.376.400		1.901.376.400		9.416.882.000	Inspektorat
1		9	Program Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah	Jumlah laporan kasus dan laporan kerugian negara			100.000.000		120.000.000		140.000.000		140.000.000		150.000.000		650.000.000	Inspektorat
JUMLAH							2.912.802.400		3.110.302.400		3.203.422.400		3.307.386.400		3.357.386.400		15.891.300.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	06		PERENCANAAN															
1	06	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															BAPPEDA
1	06	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah			1.390.400.000		1.529.440.000		1.682.384.000		1.850.622.400		2.035.684.640		8.488.531.040	BAPPEDA
1	06	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan rutin, pemeliharaan perlengkapan gedung, pembelian peralatan			555.844.280		410.929.759		238.711.247		251.781.809		274.655.900		1.731.922.995	BAPPEDA
		3	program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya ketentuan disiplin aparatur pemerintah			130.200.000		139.100.000		147.505.000		152.380.250		157.499.263		726.684.513	BAPPEDA
1	06	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur			156.300.200		345.250.000		220.762.500		121.550.625		127.628.156		971.491.481	BAPPEDA
1	06	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			125.000.000		142.305.000		150.420.250		161.601.263		179.853.826		759.180.338	BAPPEDA
1	06	6	Program Pengembangan Data/Informasi	Berkembangnya layanan data dan informasi yang disediakan			724.500.000		760.725.000		798.761.250		838.699.313		880.634.278		4.003.319.841	BAPPEDA
1	06	7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah			882.000.000		926.100.000		972.405.000		1.021.025.250		1.072.076.513		4.873.606.763	BAPPEDA
1	06	8	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi			378.000.000		396.900.000		416.745.000		437.582.250		459.461.363		2.088.688.613	BAPPEDA
		9	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Meningkatnya kualitas perencanaan sosial dan budaya			105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156		580.191.281	BAPPEDA
1	06	10	Program Perencanaan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah	Meningkatnya kualitas perencanaan infrastruktur dan prasarana wilayah			441.000.000		463.050.000		486.202.500		510.512.625		536.038.256		2.436.803.381	BAPPEDA

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	06	11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah rawan bencana			105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156		580.191.281	BAPPEDA
1	06	12	Program perencanaan pendidikan dan Kesra	Meningkatnya kualitas perencanaan pendidikan dan kesra			315.000.000		330.750.000		347.287.500		364.651.875		382.884.469		1.740.573.844	BAPPEDA
1	06	13	Program Perencanaan Bidang Kependudukan dan Pemerintahan	Meningkatnya kuaitas perencanaan bidang kependudukan dan pemerintahan			115.500.000		121.275.000		127.338.750		133.705.688		140.390.972		638.210.409	BAPPEDA
		14	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Berkembangnya layanan informasi dan komunikasi publik			186.500.000		201.125.000		207.881.250		210.775.313		213.814.078		1.020.095.641	BAPPEDA
		15	Program Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran	Berkembangya infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan penyiaran			52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078		290.095.641	BAPPEDA
		16	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Terselenggaranya layanan pos dan informasi			252.500.000		277.750.000		305.525.000		336.077.500		369.685.250		1.541.537.750	BAPPEDA
		17	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang	Meningkatnya kualitas perencanaan pengembangan wilayah pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang			105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156		580.191.281	BAPPEDA
JUMLAH							6.020.244.480		6.430.574.759		6.507.097.997		6.816.393.347		7.277.005.510		33.051.316.092	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
-	20		Pemerintahan Umum																
	20	01	BPKAD					-	-	-	-	-	-	-	-		-	BPKAD	
1		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah		1 tahun	1.082.220.000	1 tahun	1.140.640.000	1 tahun	1.199.060.000	1 tahun	1.257.480.000	1 tahun	1.314.400.000	100%	5.993.800.000	BPKAD	
1		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan kantor BPKAD, Pemeliharaan berkala gedung kantor, kendaraan dinas, penimbunan halaman kantor		1 tahun	3.130.000.000	1 tahun	2.145.000.000	1 tahun	160.000.000	1 tahun	175.000.000	1 tahun	190.000.000	100%	5.800.000.000	BPKAD	
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas , pakaian olah raga		1 tahun	77.500.000	1 tahun	30.000.000	1 tahun	88.000.000	1 tahun	35.000.000	1 tahun	100.000.000	100%	1.178.128.000	BPKAD	
		4	Program Pengembangan Kapasita Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi			110.000.000		125.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000	100%	1.200.628.000	BPKAD	
		5	Program Pengembangan Data dan Informasi	Tersusunnya Akuntansi Pemerintah daerah, Raperda APBD 2018-2022, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber PAD		1 Buku	207.966.600	1 Buku	227.327.200	1 Buku	246.687.800	1 Buku	266.048.400	1 Buku	285.409.000	100%	1.233.439.000	BPKAD	
1		6	Program Pengelolaan Data dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah		1 tahun	925.128.000	1 tahun	1.006.776.000	1 tahun	1.088.424.000	1 tahun	1.170.072.000	1 tahun	1.251.720.000	100%	5.616.992.000	BPKAD	
1		7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Kinerja Pendapatan Daerah	Jumlah laporan keuangan PD yang memenuhi standar		1 Buku	655.628.000	1 Buku	714.776.000	1 Buku	773.924.000	1 Buku	833.072.000	1 Buku	892.220.000	100%	6.645.145.000	BPKAD	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
						2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1		8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase selisih perhitungan nilai aset oleh Bid Asset Badan Keuangan Daerah dengan audit BPK			1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000	100%	6.500.000.000	BPKAD
		9	Program Peningkatan dan Penagihan	Persentase peningkatan pendapatan daerah			821.128.000	1 Buku	893.776.000	1 Buku	970.000.000	1 Buku	1.045.072.000	1 Buku	1.119.720.000	100%	4.236.534.600	BPKAD
1		10	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah temuan pelanggaran keuda yang itindaklanjuti			3.431.153.000	1 Buku	3.740.026.000	1 Buku	4.048.899.000	1 Buku	4.357.772.000	1 Buku	4.551.445.000	100%	17.623.270.000	BPKAD
JUMLAH							11.540.723.600		11.223.321.200		10.004.994.800		10.679.516.400		11.354.914.000		56.027.936.600	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capai Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	02		URUSAN WAJIB															
2	02	01	Kepegawaian															
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						-	-	-	-	-	-	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2		1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya administrasi perkantoran: jasa surat menyurat, perbaikan peralatan kerja komunikasi, rutin kantor, rakor, konsultasi keluar daerah			875.083.330		962.691.663		1.028.850.829		1.166.705.912		1.283.209.464		5.316.541.198	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja internal			141.955.000		156.150.500		171.755.550		188.942.105		211.836.316		870.639.471	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian Dinas			78.320.000		86.152.000		94.767.200		104.243.920		114.668.312		478.151.432	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada Unit Kerjanya			2.045.338.900		2.206.939.570		2.474.860.069		2.722.046.076		2.994.580.684		12.443.765.299	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1		5	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan program kerja dan capaian kinerja			224.059.000		246.464.900		271.111.390		298.222.529		328.044.782		1.367.902.601	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capai Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1		6	Program Pembinaan ASN Kabupaten Barito Selatan	Pengurusan Kartu Taspen, Karis, Karsu dan Karpeg; Penyelesaian Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS; Biaya Pemulangan PNS yang Pensiun; Pendataan dan Penyimpanan Data PNS Kab. Barsel (SAPK)			307.689.000		338.457.540		372.203.690		409.134.059		452.487.465		1.879.971.754	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Pengurusan Usul Penetapan NIP; Penyusunan dan Pengurusan Formasi PNS Kabupaten Barito Selatan; Penyelesaian UKP PNS; Penyelenggaraan Sosialisasi Tentang Perhitungan PAK Jabatan Fungsional; Penyusunan DUK dan Daftar Nominatif PNS Kabupaten Barito Selatan			482.452.520		470.197.772		429.247.500		642.144.304		705.088.735		2.729.130.831	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		8	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Jumlah sistem informasi pelayanan publik yang termanfaatkan dengan optimal			286.931.370		315.624.507		347.186.958		381.905.653		420.096.219		1.751.744.707	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		9	Kelembagaan KORPRI/ASN	Tingkat Capaian Kinerja			173.240.000		190.575.000		183.877.650		202.265.415		222.491.157		972.449.222	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
JUMLAH							4.300.339.200		4.973.253.452		5.373.860.836		6.115.609.973		6.732.503.134		27.495.566.595	

Kode			Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Capai Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD Penanggung Jawab	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Tahun Periode RPJMD (2022)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	02																	
2	02	01																
			Dinas Perhubungan					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
2		1	Program Revitalisasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik ASPDL	Jumlah dokumen perencanaan			20.000.000		80.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		130.000.000	Dinas Perhubungan
		2	Program Peningkatan Pelayananan Angkutan	Persentase jumlah masyarakat yang terlayani angkutan darat/laut/udara			15.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		615.000.000	Dinas Perhubungan
		3	Program PengawasanPendalian dan Pengamanan LLASDL	Persentase berkurangnya angka kecelakaan angkutan umum			315.000.000		400.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		1.765.000.000	Dinas Perhubungan
		4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik	Persentase jumlah masyarakat yang terlayani angkutan darat/laut/udara			310.000.000		800.000.000		500.000.000		400.000.000		400.000.000		2.410.000.000	Dinas Perhubungan
1		5	Program Intensifikasi PAD Bidang Transportasi	dokumen pengelolaan aset/barang daerah			270.000.000		270.000.000		60.000.000		60.000.000		90.000.000		750.000.000	Dinas Perhubungan
1		6	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah aparatur memenuhi standar kompetensi			307.689.000		338.457.540		372.203.690		409.134.059		452.487.465		1.879.971.754	Dinas Perhubungan
JUMLAH							4.300.339.200		2.038.457.540		1.442.203.690		1.379.134.059		1.452.487.465		10.612.621.954	

Tabel 8.2

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Tahun 2017	2018	2019	2020	2021	2022
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan PDRB	7,1	7,3	7,5	7,65	7,8	7,8
2	Laju Inflasi	4,55	4,4	4,25	4,15	4,05	3,85
3	PDRB per kapita	25,2	27,3	29,4	31,5	33,1	35,2
4	Indeks Gini	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,04	69,73	70,43	71,33	72,22	73,1
6	Angka Melek Huruf	98,9	98,9	98,9	99	99,5	99,5
7	Angka rata-rata lama sekolah	12	12	12	12	12	12
8	Angka usia harapan hidup	71,56	71,68	71,8	71,92	72,04	72,5
9	Angka partisipasi angkatan kerja	68.276	69.642	71.034	72.455	73.904	75.382
10	Tingkat partisipasi angkatan kerja	150,00	165	182	200	220	242
11	Tingkat pengangguran terbuka	5,28	5,06	4,84	4,62	4,40	4,65
12	Rasio penduduk yang bekerja	86,57	88,87	92,45	93,47	94,78	96,57
13	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	5.635	5.485	5.285	5.135	4.850	4.650

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Tahun 2017	2018	2019	2020	2021	2022
14	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	2,87	3,1	3,33	3,56	3,89	4,1
16	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras)	17,46	19,21	21,13	23,24	25,56	28,12
17	Produksi sektor perkebunan	10,23	11,15	12,07	12,99	13,91	14,83
18	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,415	0,625	0,84	1,14	1,355	1,57
19	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap	15,00	17	18	20	22	24
20	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	18,87	19,42	19,97	20,52	21,07	21,62
21	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	8,05	8,43	8,81	9,19	9,57	9,95
22	Pertumbuhan industri	21	21	22	23	24	25
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	651.353	716.488	788.137	866.951	953.646	1.049.011
2	Nilai tukar petani	109,67	110,51	111,35	112,19	113,03	113,87
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan	238.938	262.832	289.115	318.026	349.829	384.812
4	Produktivitas total daerah	54.137	59.551	65.506	72.056	79.262	87.188
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total	24	25	27	29	30	30
6	Angka kriminalitas yang tertangani	85	80	75	60	50	50
7	Rasio ketergantungan	29,23	28,12	27,01	26,00	24,99	24,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Target Tahun 2017	2018	2019	2020	2021	2022
----	-------------------------	----------------------	------	------	------	------	------

Tabel 8.3

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Pendidikan						
1.2	Angka Partasipasi Kasar	98,82	98,82	98,82	98,82	98,82	98,82
1.4	Angka Partisipasi Murni:	106,53	85,00	86,00	88,00	89,00	90,00
1.4.1	Angka Partispasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	95,71%	96%	96,5%	97%	97,5%	98%
1.4.2	Angka Partispasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	106,53	85,00	86,00	88,00	89,00	90,00
1.5.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	95,71%	96%	96,5%	97%	97,5%	98%
1.5.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	106,53	85,00	86,00	88,00	89,00	90,00
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,02%	0,01%
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0%	0%
1.7.1	Angka Kelulusan (AK) SD/MI	94,98%	94,98%	95%	96%	97%	98%
1.7.2	Angka Kelulusan (AK) SMP/MTs	96,12 %	80%	85%	90%	90%	95%
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI	94,98	94,98	95,00	96,00	97,00	98,00
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs	88,82	88,82	88,22	90,00	90,00	90,00
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	26,45	30	35	40	45	50
1.9.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	16,67	20	35	50	75	90
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1;83	1;83	1;83	1;83	1;83	1;83
1.12.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1;8	1;8	1;10	1;15	1;18	1;20
1.13.	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	1;11	1;12	1;14	1;16	1;18	1;20
1.14.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	1;08	1;08	1;10	1;15	1;18	1;20
1.18.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	0,19	0,15	0,1	0,05%	0,02	0%
1.19.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	78,86%	78,86%	79,57%	80,28%	80,99%	81,70%
2	Kesehatan						
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5	5	5	5	4	4

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	99,75	99,75	99,85	99,9	99,9	99,9
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	89	89	89	89	45	45
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	1 : 75	1 : 70	1 : 65	1 : 60	1 : 50	1 : 50
2.7.	Rasio puskesmas per satuan penduduk	10 : 100.000	10 : 100.000	10 : 100.000	10 : 100.000	10 : 100.000	10 : 100.000
2.8.	Rasio pustu per satuan penduduk	6 : 10.000	6 : 10.000	6 : 10.000	6 : 10.000	6 : 10.000	6 : 10.000
2.9.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk						
2.10.	Rasio dokter per satuan penduduk	40 : 100.000	40 : 100.000	40 : 100.000	42 : 100.000	42 : 100.000	42 : 100.000
2.15.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	4%	4%	3,5 %	3,5 %	3%	3%
2.39.	Cakupan pelayanan nifas	75%	78,5 %	80%	83%	85%	85%
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	421,66	463,83	510,21	561,23	617,35	679,09
3.1.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	1.500,00	1.814,87	1.996,37	2.196,00	2.415,60	2.415,60
3.1.5.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	18,00
3.1.6.	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	2	1	1	1	1	1
3.1.7.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	30,67	30,67	25,57	25,32	20,67	20,67
3.1.8.	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	2	1	1	1	1	1
3.1.9.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	10,00	12,00	16,00	20,00	24,00	25,00
3.1.11.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	1,50	1,70	1,90	2,10	2,50	3,00
3.1.12.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	5.469,60	6.069,60	6.469,60	6.869,60	7.269,60	7.669,60
3.1.13.	Rasio Jaringan Irigasi	421,66	463,83	510,21	561,23	617,35	679,09
3.1.14.	Persentase penduduk berakses air minum	55,5	55,5	61,05	67,16	73,87	81,26
3.1.16.	Rasio areal kawasan kumuh	15	10	5	0	0	0
3.1.18.	Rasio tempat pemakaman umum per desa/kelurahan	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2
3.1.19.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1 : 158	1 : 158	1 : 148	1 : 148	1 : 138	1 : 138
3.2.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	15.913	15.913	16.000	16.000	16.500	16.500

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
4.1.	Jumlah rumah layak huni	28.063	28.063	28.313	28.563	28.813	29.063
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	50%	100%	100%	100%	100%	100%
5.4.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20 km : 30' 50 km : 55'	20 km : 30' 50 km : 55'	20 km : 30' 50 km : 55'	20 km : 30' 50 km : 55'	20 km : 30' 50 km : 55'	20 km : 30' 50 km : 55'
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Sosial						
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	1100	1050	1000	950	900	850
Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
1	Tenaga Kerja						
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	5	5	4	4	3	3
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	62	35	30	25	20	15
1.6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	2	2	2	2	2	2
1.9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	30	40	80	100	150	200
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	25,00	25,00	27,00	29,00	30,00	30,00
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	36%	36%	36%	36%	40%	43%
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	15,00	15,00	18,00	22,00	25,00	25,00
2.4.	Rasio KDRT	0,005	0,0045	0,0040	0,0035	0,0025	0,0025

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.5.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur						
2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	47,50 %	47,75%	48,00%	48,25%	48,50%	49,00%
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	40%	50%	60%	70%	80%	90%
2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,20
3	Pangan						
3.1.1	- Penguatan Cadangan Pangan (%)	60,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00
3.1.2	- Informasi Pasokan,Harga da Akses Pangan di daerah %	90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
3.1.3	- Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%)	90,00	90,00	95,00	92,00	93,00	94,00
3.1.4	- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat (%)	94,00	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00
3.1.5	- Penanganan Daerah Kerawanan Pangan (%)	60,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00
3.2.	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapital	90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	70,00	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00
4	Pertanahan						
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	70,75	72,75	77,75	78,75	80,75	80,75
5	Lingkungan Hidup						
5.1.17.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	80%	80%	85%	85%	90%	95%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
6.1.	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	90	94	98	100	100	100
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	80%	82,50%	85%	87%	88,50%	90%
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	25	30	35	40	45	50
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	90%	94%	98%	100%	100%	100%
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	40%	50%	70%	90%	93%	95%
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	10	10	15	15	15	15
7.4.	Persentase LSM aktif	50 Unit	53 Unit	55 Unti	58 Unit	60 Unit	60 unit
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	10,75	10,95	11,15	11,35	11,55	11,75
7.6.	Persentase PKK aktif	93 Unit	93 Unit	93 Unit	93 Unit	93 Unit	93 Unit
7.7.	Persentase Posyandu aktif	167	167	167	167	167	167
7.8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	558.940	79.125.000	86.251.000	97.560.000	107.540.000	125.754.000
7.9.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	2.016.700.000	2.056.700.000	2.096.700.000	2.096.700.000	2.136.700.000	2.176.700.000
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
8.8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,56	2,14	2,13	2,12	2,11	2,10
8.9.	Ratio Akseptor KB	75%	78%	80%	82%	84%	86%
8.10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	75%	77%	80%	85%	88%	90%
8.12.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	2,13	2,14	2,15	2,16	2,17	2,18
8.13.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	14,93	14,50	14,00	13,50	13,00	12,00
8.14.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	18,15%	18,5%	19%	20%	22%	25%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8.16.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	87,38%	88%	88,10%	88,20%	88,30%	88,40%
8.17.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	90,25%	90,30%	90,35%	90,40%	90,50%	90,60%
8.18.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	83,02%	83,10%	83,20%	83,30%	83,40%	83,50%
8.19.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	50%	55%	60%	65%	70%	80%
8.22.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	86,09	86,10	86,20	86,30	86,40	86,50
8.23.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	64,5%	65%	67%	70%	72%	75%
8.26.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	1	1	1	1	1	1
9	Perhubungan						
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	11.150	11.200	11.300	11.450	11.650	11.650
9.2.	Rasio ijin trayek						
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	400 unit	402 unit	404 unit	409 unit	415 unit	415 unit
9.4.	Jumlah Pelabuhan Sungai/Udara/Terminal Bis	9	9	9	10	10	10
9.7.	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan (Unit)	1100	1100	1300	1500	1700	1700
9.8.	Pemasangan Rambu Sungai (Unit)	300	300	325	350	375	400
9.9.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1 : 170	1 : 160	1 : 150	1: 140	1: 125	1 : 120
9.10.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	11.150	11.200	11.323	11.456	11.600	11.750
10	Komunikasi dan Informatika						
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	87,88%	88,88%	89,90%	90,50%	92%	95%
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet						
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah						
11.1.	Persentase koperasi aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.3.	Persentase BPR/LKM aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Penanaman Modal						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	52	53	55	58	60	60
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1,5 triliun	1,55 triliun	1,6 triliun	1,7 Triliun	1,75 Triliun	1,75 Triliun
13	Kepemudaan dan Olah Raga						
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	25%	27%	35%	40%	43%	47%
14	Statistik						
14.2.	Buku ”kabupaten dalam angka”	1	1	1	1	1	1
14.3.	Buku ”PDRB”	1	1	1	1	1	1
15	Persandian						
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah						
17	Perpustakaan						
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	18.012	50	50	100	100	150
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	22.568	100	160	200	200	250
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,56%	0,59%	0,62%	0,65%	0,68%	0,70
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	397,08	476,50	571,83	686,17	823,42	988,08
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	28,787	28,757	30,507	32,507	34,757	37,257
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	1	1	1	1	1	1
18	Kearsipan						
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	0%	20%	40%	60%	80%	100%
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	10	1	2	3	3	3
Layanan Urusan Pilihan							
1	Pariwisata						
1.1.	Kunjungan wisata	27%	30%	35%	37%	40%	40%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	Pertanian						
2.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	2,87	3,1	3,33	3,56	3,89	4,1
2.3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	17,46	19,21	21,13	23,24	25,56	28,12
4	Energi dan Sumber Daya Mineral						
4.1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	95	97	98	98	99	100
5	Perdagangan						
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	941	1011	1081	1151	1221	1291
6	Perindustrian						
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	28	30	33	35	38	40
7	Transmigrasi						
7.1.	Persentase transmigran swakarsa	200 KK	10 KK	20 KK	20KK	25 KK	25 KK
8	Kelautan dan Perikanan						
8.1.	Produksi perikanan	6.185,40	6,309,11	6,435,29	6,564,00	6,695,28	6.829,18
8.2.	Konsumsi ikan	40,58	41,39	42,21	43,05	43,91	44,79
8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan						
8.3.1	Jumlah Kelompok Budidaya/Nelayan Yang di Bina (Klpk)	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00	64,00
8.3.2	Jumlah Petugas Yang Mengikuti Diklat Teknis (Org)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
8.4.	Produksi Hasil Budidaya Ikan						
8.4.1	Kolam Ikan	2.467,72	2.517,07	2.567,42	2.618,76	2.671,14	2.724,56
8.4.2	Keramba dan KJA	4,791,29	4,887,12	4,984,86	5,084,56	5,186,25	5.289,97
8.5.	Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Yang Lestari						
8.5.1	- Jumlah Pokmaswas Yang Di Bina (Klpk)	18,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00
8.5.2	- Jumlah Penanganan Kasus Illegal Fishing (Kasus)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
8.5.3	- Jumlah Kegiatan Operasional Pengawasan Perikanan (Kali)	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00
8.6.	Usaha Pengelolaan	140,00	145,00	150,00	155,00	160,00	165,00
8.7.	Nilai tukar nelayan						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
8.8.	Pengembangan Wilayah Konservasi Sumber DayaPerikanan						
8.8.1	- Reservaat (Danau)	-	3,00	8,00	12,00	16,00	20,00
8.8.2	- Restocing (Ekor)	-	450.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00	3.000.000,00
8.8.3	- Rehabilitasi Dan Revitalisasi Beje (Buah)	-	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
Penunjang Urusan							
1	Perencanaan Pembangunan						
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tidak ada	tidak ada	ada	-	-	-
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	-	Ada	-	-	-	-
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	-	-	-
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA						
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	-	-	-
2	Keuangan						
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.	Persentase SILPA		9%	8%	7%	6%	5%
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD		9%	8%	7%	6%	5%
2.4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana		9%	8%	7%	6%	5%
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)		22%	22%	22%	22%	22%
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)		12%	10%	10%	10%	10%
2.7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung		100%	100%	100%	100%	100%
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa		41.382.064.879,82	43.451.168.123,74	45.623.726.529,85	47.904.912.856,23	50.300.158.499,12
2.9.	Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang	26 Orang
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	130 Orang	130 Orang	130 Orang	130 Orang	130 Orang	130 Orang
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	394 Orang	512 Orang	666 Orang	866 Orang	1.126 Orang	1.464 Orang
5	Pengawasan						
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	39%	50%	60%	70%	80%	100%
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	40%	30%	20%	10%	5%	5%
5.3.	Jumlah temuan BPK	20	15	10	5	5	5
6	Sekretariat Dewan						
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Ada	-	-	-
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	-	-	-
6.3.	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.	Ada	Ada	Ada	-	-	-

CEKLIS INPUT RENSTRA >> RPJMD

NO	DINAS/BADAN/INSTANSI	KET
1	SETDA	SUDAH
2	SETWAN	SUDAH
3	INSPEKTORAT	SUDAH
4	DINAS SOSIAL, PMD	(urusan Sosial Belum Ada data)
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
6	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB P3A	SUDAH
7	BAPPEDA	SUDAH
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	SUDAH
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SUDAH
10	DINAS KETAHANAN PANGAN P3	SUDAH
11	BPBD	SUDAH
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	SUDAH
13	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	SUDAH
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	SUDAH
15	DINAS PU	SUDAH
16	DINAS NAKERTRANS	SUDAH
17	DINAS KESEHATAN	SUDAH
18	DINAS PENDIDIKAN	SUDAH
19	DINAS PERDAGANGAN KUKM	SUDAH
20	DINAS PEMUDA OLAHRAGA	
21	DINAS PERHUBUNGAN	SUDAH
22	DINAS KOMINFO	
23	DINAS DUKCAPIL	SUDAH
24	BPKAD	
25	DINAS PERUMAHAN, KP	SUDAH
26	KECAMATAN DUSUN SELATAN	SUDAH
27	KECAMATAN DUSUN HULIR	SUDAH
28	KECAMATAN DUSUN UTARA	SUDAH
29	KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	SUDAH
30	KECAMATAN JENAMAS	SUDAH
31	KECAMATAN KARAU KUALA	SUDAH

Ceklis IKU Perangkat Daerah